



Katalog: 4301002

ISSN 2086-4566

STATISTIK PENDIDIKAN

2023

Volume 12, 2023



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4301002

ISSN 2086-4566

STATISTIK PENDIDIKAN

2023

Volume 12, 2023

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDIDIKAN 2023

Volume 12, 2023

Katalog: 4301002

ISSN: 2086-4566

Nomor Publikasi: 04200.2317

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xxxii + 242 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penyunting:

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pembuat Kover:

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

kebudayaan.kemdikbud.go.id

“

Dilarang memproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

”

TIM PENYUSUN STATISTIK PENDIDIKAN 2023

Volume 12, 2023

Pengarah: Ateng Hartono

Penanggung Jawab:

Ahmad Avenzora

Penyunting:

Dr. Budi Santoso

Raden Sinang

Yeni Rachmawati

Penulis Naskah:

Andry Poltak Lasriado Girsang

Rida Agustina

Sigit Wahyu Nugroho

Nindya Putri Sulistyowati

Pengolah Data:

Ganish Anggraeni

Penata Letak:

Rida Agustina

KATA PENGANTAR

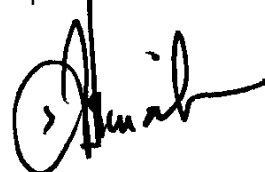
Pendidikan menjadi salah satu kunci dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM tangguh yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari tujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter. Statistik Pendidikan 2023 sebagai salah satu potret pendidikan Indonesia menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan hasil Susenas Maret 2023. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan *output* pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Tahun Ajaran 2022/2023. Data ini memuat informasi mengenai input pendidikan yang mencakup data jumlah sekolah, peserta didik, pendidik, sarana prasarana pendidikan, dan sanitasi sekolah.

Dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Jakarta, November 2023

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik




Amalia Adininggar Widyasanti

Pandemi telah berakhir, namun bukan berarti situasi dan kondisi akan kembali ke keadaan sebelumnya. Setelah adanya evaluasi terhadap kurikulum pendidikan yang digunakan selama pandemi, disimpulkan perlu adanya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Namun demikian, dengan pertimbangan kesiapan satuan pendidikan, pemerintah memberikan tiga pilihan kurikulum. Kurikulum merdeka sebagai salah satu opsi yang ada sudah mulai diimplementasikan sebagian satuan pendidikan. Pada kurikulum tersebut terdapat tiga level tingkatan mulai dari pemula sampai ke lanjutan. Mekanisme pembelajaran pun dirancang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik.

Sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah. Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah pada jenjang SMP, SMA, dan SMK mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Sementara itu, ketersediaan ruang kelas pada sekolah negeri di jenjang SD, SMP, dan SMA lebih banyak daripada ruang kelas pada sekolah swasta. Bahkan jumlah ruang kelas pada jenjang SD negeri lima kali jumlah ruang kelas SD swasta. Hal sebaliknya terjadi pada jenjang SMK, dimana jumlah ruang kelas sekolah swasta lebih banyak dari jumlah ruang kelas sekolah negeri.


Jumlah rombongan belajar (rombel) idealnya sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Pada tahun ajaran 2022/2023, angka rasio rombel per kelas pada jenjang SMP dan SMA di bawah satu. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada ruang kelas yang digunakan untuk dua atau lebih rombel yang berbeda. Sementara itu, pada jenjang SD dan SMK negeri rasio rombel per kelas lebih dari satu, yang berarti jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah kelas yang tersedia.



Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. Pada tahun 2023, mayoritas sekolah pada setiap jenjang pendidikan telah memiliki sumber air yang cukup. Sementara itu, hanya sedikit sekolah yang tidak memiliki sumber air, persentase terbesar yaitu pada jenjang SD dengan sekitar 1,73 persen sekolah yang tidak memiliki sumber air. Apabila ditinjau dari sisi ketersediaan toilet, pada setiap jenjang pendidikan secara umum terdapat 8 dari 10 sekolah yang telah memiliki sarana toilet siswa baik itu toilet terpisah ataupun toilet bersama.

Isu tentang pentingnya keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Pada tahun ajaran 2022/2023 terjadi peningkatan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Peningkatan jumlah guru tersebut diikuti oleh peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 pada setiap jenjang pendidikan. Apabila dilihat dari status sekolah, keberadaan guru dengan kualifikasi akademik minimal S1/D4 di sekolah negeri lebih banyak dibandingkan sekolah swasta.

Meskipun telah terjadi peningkatan jumlah guru, distribusi guru yang ideal dan menyeluruh masih menjadi tantangan pembangunan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada beban kerja guru yang berbeda-beda di setiap daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid, sementara pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Pada tahun ajaran 2022/2023, rasio murid-guru pada semua jenjang pendidikan masih memenuhi standar ideal yang ditetapkan




Layanan pendidikan sudah sepatutnya dimulai sejak usia dini agar perkembangan anak menjadi lebih optimal. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah membuat program untuk anak usia dini yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meskipun demikian, baru sekitar 27,38 persen anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang tersentuh oleh pendidikan prasekolah. Di sisi lain, capaian APK PAUD tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 36,36 persen anak Indonesia yang bersekolah pada tahapan PAUD. Sementara itu, Angka Kesiapan Sekolah (AKS) tahun 2023 tercatat mencapai 76,65 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Keberhasilan program Wajib Belajar yang diterapkan oleh pemerintah tampak terlihat dari capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang berada di atas 95 persen. Sementara itu, capaian APS kelompok umur 16-18 tahun dan 19-23 tahun tercatat sebesar 73,42 persen dan 28,96 persen. Perbedaan capaian APS pada kelompok pengeluaran teratas (Kuintil 5) dan terbawah (Kuintil 1) semakin nyata terlihat seiring kenaikan kategori kelompok umur.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian APK ketiga jenjang pendidikan tersebut masih cukup jauh dari target yang dicanangkan dalam Renstra Kemdikbud 2020-2024. Sementara itu, APK SD/ sederajat justru mengalami penurunan dari 106,27 persen di tahun 2022, menjadi 105,62 persen di tahun 2023. Di sisi lain, ada disparitas yang cukup tinggi antara rumah tangga berpendapatan sangat tinggi dan berpendapatan sangat rendah dalam mengakses pendidikan tinggi.


Meskipun bukan merupakan agenda target pencapaian pendidikan, akan tetapi Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan oleh SDGs untuk melihat disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Pada semua kategori, kecuali status disabilitas, kesenjangan dalam akses pendidikan tampak samar pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Kesenjangan partisipasi pendidikan tampak nyata pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat ke atas.



Anak Tidak Sekolah masih menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah telah mencanangkan kebijakan adanya pemerataan sekolah untuk seluruh anak usia sekolah. Hal ini dikarenakan masih adanya anak usia sekolah yang belum berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Data menunjukkan, semakin tinggi kelompok umur anak, semakin meningkat angka anak tidak sekolah. Pola yang sama terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan status disabilitas, penduduk penyandang disabilitas memiliki angka anak tidak sekolah yang lebih tinggi dibandingkan penduduk bukan penyandang disabilitas untuk semua kelompok umur.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era yang serba canggih saat ini tidak terlepas dari aktivitas seluruh penduduk, termasuk para peserta didik di Indonesia. Meskipun sudah memasuki masa endemi, namun peserta didik diharapkan tetap dapat memanfaatkan TIK untuk menunjang proses belajar. Pada tahun 2023, Presiden RI telah mengumumkan berakhirnya masa pandemi dan menetapkan adanya kebijakan proses belajar secara *full* tatap muka khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Fenomena ini turut mengubah penggunaan TIK para peserta didik berupa penurunan persentase penggunaan telepon seluler. Meskipun demikian, akses internet dan penggunaan komputer mengalami peningkatan di kalangan peserta didik. Walaupun pembelajaran selama pandemi memengaruhi perilaku TIK peserta didik, namun jika dilihat dari tujuannya, hiburan, media sosial, dan akses informasi/berita mendominasi peserta didik dalam mengakses internet.


Selain bersekolah, peserta didik juga melakukan hal lain seperti mengurus rumah tangga maupun bekerja. Hal ini dikarenakan usia 5-24 tahun yang dianalisis beririsan dengan usia bekerja dan usia perkawinan. Pada tahun 2023, persentase peserta didik yang mengurus rumah tangga mengalami kenaikan yaitu sekitar 1,62 persen poin dibandingkan tahun 2022. Begitu pula dengan persentase peserta didik yang bekerja juga mengalami kenaikan meski hanya sekitar 0,86 persen poin dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan jenjang pendidikan, masih terdapat 0,96 persen peserta didik pada jenjang SD/ sederajat



yang bekerja. Hal ini menjadi perhatian karena di dalam UU, penduduk yang berada di bawah usia 13 tahun dilarang untuk bekerja. Sementara sebagian besar peserta didik pada jenjang SD/ sederajat berusia di bawah 13 tahun. Secara umum, meskipun melakukan kegiatan lainnya, 87,61 persen peserta didik menggunakan waktu terbanyaknya untuk sekolah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melakukan kegiatan dengan waktu terbanyak untuk mengurus rumah tangga, bekerja, dan lainnya.

Dalam publikasi ini, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur proses pendidikan antara lain angka bertahan, angka melanjutkan, angka mengulang dan angka putus sekolah. Pada level nasional, capaian angka bertahan sekitar 95,74 persen. Ini menunjukkan bahwa 96 dari 100 peserta didik yang baru masuk SD/ sederajat dapat bertahan untuk tetap sekolah sampai dengan kelas 6 SD/ sederajat. Terkait angka melanjutkan, capaiannya sudah cukup baik dan berimbang, baik untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat (87,01 persen) maupun SM/ sederajat (87,75 persen). Untuk angka mengulang, capaian paling rendah terdapat pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat (3,58 persen) sedangkan capaian tertinggi berada di jenjang SD/ sederajat (5,14 persen). Sedangkan untuk indikator anak putus sekolah, data Susenas 2023 menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi, dengan capaian tertinggi berada di jenjang SM/ sederajat sebesar 1,03 persen.

Capaian pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) terendah terjadi pada kelompok umur 15 tahun ke atas. Mayoritas penduduk 15 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai wajib belajar 9 tahun (63,11 persen). Masih terdapat ketimpangan tingkat pendidikan yang ditamatkan dari penduduk usia 15 tahun ke atas untuk penduduk yang tinggal di perdesaan, kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah serta para penyandang disabilitas. Capaian pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2023, RLS penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 9,08 tahun atau setara kelas 3 SMP/ Sederajat. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan tingkat penyelesaian pendidikan, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin



rendah capaian tingkat penyelesaian pendidikannya. Data Susenas 2023 menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan nasional untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 97,83 persen, jenjang SMP/ sederajat adalah 90,44 persen, sedangkan untuk jenjang SM/ sederajat hanya sebesar 66,79 persen.

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Statistik Pendidikan 2023

Volume 12, 2023

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xxiii
PENJELASAN TEKNIS	xxvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Pendidikan di Masa Endemi.....	3
1.2 Data Pendidikan untuk Pembangunan.....	5
1.3 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	9
2.1 Jumlah Sekolah	11
2.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas.....	13
2.3 Sanitasi Sekolah.....	18
2.4 Guru.....	21
BAB 3. PARTISIPASI SEKOLAH	47
3.1 Pendidikan Anak Usia Dini.....	49
3.2 Angka Partisipasi Sekolah.....	54
3.3 Angka Partisipasi Kasar.....	57
3.4 Angka Partisipasi Murni.....	60
3.5 Angka Anak Tidak Sekolah.....	62
BAB 4. KEGIATAN PESERTA DIDIK	109
4.1 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	111
4.2 Aktivitas Peserta Didik Selain Bersekolah.....	115

BAB 5. HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN.....	149
5.1 Proses Pendidikan.....	151
A. Angka Bertahan.....	151
B. Angka Melanjutkan.....	153
C. Angka Mengulang.....	154
D. Angka Putus Sekolah.....	155
5.2 Capaian Pendidikan.....	157
A. Tingkat Penyelesaian Pendidikan.....	157
B. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	162
C. Angka Melek Huruf.....	166
D. Rata-Rata Lama Sekolah.....	169
DAFTAR PUSTAKA.....	191
LAMPIRAN.....	201
METADATA.....	229

Bab 2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.1.1	Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023.....	27
Tabel 2.1.2	Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023.....	28
Tabel 2.1.3	Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023.....	29
Tabel 2.1.4	Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023.....	30
Tabel 2.2.1	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023.....	31
Tabel 2.2.2	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023...	32
Tabel 2.2.3	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023.....	33
Tabel 2.2.4	Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023.....	34
Tabel 2.3	Rasio Peserta Didik per Rombel menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	35
Tabel 2.4	Rasio Rombel per Kelas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	36
Tabel 2.5.1	Persentase Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023.....	37
Tabel 2.5.2	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023.....	38
Tabel 2.5.3	Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023.....	39
Tabel 2.5.4	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023.....	40
Tabel 2.6.1	Persentase Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023.....	41
Tabel 2.6.2	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023.....	42

Tabel 2.6.3	Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023.....	43
Tabel 2.6.4	Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023.....	44
Tabel 2.7	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	45
Tabel 2.8	Rasio Murid-Guru menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	46

Bab 3 Partisipasi Sekolah

Tabel 3.1	Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut Karakteristik Demografi, 2023.....	64
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik Demografi dan Partisipasi Sekolah, 2023.....	65
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023.....	66
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	67
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	68
Tabel 3.6	Angka Anak Tidak Sekolah (ATS/OOSC) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023.....	69
Tabel 3.7	Persentase Penduduk 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin 2023.....	70
Tabel 3.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023.....	71
Tabel 3.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023.....	72
Tabel 3.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023.....	73
Tabel 3.11	Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023.....	74
Tabel 3.12	Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023.....	75
Tabel 3.13	Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	76
Tabel 3.14	Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023.....	77

Tabel 3.15	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023.....	78
Tabel 3.16	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023.....	79
Tabel 3.17	Persentase Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023.....	80
Tabel 3.18	Persentase Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023.....	81
Tabel 3.19	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023.....	82
Tabel 3.20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	83
Tabel 3.21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	84
Tabel 3.22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-laki menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	85
Tabel 3.23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	86
Tabel 3.24	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	87
Tabel 3.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	88
Tabel 3.26	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	89
Tabel 3.27	Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	90
Tabel 3.28	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	91
Tabel 3.29	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	92
Tabel 3.30	Angka Partisipasi Murni (APM) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	93
Tabel 3.31	Angka Partisipasi Murni (APM) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	94
Tabel 3.32	Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	95
Tabel 3.33	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	96
Tabel 3.34	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	97

Tabel 3.35	Angka Anak Tidak Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	98
Tabel 3.36	<i>Sampling Error</i> Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	99
Tabel 3.37	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-23 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	100
Tabel 3.38	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Kasar (APK) PT 19-23 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	101
Tabel 3.39	<i>Sampling Error</i> Angka Partisipasi Murni (APM) PT 19-23 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	102
Tabel 3.40	<i>Sampling Error</i> Angka Tidak Sekolah 7-12 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	103
Tabel 3.41	<i>Sampling Error</i> Angka Tidak Sekolah 7-12 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	104
Tabel 3.42	<i>Sampling Error</i> Angka Tidak Sekolah 13-15 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	105
Tabel 3.43	<i>Sampling Error</i> Angka Tidak Sekolah 13-15 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	106
Tabel 3.44	<i>Sampling Error</i> Angka Tidak Sekolah 16-18 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023	107
Tabel 3.45	<i>Sampling Error</i> Angka Tidak Sekolah 16-18 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023	108

Bab 4 Kegiatan Peserta Didik

Tabel 4.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Karakteristik Demografi dan Media Mengakses TIK, 2023.....	120
Tabel 4.2	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 menurut Karakteristik Demografi dan Status Bekerja, 2023.....	121
Tabel 4.3	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Karakteristik Demografi dan Lapangan Usaha Utama, 2023.....	122
Tabel 4.4	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Karakteristik Demografi dan Status Pekerjaan, 2023.....	123
Tabel 4.5	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun menurut Karakteristik Demografi dan Status Mengurus Rumah Tangga, 2023.....	124
Tabel 4.6	Persentase Siswa Umur 10-24 Tahun menurut Karakteristik Demografi dan Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak, 2023.....	125

Tabel 4.7	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	126
Tabel 4.8	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	127
Tabel 4.9	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	128
Tabel 4.10	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	129
Tabel 4.11	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	130
Tabel 4.12	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	131
Tabel 4.13	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	132
Tabel 4.14	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	133
Tabel 4.15	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	134
Tabel 4.16	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	135
Tabel 4.17	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	136
Tabel 4.18	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	137
Tabel 4.19	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	138
Tabel 4.20	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	139

Tabel 4.21	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	140
Tabel 4.22	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Mengurus Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	141
Tabel 4.23	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengurus Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	142
Tabel 4.24	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	143
Tabel 4.25	<i>Sampling Error</i> Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2023.....	144
Tabel 4.26	<i>Sampling Error</i> Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2023.....	145
Tabel 4.27	<i>Sampling Error</i> Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2023.....	146
Tabel 4.28	<i>Sampling Error</i> Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2023.....	147
Tabel 4.29	<i>Sampling Error</i> Persentase Siswa Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengurus Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin, 2023.....	148

Bab 5 Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Tabel 5.1	Angka Melanjutkan menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023.....	172
Tabel 5.2	Angka Mengulang menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023.....	172
Tabel 5.3	Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023.....	173
Tabel 5.4	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (<i>School Age</i>), 2023.....	173
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	174
Tabel 5.6	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023.....	175
Tabel 5.7	Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	176
Tabel 5.8	Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	177
Tabel 5.9	Angka Melanjutkan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	178
Tabel 5.10	Angka Mengulang menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	179
Tabel 5.11	Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	180

Tabel 5.12	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023.....	181
Tabel 5.13.1	Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	182
Tabel 5.13.2	Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	183
Tabel 5.13.3	Angka Melek Huruf (AMH) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	184
Tabel 5.13.4	Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	185
Tabel 5.13.5	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	186
Tabel 5.14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023.....	187
Tabel 5.15	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	188
Tabel 5.16	<i>Sampling Error</i> Angka Mengulang menurut Jenjang Pendidikan, 2023.....	189

Bab 2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Gambar 2.1	Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021, 2021/2022, dan 2022/2023.....	12
Gambar 2.2	Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023.....	13
Gambar 2.3	Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023.....	14
Gambar 2.4	Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2022/2023.....	15
Gambar 2.5	Rasio Peserta Didik per Rombel menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	16
Gambar 2.6	Rasio Rombel per Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023.....	17
Gambar 2.7	Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023.....	18
Gambar 2.8	Kecukupan Sumber Air di Sekolah menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	19
Gambar 2.9	Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023.....	20
Gambar 2.10	Ketersediaan Toilet Terpisah di Sekolah menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	21
Gambar 2.11	Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023.....	22
Gambar 2.12	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023.....	23
Gambar 2.13	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023.....	24
Gambar 2.14	Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	25
Gambar 2.15	Rasio Murid-Guru menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023.....	26

Bab 3 Partisipasi Sekolah

Gambar 3.1	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, 2019-2023.....	50
------------	--	----

Gambar 3.2	Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Klasifikasi Desa dan Kelompok Pengeluaran, 2023.....	51
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun, 2019-2023.....	52
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun menurut Karakteristik Demografi, 2023.....	53
Gambar 3.5	Angka Kesiapan Sekolah, 2019-2023.....	54
Gambar 3.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2019-2023.....	55
Gambar 3.7	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2023.....	57
Gambar 3.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2023.....	58
Gambar 3.9	Angka Partisipasi Kasar SM/ sederajat dan PT menurut Kelompok Pengeluaran, 2023.....	59
Gambar 3.10	Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023.....	61
Gambar 3.11	Angka Anak Tidak Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Status Disabilitas, 2023.....	62

Bab 4 Kegiatan Peserta Didik

Gambar 4.1	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet, 2019-2023.....	112
Gambar 4.2	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer, 2019-2023.....	113
Gambar 4.3	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer menurut Jenjang Pendidikan dan Kuintil Pengeluaran, 2023.....	114
Gambar 4.4	Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Penggunaannya, 2023.....	115
Gambar 4.5	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga, 2019-2023.....	116
Gambar 4.6	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	117
Gambar 4.7	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2023.....	118
Gambar 4.8	Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun menurut Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak, 2023.....	119

Bab 5 Hasil dan Capaian Proses Pendidikan

Gambar 5.1	Angka Bertahan Kelas 6 SD/ sederajat menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2023.....	152
Gambar 5.2	Angka Melanjutkan menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023.....	153
Gambar 5.3	Angka Mengulang menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023.....	154
Gambar 5.4	Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023.....	156
Gambar 5.5	Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Karakteristik Demografi, 2023.....	158
Gambar 5.6	Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023.....	160
Gambar 5.7	Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 19-21 Tahun, 2023.....	161
Gambar 5.8	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2023.....	163
Gambar 5.9	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Disabilitas, 2023.....	164
Gambar 5.10	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Ekonomi, 2023.....	165
Gambar 5.11	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Klasifikasi Desa, 2023.....	166
Gambar 5.12	Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur, 2023.....	167
Gambar 5.13	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik Demografi, 2023.....	168
Gambar 5.14	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, 2023.....	169
Gambar 5.15	Rata-Rata Lama Sekolah menurut Karakteristik Demografi, 2023.....	170

Metodologi

Susenas merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang dilaksanakan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September.

Susenas Maret tahun 2023 menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (BPS, 2023). Namun pada publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai dengan level provinsi. Unit observasi Susenas adalah rumah tangga, sedangkan yang menjadi unit analisis adalah rumah tangga dan individu. Selain mengumpulkan karakteristik rumah tangga, Susenas juga mengumpulkan karakteristik individu.

Jumlah sampel Susenas Maret 2023 mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada setiap blok sensus yang dipilih secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dilakukan pemilihan sampel sebanyak 10 rumah tangga dengan *systematic sampling* sehingga jumlah sampel blok sensus untuk Susenas Maret sebanyak 34.500 blok sensus. Stratifikasi dilakukan pada level blok sensus dan pada level rumah tangga di blok sensus terpilih untuk menghasilkan *representative sample*. Stratifikasi blok sensus dilakukan secara eksplisit (seluruh populasi blok sensus biasa Sensus Penduduk 2020 dikelompokkan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan), sedangkan *implicit stratification* dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Relative Standard Error

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas Maret 2023 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Sedangkan *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2023 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah/atas sebesar nilai estimasi dikurangi/ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi begitu juga sebaliknya. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$. Penghitungan tingkat *sampling error* menggunakan paket pemrograman dengan desain yang mengikuti desain sampling Susenas. Tidak semua variabel hasil pendataan dihitung RSE-nya. Hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung RSE-nya.

Konsep Definisi

Klasifikasi Desa menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 1 tahun dan tidak berniat pindah.

Tidak Termasuk Anggota Rumah Tangga yakni orang yang telah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 1 tahun atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 1 tahun atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 1 tahun tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Status Ekonomi Rumah Tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran perkapita sebulan sama dengan pendapatannya. Status ekonomi rumah tangga digolongkan menjadi lima kuintil. Kuintil 1 dan 2 untuk status ekonomi terendah,

Kuintil 3 dan 4 untuk status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 untuk status ekonomi tertinggi.

Rasio murid-guru adalah gambaran jumlah murid terhadap jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Rasio Murid-Kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Rombel (Rombongan Belajar) adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan, atau identik dengan banyaknya kelas dalam suatu sekolah.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

APK PAUD 3-6 Tahun adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA, PAUD) tanpa memandang usia terhadap penduduk kelompok usia 3-6 tahun.

APM PAUD 3-6 Tahun adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan umur dini (TK/BA/RA, PAUD) berumur 3-6 tahun terhadap penduduk kelompok umur 3-6 tahun.

Angka Kesiapan Sekolah (AKS) adalah persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia

terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Rasio APM (SD/SMP/SM) adalah perbandingan APM murid/mahasiswa perempuan terhadap APM murid/ mahasiswa laki-laki pada tiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase.

Anak Tidak Sekolah adalah persentase penduduk usia jenjang pendidikan tertentu yang tidak sedang bersekolah. Penduduk yang sedang prasekolah dianggap sebagai bersekolah. Penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi namun telah memiliki ijazah SMA ke atas dianggap sebagai bersekolah. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.

Angka Bertahan SD adalah persentase siswa kelas 1 SD yang diharapkan bisa secara terus menerus mencapai kelas terakhir SD.

Angka Mengulang menurut Jenjang Pendidikan adalah persentase siswa kelas x suatu jenjang pendidikan pada tahun ajaran lalu yang masih duduk di kelas x pada tahun ajaran sekarang, terhadap anak kelas x pada tahun ajaran lalu.

Angka Melanjutkan pada Jenjang SD ke SMP adalah persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran lalu.

Angka Melanjutkan pada Jenjang SMP ke SM adalah persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan SM pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan SMP pada tahun ajaran lalu.

Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan adalah persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.


Tingkat Penyelesaian Sekolah adalah persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok umur referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Kelompok umur referensi menurut UNESCO adalah 3-5 tahun di atas batas usia kelas terakhir pada usia dari tiap jenjang pendidikan. Untuk Indikator nasional di Indonesia kelompok umur referensi adalah 1-3 tahun di atas batas usia kelas terakhir pada usia dari tiap jenjang pendidikan. Tingkat penyelesaian sekolah SD dihitung sebagai persentase penduduk umur 13-15 tahun yang minimal telah tamat SD. Terdapat tiga kelompok umur referensi yang digunakan dalam mengukur capaian tingkat penyelesaian sekolah, yaitu: tingkat penyelesaian SD penduduk umur 13-15 tahun, tingkat penyelesaian SMP penduduk umur 16-18 tahun, dan tingkat penyelesaian SMA penduduk umur 19-21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk kelompok umur tersebut.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



PENDAHULUAN



Presiden Republik Indonesia memiliki visi dan misi pendidikan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan tetap menjunjung tinggi dasar-dasar negara, diharapkan pelajar Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia unggul yang dapat bersaing tidak hanya di bumi nusantara tetapi juga di kancah internasional untuk kehidupan yang lebih maju dan sejahtera.

1.1 Pendidikan di Masa Endemi

Pandemi sedikit banyak telah memengaruhi pembangunan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk memitigasi pandemi telah mengakibatkan adanya *learning loss* yang dialami oleh peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Untuk meminimalisir hal tersebut penyederhanaan kurikulum dilakukan agar dapat diaplikasikan dalam kondisi darurat saat itu. Setelah dua tahun sembilan bulan sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia, akhirnya pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022). Namun demikian meskipun sudah memasuki masa endemi, kurikulum yang diterapkan tidak serta merta kembali seperti sebelum pandemi (kurikulum 13).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum baru dapat mengurangi dampak pandemi khususnya pada literasi dan numerasi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Efektivitas kurikulum tersebut semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Namun, karena adanya beberapa pertimbangan yaitu salah satunya kesiapan dari masing-

masing satuan pendidikan, saat ini pemerintah memberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Terdapat tiga opsi kurikulum yaitu: kurikulum 13 secara keseluruhan, kurikulum darurat (kurikulum 13 yang disederhanakan), dan kurikulum merdeka. Kurikulum 13 merupakan kurikulum yang sudah digunakan dari sebelum adanya pandemi. Kurikulum darurat atau kurikulum 13 yang disederhanakan adalah kurikulum yang digunakan saat awal pandemi untuk mitigasi. Sedangkan kurikulum merdeka adalah kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana, dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung *learning loss recovery* akibat pandemi Covid-19 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Sebelum pemerintah membuka pendaftaran aplikasi kurikulum merdeka, uji coba terbatas telah dilakukan pada tahun 2021 melalui 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan 901 sekolah yang mengikuti SMK Pusat Keunggulan (PK) (Kompas, 2023). Pada tahun ajaran 2023/2024 jumlahnya semakin bertambah hingga 256.568 satuan pendidikan atau lebih dari 50 persen yang berpartisipasi mengimplementasikan kurikulum merdeka (Medcom.id, 2023). Bagi satuan pendidikan yang baru pertama kali menggunakan kurikulum merdeka, dianjurkan untuk diimplementasikan pada kelas I, IV, VII, dan X (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Sedangkan untuk yang sudah memasuki tahun kedua, disarankan untuk diterapkan pada kelas I, kelas II, kelas IV, kelas V, kelas VII, kelas VIII, kelas X, atau kelas XI.

Satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka diberikan tiga tingkatan opsi mulai dari level pemula hingga lanjutan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Pertama mandiri belajar, yaitu menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Kedua mandiri berubah, menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Ketiga mandiri berbagi, menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam

mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.

Pada kurikulum merdeka, sebelum kegiatan belajar dilakukan, guru merancang suatu rencana pembelajaran yang mencakup asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Dengan asesment formatif, guru akan mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi yang sudah dirancang. Hasil asesmen formatif dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam mengajar apakah perlu melakukan modifikasi atau penyesuaian pada rencana pembelajaran yang sebelumnya telah disusun. Selama proses pembelajaran, asesmen formatif juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil asesmen akhir tersebut juga bisa digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya.

Perubahan mekanisme belajar di sebagian sekolah yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap kesiapan siswa dan adaptasinya terhadap pola pembelajaran. Bagaimana pengaruhnya terhadap tren indikator-indikator pendidikan? Hal ini akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

1.2 Data Pendidikan untuk Pembangunan

Dalam merencanakan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran, diperlukan informasi yang lengkap serta akurat. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran situasi serta kondisi pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini. Dengan adanya Informasi dan perencanaan yang matang diharapkan tantangan pembangunan di bidang pendidikan yang sedang dan akan dihadapi akan terjawab. Visualisasi dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan bidang pendidikan di Indonesia pada tahun 2023 salah satunya

tercermin di beberapa indikator pendidikan yang disajikan dalam publikasi “Statistik Pendidikan Indonesia 2023”. Informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan serta evaluasi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu data yang ada juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional.

Data dan informasi mengenai pendidikan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023 secara umum disajikan dalam publikasi ini. Sampel rumah tangga Susenas Kor mencapai 345.000 sehingga data dapat disajikan mulai dari level nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota. Namun demikian dalam publikasi ini secara umum disajikan hanya sampai level provinsi. Data tersebut disajikan dengan disagregasi menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan, status disabilitas, kelompok pengeluaran, dan wilayah, sehingga diharapkan mampu menggambarkan pendidikan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Data sekunder dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun ajaran 2022/2023 juga digunakan untuk melengkapi informasi terkait sarana dan prasarana pendidikan.

1.3 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan Publikasi Statistik Pendidikan Tahun 2023 disajikan dalam lima bab berikut:

Bab I Pendahuluan, menceritakan bagaimana gambaran pendidikan dimasa endemi, pentingnya data pendidikan untuk pembangunan serta sistematika penulisan dari publikasi.

Bab II Sarana dan Prasarana Pendidikan, memaparkan jumlah sekolah dan peserta didik, kondisi dan kecukupan ruang kelas, sanitasi sekolah, serta kualifikasi dan beban kerja pendidik.

Bab III Partisipasi Sekolah, yaitu tentang Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, serta Angka Anak Tidak Sekolah.

Bab IV Kegiatan Peserta Didik, menjelaskan akses teknologi informasi dan komunikasi oleh peserta didik, aktivitas peserta didik selain sekolah yang meliputi peserta didik dalam dunia kerja, peserta didik pekerja dan status pekerjaannya, serta peserta didik dalam kegiatan mengurus rumah tangga.

Bab V Hasil dan Capaian Proses Pendidikan, menjelaskan indikator-indikator terkait hasil dan capaian dari proses pendidikan meliputi angka bertahan, angka melanjutkan, angka mengulang, angka putus sekolah, Tingkat Penyelesaian Sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Angka Melek Huruf, serta Rata-Rata Lama Sekolah.

Tabel informasi indikator menurut karakteristik demografi dan provinsi disajikan pada setiap akhir bab. Selain itu juga ditampilkan hasil penghitungan *sampling error* dari hasil estimasi beberapa indikator pendidikan untuk melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel. Sedangkan untuk penjelasan mengenai konsep definisi dimasukkan dalam metadata dan penjelasan teknis.



2

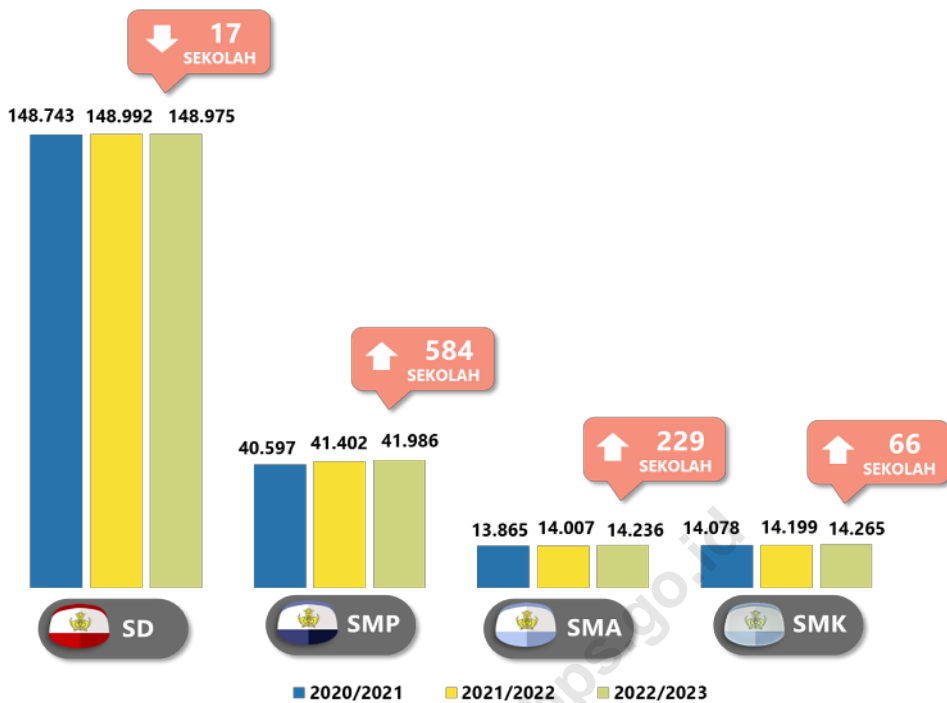
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan belajar di sekolah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu aspek yang diatur dalam Delapan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45, dimana setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

2.1 Jumlah Sekolah

Keberadaan sekolah merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Keberadaan sekolah dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang merata dan memadai dapat memicu masyarakat untuk menempuh pendidikan, sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah (Virdam dan Ariani, 2023).

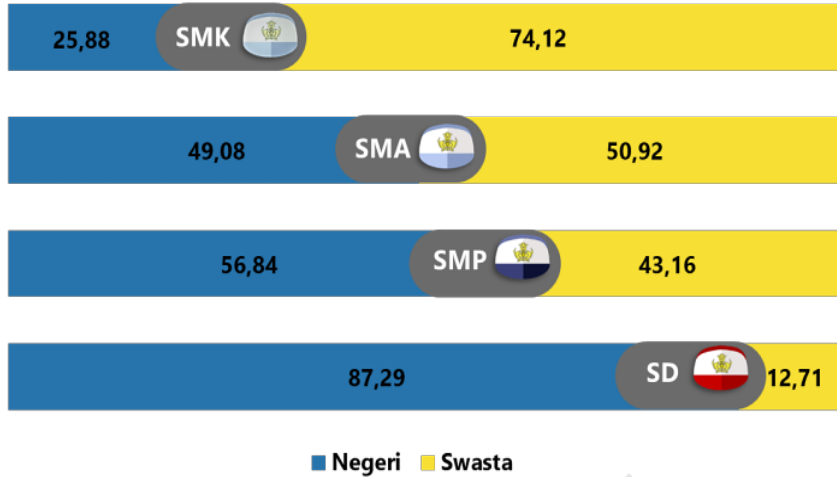
Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah pada jenjang SMP, SMA, dan SMK mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya (Gambar 2.1). Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun tersebut paling banyak terjadi pada jenjang SMP yaitu sebanyak 584 sekolah baru. Sementara itu, pada jenjang SD jumlah sekolah justru mengalami penurunan sebanyak 17 sekolah.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.1 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021, 2021/2022, dan 2022/2023

Sementara itu apabila ditinjau menurut status sekolahnya, jumlah sekolah negeri tersedia lebih banyak pada jenjang Sekolah Dasar, dan semakin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan sekolah swasta (Gambar 2.2). Sebaliknya jumlah sekolah swasta lebih mendominasi pada jenjang pendidikan SMA dan SMK.

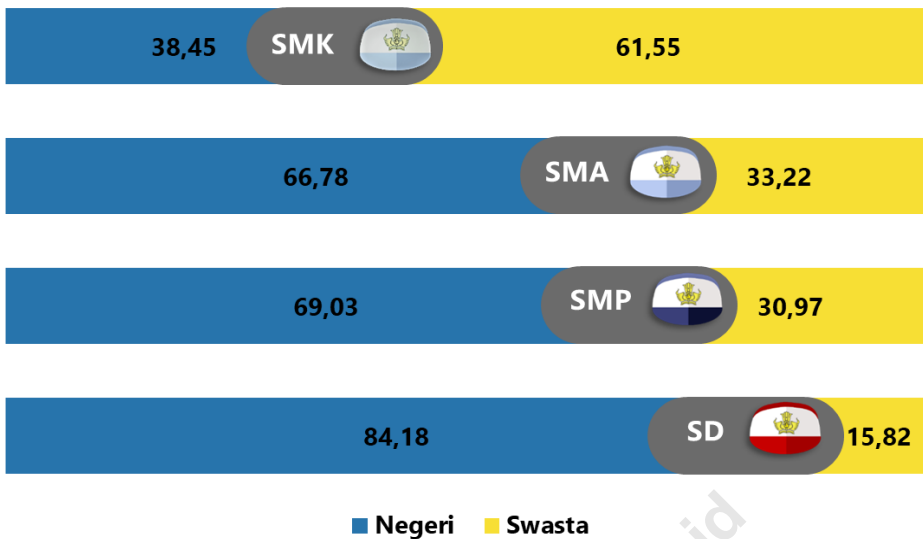


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.2 Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

2.2 Ketersediaan dan Kondisi Ruang Kelas

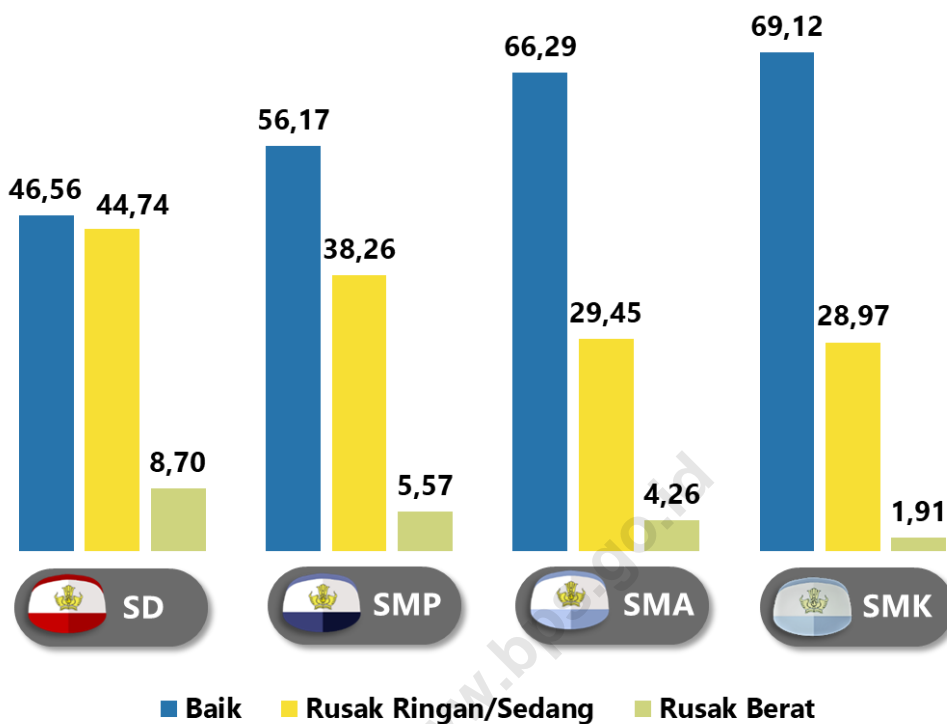
Ruang kelas merupakan komponen prasarana sekolah yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Ruang kelas berfungsi sebagai tempat interaksi guru dan peserta didik selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Jika ditinjau dari status sekolah, jumlah ruang kelas sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, dan SMA lebih banyak dari ruang kelas sekolah swasta (Gambar 2.3). Bahkan jumlah ruang kelas pada jenjang SD negeri lima kali jumlah ruang kelas SD swasta. Hal sebaliknya terjadi pada jenjang SMK dimana jumlah ruang kelas sekolah swasta lebih banyak dari jumlah ruang kelas sekolah negeri.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.3 Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

Jika dilihat dari kondisi dan keadaan ruang kelas, semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah ruang kelas dengan kondisi baik semakin meningkat (Gambar 2.4). Di sisi lain, ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/ sedang dan rusak berat jumlahnya semakin berkurang seiring dengan tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK masih terdapat 4,26 persen dan 1,91 persen ruang kelas dengan kondisi rusak berat.



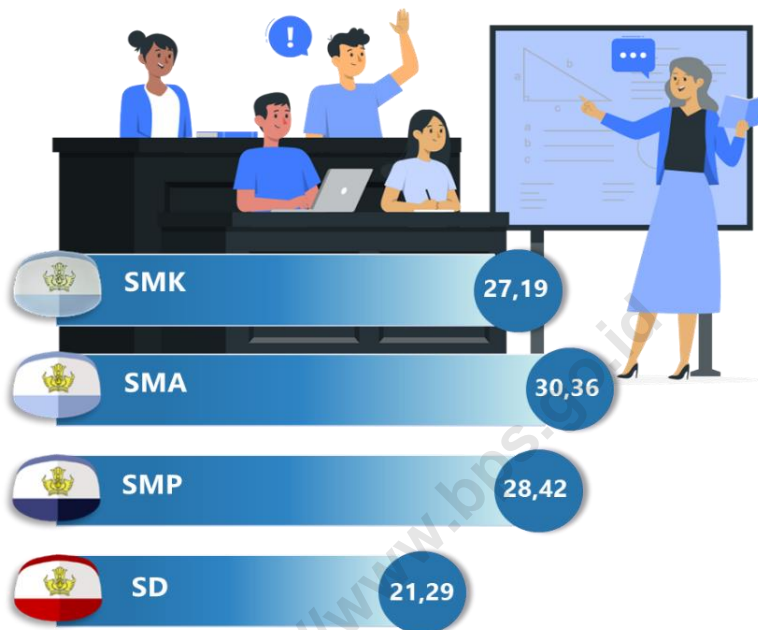
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.4 Persentase Ruang Kelas menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi Ruang Kelas, Tahun Ajaran 2022/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, rombongan belajar (rombel) merupakan kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, peraturan tersebut juga mengatur jumlah peserta didik per rombel untuk setiap sekolah. Kebijakan pengaturan jumlah peserta didik ini utamanya bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Pada jenjang SD satu rombel layaknya mencakup 20-28 peserta didik, jenjang SMP mencakup 20-32 peserta didik, jenjang SMA mencakup 20-36 peserta didik, dan jenjang SMK setidaknya mencakup 15-36 peserta didik. Sementara itu, jumlah rombel pada setiap jenjang pendidikan diatur sebagai

berikut: pada jenjang SD jumlah rombel antara 6-24 rombel, jenjang SMP mencakup 3-33 rombel, jenjang SMA mencakup 3-36 rombel, dan jenjang SMK mencakup 3-72 rombel.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

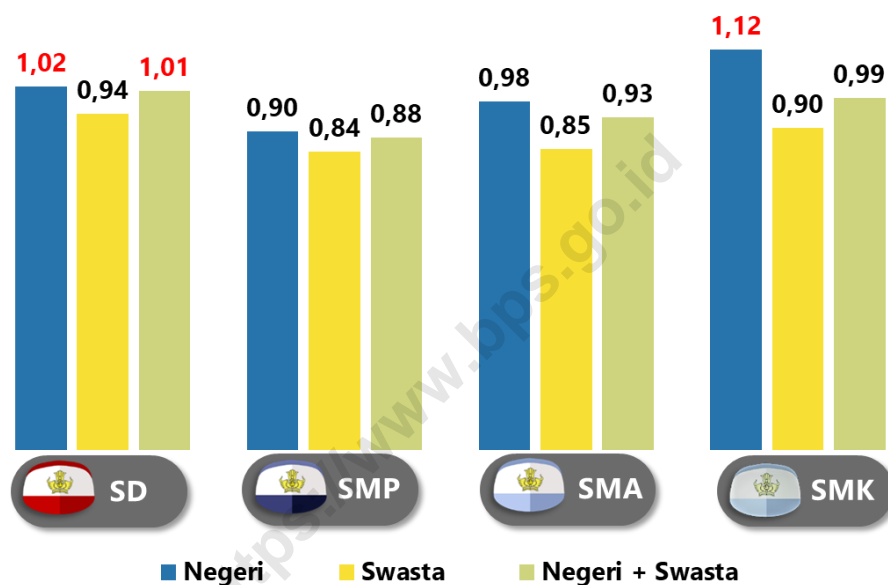
Gambar 2.5 Rasio Peserta Didik per Rombel menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Gambar 2.5 menunjukkan rasio peserta didik per rombel pada setiap jenjang pendidikan. Rasio peserta didik per rombel paling kecil terdapat pada jenjang SD dan rasio paling besar terdapat pada jenjang SMA. Rasio peserta didik per rombel jenjang SD sebesar 21,29 yang artinya bahwa setiap rombel di SD terdiri dari 21 sampai 22 peserta didik. Sementara itu, pada jenjang SMA setiap rombel terdiri dari 30 sampai 31 peserta didik.

Chingos dalam penelitiannya sebagaimana yang dikutip (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), menyatakan bahwa jumlah rombel yang lebih sedikit dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman belajarnya. Namun, jika jumlahnya terlalu sedikit juga akan berdampak kurang

baik karena mengurangi sosialisasi dan kerja sama peserta didik yang juga menjadi bagian penting dari proses pendidikan.

Selain rasio peserta didik per rombel, hal yang perlu mendapat perhatian adalah rasio rombel per kelas. Idealnya jumlah rombel sama dengan jumlah kelas yang tersedia. Hal tersebut menandakan bahwa tidak ada ruang kelas yang digunakan untuk dua atau lebih rombel yang berbeda.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

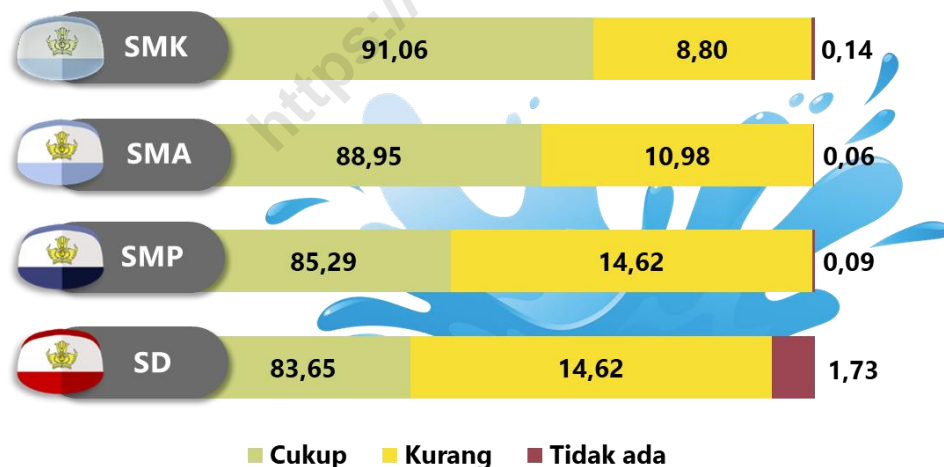
Gambar 2.6 Rasio Rombel per Kelas menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Rasio rombel per kelas pada jenjang SMP dan SMA nilainya di bawah satu, artinya jumlah ruang kelas yang tersedia lebih banyak daripada jumlah rombel. Kondisi ini menggambarkan kelas yang tersedia masih mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik yang ada, dengan memperhatikan kewajaran daya tampung peserta didik per kelas. Sementara itu, pada jenjang SD dan SMK negeri memiliki rasio rombel per kelas lebih dari satu. Hal ini berarti jumlah rombongan belajar lebih banyak dari jumlah kelas yang tersedia.

2.3 Sanitasi Sekolah

Sanitasi sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatnya akses sanitasi sekolah akan berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan kenyamanan peserta didik dan secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan angka partisipasi sekolah. Oleh karena itu, sanitasi sekolah menjadi salah satu prioritas pembangunan yang termasuk dalam tujuan 4.a SDGs (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan pembangunan tersebut antara lain menggunakan proporsi sekolah dengan akses terhadap fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin dan fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) (Bappenas, 2020).

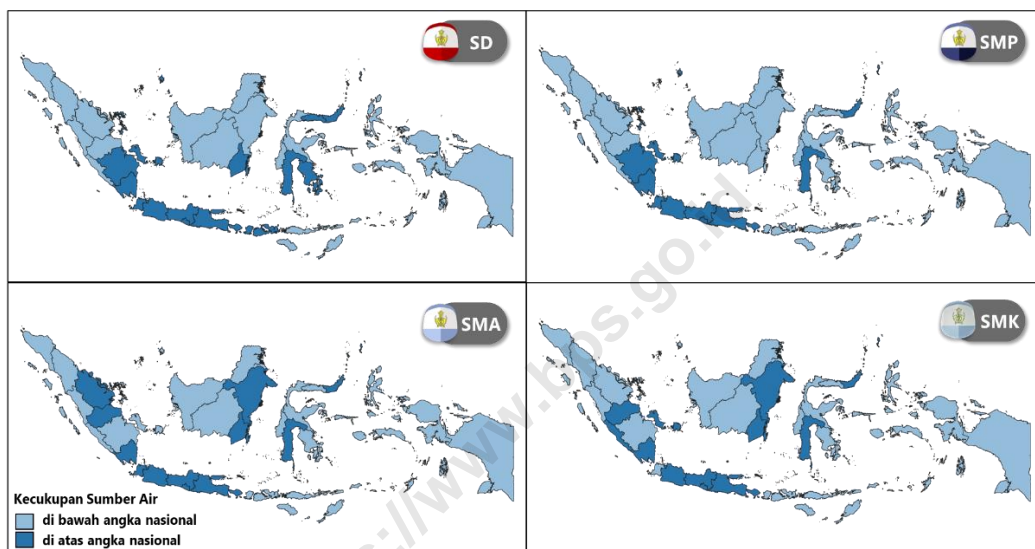
Pada tahun 2023, mayoritas sekolah pada setiap jenjang pendidikan telah memiliki sumber air cukup. Sementara itu, hanya sedikit sekolah yang tidak memiliki sumber air, persentase terbesar yaitu pada jenjang SD dengan sekitar 1,73 persen sekolah yang tidak memiliki sumber air.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.7 Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023

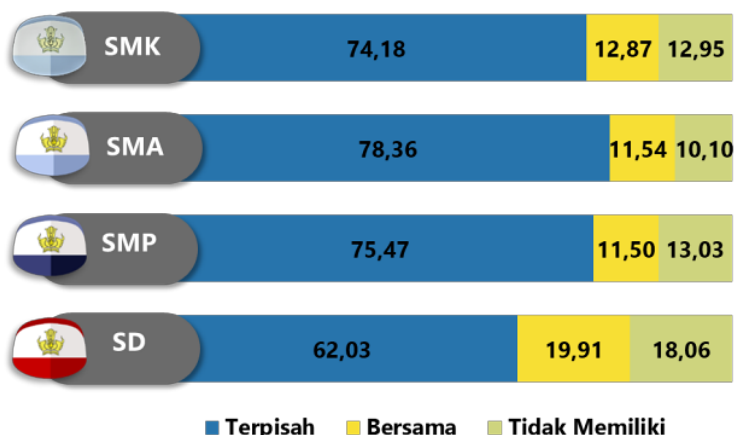
Dilihat dari sebaran di wilayah provinsi, provinsi dengan persentase sekolah yang memiliki sumber air cukup lebih besar dari angka nasional terlihat mengelompok di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera bagian selatan. Sementara itu, provinsi-provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia memiliki persentase sekolah dengan sumber air cukup di bawah angka nasional. Hal ini terjadi pada semua jenjang pendidikan.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.8 Kecukupan Sumber Air di Sekolah menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Selain ketersediaan air yang cukup, keberadaan toilet sekolah juga menjadi aspek penting dalam mendukung proses pembelajaran. Sekolah yang sehat membutuhkan toilet yang seimbang dengan jumlah warga sekolah. Selain itu, ketersediaan toilet yang terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan siswa, membiasakan peserta didik agar selalu berperilaku sehat, dan memenuhi Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) bagi peserta didik perempuan.

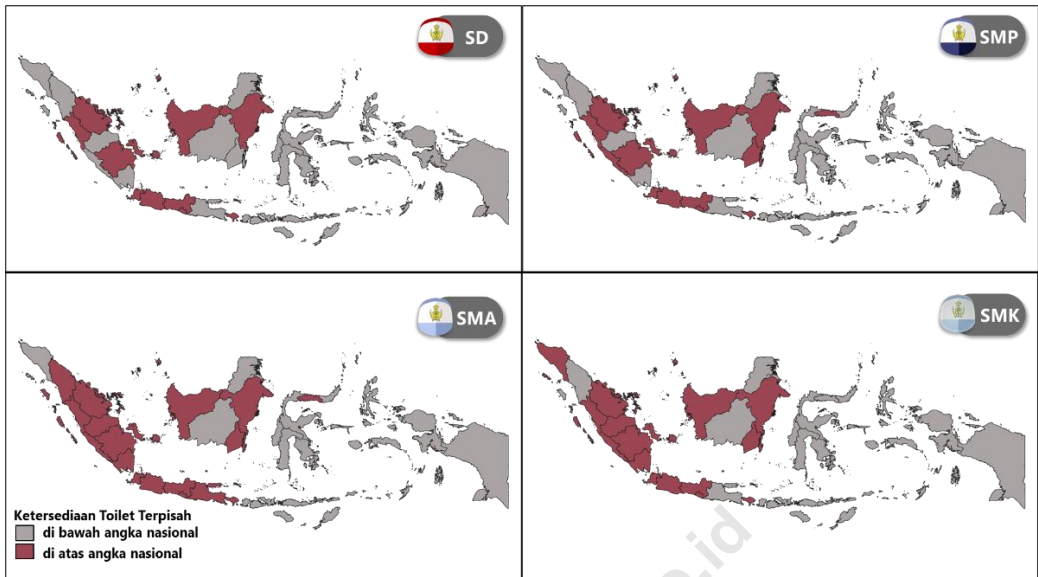


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.9 Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023

Berdasarkan data Kemendikbudristek, di tahun ajaran 2022/2023 pada seluruh jenjang pendidikan, 8 dari 10 sekolah telah memiliki sarana toilet siswa, baik itu toilet terpisah ataupun toilet bersama. Jenjang SD memiliki persentase kepemilikan toilet yang paling rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Terdapat 62,03 persen SD yang memiliki toilet terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan. Sementara itu, masih terdapat sekitar 18,06 persen SD yang tidak memiliki toilet.

Berdasarkan sebaran provinsi, pada setiap jenjang pendidikan, persentase sekolah dengan ketersediaan toilet terpisah lebih besar dari angka nasional terlihat berada pada wilayah Indonesia barat (Gambar 2.10). Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur menjadi satu satunya provinsi dimana persentase sekolah dengan ketersediaan toilet terpisah masih di bawah angka nasional untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMK. Sementara itu, masih banyak provinsi di wilayah Indonesia timur yang memiliki persentase ketersediaan toilet terpisah di bawah angka nasional.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

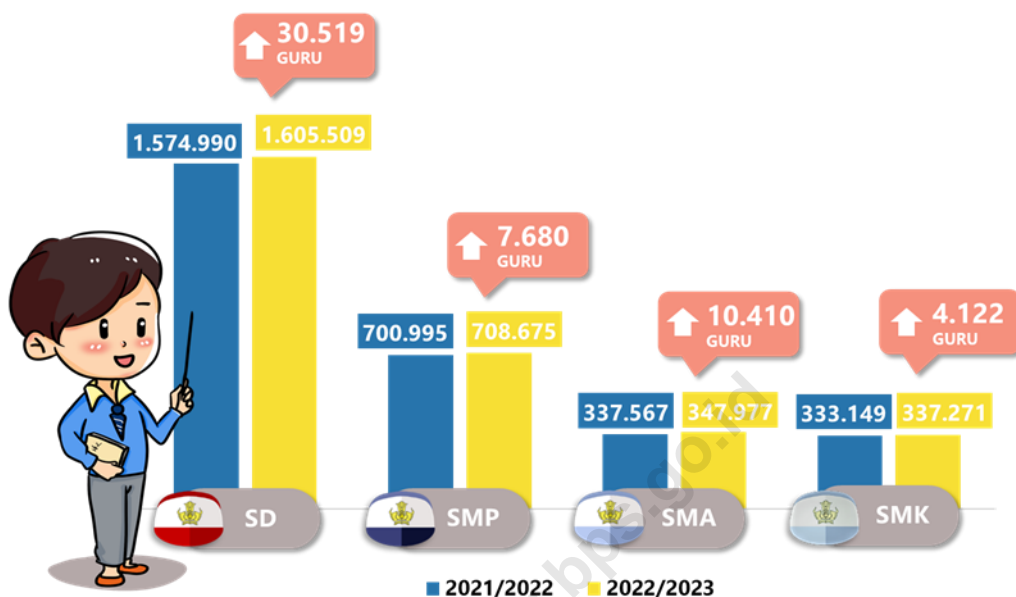
Gambar 2.10 Ketersediaan Toilet Terpisah di Sekolah menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

2.4 Guru

Kualitas seorang guru menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pembelajaran (Bappenas, 2019). Karena perannya tersebut, jumlah dan kualitas guru menjadi salah satu target pemerintah dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Hal ini tertuang pada target SDGs 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Target tersebut diukur dengan indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.

Pada tahun ajaran 2022/2023 terjadi peningkatan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan (Gambar 2.11). Komposisi guru paling banyak berada pada jenjang SD yaitu sebanyak 1,6 juta guru. Jumlah guru pada jenjang SMP sekitar setengah dari jumlah guru SD yaitu sebanyak 708 ribu guru. Sementara

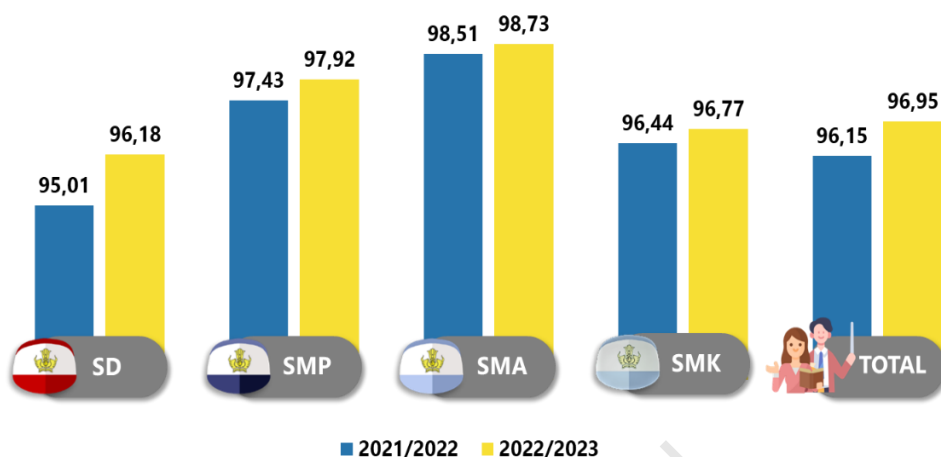
itu, jumlah guru pada jenjang SMK lebih sedikit dibandingkan jumlah guru pada jenjang SMA.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.11 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

Dalam Metadata Pilar Sosial Edisi II SDGs, guru yang memenuhi kualifikasi adalah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yaitu bahwa kualifikasi akademik guru SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SM/ sederajat adalah minimal D4 atau S1.

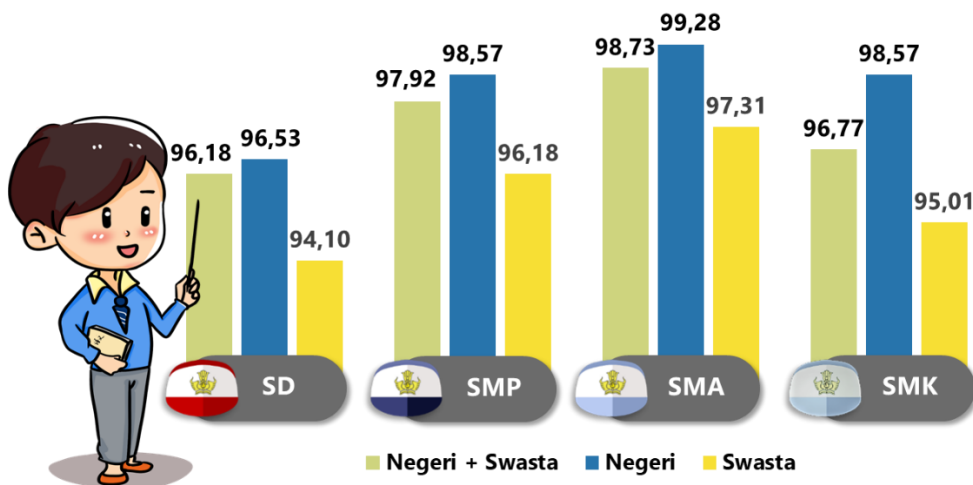


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.12 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 2.12, pada tahun ajaran 2022/2023 secara umum persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 sebesar 96,95 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya (96,15 persen). Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 pada setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA, maupun SMK juga meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tentunya belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas pendidik sebagai ujung tombak pendidikan. Namun, setidaknya dapat mengindikasikan bahwa kualitas pendidik menjadi semakin baik.

Persentase guru dengan pendidikan minimal S1/D4 paling banyak terdapat pada jenjang SMA, sedangkan jenjang SD memiliki persentase yang paling kecil. Apabila dilihat dari status sekolah, keberadaan guru dengan kualifikasi akademik minimal S1/D4 di sekolah negeri lebih banyak dibandingkan sekolah swasta pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.

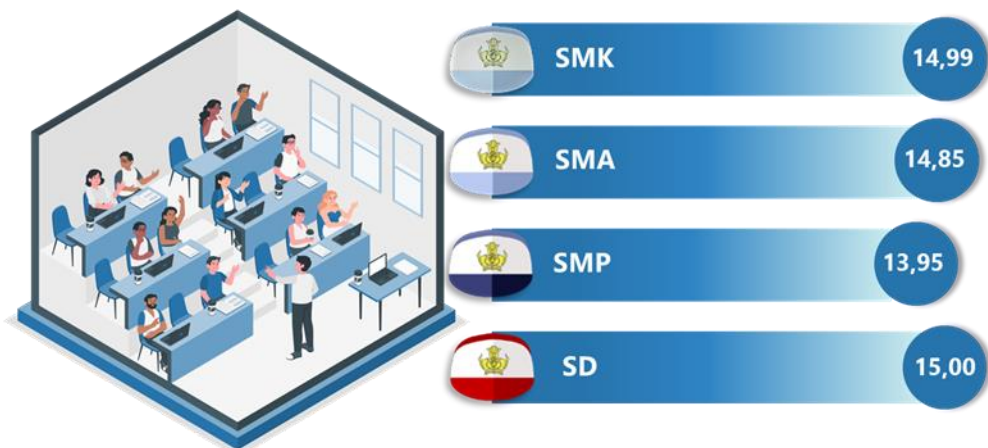


Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.13 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023

Distribusi guru yang ideal dan menyeluruh masih menjadi tantangan pembangunan bidang pendidikan di Indonesia (Haekal, 2022). Terdapat daerah yang kelebihan guru, namun ada juga daerah lain yang kekurangan guru. Hal ini menyebabkan beban kerja guru di setiap daerah berbeda-beda. Beban kerja guru dapat dilihat melalui rasio murid-guru. Angka tersebut mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, menunjukkan semakin berkurang efektivitas proses pembelajaran, dikarenakan tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang. Hal ini memberikan pengaruh juga pada mutu pengajaran.

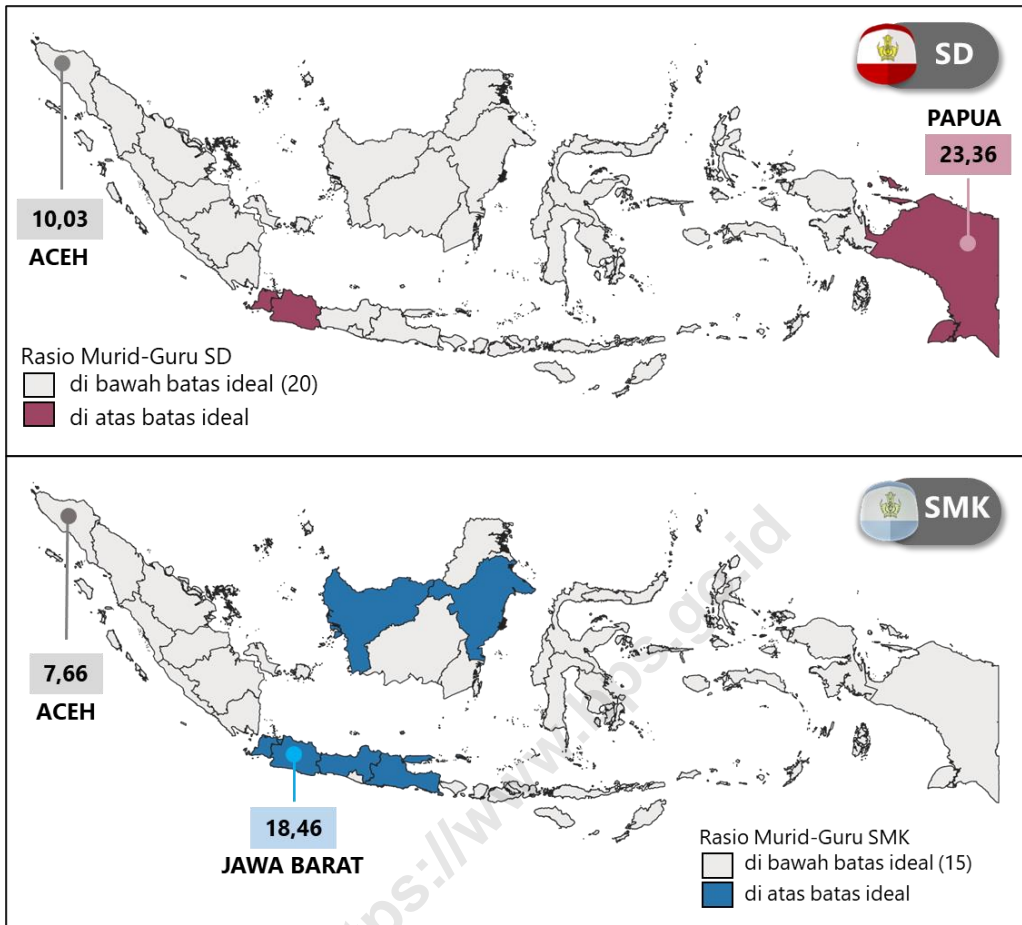
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid, sementara pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid. Berdasarkan Gambar 2.14, terlihat bahwa rasio murid-guru pada semua jenjang pendidikan masih memenuhi standar ideal yang ditetapkan.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.14 Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Meskipun secara nasional rasio murid-guru pada jenjang SD tidak melebihi batas ideal, namun masih terdapat tiga provinsi dengan rasio murid-guru di atas batas ideal yaitu di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Papua (Gambar 2.15). Angka ini menunjukkan bahwa masih belum meratanya penyebaran jumlah guru SD di level provinsi. Rasio terkecil ada di Provinsi Aceh, dimana satu guru bertanggung jawab terhadap 10 murid, sedangkan di Provinsi Papua, satu guru bertanggung jawab terhadap 23 murid. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SMK, dimana terdapat beberapa provinsi dengan rasio murid-guru di atas batas ideal. Salah satunya yaitu di Provinsi Kalimantan Barat, sementara empat provinsi lainnya ditemukan di wilayah Pulau Jawa yang cenderung banyak penduduknya yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pada jenjang SMP dan SMA, sudah tidak ada provinsi yang secara rata-rata memiliki rasio murid-guru di atas batas ideal.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.15 Rasio Murid-Guru menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Tabel 2.1.1 Jumlah dan Persentase Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3.336	94,53	193	5,47	3.529	100,00
Sumatera Utara	8.205	83,88	1.577	16,12	9.782	100,00
Sumatera Barat	3.962	93,00	298	7,00	4.260	100,00
Riau	3.221	84,96	570	15,04	3.791	100,00
Jambi	2.308	93,71	155	6,29	2.463	100,00
Sumatera Selatan	4.252	90,55	444	9,45	4.696	100,00
Bengkulu	1.290	92,27	108	7,73	1.398	100,00
Lampung	4.314	91,17	418	8,83	4.732	100,00
Kep. Bangka Belitung	760	91,35	72	8,65	832	100,00
Kep. Riau	684	70,30	289	29,70	973	100,00
DKI Jakarta	1.308	58,42	931	41,58	2.239	100,00
Jawa Barat	17.302	88,01	2.357	11,99	19.659	100,00
Jawa Tengah	17.472	93,13	1.288	6,87	18.760	100,00
DI Yogyakarta	1.423	77,00	425	23,00	1.848	100,00
Jawa Timur	16.980	89,34	2.027	10,66	19.007	100,00
Banten	3.895	84,05	739	15,95	4.634	100,00
Bali	2.265	93,75	151	6,25	2.416	100,00
Nusa Tenggara Barat	3.011	90,99	298	9,01	3.309	100,00
Nusa Tenggara Timur	3.378	64,92	1.825	35,08	5.203	100,00
Kalimantan Barat	4.139	93,26	299	6,74	4.438	100,00
Kalimantan Tengah	2.412	91,09	236	8,91	2.648	100,00
Kalimantan Selatan	2.740	94,00	175	6,00	2.915	100,00
Kalimantan Timur	1.652	86,09	267	13,91	1.919	100,00
Kalimantan Utara	437	90,10	48	9,90	485	100,00
Sulawesi Utara	1.344	61,01	859	38,99	2.203	100,00
Sulawesi Tengah	2.670	91,25	256	8,75	2.926	100,00
Sulawesi Selatan	6.082	94,47	356	5,53	6.438	100,00
Sulawesi Tenggara	2.257	96,25	88	3,75	2.345	100,00
Gorontalo	896	96,55	32	3,45	928	100,00
Sulawesi Barat	1.297	97,81	29	2,19	1.326	100,00
Maluku	1.276	70,42	536	29,58	1.812	100,00
Maluku Utara	1.110	84,41	205	15,59	1.315	100,00
Papua Barat	700	63,41	404	36,59	1.104	100,00
Papua	1.664	62,98	978	37,02	2.642	100,00
Indonesia	130.042	87,29	18.933	12,71	148.975	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.1.2 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	902	71,53	359	28,47	1.261	100,00
Sumatera Utara	1.338	50,07	1.334	49,93	2.672	100,00
Sumatera Barat	673	78,90	180	21,10	853	100,00
Riau	863	68,82	391	31,18	1.254	100,00
Jambi	560	79,66	143	20,34	703	100,00
Sumatera Selatan	904	64,16	505	35,84	1.409	100,00
Bengkulu	380	84,82	68	15,18	448	100,00
Lampung	709	49,41	726	50,59	1.435	100,00
Kep. Bangka Belitung	163	72,44	62	27,56	225	100,00
Kep. Riau	235	57,32	175	42,68	410	100,00
DKI Jakarta	293	27,18	785	72,82	1.078	100,00
Jawa Barat	1.982	34,03	3.843	65,97	5.825	100,00
Jawa Tengah	1.771	51,92	1.640	48,08	3.411	100,00
DI Yogyakarta	214	47,45	237	52,55	451	100,00
Jawa Timur	1.731	35,03	3.210	64,97	4.941	100,00
Banten	573	36,24	1.008	63,76	1.581	100,00
Bali	273	67,74	130	32,26	403	100,00
Nusa Tenggara Barat	604	58,87	422	41,13	1.026	100,00
Nusa Tenggara Timur	1.366	75,72	438	24,28	1.804	100,00
Kalimantan Barat	1.023	75,06	340	24,94	1.363	100,00
Kalimantan Tengah	710	82,75	148	17,25	858	100,00
Kalimantan Selatan	523	83,68	102	16,32	625	100,00
Kalimantan Timur	451	66,03	232	33,97	683	100,00
Kalimantan Utara	156	81,25	36	18,75	192	100,00
Sulawesi Utara	476	64,94	257	35,06	733	100,00
Sulawesi Tengah	731	84,22	137	15,78	868	100,00
Sulawesi Selatan	1.268	74,41	436	25,59	1.704	100,00
Sulawesi Tenggara	694	89,09	85	10,91	779	100,00
Gorontalo	312	91,76	28	8,24	340	100,00
Sulawesi Barat	318	83,91	61	16,09	379	100,00
Maluku	542	79,12	143	20,88	685	100,00
Maluku Utara	369	72,35	141	27,65	510	100,00
Papua Barat	238	71,26	96	28,74	334	100,00
Papua	519	69,85	224	30,15	743	100,00
Indonesia	23.864	56,84	18.122	43,16	41.986	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.1.3 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	394	73,64	141	26,36	535	100,00
Sumatera Utara	428	39,81	647	60,19	1.075	100,00
Sumatera Barat	236	70,03	101	29,97	337	100,00
Riau	303	66,59	152	33,41	455	100,00
Jambi	162	67,78	77	32,22	239	100,00
Sumatera Selatan	329	53,76	283	46,24	612	100,00
Bengkulu	109	74,66	37	25,34	146	100,00
Lampung	239	46,05	280	53,95	519	100,00
Kep. Bangka Belitung	47	66,20	24	33,80	71	100,00
Kep. Riau	93	57,06	70	42,94	163	100,00
DKI Jakarta	117	23,78	375	76,22	492	100,00
Jawa Barat	514	30,04	1.197	69,96	1.711	100,00
Jawa Tengah	361	42,27	493	57,73	854	100,00
DI Yogyakarta	69	39,88	104	60,12	173	100,00
Jawa Timur	423	27,87	1.095	72,13	1.518	100,00
Banten	161	26,70	442	73,30	603	100,00
Bali	88	53,99	75	46,01	163	100,00
Nusa Tenggara Barat	150	43,73	193	56,27	343	100,00
Nusa Tenggara Timur	386	64,55	212	35,45	598	100,00
Kalimantan Barat	273	59,48	186	40,52	459	100,00
Kalimantan Tengah	181	74,79	61	25,21	242	100,00
Kalimantan Selatan	142	69,27	63	30,73	205	100,00
Kalimantan Timur	143	61,37	90	38,63	233	100,00
Kalimantan Utara	44	65,67	23	34,33	67	100,00
Sulawesi Utara	121	52,61	109	47,39	230	100,00
Sulawesi Tengah	176	75,86	56	24,14	232	100,00
Sulawesi Selatan	335	55,93	264	44,07	599	100,00
Sulawesi Tenggara	249	79,55	64	20,45	313	100,00
Gorontalo	61	87,14	9	12,86	70	100,00
Sulawesi Barat	77	84,62	14	15,38	91	100,00
Maluku	211	74,30	73	25,70	284	100,00
Maluku Utara	139	64,06	78	35,94	217	100,00
Papua Barat	82	62,60	49	37,40	131	100,00
Papua	144	56,25	112	43,75	256	100,00
Indonesia	6.987	49,08	7.249	50,92	14.236	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.1.4 Jumlah dan Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Negeri		Swasta		Negeri+Swasta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	153	69,55	67	30,45	220	100,00
Sumatera Utara	270	27,75	703	72,25	973	100,00
Sumatera Barat	114	53,77	98	46,23	212	100,00
Riau	128	42,24	175	57,76	303	100,00
Jambi	104	58,10	75	41,90	179	100,00
Sumatera Selatan	120	38,71	190	61,29	310	100,00
Bengkulu	64	61,54	40	38,46	104	100,00
Lampung	111	22,56	381	77,44	492	100,00
Kep. Bangka Belitung	36	61,02	23	38,98	59	100,00
Kep. Riau	36	32,73	74	67,27	110	100,00
DKI Jakarta	73	12,76	499	87,24	572	100,00
Jawa Barat	288	9,91	2.617	90,09	2.905	100,00
Jawa Tengah	237	15,30	1.312	84,70	1.549	100,00
DI Yogyakarta	50	23,58	162	76,42	212	100,00
Jawa Timur	297	13,82	1.852	86,18	2.149	100,00
Banten	91	12,31	648	87,69	739	100,00
Bali	54	31,58	117	68,42	171	100,00
Nusa Tenggara Barat	99	29,38	238	70,62	337	100,00
Nusa Tenggara Timur	165	51,24	157	48,76	322	100,00
Kalimantan Barat	110	48,25	118	51,75	228	100,00
Kalimantan Tengah	94	67,63	45	32,37	139	100,00
Kalimantan Selatan	63	50,00	63	50,00	126	100,00
Kalimantan Timur	87	40,28	129	59,72	216	100,00
Kalimantan Utara	21	65,63	11	34,38	32	100,00
Sulawesi Utara	92	48,42	98	51,58	190	100,00
Sulawesi Tengah	107	58,79	75	41,21	182	100,00
Sulawesi Selatan	168	40,38	248	59,62	416	100,00
Sulawesi Tenggara	102	61,45	64	38,55	166	100,00
Gorontalo	40	68,97	18	31,03	58	100,00
Sulawesi Barat	60	45,80	71	54,20	131	100,00
Maluku	82	71,30	33	28,70	115	100,00
Maluku Utara	63	42,00	87	58,00	150	100,00
Papua Barat	33	57,89	24	42,11	57	100,00
Papua	80	56,74	61	43,26	141	100,00
Indonesia	3.692	25,88	10.573	74,12	14.265	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.2.1 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43,25	47,93	8,82	100,00
Sumatera Utara	49,26	41,70	9,04	100,00
Sumatera Barat	43,72	46,94	9,34	100,00
Riau	49,66	41,50	8,83	100,00
Jambi	39,90	50,55	9,55	100,00
Sumatera Selatan	46,52	45,08	8,39	100,00
Bengkulu	43,84	50,64	5,52	100,00
Lampung	40,98	49,20	9,82	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,05	34,57	12,38	100,00
Kep. Riau	68,72	26,64	4,65	100,00
DKI Jakarta	85,01	13,94	1,05	100,00
Jawa Barat	42,42	49,85	7,72	100,00
Jawa Tengah	45,44	46,50	8,06	100,00
DI Yogyakarta	60,45	36,38	3,17	100,00
Jawa Timur	48,10	43,74	8,16	100,00
Banten	56,19	36,88	6,92	100,00
Bali	56,83	37,58	5,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,37	50,70	7,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,42	49,37	13,21	100,00
Kalimantan Barat	39,73	49,40	10,88	100,00
Kalimantan Tengah	41,91	47,79	10,29	100,00
Kalimantan Selatan	50,10	44,00	5,89	100,00
Kalimantan Timur	60,80	32,53	6,67	100,00
Kalimantan Utara	54,55	35,20	10,26	100,00
Sulawesi Utara	47,78	41,76	10,46	100,00
Sulawesi Tengah	43,06	45,35	11,59	100,00
Sulawesi Selatan	39,66	49,16	11,18	100,00
Sulawesi Tenggara	43,35	43,45	13,20	100,00
Gorontalo	51,48	41,28	7,24	100,00
Sulawesi Barat	32,38	46,85	20,77	100,00
Maluku	40,75	45,48	13,77	100,00
Maluku Utara	32,91	53,29	13,80	100,00
Papua Barat	46,67	45,02	8,31	100,00
Papua	36,64	52,98	10,39	100,00
Indonesia	46,56	44,74	8,70	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.2.2 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	48,61	43,89	7,51	100,00
Sumatera Utara	55,69	37,71	6,60	100,00
Sumatera Barat	56,59	38,05	5,36	100,00
Riau	56,40	37,52	6,08	100,00
Jambi	47,38	44,85	7,77	100,00
Sumatera Selatan	52,23	42,02	5,75	100,00
Bengkulu	47,52	46,33	6,15	100,00
Lampung	51,53	41,79	6,68	100,00
Kep. Bangka Belitung	66,10	27,58	6,31	100,00
Kep. Riau	71,89	25,25	2,87	100,00
DKI Jakarta	88,01	11,70	0,29	100,00
Jawa Barat	57,25	38,30	4,46	100,00
Jawa Tengah	55,19	40,39	4,43	100,00
DI Yogyakarta	64,57	29,10	6,33	100,00
Jawa Timur	58,13	36,61	5,27	100,00
Banten	63,30	32,99	3,71	100,00
Bali	72,83	24,44	2,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	50,87	43,29	5,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	49,57	42,84	7,59	100,00
Kalimantan Barat	50,45	42,85	6,70	100,00
Kalimantan Tengah	50,80	43,06	6,14	100,00
Kalimantan Selatan	58,22	37,84	3,94	100,00
Kalimantan Timur	63,51	31,60	4,89	100,00
Kalimantan Utara	65,41	28,22	6,37	100,00
Sulawesi Utara	46,35	47,08	6,57	100,00
Sulawesi Tengah	48,07	43,20	8,73	100,00
Sulawesi Selatan	49,96	43,26	6,78	100,00
Sulawesi Tenggara	52,10	38,11	9,78	100,00
Gorontalo	61,36	34,31	4,33	100,00
Sulawesi Barat	36,69	47,61	15,69	100,00
Maluku	49,93	38,78	11,28	100,00
Maluku Utara	39,22	52,22	8,57	100,00
Papua Barat	48,29	45,23	6,48	100,00
Papua	42,96	49,65	7,39	100,00
Indonesia	56,17	38,26	5,57	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.2.3 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	52,39	38,81	8,80	100,00
Sumatera Utara	65,73	30,40	3,88	100,00
Sumatera Barat	62,16	31,33	6,50	100,00
Riau	71,49	25,04	3,48	100,00
Jambi	67,10	29,29	3,61	100,00
Sumatera Selatan	63,61	32,81	3,58	100,00
Bengkulu	61,39	36,51	2,10	100,00
Lampung	62,08	31,32	6,60	100,00
Kep. Bangka Belitung	72,20	19,84	7,96	100,00
Kep. Riau	80,08	18,94	0,98	100,00
DKI Jakarta	91,80	8,08	0,12	100,00
Jawa Barat	67,45	29,31	3,24	100,00
Jawa Tengah	73,87	23,66	2,47	100,00
DI Yogyakarta	75,73	22,07	2,20	100,00
Jawa Timur	70,93	25,64	3,43	100,00
Banten	73,46	23,86	2,68	100,00
Bali	81,16	16,07	2,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,12	51,84	5,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,30	33,02	7,67	100,00
Kalimantan Barat	64,06	29,68	6,27	100,00
Kalimantan Tengah	64,63	31,19	4,18	100,00
Kalimantan Selatan	78,95	18,93	2,12	100,00
Kalimantan Timur	59,37	39,02	1,60	100,00
Kalimantan Utara	64,31	28,61	7,08	100,00
Sulawesi Utara	57,82	36,03	6,15	100,00
Sulawesi Tengah	59,10	33,82	7,08	100,00
Sulawesi Selatan	60,58	35,37	4,05	100,00
Sulawesi Tenggara	52,15	35,59	12,26	100,00
Gorontalo	79,85	16,23	3,92	100,00
Sulawesi Barat	65,17	29,26	5,57	100,00
Maluku	49,53	41,79	8,68	100,00
Maluku Utara	52,98	41,71	5,31	100,00
Papua Barat	55,09	40,39	4,52	100,00
Papua	46,41	49,15	4,44	100,00
Indonesia	66,29	29,45	4,26	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.2.4 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Kondisi, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kondisi Ruang Kelas			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan/Sedang	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	56,43	38,78	4,79	100,00
Sumatera Utara	68,40	29,55	2,06	100,00
Sumatera Barat	62,82	33,10	4,07	100,00
Riau	69,73	28,38	1,90	100,00
Jambi	61,21	37,00	1,79	100,00
Sumatera Selatan	71,64	26,49	1,86	100,00
Bengkulu	58,70	39,19	2,11	100,00
Lampung	63,77	33,18	3,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	78,50	17,45	4,05	100,00
Kep. Riau	76,99	22,19	0,82	100,00
DKI Jakarta	86,39	13,29	0,32	100,00
Jawa Barat	69,22	29,53	1,25	100,00
Jawa Tengah	71,92	27,35	0,73	100,00
DI Yogyakarta	80,36	17,81	1,82	100,00
Jawa Timur	74,16	24,95	0,89	100,00
Banten	65,07	34,03	0,91	100,00
Bali	76,67	22,94	0,39	100,00
Nusa Tenggara Barat	61,72	34,88	3,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	63,77	29,56	6,67	100,00
Kalimantan Barat	61,44	34,76	3,81	100,00
Kalimantan Tengah	60,30	36,34	3,36	100,00
Kalimantan Selatan	74,00	21,69	4,31	100,00
Kalimantan Timur	66,15	31,75	2,10	100,00
Kalimantan Utara	70,19	27,16	2,64	100,00
Sulawesi Utara	66,21	30,22	3,57	100,00
Sulawesi Tengah	61,19	34,60	4,21	100,00
Sulawesi Selatan	61,56	35,66	2,78	100,00
Sulawesi Tenggara	50,41	39,88	9,71	100,00
Gorontalo	64,62	32,48	2,90	100,00
Sulawesi Barat	58,82	31,36	9,82	100,00
Maluku	53,32	39,50	7,17	100,00
Maluku Utara	50,77	45,16	4,06	100,00
Papua Barat	60,21	37,09	2,70	100,00
Papua	42,75	53,28	3,97	100,00
Indonesia	69,12	28,97	1,91	100,00

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.3 Rasio Peserta Didik per Rombel menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	19,18	25,45	26,07	20,47
Sumatera Utara	20,74	28,31	31,46	26,96
Sumatera Barat	19,15	26,93	30,64	25,79
Riau	22,31	27,60	29,99	25,46
Jambi	19,63	25,64	29,13	23,78
Sumatera Selatan	22,01	28,51	30,99	28,37
Bengkulu	18,66	25,99	29,21	22,63
Lampung	20,94	27,96	29,77	25,89
Kep. Bangka Belitung	23,94	29,97	31,25	28,89
Kep. Riau	23,15	30,11	30,88	25,85
DKI Jakarta	27,11	32,07	31,33	28,97
Jawa Barat	26,81	30,98	32,14	28,71
Jawa Tengah	20,63	29,42	32,58	29,56
DI Yogyakarta	19,98	29,16	29,74	26,71
Jawa Timur	19,13	28,15	30,24	27,77
Banten	27,32	30,86	32,01	29,22
Bali	22,06	32,13	33,43	29,48
Nusa Tenggara Barat	21,55	25,44	29,48	24,13
Nusa Tenggara Timur	18,27	26,72	28,07	25,16
Kalimantan Barat	18,15	26,63	29,86	27,02
Kalimantan Tengah	15,68	23,82	26,82	23,28
Kalimantan Selatan	17,22	25,84	28,75	26,87
Kalimantan Timur	22,48	28,38	30,77	27,16
Kalimantan Utara	19,11	25,75	27,81	26,59
Sulawesi Utara	15,12	24,47	25,47	19,83
Sulawesi Tengah	16,18	24,06	29,28	22,21
Sulawesi Selatan	18,97	26,12	30,24	23,49
Sulawesi Tenggara	17,63	24,45	27,80	20,56
Gorontalo	17,90	23,31	30,29	21,07
Sulawesi Barat	16,07	24,40	28,97	21,83
Maluku	17,62	24,67	26,35	19,26
Maluku Utara	16,77	24,34	26,12	18,59
Papua Barat	17,15	25,48	25,70	22,60
Papua	25,46	30,93	29,69	23,14
Indonesia	21,29	28,42	30,36	27,19

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.4 Rasio Rombel per Kelas menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,97	0,74	0,79	0,95
Sumatera Utara	0,98	0,86	0,93	0,92
Sumatera Barat	0,98	0,82	0,92	1,04
Riau	1,03	0,86	0,94	1,02
Jambi	1,00	0,81	0,90	0,99
Sumatera Selatan	1,07	0,93	0,93	1,08
Bengkulu	0,93	0,83	0,94	1,01
Lampung	1,03	0,90	0,93	0,99
Kep. Bangka Belitung	0,94	0,89	0,94	0,90
Kep. Riau	1,08	0,94	0,96	1,05
DKI Jakarta	1,01	0,87	0,90	0,84
Jawa Barat	1,10	0,90	1,00	0,96
Jawa Tengah	0,97	0,92	0,94	1,03
DI Yogyakarta	0,96	0,92	0,89	1,00
Jawa Timur	0,98	0,89	0,92	1,05
Banten	1,09	0,88	0,93	0,94
Bali	0,99	1,00	0,95	1,05
Nusa Tenggara Barat	1,05	0,88	0,98	1,07
Nusa Tenggara Timur	0,91	0,89	0,98	1,08
Kalimantan Barat	1,04	0,89	0,95	1,10
Kalimantan Tengah	0,98	0,84	0,93	0,96
Kalimantan Selatan	0,97	0,81	0,91	1,03
Kalimantan Timur	1,07	0,90	0,95	1,02
Kalimantan Utara	1,06	0,95	0,95	0,94
Sulawesi Utara	0,96	0,83	0,92	0,94
Sulawesi Tengah	0,96	0,83	0,98	0,97
Sulawesi Selatan	1,02	0,81	0,89	0,92
Sulawesi Tenggara	0,99	0,82	0,89	0,96
Gorontalo	0,91	0,81	0,96	0,96
Sulawesi Barat	1,02	0,82	0,90	0,99
Maluku	0,96	0,83	0,91	0,99
Maluku Utara	0,97	0,83	0,95	0,98
Papua Barat	1,04	0,87	0,94	1,07
Papua	1,03	0,93	0,95	0,95
Indonesia	1,01	0,88	0,93	0,99

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.5.1 Persentase Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80,08	17,97	1,96
Sumatera Utara	77,82	20,15	2,03
Sumatera Barat	81,01	17,37	1,62
Riau	81,01	17,28	1,71
Jambi	81,40	16,81	1,79
Sumatera Selatan	84,11	14,08	1,81
Bengkulu	81,69	16,09	2,22
Lampung	86,56	11,69	1,75
Kep. Bangka Belitung	85,10	13,34	1,56
Kep. Riau	86,54	12,13	1,34
DKI Jakarta	96,52	1,70	1,79
Jawa Barat	86,01	12,41	1,59
Jawa Tengah	92,33	6,27	1,40
DI Yogyakarta	95,18	3,68	1,14
Jawa Timur	90,65	7,86	1,49
Banten	88,24	10,29	1,47
Bali	92,30	6,04	1,66
Nusa Tenggara Barat	83,80	14,39	1,81
Nusa Tenggara Timur	56,22	42,00	1,79
Kalimantan Barat	67,10	31,16	1,74
Kalimantan Tengah	76,96	21,26	1,77
Kalimantan Selatan	87,44	10,60	1,96
Kalimantan Timur	81,24	17,46	1,30
Kalimantan Utara	74,02	23,30	2,68
Sulawesi Utara	85,11	12,98	1,91
Sulawesi Tengah	80,55	17,53	1,91
Sulawesi Selatan	84,61	13,73	1,66
Sulawesi Tenggara	83,75	14,88	1,36
Gorontalo	85,78	12,39	1,83
Sulawesi Barat	77,68	20,74	1,58
Maluku	76,43	20,70	2,87
Maluku Utara	80,00	18,02	1,98
Papua Barat	65,85	31,79	2,36
Papua	53,18	42,32	4,50
Indonesia	83,65	14,62	1,73

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.5.2 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	80,25	19,59	0,16
Sumatera Utara	82,78	17,03	0,19
Sumatera Barat	82,88	17,12	0,00
Riau	83,73	16,27	0,00
Jambi	83,78	16,22	0,00
Sumatera Selatan	85,45	14,55	0,00
Bengkulu	84,15	15,63	0,22
Lampung	88,85	11,08	0,07
Kep. Bangka Belitung	89,78	10,22	0,00
Kep. Riau	90,00	9,76	0,24
DKI Jakarta	97,31	2,69	0,00
Jawa Barat	89,99	9,85	0,15
Jawa Tengah	93,64	6,33	0,03
DI Yogyakarta	95,34	4,66	0,00
Jawa Timur	91,72	8,22	0,06
Banten	92,09	7,84	0,06
Bali	92,56	7,44	0,00
Nusa Tenggara Barat	82,75	17,15	0,10
Nusa Tenggara Timur	59,70	40,24	0,06
Kalimantan Barat	72,34	27,59	0,07
Kalimantan Tengah	80,42	19,58	0,00
Kalimantan Selatan	85,28	14,56	0,16
Kalimantan Timur	84,19	15,67	0,15
Kalimantan Utara	78,65	21,35	0,00
Sulawesi Utara	86,36	13,51	0,14
Sulawesi Tengah	82,72	17,28	0,00
Sulawesi Selatan	86,38	13,56	0,06
Sulawesi Tenggara	83,83	16,17	0,00
Gorontalo	84,12	15,88	0,00
Sulawesi Barat	83,91	16,09	0,00
Maluku	75,18	24,67	0,15
Maluku Utara	78,04	21,57	0,39
Papua Barat	67,66	32,34	0,00
Papua	61,24	38,49	0,27
Indonesia	85,29	14,62	0,09

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.5.3 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	84,86	14,95	0,19
Sumatera Utara	87,81	12,19	0,00
Sumatera Barat	86,05	13,95	0,00
Riau	90,11	9,89	0,00
Jambi	90,38	9,62	0,00
Sumatera Selatan	87,75	12,09	0,16
Bengkulu	85,62	14,38	0,00
Lampung	92,49	7,51	0,00
Kep. Bangka Belitung	84,51	15,49	0,00
Kep. Riau	86,50	13,50	0,00
DKI Jakarta	97,76	2,24	0,00
Jawa Barat	93,34	6,66	0,00
Jawa Tengah	95,43	4,57	0,00
DI Yogyakarta	93,64	5,78	0,58
Jawa Timur	92,36	7,58	0,07
Banten	94,53	5,14	0,33
Bali	93,87	6,13	0,00
Nusa Tenggara Barat	87,46	12,54	0,00
Nusa Tenggara Timur	73,41	26,59	0,00
Kalimantan Barat	78,87	20,92	0,22
Kalimantan Tengah	84,71	15,29	0,00
Kalimantan Selatan	92,20	7,80	0,00
Kalimantan Timur	90,99	9,01	0,00
Kalimantan Utara	79,10	20,90	0,00
Sulawesi Utara	90,00	10,00	0,00
Sulawesi Tengah	88,36	11,64	0,00
Sulawesi Selatan	92,65	7,01	0,33
Sulawesi Tenggara	86,58	13,42	0,00
Gorontalo	87,14	12,86	0,00
Sulawesi Barat	83,52	16,48	0,00
Maluku	83,45	16,55	0,00
Maluku Utara	85,71	14,29	0,00
Papua Barat	75,57	24,43	0,00
Papua	65,63	34,38	0,00
Indonesia	88,95	10,98	0,06

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.5.4 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Kecukupan Sumber Air, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kecukupan Sumber Air		
	Cukup	Kurang	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	88,64	11,36	0,00
Sumatera Utara	86,02	13,67	0,31
Sumatera Barat	83,49	16,51	0,00
Riau	88,12	11,88	0,00
Jambi	93,30	6,70	0,00
Sumatera Selatan	90,32	9,03	0,65
Bengkulu	92,31	7,69	0,00
Lampung	93,09	6,91	0,00
Kep. Bangka Belitung	96,61	3,39	0,00
Kep. Riau	90,00	9,09	0,91
DKI Jakarta	97,03	2,80	0,17
Jawa Barat	93,22	6,78	0,00
Jawa Tengah	95,80	4,07	0,13
DI Yogyakarta	93,87	6,13	0,00
Jawa Timur	94,42	5,40	0,19
Banten	90,80	8,66	0,54
Bali	95,32	4,68	0,00
Nusa Tenggara Barat	88,43	10,68	0,89
Nusa Tenggara Timur	70,50	29,50	0,00
Kalimantan Barat	82,02	17,98	0,00
Kalimantan Tengah	84,89	15,11	0,00
Kalimantan Selatan	92,06	7,94	0,00
Kalimantan Timur	92,13	7,87	0,00
Kalimantan Utara	75,00	25,00	0,00
Sulawesi Utara	92,11	7,89	0,00
Sulawesi Tengah	84,07	15,93	0,00
Sulawesi Selatan	93,27	6,73	0,00
Sulawesi Tenggara	88,55	11,45	0,00
Gorontalo	82,76	17,24	0,00
Sulawesi Barat	84,73	15,27	0,00
Maluku	75,65	24,35	0,00
Maluku Utara	84,67	15,33	0,00
Papua Barat	75,44	24,56	0,00
Papua	70,92	29,08	0,00
Indonesia	91,06	8,80	0,14

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.6.1 Persentase Sekolah Dasar (SD) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	55,06	23,35	21,59
Sumatera Utara	57,41	18,18	24,41
Sumatera Barat	67,07	16,92	16,01
Riau	66,61	15,59	17,81
Jambi	57,61	19,57	22,82
Sumatera Selatan	68,29	18,08	13,63
Bengkulu	54,65	21,24	24,11
Lampung	60,88	21,20	17,92
Kep. Bangka Belitung	88,70	7,57	3,73
Kep. Riau	78,73	11,82	9,46
DKI Jakarta	90,13	6,48	3,39
Jawa Barat	65,99	22,27	11,74
Jawa Tengah	75,10	17,86	7,04
DI Yogyakarta	88,53	8,55	2,92
Jawa Timur	61,49	21,81	16,70
Banten	63,94	18,69	17,37
Bali	75,37	16,47	8,15
Nusa Tenggara Barat	55,15	19,73	25,11
Nusa Tenggara Timur	49,16	20,01	30,83
Kalimantan Barat	65,55	19,45	15,01
Kalimantan Tengah	47,89	26,70	25,42
Kalimantan Selatan	58,25	26,96	14,79
Kalimantan Timur	72,59	16,78	10,63
Kalimantan Utara	60,82	20,62	18,56
Sulawesi Utara	53,11	27,51	19,38
Sulawesi Tengah	45,28	22,62	32,09
Sulawesi Selatan	53,43	22,58	23,98
Sulawesi Tenggara	46,52	23,16	30,32
Gorontalo	60,67	21,77	17,56
Sulawesi Barat	33,48	21,27	45,25
Maluku	39,74	22,24	38,02
Maluku Utara	31,48	24,26	44,26
Papua Barat	41,21	18,30	40,49
Papua	35,39	13,47	51,14
Indonesia	62,03	19,91	18,06

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.6.2 Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	67,09	16,02	16,89
Sumatera Utara	75,26	10,52	14,22
Sumatera Barat	83,00	9,03	7,97
Riau	78,47	9,25	12,28
Jambi	68,71	12,38	18,92
Sumatera Selatan	80,98	9,51	9,51
Bengkulu	77,01	13,62	9,38
Lampung	74,84	13,45	11,71
Kep. Bangka Belitung	90,67	4,89	4,44
Kep. Riau	85,61	5,37	9,02
DKI Jakarta	91,09	5,01	3,90
Jawa Barat	80,14	10,09	9,77
Jawa Tengah	87,77	7,80	4,43
DI Yogyakarta	92,68	4,66	2,66
Jawa Timur	75,41	11,82	12,77
Banten	80,90	10,82	8,29
Bali	84,12	8,19	7,69
Nusa Tenggara Barat	58,97	15,50	25,54
Nusa Tenggara Timur	60,48	13,64	25,89
Kalimantan Barat	81,14	10,49	8,36
Kalimantan Tengah	69,00	15,97	15,03
Kalimantan Selatan	81,60	13,44	4,96
Kalimantan Timur	84,33	8,20	7,47
Kalimantan Utara	73,96	10,42	15,63
Sulawesi Utara	66,44	16,51	17,05
Sulawesi Tengah	69,24	14,63	16,13
Sulawesi Selatan	71,89	16,73	11,38
Sulawesi Tenggara	69,45	13,09	17,46
Gorontalo	76,76	12,94	10,29
Sulawesi Barat	58,31	14,51	27,18
Maluku	48,47	16,93	34,60
Maluku Utara	44,12	19,61	36,27
Papua Barat	60,18	12,28	27,54
Papua	56,12	12,38	31,49
Indonesia	75,47	11,50	13,03

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.6.3 Persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	77,38	12,34	10,28
Sumatera Utara	78,51	12,65	8,84
Sumatera Barat	85,46	7,72	6,82
Riau	83,08	10,99	5,93
Jambi	79,92	11,72	8,37
Sumatera Selatan	82,68	9,31	8,01
Bengkulu	89,04	4,79	6,16
Lampung	78,81	11,56	9,63
Kep. Bangka Belitung	90,14	5,63	4,23
Kep. Riau	82,21	7,36	10,43
DKI Jakarta	93,09	4,27	2,64
Jawa Barat	80,60	11,10	8,30
Jawa Tengah	86,18	10,07	3,75
DI Yogyakarta	86,13	8,67	5,20
Jawa Timur	78,92	11,86	9,22
Banten	80,60	10,28	9,12
Bali	85,89	6,13	7,98
Nusa Tenggara Barat	67,35	14,87	17,78
Nusa Tenggara Timur	66,56	13,21	20,23
Kalimantan Barat	79,52	10,68	9,80
Kalimantan Tengah	75,21	14,88	9,92
Kalimantan Selatan	82,93	8,78	8,29
Kalimantan Timur	84,98	9,44	5,58
Kalimantan Utara	74,63	11,94	13,43
Sulawesi Utara	75,65	13,91	10,43
Sulawesi Tengah	75,43	10,78	13,79
Sulawesi Selatan	73,96	15,36	10,68
Sulawesi Tenggara	65,18	16,93	17,89
Gorontalo	85,71	5,71	8,57
Sulawesi Barat	76,92	9,89	13,19
Maluku	55,99	19,37	24,65
Maluku Utara	55,76	20,74	23,50
Papua Barat	64,89	15,27	19,85
Papua	64,84	13,67	21,48
Indonesia	78,36	11,54	10,10

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.6.4 Persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Provinsi dan Kepemilikan Toilet Siswa, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	Kepemilikan Toilet Siswa		
	Terpisah	Bersama	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	74,55	12,27	13,18
Sumatera Utara	72,97	14,18	12,85
Sumatera Barat	77,36	12,26	10,38
Riau	77,89	10,89	11,22
Jambi	82,12	7,82	10,06
Sumatera Selatan	83,55	10,65	5,81
Bengkulu	90,38	3,85	5,77
Lampung	76,83	10,98	12,20
Kep. Bangka Belitung	81,36	11,86	6,78
Kep. Riau	80,00	7,27	12,73
DKI Jakarta	85,84	8,57	5,59
Jawa Barat	75,94	12,53	11,53
Jawa Tengah	81,60	11,23	7,17
DI Yogyakarta	82,55	9,43	8,02
Jawa Timur	70,68	15,68	13,63
Banten	76,05	11,23	12,72
Bali	78,36	9,94	11,70
Nusa Tenggara Barat	56,68	16,62	26,71
Nusa Tenggara Timur	61,80	12,42	25,78
Kalimantan Barat	80,70	8,77	10,53
Kalimantan Tengah	69,78	13,67	16,55
Kalimantan Selatan	85,71	6,35	7,94
Kalimantan Timur	81,94	10,65	7,41
Kalimantan Utara	56,25	21,88	21,88
Sulawesi Utara	66,32	14,74	18,95
Sulawesi Tengah	65,93	14,84	19,23
Sulawesi Selatan	66,59	16,35	17,07
Sulawesi Tenggara	62,05	15,06	22,89
Gorontalo	68,97	8,62	22,41
Sulawesi Barat	48,85	17,56	33,59
Maluku	51,30	24,35	24,35
Maluku Utara	37,33	26,00	36,67
Papua Barat	64,91	12,28	22,81
Papua	61,70	17,73	20,57
Indonesia	74,18	12,87	12,95

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.7 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	94,46	98,08	99,28	99,02
Sumatera Utara	96,36	97,97	98,21	95,95
Sumatera Barat	97,46	98,17	99,39	98,47
Riau	95,15	97,00	98,45	96,68
Jambi	94,50	98,11	98,91	97,47
Sumatera Selatan	95,60	98,10	98,53	95,81
Bengkulu	95,93	98,16	99,26	97,22
Lampung	95,36	96,53	98,31	94,67
Kep. Bangka Belitung	97,11	98,44	99,15	97,65
Kep. Riau	95,65	97,17	98,48	96,43
DKI Jakarta	97,27	98,09	98,78	96,81
Jawa Barat	97,42	97,60	98,42	95,57
Jawa Tengah	98,36	98,60	99,05	97,59
DI Yogyakarta	98,14	98,43	98,96	97,68
Jawa Timur	98,11	98,54	99,14	97,77
Banten	97,01	97,75	98,40	96,95
Bali	98,50	99,09	98,99	96,63
Nusa Tenggara Barat	96,09	98,49	99,05	97,80
Nusa Tenggara Timur	94,15	97,64	98,07	94,49
Kalimantan Barat	94,64	97,00	98,03	95,38
Kalimantan Tengah	95,96	98,19	99,16	97,63
Kalimantan Selatan	97,00	98,68	99,13	97,10
Kalimantan Timur	96,96	98,27	99,08	97,20
Kalimantan Utara	96,36	98,47	98,87	98,73
Sulawesi Utara	94,69	96,81	98,82	97,39
Sulawesi Tengah	90,78	98,11	99,03	97,72
Sulawesi Selatan	97,04	98,82	99,18	98,11
Sulawesi Tenggara	95,03	98,46	99,03	96,74
Gorontalo	97,71	98,26	99,47	97,23
Sulawesi Barat	90,56	96,71	98,70	95,94
Maluku	87,33	95,87	98,32	95,51
Maluku Utara	84,76	96,63	98,13	95,11
Papua Barat	90,76	97,68	98,40	94,74
Papua	80,71	93,83	97,83	93,48
Indonesia	96,18	97,92	98,73	96,77

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Tabel 2.8 Rasio Murid-Guru menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2022/2023

Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10,03	8,34	9,46	7,66
Sumatera Utara	14,13	13,80	15,95	14,62
Sumatera Barat	12,75	11,02	13,49	11,57
Riau	15,06	12,51	13,81	12,26
Jambi	13,57	10,21	12,75	11,19
Sumatera Selatan	14,74	13,28	13,96	14,27
Bengkulu	12,12	10,66	12,52	9,89
Lampung	13,86	13,66	14,27	13,92
Kep. Bangka Belitung	16,81	16,08	17,02	14,30
Kep. Riau	16,07	15,40	15,37	14,15
DKI Jakarta	18,96	17,79	16,13	16,61
Jawa Barat	20,91	18,52	18,81	18,46
Jawa Tengah	15,15	16,82	16,75	17,12
DI Yogyakarta	13,42	14,65	13,56	12,93
Jawa Timur	13,81	15,09	15,67	15,80
Banten	20,85	18,27	17,45	18,18
Bali	14,89	16,66	16,45	14,96
Nusa Tenggara Barat	12,08	8,02	11,74	9,99
Nusa Tenggara Timur	12,33	10,73	12,44	12,11
Kalimantan Barat	14,31	13,64	16,04	16,63
Kalimantan Tengah	10,79	10,40	11,93	10,71
Kalimantan Selatan	11,83	11,93	13,21	13,36
Kalimantan Timur	15,79	14,70	15,44	15,37
Kalimantan Utara	12,88	11,71	12,87	12,02
Sulawesi Utara	11,45	10,87	12,99	11,40
Sulawesi Tengah	11,32	9,99	13,75	10,96
Sulawesi Selatan	12,50	11,07	14,39	11,94
Sulawesi Tenggara	11,41	8,85	12,01	9,54
Gorontalo	12,89	10,11	14,99	9,98
Sulawesi Barat	10,47	9,41	12,19	10,07
Maluku	11,58	8,79	10,45	7,88
Maluku Utara	11,68	8,90	11,88	9,36
Papua Barat	13,40	10,20	12,58	12,10
Papua	23,36	15,04	14,31	11,51
Indonesia	15,00	13,95	14,85	14,99

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin), Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)



3

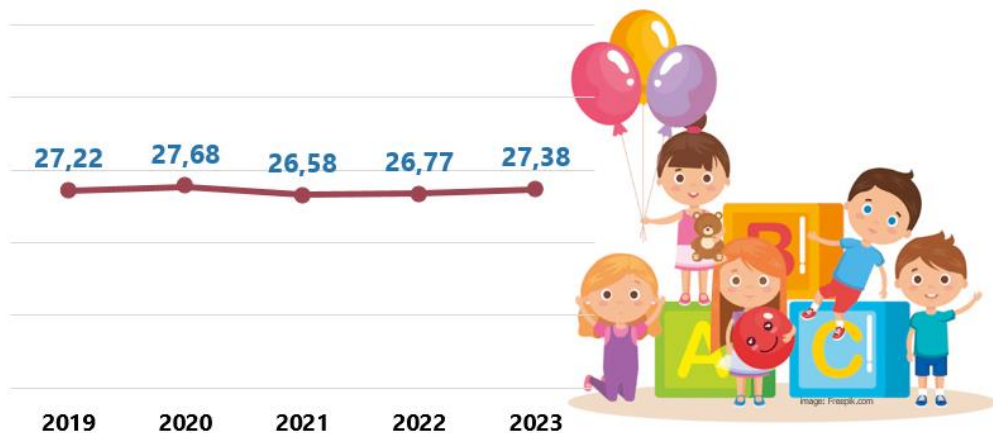
*PARTISIPASI
SEKOLAH*

Sejak menjadi bangsa yang merdeka, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka peningkatan mutu pendidikan terus menjadi fokus dan prioritas dari pemerintah. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu juga mengupayakan akses layanan pendidikan yang inklusif bagi seluruh penduduk (Safira dan Wibowo, 2021).

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan di bidang pendidikan adalah partisipasi sekolah. Harapannya semakin tinggi tingkat partisipasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik. Informasi mengenai partisipasi sekolah dapat membantu pemerintah dalam mengintervensi program pendidikan supaya lebih tepat sasaran (Purnamasari dan Amaliah, 2015). Partisipasi sekolah sebagai bentuk monitoring keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

3.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan merupakan garda terdepan dalam membentuk manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan jaman. Oleh karena itu, layanan pendidikan sudah sepatutnya dimulai sejak usia dini supaya perkembangan anak menjadi lebih optimal. Hal ini bertujuan supaya anak memiliki kesiapan untuk menjalani pendidikan pada jenjang selanjutnya (Eriani dan Yolanda, 2022). Pemerintah telah membuat program dalam bidang pendidikan yang dibuat khusus untuk anak usia dini yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD merupakan program pendidikan yang paling fundamental dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. PAUD berfungsi untuk memberikan pondasi yang kuat bagi anak supaya menjadi sosok manusia berkualitas yang nantinya tampil sebagai generasi penerus bangsa yang siap berkompetisi di era globalisasi (Lestari, Harsasto, dan Sulistyowati, 2015).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

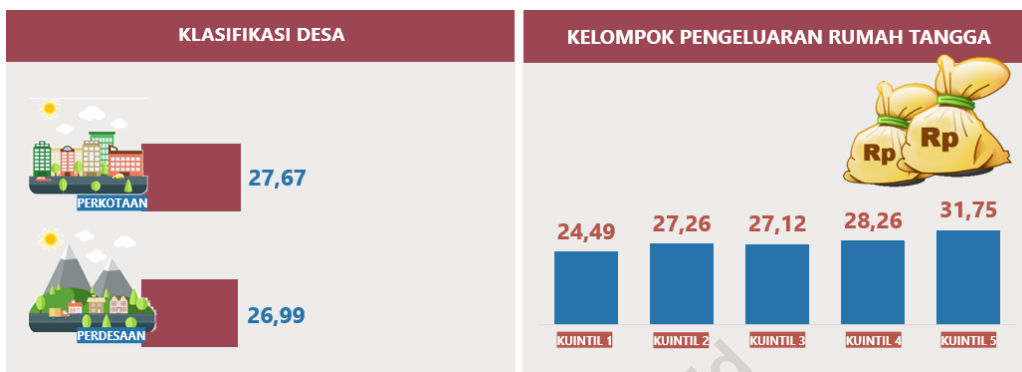
Gambar 3.1 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, 2019-2023

Pelaksanaan pendidikan prasekolah belum sepenuhnya menjangkau semua anak usia dini. Meskipun program pendidikan bagi anak usia dini telah dilaksanakan sejak lama, namun anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan pendidikan masih cukup rendah. Pada tahun 2023, hanya sekitar 27,38 persen anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang tersentuh oleh pendidikan prasekolah (Gambar 3.1). Penelitian yang dilakukan Nurrachmah, Zwagery, dan Dewi (2019) menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di PAUD menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi anak usia 0-6 tahun untuk memasuki pendidikan prasekolah.

Secara keseluruhan selama kurun waktu 2019-2023, persentase anak usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah relatif berkisar pada angka 26-27 persen. Faktor pandemi Covid-19 sempat menurunkan partisipasi PAUD pada tahun 2021-2022. Namun, seiring dengan membaiknya pandemi Covid-19 membuat partisipasi anak usia dini yang mengikuti pendidikan prasekolah mengalami peningkatan pada tahun 2023 (Gambar 3.1).

Kesenjangan partisipasi pendidikan prasekolah anak usia dini antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak terlalu kentara. Pada Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa angka partisipasi pendidikan prasekolah anak usia dini di

perkotaan sebesar 27,67 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 26,99 persen. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam meningkatkan sarana maupun keterjangkauan PAUD di perdesaan yang sudah semakin membaik.

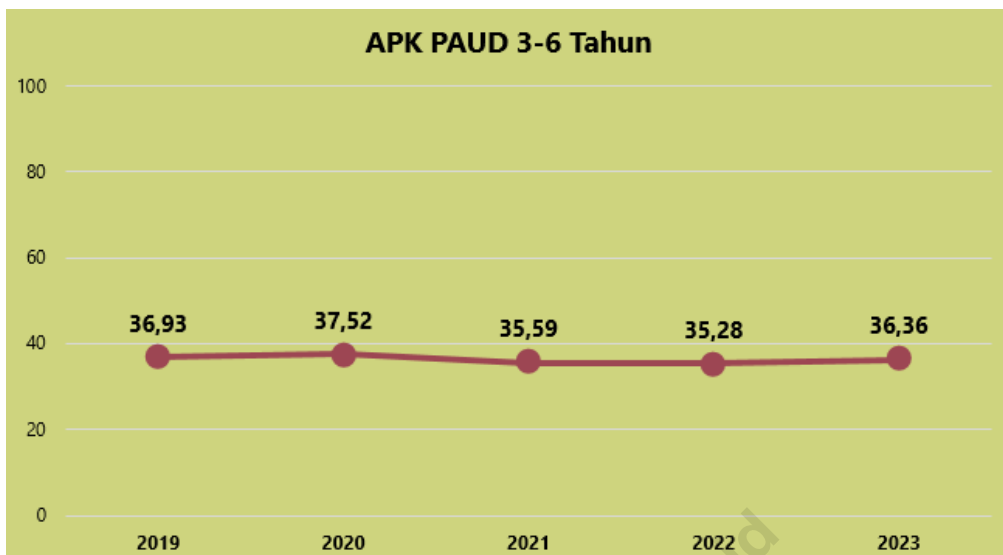


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.2 Partisipasi Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Klasifikasi Desa dan Kelompok Pengeluaran, 2023

Semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, akan semakin memperbesar peluang seorang anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah (Salsabila dan Budyanra, 2022). Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2, partisipasi anak usia dini pada kelompok pengeluaran terbawah (Kuintil 1) pada pendidikan prasekolah sebesar 24,49 persen. Sedangkan pada kelompok pengeluaran teratas (Kuintil 5) partisipasinya mencapai 31,75 persen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Takerubun dan Marsisno (2021) yang mengemukakan bahwa peningkatan rata-rata pengeluaran suatu rumah tangga akan memperbesar tingkat kecenderungan anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah.

Keberhasilan program pemerintah pada penyelenggaraan PAUD dalam rangka memperluas kesempatan mengenyam pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Dibandingkan angka partisipasi prasekolah, indikator APK PAUD memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai partisipasi prasekolah anak usia dini karena kelompok umur yang dilibatkan dalam penghitungan diperpendek dengan cakupan umur 3-6 tahun (Badan Pusat Statistik, 2022).

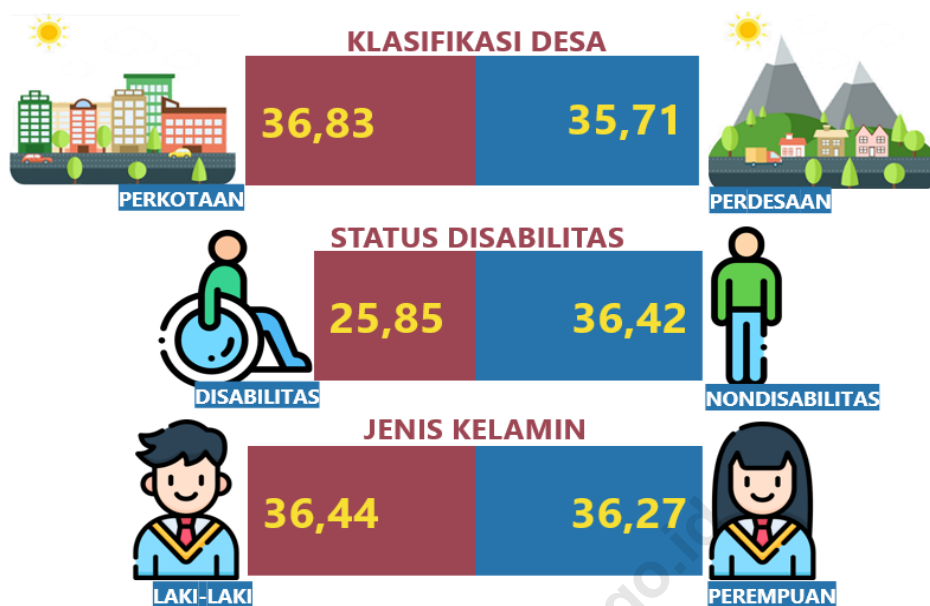


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun, 2019-2023

Pada tahun 2023, APK PAUD tercatat sebesar 36,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 3-6 tahun di Indonesia, baru sekitar 36 anak yang bersekolah pada tahapan PAUD. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021-2022 yang sempat menurun akibat terjadi pandemi Covid-19, dimana banyak orangtua cenderung tidak mendaftarkan ke jenjang PAUD (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Meskipun demikian, capaian APK PAUD tahun 2023 masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 (2019-2020).

Kebijakan pemerintah untuk perluasan dan pemerataan PAUD melalui program Satu Desa Satu PAUD tampaknya cukup efektif. Hal ini tergambar dari tidak jauhnya disparitas antara APK PAUD daerah perkotaan dan perdesaan. Seperti yang terlihat Gambar 3.4, di mana APK PAUD di perkotaan tercatat sebesar 36,83 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 35,71 persen.

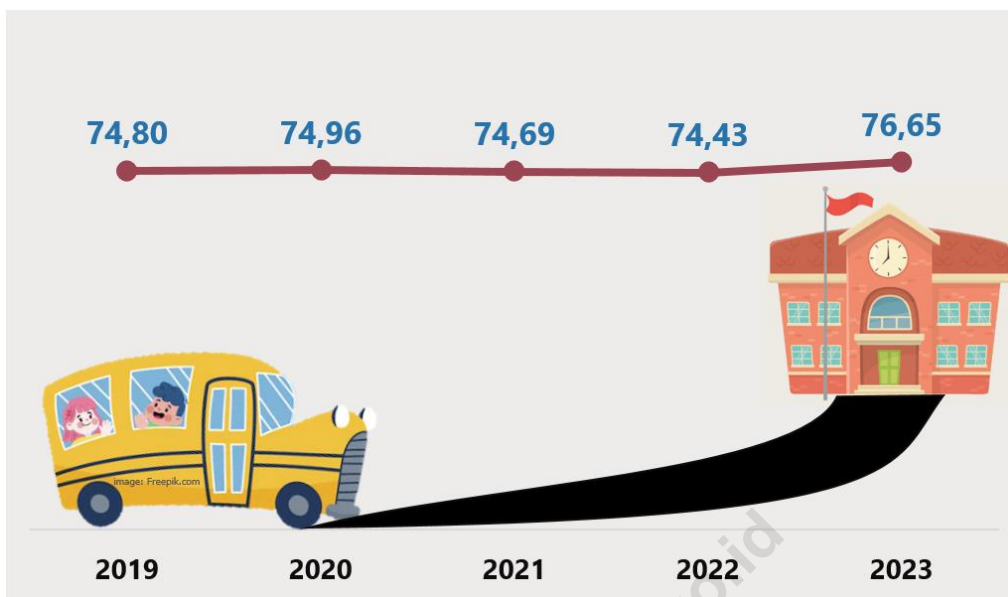


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 Tahun menurut Karakteristik Demografi, 2023

Anak usia dini penyandang disabilitas masih banyak yang belum mengakses pendidikan. Disamping sekolah luar biasa dan sekolah inklusi yang jumlahnya terbatas, juga masih ditemui penolakan terhadap anak penyandang disabilitas (Arika, 2020). Adanya keterbatasan pada anak penyandang disabilitas dirasa ikut menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam mengikuti layanan PAUD. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4, APK PAUD anak penyandang disabilitas sekitar sepuluh persen lebih rendah dibanding bukan penyandang disabilitas (25,85 persen berbanding 36,42 persen).

Kesiapan bersekolah erat kaitannya dengan proses transisi anak ke jenjang berikutnya. Kesiapan sekolah anak dapat diukur melalui matangnya aspek perkembangan yang akan membantu anak dalam proses pembelajaran dan penyesuaian dirinya di lingkungan sekolah (Pratiwi, 2018). Sejalan dengan itu, Sulistyaningsih (2005) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa anak yang telah siap secara sosial akan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Sementara itu, anak yang belum memiliki kesiapan justru akan frustrasi bila ditempatkan di lingkungan akademis



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

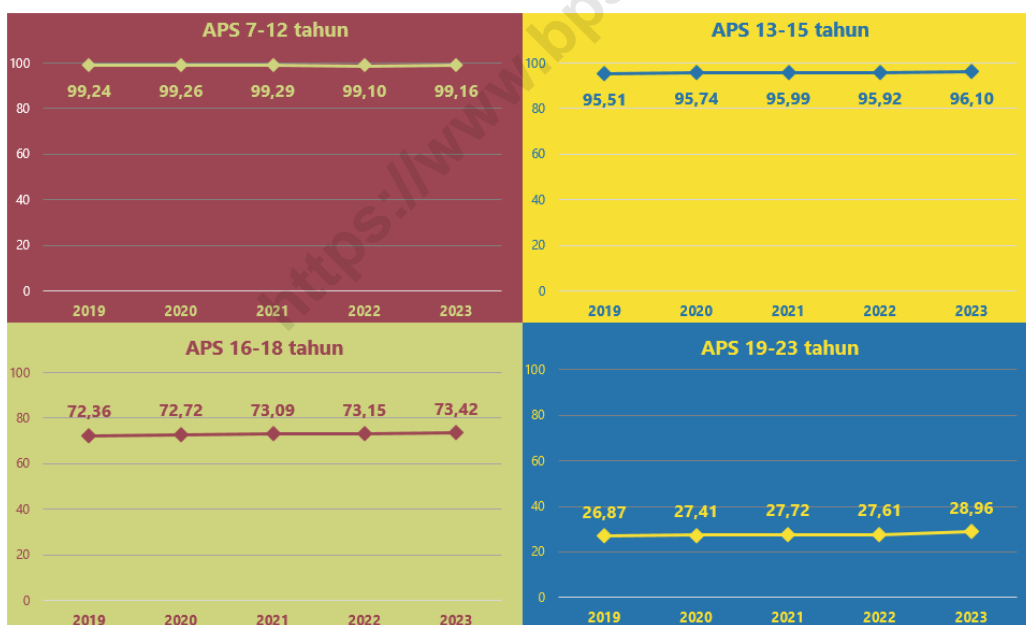
Gambar 3.5 Angka Kesiapan Sekolah, 2019-2023

Indikator Angka Kesiapan Sekolah (AKS) dimaknai sebagai persentase anak kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD. Pada tahun 2023, capaian AKS meningkat dibanding tahun sebelumnya (Gambar 3.5). Tercatat ada 76,65 persen anak yang menduduki kelas 1 SD/ sederajat pernah mengikuti pendidikan prasekolah jenis TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya. Secara nasional indikator AKS juga sudah melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebesar 72,77 persen (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

3.2 Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator APS terbagi dalam empat kategori kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Meskipun demikian, menurut Huriaty, Ranti, & Chairani (2018), peningkatan APS tidak selalu dapat diartikan dengan meningkatnya pemerataan kesempatan dalam mengenyam pendidikan.


Secara umum, capaian APS pada tahun 2023 di masing-masing kelompok umur cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (Gambar 3.6). Capaian APS kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk kelompok umur 7-12 tahun terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik formal maupun nonformal (Paket A/B/C). Sementara itu, capaian APS kelompok umur 13-15 tahun berada pada kisaran yang hampir sama, yaitu 96,10 persen. Tingginya capaian indikator APS pada jenjang pendidikan dasar ini mengindikasikan keberhasilan program Wajib Belajar yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian Supriyadi (2010, dalam Fatah, Suhaili, & Farida, 2021) menjelaskan bahwa tingginya partisipasi pendidikan pada usia ini juga didukung oleh minat masyarakat untuk bersekolah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat karena tidak ada pungutan biaya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2019-2023

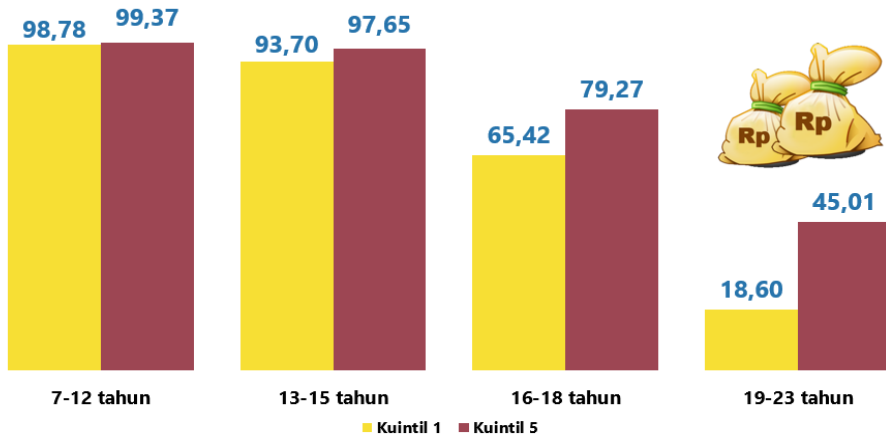
Capaian APS kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,42 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APS yang merepresentasikan usia sekolah jenjang menengah ini mengalami peningkatan



setiap tahunnya (Gambar 3.6). Meskipun demikian masih diperlukan upaya peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan supaya penduduk kelompok umur 16-18 tahun dapat menuntaskan Wajib Belajar 12 tahun atau setidaknya dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SM/ sederajat. Sementara itu, capaian APS kelompok umur 19-23 tahun sebesar 28,96 persen, pada tahun 2023. Cukup rendahnya capaian APS pada kelompok umur yang lebih tinggi ini sejalan dengan penelitian Arum dan Adry (2020) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi sekolah akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini dikarenakan dengan semakin bertambahnya umur, seseorang akan cenderung memutuskan untuk bekerja atau menikah dibanding bersekolah.

Status sosial ekonomi seringkali digunakan sebagai indikator kesejahteraan yang menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam pengambilan keputusan untuk bersekolah (Cendekia, 2021). Faktor ekonomi rumah tangga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pendidikan seseorang. Meskipun sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang membuat uang masuk dan bulanan menjadi gratis, tetapi masih ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2015) menyebutkan bahwa anak yang berada dalam rumah tangga pada tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak bersekolah dibanding anak yang berada dalam rumah tangga pada tingkat kesejahteraan yang tinggi. Dengan demikian, semakin baik kesejahteraan rumah tangga, semakin mudah pula rumah tangga tersebut untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak mereka.

Gambar 3.7 menunjukkan capaian APS pada kelompok pengeluaran terbawah (Kuintil 1) dan teratas (Kuintil 5). Perbedaan capaian APS antara kelompok pengeluaran teratas dan terbawah semakin terlihat seiring dengan kenaikan kelompok umur. Pada APS kelompok umur 7-12 tahun, perbedaan capaian APS antara kelompok pengeluaran terbawah dan teratas tidak begitu terlihat (98,78 persen berbanding 99,37 persen). Sementara itu, pada APS kelompok umur 19-23 tahun perbedaan tersebut semakin lebar dengan selisih sebesar 26,41 persen poin.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023

Gambar 3.7 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2023

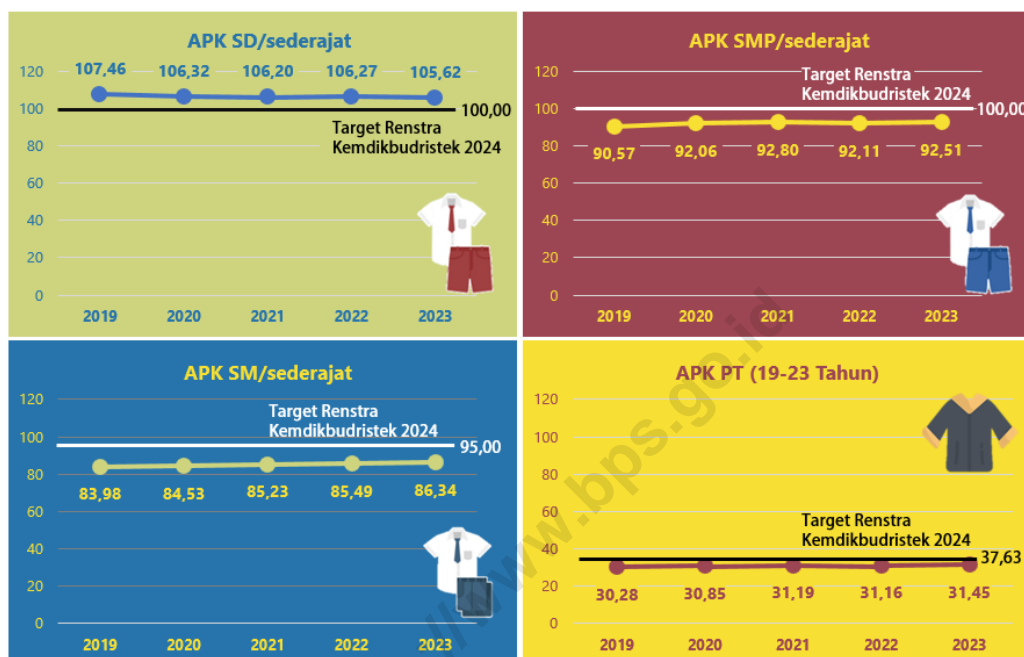
3.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil nilai APK.

Capaian APK pada jenjang SD/ sederajat mengalami penurunan. Pada tahun 2023, capaian APK jenjang SD/ sederajat sebesar 105,62 persen, sedangkan pada tahun 2022 capaiannya sebesar 106,27 persen (Gambar 3.8). Sementara itu, APK jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT pada tahun 2023 justru mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, capaian APK untuk jenjang SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT pada

tahun 2024 ditargetkan masing-masing sebesar 100,00 persen, 95,00 persen, dan 37,63 persen (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Oleh karena itu masih diperlukan kerja keras dan upaya yang solid agar capaian APK yang ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024.

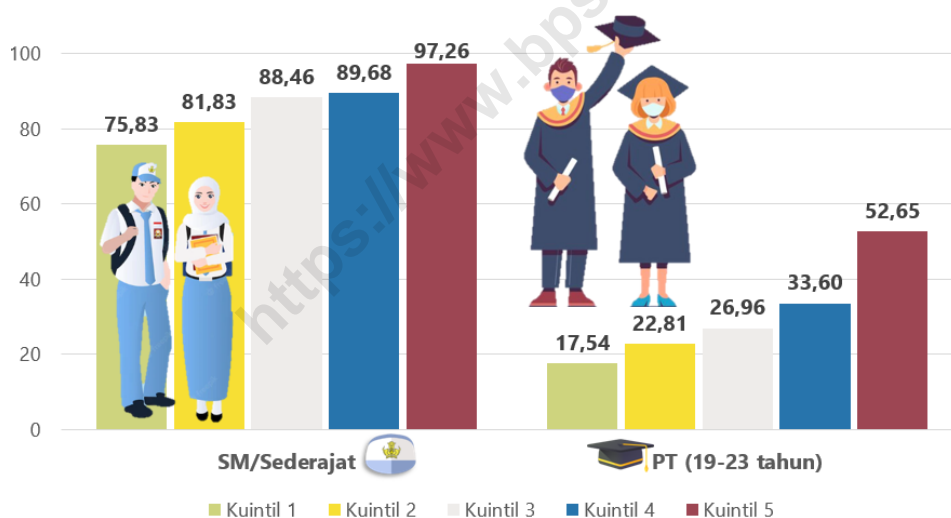


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2023

Keterbatasan ekonomi masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini khususnya dalam pemerataan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Karini (2018) menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama dari tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat ekonomi rendah. Biaya pendidikan yang relatif besar, terlebih pada pendidikan menengah dan tinggi, membuat masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah pada umumnya tidak memiliki dana yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, banyak anak-anak yang lebih memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Penduduk miskin masih sulit dalam mengakses pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Padahal, kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga keluar dari kemiskinan (Elmira dan Suryadarma, 2018). Seperti yang terlihat pada Gambar 3.9, capaian APK PT tahun 2023 pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (Kuintil 1) hanya sebesar 17,54 persen. Capaian tersebut masih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok dengan pengeluaran tertinggi (Kuintil 5). Pada kelompok ini, lebih dari separuh penduduk berusia 19-23 tahun sedang bersekolah di pendidikan tinggi (52,65 persen). Angka ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi antara rumah tangga berpendapatan sangat tinggi dan berpendapatan sangat rendah dalam mengakses pendidikan tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.9 Angka Partisipasi Kasar SM/serderajat dan PT menurut Kelompok Pengeluaran, 2023

Masih sulitnya penduduk miskin dalam mengakses pendidikan tinggi ini sejalan dengan penelitian Ridho Al Izzati (2021) yang menemukan bahwa anak dari rumah tangga yang masuk ke dalam kelompok 60 persen termiskin hanya memiliki peluang 1 persen hingga 20 persen untuk melanjutkan kuliah. Peluang tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan anak dari rumah tangga yang

termasuk kelompok 61-100 persen terkaya memiliki peluang 20 persen hingga 60 persen untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

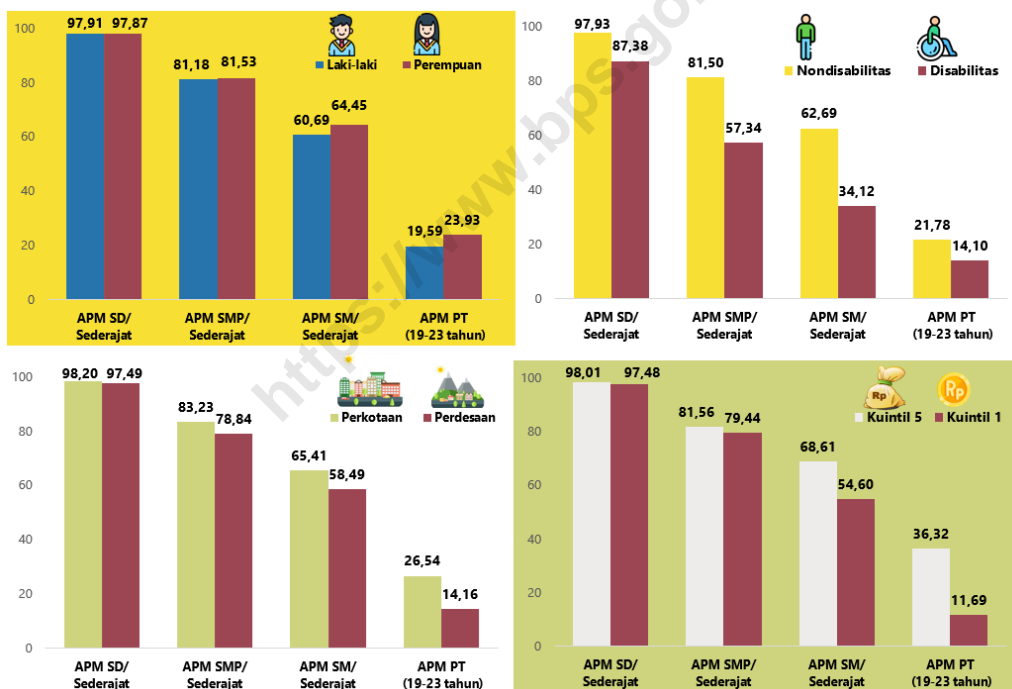
3.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai atau tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Jadi, apabila APM sama dengan 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Pemerintah, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemdikbudristek 2020-2024, tidak memasukkan APM sebagai bagian dari salah satu agenda pencapaian target pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam Target 4.5 menggunakan indikator APM untuk melihat kesenjangan antar kelompok dalam mengakses pendidikan sebagai upaya menghilangkan disparitas gender dan menjamin akses pendidikan yang sama bagi semua penduduk (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Kelompok penduduk yang dibandingkan antara lain adalah laki-laki dan perempuan, perkotaan dan perdesaan, disabilitas dan nondisabilitas, serta kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) dan terbawah (kuintil 1).

Program peningkatan akses terhadap pendidikan dasar yang digalakkan pemerintah melalui Wajib Belajar tampaknya cukup berhasil menutup jurang kesenjangan partisipasi pendidikan jenjang dasar. Akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar telah mencapai level yang patut dibanggakan. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.10, pada jenjang pendidikan SD/ sederajat hampir tidak ada perbedaan dalam mengakses pendidikan, baik antar jenis kelamin, wilayah, maupun tingkat ekonomi keluarga. Namun, kesenjangan mulai terlihat pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa capaian APM perempuan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD/ sederajat lebih besar dibandingkan laki-laki (Gambar 3.10). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) dalam laporannya memberikan gambaran, pada umumnya perempuan lebih mampu bertahan bersekolah sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan yang sudah berada di sekolah sudah sangat terseleksi sehingga mampu bertahan dengan lebih baik di sekolah. Styawan (2018) menyebutkan rendahnya APM laki-laki pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan laki-laki cenderung meninggalkan bangku sekolah ketika menginjak umur yang cukup, untuk bekerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.10 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023

Kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah banyak tertuang dalam berbagai regulasi. Harapannya penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Namun dalam

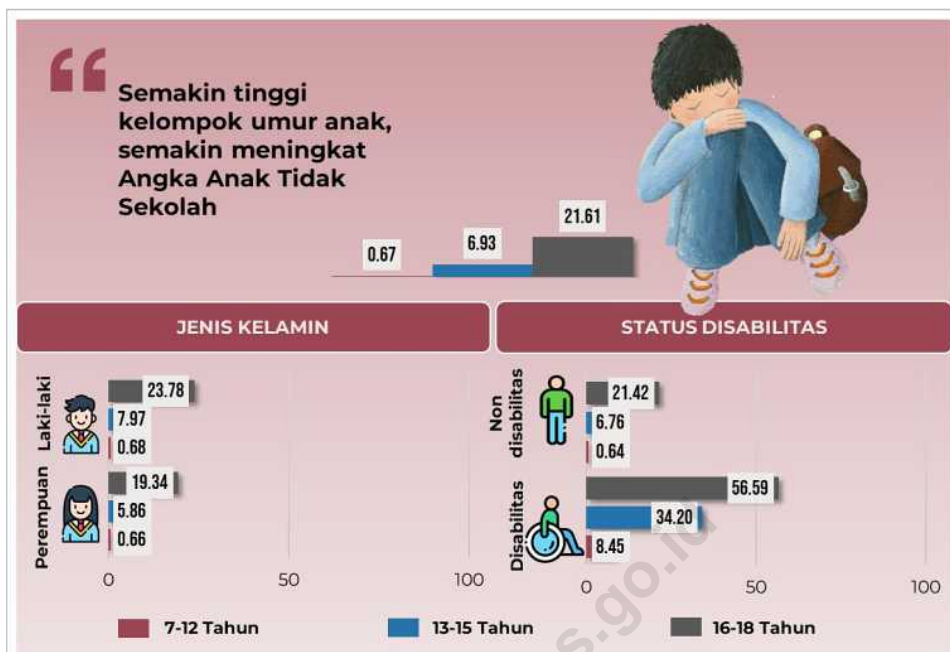
prakteknya masih terdapat kesenjangan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.10, kesenjangan partisipasi pendidikan antara penyandang disabilitas dan bukan disabilitas tampak terlihat pada semua jenjang pendidikan. APM kelompok bukan disabilitas pada semua jenjang pendidikan capaiannya lebih besar dibanding kelompok disabilitas. Secara umum, menurut Fitriyani, (2021) partisipasi penyandang disabilitas di ranah pendidikan masih rendah karena banyaknya hambatan yang dialami baik karena minimnya dukungan dari *support system* mereka, seperti teman, orang tua dan keluarga, juga karena infrastruktur (sarana dan prasarana), maupun suprastruktur (kebijakan) yang kurang tersedia.

3.5 Angka Anak Tidak Sekolah

Salah satu tantangan pembangunan pendidikan Indonesia terkait partisipasi sekolah adalah masih adanya anak yang tidak sekolah (ATS). Penanganan ATS telah menjadi Strategi Nasional dengan fokus pada kelompok umur 7-18 tahun. Kebijakan tersebut tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dimana penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dilakukan melalui program percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan semua anak usia sekolah yang tidak bersekolah dapat kembali bersekolah serta terjadinya pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya berpotensi menumbuhkan pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Gambar 3.11, terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur, semakin meningkat pula persentase anak tidak sekolah. Pola tersebut terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Begitu juga untuk penduduk bukan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas memiliki pola yang sama. Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada di kelompok umur 16-18 tahun, dimana dari 100 anak berumur 16-18 tahun, 22 di antaranya tidak bersekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 3.11 Angka Anak Tidak Sekolah menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Status Disabilitas, 2023

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki memiliki angka tidak sekolah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk semua kelompok umur. Sedangkan jika dilihat berdasarkan status disabilitas, penduduk penyandang disabilitas memiliki angka anak tidak sekolah yang lebih tinggi dibandingkan penduduk bukan penyandang disabilitas untuk semua kelompok umur. Bahkan, pada kelompok umur 16-18 tahun angkanya mencapai 56,59 persen.

Studi yang dilakukan oleh Tatang Muttaqin (2017) menemukan bahwa pada level rumah tangga, angka anak tidak sekolah secara signifikan dipengaruhi oleh pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pendidikan, dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga. Sedangkan pada level wilayah atau kota, angka anak tidak sekolah dapat diturunkan dengan meningkatkan anggaran belanja pendidikan. Partisipasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menurunkan angka anak tidak sekolah.

Tabel 3.1 Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut Karakteristik Demografi, 2023

Karakteristik	Indikator		
	APK PAUD 3-6 Tahun	APM PAUD 3-6 Tahun	Angka Kesiapan Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	36,36	35,93	76,54
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	36,44	36,05	75,99
Perempuan	36,27	35,81	77,12
Status Disabilitas			
Disabilitas	25,85	25,50	38,57
Nondisabilitas	36,42	35,99	76,66
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	33,84	33,43	71,20
Kuintil 2	36,25	35,91	74,83
Kuintil 3	35,82	35,34	77,63
Kuintil 4	36,56	36,10	78,57
Kuintil 5	41,01	40,57	83,72
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	36,83	36,45	79,28
Perdesaan	35,71	35,23	72,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) Maret 2023

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik Demografi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Karakteristik	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	5,57	23,54	70,89	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	4,92	23,58	71,50	100,00
Perempuan	6,22	23,50	70,28	100,00
Kelompok Umur				
5	98,80	1,20	0,00	100,00
6	65,45	34,55	0,00	100,00
7-12	0,70	99,16	0,14	100,00
13-15	0,41	96,10	3,49	100,00
16-18	0,61	73,42	25,96	100,00
19-23	0,84	28,96	70,20	100,00
24 ke atas	3,85	1,22	94,93	100,00
Status Disabilitas				
Disabilitas	16,70	4,41	78,90	100,00
Nondisabilitas	5,34	23,94	70,72	100,00
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	8,02	25,08	66,90	100,00
Kuintil 2	6,25	25,12	68,63	100,00
Kuintil 3	5,31	24,01	70,69	100,00
Kuintil 4	4,63	22,56	72,80	100,00
Kuintil 5	3,75	21,04	75,21	100,00
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	4,47	23,98	71,55	100,00
Perdesaan	7,12	22,92	69,96	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	99,16	96,10	73,42	28,96
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	99,11	95,24	71,90	26,79
Perempuan	99,21	96,99	75,01	31,20
Status Disabilitas				
Disabilitas	87,92	70,70	42,00	21,03
Nondisabilitas	99,20	96,26	73,60	29,01
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	98,77	93,70	65,45	18,58
Kuintil 2	99,25	95,88	72,06	22,40
Kuintil 3	99,19	96,52	75,27	25,50
Kuintil 4	99,37	97,46	75,66	30,55
Kuintil 5	99,37	97,65	79,27	45,01
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	99,46	97,18	75,91	33,84
Perdesaan	98,77	94,66	69,92	21,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Karakteristik	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	105,62	92,51	86,34	31,45
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	105,84	92,59	83,49	29,12
Perempuan	105,39	92,43	89,31	33,87
Status Disabilitas				
Disabilitas	98,34	64,04	57,14	18,34
Nondisabilitas	105,65	92,69	86,50	31,54
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	105,91	90,85	75,89	17,51
Kuintil 2	105,88	92,83	81,72	22,84
Kuintil 3	105,13	92,35	88,51	26,95
Kuintil 4	105,75	94,10	89,65	33,62
Kuintil 5	105,27	92,72	97,27	52,66
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	105,07	93,93	89,03	37,44
Perdesaan	106,34	90,61	82,56	22,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Karakteristik Demografi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Karakteristik	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	97,89	81,35	62,53	21,73
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	97,91	81,18	60,69	19,59
Perempuan	97,87	81,53	64,45	23,93
Status Disabilitas				
Disabilitas	87,38	57,34	34,12	14,10
Nondisabilitas	97,93	81,50	62,69	21,78
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	97,48	79,44	54,60	11,69
Kuintil 2	98,16	81,90	60,48	15,86
Kuintil 3	97,95	81,40	64,41	18,69
Kuintil 4	97,95	82,74	65,23	23,46
Kuintil 5	98,01	81,56	68,61	36,32
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	98,20	83,23	65,41	26,54
Perdesaan	97,49	78,84	58,49	14,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.6 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS/OOSC) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	0,67	6,93	21,61
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	0,68	7,97	23,78
Perempuan	0,66	5,86	19,34
Status Disabilitas			
Disabilitas	8,45	34,20	56,59
Nondisabilitas	0,64	6,76	21,42
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,32	5,82	18,50
Perdesaan	1,12	8,45	26,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.7 Persentase Penduduk 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Prasekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	27,07	25,92	25,87	26,76	26,31
Sumatera Utara	20,75	20,73	20,60	20,88	20,74
Sumatera Barat	23,03	21,40	21,99	22,39	22,19
Riau	20,02	22,13	20,26	22,38	21,29
Jambi	25,42	26,95	27,50	25,35	26,45
Sumatera Selatan	20,37	23,52	23,55	21,12	22,37
Bengkulu	23,30	20,86	21,22	22,09	21,65
Lampung	26,32	22,92	23,76	24,30	24,03
Kep. Bangka Belitung	25,80	24,43	26,01	24,35	25,21
Kep. Riau	19,80	28,84	18,14	23,30	20,66
DKI Jakarta	28,74	-	27,93	29,58	28,74
Jawa Barat	24,60	24,57	24,88	24,30	24,60
Jawa Tengah	36,04	33,64	34,40	35,43	34,91
DI Yogyakarta	40,90	53,21	45,55	41,90	43,80
Jawa Timur	39,34	35,67	37,69	37,84	37,76
Banten	24,46	17,84	22,10	23,73	22,90
Bali	23,71	17,68	21,51	22,73	22,12
Nusa Tenggara Barat	28,87	30,71	29,68	29,87	29,77
Nusa Tenggara Timur	24,61	27,24	26,53	26,74	26,63
Kalimantan Barat	15,98	17,56	18,13	15,84	17,00
Kalimantan Tengah	25,66	28,86	28,88	26,04	27,51
Kalimantan Selatan	30,45	33,24	31,04	32,72	31,87
Kalimantan Timur	20,41	24,88	20,64	23,04	21,82
Kalimantan Utara	21,37	24,30	22,17	22,64	22,41
Sulawesi Utara	22,94	28,33	25,71	25,32	25,52
Sulawesi Tengah	26,30	30,49	30,82	27,42	29,17
Sulawesi Selatan	23,14	23,77	23,75	23,19	23,48
Sulawesi Tenggara	25,75	26,41	25,83	26,51	26,17
Gorontalo	33,24	38,65	35,88	36,86	36,36
Sulawesi Barat	35,20	31,30	32,22	31,95	32,09
Maluku	20,56	27,76	24,44	25,39	24,90
Maluku Utara	23,33	30,36	27,67	29,26	28,47
Papua Barat	22,61	22,47	21,63	23,44	22,52
Papua	17,00	10,62	12,77	12,76	12,76
Indonesia	27,67	26,99	27,30	27,46	27,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	33,08	34,18	33,63
Sumatera Utara	24,13	25,28	24,72
Sumatera Barat	28,78	27,81	28,31
Riau	20,09	20,98	20,50
Jambi	35,55	27,07	31,68
Sumatera Selatan	23,48	19,17	21,43
Bengkulu	29,28	22,88	25,90
Lampung	34,57	39,70	37,10
Kep. Bangka Belitung	38,05	32,68	35,60
Kep. Riau	26,30	28,52	27,34
DKI Jakarta	39,81	35,37	37,52
Jawa Barat	33,44	33,62	33,52
Jawa Tengah	50,60	48,49	49,56
DI Yogyakarta	60,80	58,40	59,72
Jawa Timur	55,45	54,63	55,04
Banten	27,96	29,70	28,83
Bali	33,50	30,59	32,04
Nusa Tenggara Barat	45,54	42,25	43,92
Nusa Tenggara Timur	31,99	27,88	30,13
Kalimantan Barat	28,02	13,40	21,05
Kalimantan Tengah	34,32	33,27	33,81
Kalimantan Selatan	40,46	45,17	42,79
Kalimantan Timur	22,35	28,90	25,55
Kalimantan Utara	34,91	29,05	31,55
Sulawesi Utara	26,52	27,35	26,91
Sulawesi Tengah	36,89	28,88	33,06
Sulawesi Selatan	33,21	31,69	32,47
Sulawesi Tenggara	29,68	32,54	31,22
Gorontalo	48,47	43,70	45,86
Sulawesi Barat	50,57	52,63	51,53
Maluku	23,11	25,76	24,37
Maluku Utara	36,07	26,78	31,03
Papua Barat	26,07	24,01	25,05
Papua	19,09	17,51	18,32
Indonesia	37,20	36,45	36,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.9 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,70	32,71	31,71
Sumatera Utara	23,93	21,44	22,72
Sumatera Barat	27,41	30,97	29,20
Riau	23,34	27,49	25,36
Jambi	33,11	32,49	32,81
Sumatera Selatan	31,55	25,57	28,66
Bengkulu	26,92	30,08	28,37
Lampung	31,39	28,78	30,08
Kep. Bangka Belitung	25,21	31,59	28,54
Kep. Riau	31,81	34,60	33,45
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	35,40	35,09	35,25
Jawa Tengah	45,11	47,32	46,20
DI Yogyakarta	73,90	73,06	73,51
Jawa Timur	51,58	51,40	51,49
Banten	21,01	27,21	23,93
Bali	23,96	28,27	26,08
Nusa Tenggara Barat	41,61	45,66	43,62
Nusa Tenggara Timur	35,79	35,64	35,72
Kalimantan Barat	22,46	22,17	22,32
Kalimantan Tengah	36,90	36,19	36,57
Kalimantan Selatan	46,23	46,08	46,15
Kalimantan Timur	28,29	31,67	29,91
Kalimantan Utara	33,52	40,48	36,94
Sulawesi Utara	33,21	37,80	35,38
Sulawesi Tengah	39,84	37,55	38,75
Sulawesi Selatan	29,31	32,27	30,80
Sulawesi Tenggara	36,49	34,68	35,61
Gorontalo	50,26	58,32	53,94
Sulawesi Barat	41,28	47,61	44,29
Maluku	34,63	36,47	35,53
Maluku Utara	40,63	41,71	41,19
Papua Barat	23,78	28,31	26,04
Papua	9,37	9,42	9,39
Indonesia	35,40	36,03	35,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.10 Angka Partisipasi Kasar (APK) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,52	33,21	32,36
Sumatera Utara	24,03	23,53	23,78
Sumatera Barat	28,10	29,41	28,75
Riau	21,97	24,92	23,37
Jambi	33,93	30,74	32,44
Sumatera Selatan	28,55	23,23	25,99
Bengkulu	27,63	27,47	27,55
Lampung	32,46	32,38	32,42
Kep. Bangka Belitung	32,90	32,17	32,55
Kep. Riau	26,74	29,27	27,95
DKI Jakarta	39,81	35,37	37,52
Jawa Barat	33,81	33,90	33,85
Jawa Tengah	48,02	47,94	47,98
DI Yogyakarta	63,91	62,04	63,06
Jawa Timur	53,82	53,26	53,54
Banten	26,33	29,16	27,72
Bali	31,05	30,01	30,53
Nusa Tenggara Barat	43,58	43,95	43,77
Nusa Tenggara Timur	34,83	33,89	34,38
Kalimantan Barat	24,47	19,12	21,87
Kalimantan Tengah	35,85	34,92	35,41
Kalimantan Selatan	43,38	45,63	44,49
Kalimantan Timur	24,24	29,76	26,92
Kalimantan Utara	34,36	32,71	33,46
Sulawesi Utara	29,71	32,40	30,98
Sulawesi Tengah	38,91	34,80	36,95
Sulawesi Selatan	31,16	32,01	31,58
Sulawesi Tenggara	34,09	33,82	33,95
Gorontalo	49,58	51,46	50,51
Sulawesi Barat	43,25	48,64	45,80
Maluku	30,01	32,32	31,13
Maluku Utara	39,43	37,42	38,38
Papua Barat	24,67	26,66	25,66
Papua	12,16	11,72	11,94
Indonesia	36,44	36,27	36,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,77	33,70	33,23
Sumatera Utara	24,13	25,11	24,63
Sumatera Barat	28,51	27,66	28,10
Riau	20,09	20,98	20,50
Jambi	35,55	27,07	31,68
Sumatera Selatan	22,79	19,17	21,07
Bengkulu	29,28	22,07	25,46
Lampung	33,86	38,36	36,08
Kep. Bangka Belitung	38,05	32,68	35,60
Kep. Riau	26,30	28,44	27,30
DKI Jakarta	39,56	35,37	37,40
Jawa Barat	33,18	32,90	33,05
Jawa Tengah	49,74	48,18	48,97
DI Yogyakarta	59,71	56,51	58,27
Jawa Timur	54,96	54,03	54,50
Banten	27,96	29,39	28,67
Bali	33,50	30,37	31,93
Nusa Tenggara Barat	44,83	41,81	43,34
Nusa Tenggara Timur	31,99	27,88	30,13
Kalimantan Barat	27,67	13,40	20,87
Kalimantan Tengah	34,32	33,27	33,81
Kalimantan Selatan	40,46	44,34	42,38
Kalimantan Timur	22,04	28,77	25,33
Kalimantan Utara	34,91	29,05	31,55
Sulawesi Utara	26,52	27,35	26,91
Sulawesi Tengah	36,89	28,88	33,06
Sulawesi Selatan	33,07	31,69	32,41
Sulawesi Tenggara	29,21	32,54	31,01
Gorontalo	47,39	43,47	45,24
Sulawesi Barat	49,80	52,60	51,10
Maluku	23,10	24,11	23,58
Maluku Utara	35,82	26,78	30,91
Papua Barat	25,69	23,60	24,66
Papua	19,09	15,79	17,48
Indonesia	36,87	36,01	36,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,48	32,14	31,31
Sumatera Utara	23,59	20,91	22,29
Sumatera Barat	27,35	30,72	29,05
Riau	23,34	26,68	24,96
Jambi	32,99	32,31	32,67
Sumatera Selatan	31,22	25,20	28,30
Bengkulu	26,75	30,05	28,26
Lampung	31,39	28,78	30,08
Kep. Bangka Belitung	24,36	31,59	28,14
Kep. Riau	31,43	34,22	33,08
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	35,18	34,88	35,04
Jawa Tengah	44,82	47,27	46,03
DI Yogyakarta	69,35	68,31	68,87
Jawa Timur	50,44	50,52	50,48
Banten	20,64	27,04	23,65
Bali	23,96	27,41	25,65
Nusa Tenggara Barat	41,03	45,09	43,04
Nusa Tenggara Timur	34,38	34,44	34,41
Kalimantan Barat	22,43	21,70	22,07
Kalimantan Tengah	36,16	36,05	36,11
Kalimantan Selatan	45,07	45,64	45,35
Kalimantan Timur	28,29	31,61	29,88
Kalimantan Utara	33,46	40,10	36,72
Sulawesi Utara	33,21	37,21	35,10
Sulawesi Tengah	39,09	37,06	38,12
Sulawesi Selatan	29,10	32,14	30,63
Sulawesi Tenggara	36,17	33,86	35,05
Gorontalo	48,92	53,30	50,92
Sulawesi Barat	40,62	47,03	43,67
Maluku	33,60	35,09	34,33
Maluku Utara	40,16	41,31	40,76
Papua Barat	23,24	27,93	25,59
Papua	9,32	9,35	9,33
Indonesia	34,92	35,55	35,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.13 Angka Partisipasi Murni (APM) 3-6 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,27	32,67	31,97
Sumatera Utara	23,87	23,19	23,53
Sumatera Barat	27,94	29,21	28,57
Riau	21,97	24,43	23,14
Jambi	33,86	30,61	32,34
Sumatera Selatan	28,08	23,00	25,64
Bengkulu	27,51	27,15	27,34
Lampung	32,22	31,94	32,08
Kep. Bangka Belitung	32,55	32,17	32,37
Kep. Riau	26,71	29,15	27,88
DKI Jakarta	39,56	35,37	37,40
Jawa Barat	33,55	33,29	33,43
Jawa Tengah	47,42	47,75	47,59
DI Yogyakarta	62,00	59,44	60,84
Jawa Timur	53,05	52,54	52,80
Banten	26,24	28,88	27,53
Bali	31,05	29,63	30,34
Nusa Tenggara Barat	42,94	43,45	43,19
Nusa Tenggara Timur	33,78	32,96	33,39
Kalimantan Barat	24,33	18,81	21,64
Kalimantan Tengah	35,41	34,84	35,14
Kalimantan Selatan	42,79	44,99	43,88
Kalimantan Timur	24,03	29,65	26,76
Kalimantan Utara	34,33	32,59	33,39
Sulawesi Utara	29,71	32,11	30,84
Sulawesi Tengah	38,39	34,46	36,52
Sulawesi Selatan	30,99	31,94	31,46
Sulawesi Tenggara	33,72	33,33	33,52
Gorontalo	48,34	48,69	48,51
Sulawesi Barat	42,57	48,18	45,22
Maluku	29,38	30,84	30,09
Maluku Utara	39,02	37,14	38,04
Papua Barat	24,20	26,27	25,23
Papua	12,12	11,18	11,66
Indonesia	36,05	35,81	35,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.14 Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi, Klasifikasi Desa, dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		Jenis Kelamin		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	81,37	73,38	75,68	76,47	76,08
Sumatera Utara	71,45	62,68	67,14	66,88	67,01
Sumatera Barat	75,71	77,47	77,56	75,41	76,59
Riau	73,09	77,71	74,90	76,77	75,79
Jambi	70,56	70,79	68,95	72,67	70,71
Sumatera Selatan	63,67	64,41	65,16	63,05	64,12
Bengkulu	83,00	74,41	78,60	76,86	77,72
Lampung	85,20	84,94	84,87	85,18	85,03
Kep. Bangka Belitung	82,32	88,85	84,02	87,18	85,45
Kep. Riau	85,43	63,17	81,52	83,38	82,57
DKI Jakarta	83,93	-	80,92	86,97	83,93
Jawa Barat	76,56	67,79	74,29	75,38	74,84
Jawa Tengah	89,52	90,70	89,70	90,43	90,08
DI Yogyakarta	100,00	99,28	99,66	100,00	99,82
Jawa Timur	92,23	90,80	91,57	91,65	91,61
Banten	70,49	44,74	67,24	61,02	64,52
Bali	86,01	70,72	77,70	85,67	82,12
Nusa Tenggara Barat	72,62	63,80	68,55	67,21	67,88
Nusa Tenggara	55,09	54,43	51,16	58,10	54,59
Kalimantan Barat	39,90	36,73	32,81	42,63	37,87
Kalimantan Tengah	84,70	77,84	72,98	89,64	80,79
Kalimantan Selatan	92,19	90,16	90,36	91,89	91,10
Kalimantan Timur	78,13	85,08	85,16	73,95	80,42
Kalimantan Utara	82,46	64,99	75,95	74,46	75,30
Sulawesi Utara	83,79	78,21	80,55	82,22	81,35
Sulawesi Tengah	73,47	81,43	77,45	80,61	78,93
Sulawesi Selatan	68,54	67,24	64,80	71,64	67,80
Sulawesi Tenggara	83,15	75,67	79,81	76,81	78,47
Gorontalo	91,18	91,16	95,57	86,92	91,17
Sulawesi Barat	74,65	67,05	74,65	62,50	68,51
Maluku	57,76	54,04	58,45	51,39	55,36
Maluku Utara	48,84	51,14	55,00	47,18	50,63
Papua Barat	66,46	42,31	50,38	51,12	50,72
Papua	56,08	26,84	33,46	39,77	36,42
Indonesia	79,28	72,99	75,99	77,12	76,54

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.15 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,53	30,42	66,05	100,00
Sumatera Utara	3,27	27,54	69,19	100,00
Sumatera Barat	3,81	29,40	66,79	100,00
Riau	3,80	29,37	66,83	100,00
Jambi	4,20	27,68	68,11	100,00
Sumatera Selatan	3,14	26,70	70,16	100,00
Bengkulu	2,92	28,29	68,79	100,00
Lampung	3,97	24,89	71,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	3,84	24,06	72,10	100,00
Kep. Riau	3,67	25,43	70,90	100,00
DKI Jakarta	3,68	21,67	74,66	100,00
Jawa Barat	4,25	23,30	72,45	100,00
Jawa Tengah	5,08	22,01	72,91	100,00
DI Yogyakarta	4,27	24,66	71,07	100,00
Jawa Timur	5,19	20,85	73,96	100,00
Banten	4,50	24,42	71,07	100,00
Bali	6,07	22,42	71,51	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,94	25,96	66,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,69	31,04	65,28	100,00
Kalimantan Barat	4,95	25,72	69,33	100,00
Kalimantan Tengah	3,79	25,29	70,92	100,00
Kalimantan Selatan	4,01	24,58	71,41	100,00
Kalimantan Timur	4,19	26,44	69,36	100,00
Kalimantan Utara	5,15	26,40	68,45	100,00
Sulawesi Utara	2,66	22,96	74,38	100,00
Sulawesi Tengah	4,76	28,12	67,12	100,00
Sulawesi Selatan	4,66	26,18	69,15	100,00
Sulawesi Tenggara	5,19	31,08	63,72	100,00
Gorontalo	5,02	26,26	68,72	100,00
Sulawesi Barat	6,28	27,36	66,36	100,00
Maluku	2,66	31,35	66,00	100,00
Maluku Utara	3,25	29,31	67,44	100,00
Papua Barat	3,99	29,28	66,73	100,00
Papua	8,36	26,10	65,54	100,00
Indonesia	4,47	23,98	71,55	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.16 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,09	28,10	67,81	100,00
Sumatera Utara	4,95	28,68	66,37	100,00
Sumatera Barat	4,49	26,85	68,66	100,00
Riau	5,41	27,07	67,52	100,00
Jambi	5,41	23,00	71,58	100,00
Sumatera Selatan	4,38	24,00	71,62	100,00
Bengkulu	5,19	23,52	71,29	100,00
Lampung	4,61	22,70	72,70	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,47	22,79	71,74	100,00
Kep. Riau	7,39	24,65	67,96	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	4,98	20,88	74,14	100,00
Jawa Tengah	6,51	20,17	73,32	100,00
DI Yogyakarta	8,06	18,33	73,61	100,00
Jawa Timur	8,76	18,97	72,27	100,00
Banten	6,91	23,51	69,58	100,00
Bali	10,39	20,71	68,90	100,00
Nusa Tenggara Barat	10,02	25,16	64,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,69	27,78	65,53	100,00
Kalimantan Barat	8,18	23,63	68,19	100,00
Kalimantan Tengah	4,28	23,23	72,48	100,00
Kalimantan Selatan	4,59	23,49	71,92	100,00
Kalimantan Timur	5,31	23,87	70,82	100,00
Kalimantan Utara	8,33	25,95	65,72	100,00
Sulawesi Utara	3,46	21,05	75,49	100,00
Sulawesi Tengah	5,63	24,42	69,95	100,00
Sulawesi Selatan	8,58	22,82	68,60	100,00
Sulawesi Tenggara	6,82	27,48	65,69	100,00
Gorontalo	6,36	22,68	70,97	100,00
Sulawesi Barat	8,97	25,40	65,63	100,00
Maluku	4,43	29,37	66,20	100,00
Maluku Utara	4,79	27,87	67,34	100,00
Papua Barat	8,90	29,54	61,56	100,00
Papua	39,41	21,19	39,40	100,00
Indonesia	7,12	22,92	69,96	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.17 Persentase Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,65	28,86	67,50	100,00
Sumatera Utara	3,79	28,41	67,80	100,00
Sumatera Barat	4,16	28,18	67,67	100,00
Riau	4,71	27,36	67,92	100,00
Jambi	4,45	24,11	71,44	100,00
Sumatera Selatan	3,76	24,49	71,75	100,00
Bengkulu	4,04	24,33	71,63	100,00
Lampung	3,90	22,90	73,20	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,31	23,46	72,24	100,00
Kep. Riau	3,96	25,00	71,04	100,00
DKI Jakarta	3,65	21,69	74,66	100,00
Jawa Barat	4,18	22,70	73,12	100,00
Jawa Tengah	4,66	21,48	73,86	100,00
DI Yogyakarta	4,29	23,62	72,10	100,00
Jawa Timur	5,38	20,29	74,32	100,00
Banten	4,25	24,31	71,44	100,00
Bali	5,22	22,52	72,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,30	26,30	66,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,47	28,91	65,62	100,00
Kalimantan Barat	5,69	23,86	70,45	100,00
Kalimantan Tengah	3,91	23,23	72,86	100,00
Kalimantan Selatan	4,28	23,92	71,80	100,00
Kalimantan Timur	3,97	25,53	70,49	100,00
Kalimantan Utara	6,30	24,80	68,89	100,00
Sulawesi Utara	3,06	21,56	75,38	100,00
Sulawesi Tengah	4,98	24,75	70,27	100,00
Sulawesi Selatan	6,24	25,07	68,68	100,00
Sulawesi Tenggara	5,57	29,09	65,35	100,00
Gorontalo	5,83	23,50	70,67	100,00
Sulawesi Barat	8,17	25,03	66,79	100,00
Maluku	3,69	30,14	66,17	100,00
Maluku Utara	4,15	28,23	67,62	100,00
Papua Barat	6,17	28,95	64,88	100,00
Papua	28,04	22,51	49,44	100,00
Indonesia	4,92	23,58	71,50	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.18 Persentase Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,14	28,95	66,91	100,00
Sumatera Utara	4,20	27,65	68,15	100,00
Sumatera Barat	4,14	28,09	67,77	100,00
Riau	4,81	28,64	66,54	100,00
Jambi	5,59	25,02	69,39	100,00
Sumatera Selatan	4,05	25,57	70,38	100,00
Bengkulu	4,83	25,94	69,23	100,00
Lampung	4,90	23,98	71,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,76	23,59	71,65	100,00
Kep. Riau	4,26	25,69	70,05	100,00
DKI Jakarta	3,70	21,64	74,65	100,00
Jawa Barat	4,63	22,90	72,47	100,00
Jawa Tengah	6,83	20,81	72,36	100,00
DI Yogyakarta	6,14	22,54	71,32	100,00
Jawa Timur	8,09	19,76	72,15	100,00
Banten	5,84	24,13	70,03	100,00
Bali	9,35	21,36	69,28	100,00
Nusa Tenggara Barat	10,54	24,87	64,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,31	28,38	65,31	100,00
Kalimantan Barat	8,29	24,98	66,74	100,00
Kalimantan Tengah	4,24	25,06	70,70	100,00
Kalimantan Selatan	4,32	24,14	71,53	100,00
Kalimantan Timur	5,13	25,77	69,10	100,00
Kalimantan Utara	6,27	27,80	65,93	100,00
Sulawesi Utara	2,98	22,66	74,35	100,00
Sulawesi Tengah	5,72	26,53	67,75	100,00
Sulawesi Selatan	7,25	23,74	69,02	100,00
Sulawesi Tenggara	6,81	28,66	64,53	100,00
Gorontalo	5,69	25,06	69,26	100,00
Sulawesi Barat	8,68	26,56	64,76	100,00
Maluku	3,64	30,31	66,05	100,00
Maluku Utara	4,54	28,35	67,11	100,00
Papua Barat	7,58	29,95	62,46	100,00
Papua	33,08	22,71	44,22	100,00
Indonesia	6,22	23,50	70,28	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.19 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2023

Provinsi	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,89	28,91	67,20	100,00
Sumatera Utara	3,99	28,03	67,98	100,00
Sumatera Barat	4,15	28,13	67,72	100,00
Riau	4,76	27,99	67,25	100,00
Jambi	5,01	24,56	70,43	100,00
Sumatera Selatan	3,91	25,02	71,07	100,00
Bengkulu	4,43	25,12	70,45	100,00
Lampung	4,39	23,43	72,18	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,53	23,52	71,95	100,00
Kep. Riau	4,11	25,34	70,55	100,00
DKI Jakarta	3,68	21,67	74,66	100,00
Jawa Barat	4,40	22,80	72,80	100,00
Jawa Tengah	5,75	21,14	73,10	100,00
DI Yogyakarta	5,22	23,07	71,71	100,00
Jawa Timur	6,76	20,02	73,22	100,00
Banten	5,04	24,22	70,74	100,00
Bali	7,28	21,94	70,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,95	25,57	65,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,90	28,64	65,46	100,00
Kalimantan Barat	6,97	24,41	68,62	100,00
Kalimantan Tengah	4,07	24,12	71,81	100,00
Kalimantan Selatan	4,30	24,03	71,67	100,00
Kalimantan Timur	4,54	25,65	69,82	100,00
Kalimantan Utara	6,29	26,24	67,47	100,00
Sulawesi Utara	3,02	22,10	74,87	100,00
Sulawesi Tengah	5,35	25,63	69,03	100,00
Sulawesi Selatan	6,76	24,39	68,86	100,00
Sulawesi Tenggara	6,19	28,87	64,93	100,00
Gorontalo	5,76	24,28	69,96	100,00
Sulawesi Barat	8,43	25,79	65,78	100,00
Maluku	3,66	30,22	66,11	100,00
Maluku Utara	4,34	28,29	67,37	100,00
Papua Barat	6,85	29,44	63,71	100,00
Papua	30,44	22,61	46,95	100,00
Indonesia	5,57	23,54	70,89	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.20 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,76	99,01	88,86	43,27
Sumatera Utara	99,62	96,96	80,70	35,01
Sumatera Barat	99,73	96,35	88,64	50,05
Riau	99,66	97,77	84,28	43,44
Jambi	99,73	95,67	78,87	37,90
Sumatera Selatan	99,44	98,00	76,65	33,87
Bengkulu	99,15	97,96	82,41	52,11
Lampung	99,70	97,22	72,83	33,40
Kep. Bangka Belitung	99,32	93,82	72,94	21,53
Kep. Riau	99,21	99,61	85,74	23,01
DKI Jakarta	99,49	98,17	72,50	28,43
Jawa Barat	99,45	96,44	70,53	28,58
Jawa Tengah	99,70	97,75	73,36	32,03
DI Yogyakarta	99,74	99,28	93,56	60,08
Jawa Timur	99,26	98,36	77,79	34,79
Banten	99,41	97,41	71,96	27,94
Bali	99,60	98,07	86,00	37,36
Nusa Tenggara Barat	99,61	98,02	83,68	33,43
Nusa Tenggara Timur	99,65	97,38	79,91	48,17
Kalimantan Barat	98,57	94,81	73,13	36,12
Kalimantan Tengah	99,06	96,29	70,51	31,38
Kalimantan Selatan	99,60	94,00	71,43	36,03
Kalimantan Timur	99,66	98,66	83,88	40,33
Kalimantan Utara	99,38	97,49	75,67	34,18
Sulawesi Utara	99,44	97,20	76,52	29,54
Sulawesi Tengah	98,46	94,10	84,92	46,08
Sulawesi Selatan	99,48	94,54	74,73	46,92
Sulawesi Tenggara	99,08	96,02	79,19	45,73
Gorontalo	99,91	97,04	75,36	47,26
Sulawesi Barat	97,16	89,00	74,73	34,11
Maluku	99,68	99,24	82,56	52,48
Maluku Utara	99,21	98,18	84,93	45,61
Papua Barat	99,31	97,61	81,95	45,08
Papua	97,35	93,85	82,04	42,56
Indonesia	99,46	97,18	75,91	33,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,26	97,06	80,46	30,76
Sumatera Utara	99,39	96,52	77,40	24,98
Sumatera Barat	99,80	97,26	79,58	32,53
Riau	99,65	94,72	73,43	24,22
Jambi	99,36	96,20	68,91	19,92
Sumatera Selatan	99,40	93,71	68,52	13,21
Bengkulu	99,55	97,89	77,88	23,23
Lampung	99,57	95,30	71,13	18,01
Kep. Bangka Belitung	99,78	92,26	64,90	16,52
Kep. Riau	99,87	95,46	78,83	17,37
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	99,23	93,00	60,73	16,74
Jawa Tengah	99,42	96,28	68,14	19,69
DI Yogyakarta	99,33	97,71	81,54	32,64
Jawa Timur	99,30	96,71	69,25	19,85
Banten	99,51	94,29	61,24	13,35
Bali	99,64	97,69	81,23	25,20
Nusa Tenggara Barat	99,31	97,89	70,79	22,22
Nusa Tenggara Timur	98,29	94,01	74,32	26,22
Kalimantan Barat	98,95	91,68	66,89	22,08
Kalimantan Tengah	99,18	94,37	63,06	20,70
Kalimantan Selatan	99,01	94,24	68,46	21,53
Kalimantan Timur	99,60	98,82	75,40	21,47
Kalimantan Utara	98,94	96,03	79,42	22,94
Sulawesi Utara	99,23	92,20	71,85	20,37
Sulawesi Tengah	98,28	92,70	71,33	21,41
Sulawesi Selatan	99,49	92,06	67,23	27,91
Sulawesi Tenggara	99,26	94,33	71,52	23,60
Gorontalo	97,70	87,66	68,44	25,94
Sulawesi Barat	98,61	89,57	70,59	23,15
Maluku	99,53	97,04	77,62	28,08
Maluku Utara	99,09	97,27	75,64	24,93
Papua Barat	97,83	97,28	79,63	28,51
Papua	78,75	76,43	57,48	19,54
Indonesia	98,77	94,66	69,92	21,29

Keterangan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.22 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-laki menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,54	96,86	83,08	31,65
Sumatera Utara	99,48	96,29	77,99	27,89
Sumatera Barat	99,80	96,21	80,09	38,96
Riau	99,74	95,35	75,51	29,51
Jambi	99,36	95,66	67,81	22,94
Sumatera Selatan	99,28	94,01	69,62	19,97
Bengkulu	99,25	97,83	72,43	30,88
Lampung	99,59	95,42	69,81	20,70
Kep. Bangka Belitung	99,72	90,84	69,72	19,88
Kep. Riau	99,08	98,51	83,60	19,26
DKI Jakarta	99,42	98,40	70,18	27,74
Jawa Barat	99,34	94,70	67,27	24,74
Jawa Tengah	99,42	95,94	70,46	25,16
DI Yogyakarta	99,57	99,04	88,73	56,30
Jawa Timur	99,27	96,87	73,02	25,22
Banten	99,58	96,54	67,87	22,87
Bali	99,40	97,64	85,38	33,39
Nusa Tenggara Barat	99,39	97,53	74,44	30,91
Nusa Tenggara Timur	98,36	93,31	75,24	31,61
Kalimantan Barat	99,01	91,75	66,92	23,93
Kalimantan Tengah	99,21	92,97	65,24	23,38
Kalimantan Selatan	99,35	93,40	69,59	26,70
Kalimantan Timur	99,57	98,18	80,03	31,15
Kalimantan Utara	99,23	97,89	72,86	23,32
Sulawesi Utara	99,37	92,88	73,70	21,84
Sulawesi Tengah	98,07	90,24	73,48	26,76
Sulawesi Selatan	99,33	91,35	70,58	35,65
Sulawesi Tenggara	99,14	93,95	71,45	30,00
Gorontalo	98,80	86,89	65,86	31,53
Sulawesi Barat	98,19	88,20	64,41	21,02
Maluku	99,52	97,91	79,79	34,67
Maluku Utara	99,14	97,65	77,57	29,20
Papua Barat	98,22	97,70	76,50	35,03
Papua	84,03	79,93	64,73	26,00
Indonesia	99,11	95,24	71,90	26,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.23 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,33	98,61	83,74	38,85
Sumatera Utara	99,54	97,27	80,55	34,54
Sumatera Barat	99,72	97,40	88,53	45,70
Riau	99,57	96,42	80,93	35,35
Jambi	99,62	96,39	77,31	28,72
Sumatera Selatan	99,56	96,47	73,93	23,11
Bengkulu	99,59	98,00	86,65	37,45
Lampung	99,64	96,42	73,71	26,47
Kep. Bangka Belitung	99,30	95,66	69,32	18,87
Kep. Riau	99,50	99,75	86,46	25,75
DKI Jakarta	99,57	97,94	74,75	29,06
Jawa Barat	99,47	96,82	70,03	28,16
Jawa Tengah	99,73	98,28	71,31	27,94
DI Yogyakarta	99,70	98,71	93,63	55,29
Jawa Timur	99,29	98,44	75,13	31,94
Banten	99,29	96,78	71,31	27,06
Bali	99,84	98,30	84,03	35,30
Nusa Tenggara Barat	99,53	98,40	80,38	25,94
Nusa Tenggara Timur	98,88	96,51	76,61	34,59
Kalimantan Barat	98,61	94,14	71,72	30,91
Kalimantan Tengah	99,05	97,55	67,40	27,83
Kalimantan Selatan	99,25	94,90	70,31	31,57
Kalimantan Timur	99,73	99,31	83,06	38,83
Kalimantan Utara	99,20	96,08	81,26	39,29
Sulawesi Utara	99,31	97,09	75,53	30,02
Sulawesi Tengah	98,62	96,01	79,04	33,96
Sulawesi Selatan	99,65	95,01	71,44	40,15
Sulawesi Tenggara	99,26	96,07	77,97	37,08
Gorontalo	98,58	96,72	77,36	39,83
Sulawesi Barat	98,44	90,65	79,62	29,72
Maluku	99,66	98,04	80,01	46,32
Maluku Utara	99,11	97,36	79,19	35,40
Papua Barat	98,61	97,10	84,76	36,50
Papua	83,16	81,99	63,52	26,12
Indonesia	99,21	96,99	75,01	31,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.24 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur			
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-23 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,43	97,72	83,41	35,24
Sumatera Utara	99,51	96,76	79,25	31,08
Sumatera Barat	99,76	96,79	84,33	42,19
Riau	99,65	95,89	78,15	32,32
Jambi	99,49	96,01	72,46	25,79
Sumatera Selatan	99,41	95,27	71,71	21,49
Bengkulu	99,42	97,91	79,57	34,05
Lampung	99,61	95,93	71,74	23,51
Kep. Bangka Belitung	99,51	93,20	69,53	19,38
Kep. Riau	99,29	99,07	84,97	22,43
DKI Jakarta	99,49	98,17	72,50	28,43
Jawa Barat	99,40	95,75	68,58	26,45
Jawa Tengah	99,57	97,08	70,87	26,52
DI Yogyakarta	99,63	98,88	91,17	55,80
Jawa Timur	99,28	97,64	74,07	28,59
Banten	99,43	96,65	69,64	24,85
Bali	99,61	97,95	84,73	34,31
Nusa Tenggara Barat	99,46	97,95	77,46	28,45
Nusa Tenggara Timur	98,62	94,89	75,93	33,03
Kalimantan Barat	98,81	92,92	69,25	27,42
Kalimantan Tengah	99,13	95,21	66,32	25,49
Kalimantan Selatan	99,30	94,12	69,95	29,09
Kalimantan Timur	99,64	98,71	81,50	34,75
Kalimantan Utara	99,22	96,96	77,03	30,83
Sulawesi Utara	99,34	95,00	74,55	25,88
Sulawesi Tengah	98,34	93,13	76,29	30,31
Sulawesi Selatan	99,49	93,22	71,00	37,89
Sulawesi Tenggara	99,20	95,00	74,60	33,59
Gorontalo	98,69	91,85	71,70	35,50
Sulawesi Barat	98,31	89,47	71,57	25,42
Maluku	99,59	97,97	79,90	40,27
Maluku Utara	99,12	97,51	78,38	32,19
Papua Barat	98,41	97,42	80,58	35,74
Papua	83,61	80,91	64,15	26,06
Indonesia	99,16	96,10	73,42	28,96

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,04	97,06	99,25	56,72
Sumatera Utara	105,29	91,63	100,70	37,03
Sumatera Barat	108,38	91,55	97,24	52,56
Riau	104,39	98,15	91,21	47,89
Jambi	106,55	83,48	98,88	48,75
Sumatera Selatan	111,43	90,91	87,95	44,41
Bengkulu	106,42	95,68	101,81	57,23
Lampung	103,61	90,98	95,61	31,72
Kep. Bangka Belitung	103,38	88,78	95,71	20,55
Kep. Riau	106,13	92,16	91,89	30,09
DKI Jakarta	103,63	95,78	77,40	40,05
Jawa Barat	104,19	95,88	81,58	27,99
Jawa Tengah	105,15	92,84	93,15	30,94
DI Yogyakarta	105,18	95,48	90,35	80,10
Jawa Timur	103,75	94,00	93,95	38,24
Banten	106,26	97,63	77,62	36,30
Bali	103,05	97,07	95,42	40,14
Nusa Tenggara Barat	107,53	95,22	94,09	38,60
Nusa Tenggara Timur	111,24	89,64	101,63	52,00
Kalimantan Barat	107,65	88,16	94,39	35,50
Kalimantan Tengah	104,93	91,18	90,48	35,00
Kalimantan Selatan	106,11	84,85	81,23	37,12
Kalimantan Timur	106,46	92,53	93,72	48,79
Kalimantan Utara	100,86	96,53	101,84	30,50
Sulawesi Utara	104,63	93,45	86,55	40,87
Sulawesi Tengah	100,06	96,72	98,69	59,54
Sulawesi Selatan	105,55	89,27	91,70	53,75
Sulawesi Tenggara	108,20	83,56	97,41	61,43
Gorontalo	108,39	84,03	90,33	51,44
Sulawesi Barat	100,79	95,62	87,40	42,70
Maluku	108,47	90,87	103,62	60,55
Maluku Utara	106,20	92,19	101,28	57,76
Papua Barat	103,03	94,96	106,39	44,06
Papua	105,53	98,15	98,12	36,60
Indonesia	105,07	93,93	89,03	37,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.26 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,71	94,72	90,85	36,12
Sumatera Utara	108,67	92,70	94,59	25,92
Sumatera Barat	107,71	93,87	86,25	31,82
Riau	105,95	89,68	80,42	26,96
Jambi	109,22	90,89	77,67	23,53
Sumatera Selatan	109,98	89,14	78,59	15,78
Bengkulu	108,27	91,72	90,20	26,48
Lampung	106,14	91,29	85,47	16,40
Kep. Bangka Belitung	109,88	88,10	78,22	15,08
Kep. Riau	104,79	95,43	80,15	14,75
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	105,83	89,92	69,01	14,60
Jawa Tengah	104,86	92,75	82,04	17,15
DI Yogyakarta	102,59	90,76	92,72	41,42
Jawa Timur	103,64	95,71	83,18	22,79
Banten	109,17	89,75	65,62	17,42
Bali	101,78	100,72	87,84	25,47
Nusa Tenggara Barat	106,59	91,52	92,30	25,97
Nusa Tenggara Timur	111,38	90,67	83,43	23,95
Kalimantan Barat	110,52	82,10	84,95	19,75
Kalimantan Tengah	108,53	85,66	81,87	20,42
Kalimantan Selatan	108,67	88,00	83,20	18,28
Kalimantan Timur	106,46	91,77	98,83	23,16
Kalimantan Utara	102,62	99,46	90,61	18,98
Sulawesi Utara	106,30	85,89	85,33	27,20
Sulawesi Tengah	103,81	91,39	82,94	28,52
Sulawesi Selatan	107,56	85,28	84,34	29,04
Sulawesi Tenggara	108,25	86,42	85,55	30,23
Gorontalo	109,05	76,12	88,03	23,87
Sulawesi Barat	105,10	82,60	89,73	27,00
Maluku	109,16	89,96	89,39	36,55
Maluku Utara	108,39	86,77	93,29	35,06
Papua Barat	113,18	89,01	90,17	26,00
Papua	86,00	76,30	64,86	13,44
Indonesia	106,34	90,61	82,56	22,04

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.27 Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,98	95,24	92,30	39,18
Sumatera Utara	106,56	92,82	97,40	28,08
Sumatera Barat	109,46	91,74	89,20	38,67
Riau	106,14	94,02	79,85	32,49
Jambi	108,09	89,10	78,06	29,17
Sumatera Selatan	110,95	89,23	79,97	22,64
Bengkulu	107,09	90,41	88,88	34,72
Lampung	104,86	91,08	87,73	19,21
Kep. Bangka Belitung	107,70	86,15	90,41	17,05
Kep. Riau	105,77	89,82	87,40	24,77
DKI Jakarta	104,18	97,03	72,24	39,39
Jawa Barat	104,06	95,89	74,85	25,17
Jawa Tengah	105,15	93,90	84,83	22,74
DI Yogyakarta	104,01	98,64	89,01	74,31
Jawa Timur	104,41	94,56	86,50	29,00
Banten	108,97	91,82	76,32	28,23
Bali	101,90	98,56	91,23	36,79
Nusa Tenggara Barat	106,36	92,74	92,38	36,46
Nusa Tenggara Timur	112,40	87,61	86,94	30,27
Kalimantan Barat	110,23	82,61	84,79	20,57
Kalimantan Tengah	108,67	85,71	86,73	22,34
Kalimantan Selatan	108,28	84,96	80,73	24,85
Kalimantan Timur	106,44	94,21	93,90	37,18
Kalimantan Utara	101,85	98,87	89,42	20,66
Sulawesi Utara	104,69	96,72	79,56	28,94
Sulawesi Tengah	102,18	91,76	83,70	34,31
Sulawesi Selatan	107,22	86,68	85,23	41,41
Sulawesi Tenggara	107,94	88,16	81,40	41,13
Gorontalo	108,45	75,03	85,20	31,45
Sulawesi Barat	104,14	84,73	80,84	26,00
Maluku	109,87	90,01	96,31	42,92
Maluku Utara	106,35	88,46	94,34	40,36
Papua Barat	108,87	89,80	94,72	33,38
Papua	90,89	79,62	75,42	22,03
Indonesia	105,84	92,59	83,49	29,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.28 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	107,97	95,79	95,26	47,84
Sumatera Utara	107,16	91,35	98,66	37,67
Sumatera Barat	106,60	93,66	94,78	48,24
Riau	104,55	91,83	90,66	39,32
Jambi	108,49	87,22	92,69	34,44
Sumatera Selatan	110,04	90,31	84,70	32,18
Bengkulu	108,26	95,85	100,13	41,52
Lampung	105,78	91,29	90,55	24,68
Kep. Bangka Belitung	104,41	90,98	86,07	19,34
Kep. Riau	106,15	95,91	94,04	32,40
DKI Jakarta	103,06	94,55	82,38	40,65
Jawa Barat	105,01	93,48	83,75	25,98
Jawa Tengah	104,87	91,64	91,13	26,92
DI Yogyakarta	105,04	89,90	92,65	73,84
Jawa Timur	102,98	94,93	92,08	34,65
Banten	104,90	100,24	73,79	36,87
Bali	103,54	97,76	95,73	36,10
Nusa Tenggara Barat	107,78	93,92	94,04	29,44
Nusa Tenggara Timur	110,29	93,29	90,37	35,28
Kalimantan Barat	108,67	86,47	92,46	30,91
Kalimantan Tengah	105,32	90,51	84,54	32,06
Kalimantan Selatan	106,52	88,04	83,68	31,48
Kalimantan Timur	106,48	90,13	96,50	45,79
Kalimantan Utara	101,16	96,40	106,28	34,28
Sulawesi Utara	106,14	83,60	93,53	42,06
Sulawesi Tengah	103,17	94,35	93,56	45,25
Sulawesi Selatan	106,07	87,59	90,94	42,64
Sulawesi Tenggara	108,55	82,36	99,86	47,41
Gorontalo	109,06	84,19	92,91	41,44
Sulawesi Barat	104,32	85,15	98,57	34,43
Maluku	107,92	90,72	95,61	54,62
Maluku Utara	109,41	87,88	96,96	45,89
Papua Barat	109,63	93,18	98,92	34,43
Papua	91,31	84,46	72,24	17,76
Indonesia	105,39	92,43	89,31	33,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	108,48	95,51	93,80	43,50
Sumatera Utara	106,85	92,11	98,02	32,67
Sumatera Barat	108,03	92,66	92,00	43,26
Riau	105,35	92,91	85,12	35,78
Jambi	108,29	88,20	85,23	31,77
Sumatera Selatan	110,51	89,78	82,26	27,26
Bengkulu	107,67	93,10	94,53	38,01
Lampung	105,31	91,19	89,12	21,88
Kep. Bangka Belitung	106,09	88,51	88,28	18,19
Kep. Riau	105,96	92,58	90,58	28,50
DKI Jakarta	103,63	95,78	77,40	40,05
Jawa Barat	104,53	94,69	79,07	25,57
Jawa Tengah	105,01	92,80	87,84	24,78
DI Yogyakarta	104,52	94,28	90,82	74,08
Jawa Timur	103,71	94,74	89,26	31,84
Banten	106,96	95,71	75,02	32,31
Bali	102,70	98,18	93,40	36,46
Nusa Tenggara Barat	107,07	93,32	93,23	32,99
Nusa Tenggara Timur	111,35	90,41	88,66	32,65
Kalimantan Barat	109,46	84,49	88,52	25,74
Kalimantan Tengah	106,98	88,06	85,63	26,95
Kalimantan Selatan	107,41	86,44	82,21	28,10
Kalimantan Timur	106,46	92,28	95,16	41,21
Kalimantan Utara	101,52	97,60	97,78	27,07
Sulawesi Utara	105,41	90,12	86,03	35,41
Sulawesi Tengah	102,66	93,06	88,69	39,71
Sulawesi Selatan	106,65	87,15	88,04	42,02
Sulawesi Tenggara	108,23	85,28	90,31	44,32
Gorontalo	108,75	79,66	89,11	36,23
Sulawesi Barat	104,23	84,95	89,18	30,27
Maluku	108,90	90,35	95,96	48,55
Maluku Utara	107,81	88,17	95,64	43,03
Papua Barat	109,24	91,41	96,79	33,89
Papua	91,10	81,91	73,90	19,99
Indonesia	105,62	92,51	86,34	31,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.30 Angka Partisipasi Murni (APM) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,34	85,23	76,62	38,18
Sumatera Utara	97,89	82,09	71,08	25,95
Sumatera Barat	98,77	79,14	72,78	40,07
Riau	97,42	83,25	70,35	34,55
Jambi	99,66	78,12	65,92	32,07
Sumatera Selatan	98,41	79,62	65,23	29,94
Bengkulu	97,89	82,85	70,96	42,81
Lampung	99,42	78,98	64,02	24,39
Kep. Bangka Belitung	97,62	76,99	64,00	14,79
Kep. Riau	99,21	87,07	75,17	19,15
DKI Jakarta	98,44	84,95	60,81	25,61
Jawa Barat	98,03	84,42	60,74	20,90
Jawa Tengah	98,74	82,34	64,06	21,08
DI Yogyakarta	99,56	86,08	77,77	57,54
Jawa Timur	98,35	85,67	67,07	28,00
Banten	97,64	86,83	63,34	24,54
Bali	98,14	85,15	78,72	32,74
Nusa Tenggara Barat	99,52	86,40	74,45	25,10
Nusa Tenggara Timur	95,99	74,11	64,62	34,91
Kalimantan Barat	97,37	73,26	60,04	21,97
Kalimantan Tengah	98,93	81,49	59,75	20,00
Kalimantan Selatan	99,59	78,47	63,40	30,80
Kalimantan Timur	98,88	84,29	71,38	31,48
Kalimantan Utara	94,99	82,20	66,37	22,53
Sulawesi Utara	95,04	80,01	65,61	26,86
Sulawesi Tengah	92,79	80,29	74,44	41,98
Sulawesi Selatan	98,64	80,50	63,78	38,84
Sulawesi Tenggara	98,68	77,40	69,94	41,22
Gorontalo	99,91	77,01	62,29	38,69
Sulawesi Barat	94,25	75,95	64,85	27,28
Maluku	97,15	79,62	69,43	46,05
Maluku Utara	97,34	77,39	68,73	37,21
Papua Barat	93,85	80,37	74,62	35,37
Papua	94,14	69,58	63,27	26,71
Indonesia	98,20	83,23	65,41	26,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.31 Angka Partisipasi Murni (APM) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	98,78	84,66	69,03	24,50
Sumatera Utara	98,02	82,07	65,59	16,03
Sumatera Barat	99,00	81,39	65,23	22,54
Riau	98,58	79,23	60,54	17,97
Jambi	99,15	81,43	57,66	14,79
Sumatera Selatan	97,95	78,83	58,67	9,38
Bengkulu	98,96	80,14	64,80	15,92
Lampung	99,12	81,45	62,17	10,34
Kep. Bangka Belitung	98,79	77,02	56,27	11,54
Kep. Riau	99,87	84,86	65,67	13,15
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	98,85	80,31	52,06	9,00
Jawa Tengah	98,16	80,65	58,62	11,54
DI Yogyakarta	98,78	84,26	70,72	27,04
Jawa Timur	97,64	81,63	56,79	14,18
Banten	99,02	81,08	49,87	10,95
Bali	96,79	83,93	67,02	19,43
Nusa Tenggara Barat	97,98	81,78	61,17	13,55
Nusa Tenggara Timur	95,97	73,24	55,53	14,45
Kalimantan Barat	97,90	69,27	51,53	12,22
Kalimantan Tengah	99,14	77,21	52,43	10,93
Kalimantan Selatan	98,71	76,43	56,25	14,18
Kalimantan Timur	97,75	81,39	66,09	12,28
Kalimantan Utara	94,30	77,64	67,28	10,35
Sulawesi Utara	96,42	72,18	61,47	17,53
Sulawesi Tengah	93,54	75,21	61,43	17,76
Sulawesi Selatan	98,22	75,76	57,33	21,07
Sulawesi Tenggara	98,37	75,98	60,04	17,70
Gorontalo	97,70	70,75	58,30	18,18
Sulawesi Barat	96,35	71,60	60,02	17,17
Maluku	97,34	77,80	63,35	24,98
Maluku Utara	97,37	78,92	64,50	18,36
Papua Barat	94,95	70,88	59,91	16,72
Papua	75,91	57,01	42,74	10,02
Indonesia	97,49	78,84	58,49	14,16

Keterangan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.32 Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	99,09	85,17	71,97	26,56
Sumatera Utara	97,89	81,89	67,47	19,11
Sumatera Barat	98,93	79,13	65,12	28,00
Riau	98,58	81,76	61,84	22,55
Jambi	99,16	80,62	57,06	18,41
Sumatera Selatan	98,24	79,57	60,85	14,98
Bengkulu	98,75	81,74	61,49	22,40
Lampung	99,31	80,52	61,30	12,08
Kep. Bangka Belitung	98,46	73,39	60,50	12,68
Kep. Riau	99,08	84,34	72,21	15,62
DKI Jakarta	98,77	87,06	57,86	24,57
Jawa Barat	97,93	83,46	57,21	17,54
Jawa Tengah	98,44	81,97	60,12	15,17
DI Yogyakarta	99,42	86,86	74,08	52,70
Jawa Timur	98,18	83,66	60,43	19,04
Banten	98,78	83,19	57,88	19,49
Bali	97,99	85,98	76,48	28,64
Nusa Tenggara Barat	98,55	84,35	65,77	22,10
Nusa Tenggara Timur	96,12	71,14	56,55	19,48
Kalimantan Barat	97,98	69,99	52,71	11,79
Kalimantan Tengah	99,06	77,74	54,91	12,78
Kalimantan Selatan	99,29	74,80	56,82	19,87
Kalimantan Timur	98,44	85,12	68,93	22,89
Kalimantan Utara	94,50	81,31	62,86	13,97
Sulawesi Utara	94,98	79,54	59,89	17,28
Sulawesi Tengah	92,48	73,95	63,08	23,31
Sulawesi Selatan	98,36	77,86	60,27	28,69
Sulawesi Tenggara	98,16	77,76	59,89	25,27
Gorontalo	98,80	68,38	56,05	23,15
Sulawesi Barat	95,66	72,30	55,70	15,23
Maluku	97,23	78,95	67,70	31,76
Maluku Utara	97,06	79,01	67,02	23,02
Papua Barat	94,00	72,09	61,09	24,42
Papua	81,13	59,84	48,84	15,66
Indonesia	97,91	81,18	60,69	19,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.33 Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	98,85	84,52	71,42	32,26
Sumatera Utara	98,01	82,29	69,90	25,28
Sumatera Barat	98,85	81,39	73,21	36,79
Riau	97,68	79,78	67,94	27,55
Jambi	99,50	79,80	64,29	22,51
Sumatera Selatan	97,98	78,69	61,66	20,44
Bengkulu	98,46	80,41	72,66	29,85
Lampung	99,11	80,75	64,40	18,81
Kep. Bangka Belitung	97,73	80,76	60,94	14,11
Kep. Riau	99,50	89,73	76,17	21,57
DKI Jakarta	98,10	82,85	63,65	26,55
Jawa Barat	98,49	83,75	60,99	19,98
Jawa Tengah	98,49	81,13	62,92	18,55
DI Yogyakarta	99,29	84,37	78,68	52,89
Jawa Timur	97,89	84,18	64,79	25,48
Banten	97,15	88,04	62,82	24,09
Bali	97,53	83,43	74,66	30,22
Nusa Tenggara Barat	98,97	83,69	70,24	17,80
Nusa Tenggara Timur	95,83	75,87	59,74	22,24
Kalimantan Barat	97,42	71,75	56,92	20,06
Kalimantan Tengah	99,04	80,47	56,36	17,45
Kalimantan Selatan	98,99	80,31	62,82	25,93
Kalimantan Timur	98,62	81,39	70,93	29,10
Kalimantan Utara	94,98	79,79	70,60	24,45
Sulawesi Utara	96,40	73,61	68,47	29,16
Sulawesi Tengah	94,19	79,63	69,21	29,78
Sulawesi Selatan	98,45	78,09	60,88	32,14
Sulawesi Tenggara	98,83	75,31	68,42	31,28
Gorontalo	98,58	78,62	64,18	31,98
Sulawesi Barat	96,19	72,46	67,32	23,22
Maluku	97,31	78,18	64,61	39,55
Maluku Utara	97,70	78,06	64,47	27,07
Papua Barat	95,08	77,59	70,87	25,33
Papua	80,19	60,67	47,75	13,74
Indonesia	97,87	81,53	64,45	23,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.34 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	98,97	84,85	71,70	29,40
Sumatera Utara	97,95	82,09	68,67	22,06
Sumatera Barat	98,89	80,22	69,18	32,21
Riau	98,13	80,76	64,81	24,96
Jambi	99,33	80,23	60,60	20,43
Sumatera Selatan	98,12	79,12	61,24	17,62
Bengkulu	98,61	81,08	67,09	26,00
Lampung	99,22	80,64	62,84	15,37
Kep. Bangka Belitung	98,11	77,00	60,72	13,39
Kep. Riau	99,29	86,78	74,11	18,52
DKI Jakarta	98,44	84,95	60,81	25,61
Jawa Barat	98,20	83,61	59,01	18,76
Jawa Tengah	98,46	81,56	61,46	16,82
DI Yogyakarta	99,36	85,62	76,37	52,79
Jawa Timur	98,04	83,91	62,59	22,27
Banten	97,97	85,43	60,42	21,66
Bali	97,77	84,78	75,60	29,40
Nusa Tenggara Barat	98,76	84,03	68,04	19,97
Nusa Tenggara Timur	95,98	73,47	58,15	20,79
Kalimantan Barat	97,70	70,85	54,76	15,93
Kalimantan Tengah	99,05	79,07	55,63	14,99
Kalimantan Selatan	99,14	77,44	59,83	22,84
Kalimantan Timur	98,53	83,36	69,89	25,80
Kalimantan Utara	94,73	80,53	66,70	18,90
Sulawesi Utara	95,68	76,56	63,86	23,14
Sulawesi Tengah	93,31	76,80	66,18	26,50
Sulawesi Selatan	98,41	77,98	60,57	30,41
Sulawesi Tenggara	98,48	76,54	64,00	28,32
Gorontalo	98,69	73,55	60,18	27,38
Sulawesi Barat	95,92	72,39	61,17	19,27
Maluku	97,27	78,58	66,16	35,51
Maluku Utara	97,36	78,53	65,75	24,97
Papua Barat	94,52	74,70	65,92	24,86
Papua	80,67	60,23	48,32	14,74
Indonesia	97,89	81,35	62,53	21,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.35 Angka Anak Tidak Sekolah menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,24	3,48	9,76
Sumatera Utara	0,34	4,50	13,27
Sumatera Barat	0,29	5,14	14,45
Riau	0,47	5,79	16,64
Jambi	0,37	7,62	19,45
Sumatera Selatan	0,58	7,09	20,05
Bengkulu	0,49	4,46	18,35
Lampung	0,56	7,78	23,48
Kep. Bangka Belitung	0,36	10,98	21,69
Kep. Riau	NA	2,84	13,04
DKI Jakarta	NA	5,54	12,06
Jawa Barat	0,46	8,61	27,03
Jawa Tengah	0,29	6,49	24,72
DI Yogyakarta	NA	1,32	7,93
Jawa Timur	0,19	5,82	24,23
Banten	0,55	6,50	23,28
Bali	0,22	4,59	12,60
Nusa Tenggara Barat	0,21	3,85	15,48
Nusa Tenggara Timur	1,22	7,48	21,64
Kalimantan Barat	0,87	10,45	27,71
Kalimantan Tengah	0,43	8,46	27,66
Kalimantan Selatan	1,10	10,24	22,81
Kalimantan Timur	NA	3,62	11,91
Kalimantan Utara	0,68	6,67	18,36
Sulawesi Utara	0,66	6,70	16,99
Sulawesi Tengah	1,24	9,33	21,48
Sulawesi Selatan	0,75	9,19	23,51
Sulawesi Tenggara	0,52	7,37	19,51
Gorontalo	1,96	10,92	25,05
Sulawesi Barat	1,59	12,18	23,81
Maluku	0,37	3,28	12,46
Maluku Utara	0,56	3,41	15,59
Papua Barat	1,13	4,37	14,88
Papua	15,07	21,44	36,67
Indonesia	0,67	6,93	21,61

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Tabel 3.36 *Sampling Error* Angka Kesiapan Sekolah menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	81.37	74.99	87.74	4.00	73.38	68.96	77.80	3.07	76.08	72.44	79.71	2.44
Sumatera Utara	71.45	66.39	76.50	3.61	62.68	58.41	66.94	3.47	67.01	63.68	70.33	2.53
Sumatera Barat	75.71	68.36	83.07	4.96	77.47	73.03	81.90	2.92	76.59	72.31	80.88	2.85
Riau	73.09	66.57	79.61	4.55	77.71	72.52	82.91	3.41	75.79	71.73	79.86	2.74
Jambi	70.56	61.27	79.86	6.72	70.79	64.50	77.07	4.53	70.71	65.51	75.92	3.76
Sumatera Selatan	63.67	54.95	72.39	6.99	64.41	59.17	69.64	4.15	64.12	59.43	68.80	3.73
Bengkulu	83.00	74.82	91.18	5.03	74.41	67.50	81.33	4.74	77.72	72.33	83.11	3.54
Lampung	85.20	79.00	91.40	3.71	84.94	81.52	88.36	2.05	85.03	81.96	88.09	1.84
Kep. Bangka Belitung	82.32	71.69	92.95	6.59	88.85	83.28	94.41	3.19	85.45	79.21	91.70	3.73
Kepulauan Riau	85.43	76.90	93.95	5.09	63.17	32.02	94.33	25.16	82.57	73.82	91.32	5.41
DKI Jakarta	83.93	78.63	89.24	3.22	-	-	-	-	83.93	78.63	89.24	3.22
Jawa Barat	76.56	72.95	80.18	2.41	67.79	62.91	72.67	3.67	74.84	71.78	77.90	2.08
Jawa Tengah	89.52	86.69	92.34	1.61	90.70	88.09	93.30	1.47	90.08	88.14	92.01	1.09
DI Yogyakarta	100.00	100.00	100.00	0.00	99.28	97.85	100.00	0.73	99.82	99.48	100.00	0.18
Jawa Timur	92.23	90.06	94.41	1.20	90.80	88.34	93.27	1.38	91.61	89.98	93.24	0.91
Banten	70.49	63.66	77.33	4.95	44.74	36.09	53.40	9.87	64.52	58.80	70.24	4.52
Bali	86.01	80.02	92.00	3.55	70.72	58.96	82.48	8.49	82.12	76.57	87.67	3.45
Nusa Tenggara Barat	72.62	64.72	80.53	5.56	63.80	57.38	70.22	5.13	67.88	62.81	72.94	3.81
Nusa Tenggara Timur	55.09	47.26	62.92	7.25	54.43	50.31	58.55	3.86	54.59	50.94	58.24	3.41
Kalimantan Barat	39.90	30.50	49.29	12.02	36.73	31.35	42.11	7.48	37.87	33.04	42.69	6.50
Kalimantan Tengah	84.70	76.77	92.64	4.78	77.84	71.60	84.07	4.09	80.79	75.83	85.75	3.13
Kalimantan Selatan	92.19	87.48	96.90	2.61	90.16	86.30	94.02	2.19	91.10	88.09	94.12	1.69
Kalimantan Timur	78.13	71.11	85.15	4.58	85.08	76.77	93.39	4.98	80.42	75.00	85.84	3.44
Kalimantan Utara	82.46	72.42	92.49	6.21	64.99	50.67	79.31	11.24	75.30	66.77	83.82	5.78
Sulawesi Utara	83.79	76.59	90.99	4.38	78.21	71.81	84.61	4.17	81.35	76.43	86.26	3.08
Sulawesi Tengah	73.47	57.62	89.33	11.01	81.43	76.51	86.34	3.08	78.93	72.78	85.08	3.98
Sulawesi Selatan	68.54	61.26	75.81	5.41	67.24	62.34	72.14	3.72	67.80	63.60	72.00	3.16
Sulawesi Tenggara	83.15	76.17	90.14	4.29	75.67	70.26	81.07	3.65	78.47	74.14	82.79	2.81
Gorontalo	91.18	82.98	99.39	4.59	91.16	86.15	96.17	2.81	91.17	86.70	95.63	2.50
Sulawesi Barat	74.65	60.96	88.33	9.35	67.05	58.95	75.15	6.16	68.51	61.45	75.58	5.26
Maluku	57.76	45.75	69.76	10.61	54.04	45.09	63.00	8.45	55.36	48.12	62.59	6.67
Maluku Utara	48.84	34.21	63.47	15.28	51.14	44.93	57.36	6.20	50.63	44.79	56.47	5.89
Papua Barat	66.46	54.81	78.12	8.95	42.31	37.28	47.34	6.06	50.72	45.37	56.08	5.39
Papua	56.08	46.84	65.32	8.41	26.84	22.27	31.41	8.68	36.42	31.82	41.03	6.45
Indonesia	79.28	77.93	80.62	0.87	72.99	71.95	74.04	0.73	76.54	75.66	77.43	0.59

Keterangan: Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.37 *Sampling Error* Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-23 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	43.27	38.63	47.91	5.47	30.76	28.05	33.47	4.50	35.24	32.79	37.70	3.56
Sumatera Utara	35.01	31.35	38.66	5.33	24.98	22.41	27.55	5.25	31.08	28.61	33.55	4.06
Sumatera Barat	50.05	45.74	54.36	4.40	32.53	29.39	35.67	4.93	42.19	39.36	45.02	3.42
Riau	43.44	38.58	48.29	5.70	24.22	21.16	27.29	6.46	32.32	29.47	35.18	4.50
Jambi	37.90	31.77	44.04	8.26	19.92	16.91	22.92	7.69	25.79	22.92	28.66	5.68
Sumatera Selatan	33.87	29.68	38.07	6.32	13.21	11.28	15.13	7.44	21.49	19.24	23.74	5.33
Bengkulu	52.11	45.73	58.49	6.24	23.23	19.23	27.23	8.79	34.05	30.30	37.81	5.62
Lampung	33.40	27.42	39.39	9.15	18.01	15.57	20.44	6.89	23.51	20.84	26.19	5.80
Kep. Bangka Belitung	21.53	16.87	26.20	11.06	16.52	11.80	21.25	14.59	19.38	16.04	22.71	8.78
Kepulauan Riau	23.01	16.99	29.03	13.34	17.37	6.34	28.41	32.41	22.43	16.88	27.98	12.62
DKI Jakarta	28.43	25.40	31.46	5.43					28.43	25.40	31.46	5.43
Jawa Barat	28.58	26.62	30.54	3.50	16.74	14.57	18.91	6.61	26.45	24.78	28.11	3.21
Jawa Tengah	32.03	29.92	34.14	3.36	19.69	17.89	21.49	4.66	26.52	25.08	27.96	2.77
DI Yogyakarta	60.08	55.01	65.15	4.31	32.64	23.51	41.76	14.27	55.80	51.14	60.46	4.26
Jawa Timur	34.79	32.81	36.76	2.90	19.85	17.98	21.71	4.79	28.59	27.19	30.00	2.51
Banten	27.94	24.40	31.48	6.47	13.35	9.15	17.55	16.06	24.85	21.91	27.80	6.05
Bali	37.36	32.72	42.01	6.34	25.20	19.95	30.45	10.62	34.31	30.52	38.10	5.64
Nusa Tenggara Barat	33.43	28.50	38.36	7.52	22.22	18.05	26.39	9.57	28.45	25.18	31.72	5.87
Nusa Tenggara Timur	48.17	42.45	53.89	6.06	26.22	23.94	28.49	4.42	33.03	30.57	35.48	3.79
Kalimantan Barat	36.12	31.31	40.92	6.79	22.08	19.51	24.65	5.94	27.42	24.99	29.85	4.52
Kalimantan Tengah	31.38	26.38	36.37	8.12	20.70	17.07	24.34	8.96	25.49	22.46	28.51	6.05
Kalimantan Selatan	36.03	31.57	40.50	6.32	21.53	17.62	25.44	9.27	29.09	26.07	32.10	5.29
Kalimantan Timur	40.33	35.75	44.90	5.79	21.47	16.67	26.27	11.40	34.75	31.17	38.33	5.25
Kalimantan Utara	34.18	27.69	40.67	9.69	22.94	17.10	28.78	12.99	30.83	25.93	35.74	8.12
Sulawesi Utara	29.54	25.47	33.61	7.03	20.37	16.91	23.83	8.66	25.88	23.06	28.69	5.55
Sulawesi Tengah	46.08	39.15	53.02	7.68	21.41	18.30	24.52	7.41	30.31	26.98	33.64	5.60
Sulawesi Selatan	46.92	42.67	51.16	4.61	27.91	25.46	30.36	4.47	37.89	35.26	40.52	3.54
Sulawesi Tenggara	45.73	39.90	51.56	6.50	23.60	20.08	27.12	7.61	33.59	30.21	36.98	5.14
Gorontalo	47.26	40.07	54.45	7.76	25.94	21.78	30.10	8.18	35.50	31.33	39.68	6.00
Sulawesi Barat	34.11	25.64	42.57	12.66	23.15	18.47	27.82	10.30	25.42	21.31	29.54	8.26
Maluku	52.48	47.13	57.82	5.19	28.08	24.08	32.07	7.27	40.27	36.74	43.80	4.47
Maluku Utara	45.61	38.12	53.10	8.37	24.93	20.94	28.93	8.17	32.19	28.26	36.12	6.23
Papua Barat	45.08	37.99	52.17	8.03	28.51	25.06	31.95	6.17	35.74	31.91	39.57	5.47
Papua	42.56	37.86	47.27	5.64	19.54	17.29	21.80	5.89	26.06	23.83	28.30	4.38
Indonesia	33.84	33.03	34.64	1.21	21.29	20.71	21.87	1.39	28.96	28.41	29.51	0.96

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.38 Sampling Error Angka Partisipasi Kasar (APK) PT 19-23 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	56.72	50.48	62.97	5.62	36.12	32.89	39.34	4.56	43.50	40.42	46.58	3.61
Sumatera Utara	37.03	32.81	41.24	5.80	25.92	23.23	28.62	5.31	32.67	29.89	35.45	4.34
Sumatera Barat	52.56	47.38	57.75	5.03	31.82	28.27	35.37	5.69	43.26	39.94	46.57	3.91
Riau	47.89	42.01	53.76	6.26	26.96	23.50	30.42	6.54	35.78	32.47	39.09	4.72
Jambi	48.75	40.92	56.59	8.20	23.53	19.81	27.24	8.06	31.77	28.22	35.31	5.69
Sumatera Selatan	44.41	39.01	49.81	6.20	15.78	13.33	18.23	7.92	27.26	24.46	30.05	5.23
Bengkulu	57.23	49.50	64.96	6.89	26.48	22.06	30.90	8.52	38.01	33.75	42.26	5.71
Lampung	31.72	25.85	37.58	9.44	16.40	14.01	18.80	7.44	21.88	19.30	24.46	6.01
Kep. Bangka Belitung	20.55	15.66	25.43	12.13	15.08	10.73	19.44	14.74	18.19	14.85	21.53	9.36
Kepulauan Riau	30.09	22.58	37.59	12.73	14.75	4.20	25.31	36.50	28.50	21.68	35.32	12.21
DKI Jakarta	40.05	35.81	44.29	5.40					40.05	35.81	44.29	5.40
Jawa Barat	27.99	25.75	30.23	4.08	14.60	12.47	16.74	7.45	25.57	23.70	27.45	3.75
Jawa Tengah	30.94	28.70	33.17	3.69	17.15	15.37	18.93	5.30	24.78	23.29	26.27	3.06
DI Yogyakarta	80.10	72.90	87.31	4.59	41.42	30.46	52.38	13.50	74.08	67.70	80.45	4.39
Jawa Timur	38.24	35.91	40.58	3.11	22.79	20.71	24.87	4.65	31.84	30.22	33.45	2.59
Banten	36.30	31.56	41.05	6.67	17.42	12.94	21.89	13.12	32.31	28.44	36.18	6.10
Bali	40.14	34.96	45.32	6.58	25.47	20.03	30.92	10.90	36.46	32.29	40.63	5.83
Nusa Tenggara Barat	38.60	32.79	44.41	7.68	25.97	21.07	30.87	9.62	32.99	29.13	36.84	5.96
Nusa Tenggara Timur	52.00	44.66	59.35	7.21	23.95	21.37	26.53	5.49	32.65	29.69	35.62	4.64
Kalimantan Barat	35.50	29.55	41.44	8.55	19.75	17.22	22.28	6.54	25.74	23.09	28.40	5.26
Kalimantan Tengah	35.00	28.76	41.25	9.10	20.42	16.13	24.70	10.71	26.95	23.28	30.62	6.95
Kalimantan Selatan	37.12	32.61	41.63	6.20	18.28	14.84	21.73	9.62	28.10	25.17	31.02	5.31
Kalimantan Timur	48.79	41.27	56.31	7.86	23.16	16.82	29.50	13.97	41.21	35.57	46.86	6.99
Kalimantan Utara	30.50	23.42	37.57	11.83	18.98	9.69	28.27	24.97	27.07	21.38	32.76	10.73
Sulawesi Utara	40.87	35.16	46.59	7.13	27.20	22.49	31.92	8.84	35.41	31.58	39.24	5.52
Sulawesi Tengah	59.54	50.91	68.17	7.39	28.52	24.68	32.35	6.86	39.71	35.67	43.76	5.19
Sulawesi Selatan	53.75	47.92	59.58	5.53	29.04	26.39	31.69	4.66	42.02	38.57	45.47	4.18
Sulawesi Tenggara	61.43	53.40	69.47	6.67	30.23	26.38	34.07	6.49	44.32	40.05	48.58	4.91
Gorontalo	51.44	43.02	59.85	8.35	23.87	19.46	28.28	9.43	36.23	31.47	41.00	6.71
Sulawesi Barat	42.70	29.64	55.76	15.60	27.00	21.90	32.11	9.65	30.27	25.38	35.15	8.24
Maluku	60.55	53.46	67.64	5.97	36.55	31.89	41.22	6.51	48.55	44.17	52.93	4.60
Maluku Utara	57.76	47.69	67.83	8.89	35.06	30.34	39.78	6.86	43.03	38.04	48.01	5.91
Papua Barat	44.06	37.55	50.57	7.54	26.00	22.56	29.45	6.75	33.89	30.18	37.60	5.59
Papua	36.60	30.92	42.27	7.91	13.44	11.46	15.41	7.51	19.99	17.80	22.19	5.60
Indonesia	37.44	36.47	38.41	1.32	22.04	21.42	22.67	1.45	31.45	30.81	32.09	1.04

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.39 *Sampling Error* Angka Partisipasi Murni (APM) PT 19-23 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	38.18	33.90	42.46	5.72	24.50	22.02	26.97	5.16	29.40	27.15	31.66	3.91
Sumatera Utara	25.95	22.64	29.26	6.50	16.03	13.90	18.16	6.78	22.06	19.86	24.26	5.09
Sumatera Barat	40.07	35.72	44.42	5.54	22.54	19.77	25.31	6.26	32.21	29.44	34.98	4.39
Riau	34.55	29.65	39.44	7.22	17.97	15.22	20.73	7.82	24.96	22.22	27.70	5.60
Jambi	32.07	26.28	37.85	9.21	14.79	12.10	17.48	9.28	20.43	17.80	23.07	6.57
Sumatera Selatan	29.94	25.82	34.06	7.02	9.38	7.64	11.13	9.48	17.62	15.44	19.80	6.31
Bengkulu	42.81	36.57	49.06	7.44	15.92	12.78	19.07	10.08	26.00	22.63	29.38	6.62
Lampung	24.39	19.58	29.19	10.05	10.34	8.36	12.33	9.81	15.37	13.21	17.52	7.14
Kep. Bangka Belitung	14.79	10.89	18.69	13.45	11.54	7.53	15.55	17.72	13.39	10.59	16.19	10.67
Kepulauan Riau	19.15	13.11	25.18	16.09	13.15	3.03	23.27	39.28	18.52	12.99	24.06	15.25
DKI Jakarta	25.61	22.62	28.60	5.96					25.61	22.62	28.60	5.96
Jawa Barat	20.90	19.08	22.73	4.45	9.00	7.34	10.65	9.38	18.76	17.22	20.29	4.18
Jawa Tengah	21.08	19.30	22.87	4.32	11.54	10.13	12.95	6.23	16.82	15.63	18.01	3.61
DI Yogyakarta	57.54	52.51	62.57	4.46	27.04	18.53	35.55	16.06	52.79	48.16	57.42	4.47
Jawa Timur	28.00	26.07	29.93	3.52	14.18	12.57	15.78	5.78	22.27	20.95	23.59	3.03
Banten	24.54	21.19	27.88	6.96	10.95	7.26	14.64	17.20	21.66	18.89	24.43	6.52
Bali	32.74	28.02	37.46	7.36	19.43	14.56	24.29	12.77	29.40	25.58	33.22	6.63
Nusa Tenggara Barat	25.10	20.61	29.59	9.13	13.55	10.00	17.10	13.36	19.97	17.03	22.91	7.51
Nusa Tenggara Timur	34.91	29.32	40.49	8.16	14.45	12.52	16.37	6.79	20.79	18.49	23.10	5.65
Kalimantan Barat	21.97	17.78	26.17	9.73	12.22	10.28	14.16	8.11	15.93	13.97	17.89	6.27
Kalimantan Tengah	20.00	15.65	24.35	11.10	10.93	8.03	13.82	13.52	14.99	12.47	17.51	8.58
Kalimantan Selatan	30.80	26.82	34.79	6.60	14.18	11.15	17.21	10.90	22.84	20.27	25.41	5.75
Kalimantan Timur	31.48	27.14	35.82	7.04	12.28	7.75	16.80	18.82	25.80	22.40	29.21	6.73
Kalimantan Utara	22.53	16.61	28.45	13.40	10.35	5.40	15.29	24.37	18.90	14.46	23.34	11.98
Sulawesi Utara	26.86	22.68	31.05	7.95	17.53	14.15	20.92	9.84	23.14	20.28	25.99	6.29
Sulawesi Tengah	41.98	35.09	48.87	8.38	17.76	14.85	20.68	8.37	26.50	23.23	29.77	6.30
Sulawesi Selatan	38.84	34.81	42.88	5.30	21.07	18.85	23.29	5.37	30.41	27.91	32.90	4.19
Sulawesi Tenggara	41.22	35.14	47.30	7.53	17.70	14.65	20.76	8.81	28.32	24.95	31.69	6.08
Gorontalo	38.69	31.98	45.40	8.85	18.18	14.54	21.82	10.21	27.38	23.58	31.18	7.07
Sulawesi Barat	27.28	19.31	35.25	14.90	17.17	13.23	21.11	11.71	19.27	15.70	22.84	9.44
Maluku	46.05	40.58	51.52	6.06	24.98	21.03	28.93	8.08	35.51	31.97	39.05	5.09
Maluku Utara	37.21	30.03	44.39	9.84	18.36	14.99	21.73	9.37	24.97	21.39	28.56	7.32
Papua Barat	35.37	29.30	41.44	8.76	16.72	14.28	19.17	7.46	24.86	21.53	28.20	6.84
Papua	26.71	22.40	31.03	8.24	10.02	8.44	11.60	8.04	14.74	13.00	16.49	6.03
Indonesia	26.54	25.79	27.30	1.45	14.16	13.67	14.64	1.75	21.73	21.22	22.23	1.18

Keterangan: Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.40 *Sampling Error* Angka Tidak Sekolah 7-12 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			Relative Standard Error
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	NA	NA	NA	55.79	0.31	0.14	0.49	28.67	0.24	0.12	0.37	25.66
Sumatera Utara	0.29	0.03	0.55	46.23	0.40	0.19	0.62	27.36	0.34	0.17	0.51	25.88
Sumatera Barat	NA	NA	NA	51.46	0.20	0.03	0.38	44.04	0.29	0.08	0.50	36.53
Riau	0.42	0.10	0.74	38.48	0.49	0.14	0.85	36.83	0.47	0.22	0.72	27.48
Jambi	NA	NA	NA	85.16	0.52	0.09	0.95	42.58	0.37	0.08	0.66	39.47
Sumatera Selatan	NA	NA	NA	74.61	0.86	0.42	1.30	26.05	0.58	0.29	0.86	25.12
Bengkulu	1.10	0.14	2.05	44.60	NA	NA	NA	56.38	0.49	0.14	0.84	36.17
Lampung	NA	NA	NA	67.76	0.73	0.39	1.08	24.05	0.56	0.31	0.81	22.66
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	55.51	0.35	0.01	0.69	49.34	0.36	0.09	0.63	38.68
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	55.39	NA	NA	NA	101.02	NA	NA	NA	54.16
DKI Jakarta	NA	NA	NA	68.58	-	-	-	-	NA	NA	NA	68.58
Jawa Barat	0.36	0.18	0.54	25.33	0.82	0.38	1.26	27.24	0.46	0.29	0.63	18.81
Jawa Tengah	0.27	0.11	0.43	30.01	0.32	0.13	0.50	29.92	0.29	0.17	0.41	21.19
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	100.08	NA	NA	NA	62.14	NA	NA	NA	57.96
Jawa Timur	NA	NA	NA	51.91	0.36	0.18	0.53	25.69	0.19	0.11	0.28	23.03
Banten	0.51	0.01	1.01	49.71	0.67	0.14	1.20	40.37	0.55	0.15	0.95	37.06
Bali	NA	NA	NA	68.98	NA	NA	NA	55.65	0.22	0.03	0.41	43.85
Nusa Tenggara Barat	NA	NA	NA	73.88	0.25	0.03	0.47	45.75	0.21	0.04	0.38	40.92
Nusa Tenggara Timur	NA	NA	NA	55.89	1.47	1.04	1.90	14.87	1.22	0.87	1.56	14.48
Kalimantan Barat	0.41	0.08	0.75	41.57	1.14	0.65	1.64	22.10	0.87	0.54	1.21	19.68
Kalimantan Tengah	NA	NA	NA	64.73	0.61	0.21	1.01	33.49	0.43	0.18	0.69	29.77
Kalimantan Selatan	0.76	0.20	1.31	37.40	1.43	0.66	2.19	27.44	1.10	0.62	1.58	22.16
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	100.04	NA	NA	NA	71.52	NA	NA	NA	68.11
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	71.91	NA	NA	NA	59.63	0.68	0.02	1.33	49.34
Sulawesi Utara	0.64	0.20	1.08	35.16	0.68	0.22	1.13	34.16	0.66	0.34	0.98	24.56
Sulawesi Tengah	NA	NA	NA	60.49	1.53	0.90	2.15	20.94	1.24	0.75	1.73	20.03
Sulawesi Selatan	0.52	0.17	0.88	34.79	0.94	0.51	1.38	23.45	0.75	0.47	1.04	19.46
Sulawesi Tenggara	0.59	0.21	0.98	33.17	0.49	0.25	0.72	24.39	0.52	0.32	0.73	19.72
Gorontalo	NA	NA	NA	73.62	2.71	1.18	4.24	28.76	1.96	0.87	3.05	28.45
Sulawesi Barat	2.63	0.56	4.71	40.24	1.33	0.68	1.98	24.90	1.59	0.93	2.25	21.24
Maluku	NA	NA	NA	59.75	0.44	0.16	0.73	33.06	0.37	0.16	0.59	29.11
Maluku Utara	NA	NA	NA	61.87	0.67	0.07	1.26	45.61	0.56	0.11	1.02	40.72
Papua Barat	0.75	0.02	1.47	49.47	1.37	0.59	2.15	28.95	1.13	0.58	1.69	25.06
Papua	1.94	0.88	3.01	27.96	19.60	17.29	21.92	6.02	15.07	13.24	16.89	6.17
Indonesia	0.32	0.25	0.39	11.08	1.12	1.02	1.23	4.71	0.67	0.61	0.73	4.56

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.41 *Sampling Error* Angka Tidak Sekolah 7-12 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	0.28	0.09	0.47	34.80	0.21	0.05	0.36	37.81	0.24	0.12	0.37	25.66
Sumatera Utara	0.43	0.13	0.73	35.69	0.24	0.09	0.39	31.56	0.34	0.17	0.51	25.88
Sumatera Barat	0.18	0.03	0.34	42.43	0.41	0.01	0.80	49.90	0.29	0.08	0.50	36.53
Riau	NA	NA	NA	54.17	0.62	0.24	0.99	30.97	0.47	0.22	0.72	27.48
Jambi	NA	NA	NA	54.08	NA	NA	NA	56.08	0.37	0.08	0.66	39.47
Sumatera Selatan	0.67	0.22	1.13	34.53	0.48	0.18	0.78	31.99	0.58	0.29	0.86	25.12
Bengkulu	0.50	0.06	0.93	45.06	NA	NA	NA	57.79	0.49	0.14	0.84	36.17
Lampung	0.59	0.23	0.95	30.87	0.53	0.18	0.89	33.61	0.56	0.31	0.81	22.66
Kep. Bangka Belitung	NA	NA	NA	56.31	NA	NA	NA	54.18	0.36	0.09	0.63	38.68
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	69.40	NA	NA	NA	83.83	NA	NA	NA	54.16
DKI Jakarta	NA	NA	NA	90.39	NA	NA	NA	98.37	NA	NA	NA	68.58
Jawa Barat	0.42	0.22	0.62	24.66	0.50	0.23	0.78	28.06	0.46	0.29	0.63	18.81
Jawa Tengah	0.34	0.15	0.52	27.71	0.25	0.09	0.41	33.11	0.29	0.17	0.41	21.19
DI Yogyakarta	NA	NA	NA	72.44	NA	NA	NA	70.16	NA	NA	NA	57.96
Jawa Timur	0.23	0.11	0.34	26.23	0.16	0.03	0.29	42.33	0.19	0.11	0.28	23.03
Banten	NA	NA	NA	58.16	0.55	0.05	1.06	46.14	0.55	0.15	0.95	37.06
Bali	NA	NA	NA	63.55	NA	NA	NA	51.70	0.22	0.03	0.41	43.85
Nusa Tenggara Barat	0.23	0.01	0.44	49.15	NA	NA	NA	66.77	0.21	0.04	0.38	40.92
Nusa Tenggara Timur	1.56	1.03	2.08	17.19	0.88	0.45	1.30	24.71	1.22	0.87	1.56	14.48
Kalimantan Barat	0.91	0.39	1.43	29.26	0.84	0.41	1.27	26.16	0.87	0.54	1.21	19.68
Kalimantan Tengah	0.45	0.10	0.79	39.18	0.42	0.05	0.79	45.15	0.43	0.18	0.69	29.77
Kalimantan Selatan	0.97	0.37	1.56	31.30	1.23	0.48	1.98	31.12	1.10	0.62	1.58	22.16
Kalimantan Timur	NA	NA	NA	90.37	NA	NA	NA	74.00	NA	NA	NA	68.11
Kalimantan Utara	NA	NA	NA	67.40	NA	NA	NA	55.15	0.68	0.02	1.33	49.34
Sulawesi Utara	0.80	0.32	1.28	30.64	0.51	0.11	0.92	40.49	0.66	0.34	0.98	24.56
Sulawesi Tengah	1.56	0.79	2.32	25.02	0.91	0.35	1.46	31.21	1.24	0.75	1.73	20.03
Sulawesi Selatan	0.68	0.34	1.02	25.62	0.82	0.38	1.27	27.79	0.75	0.47	1.04	19.46
Sulawesi Tenggara	0.67	0.33	1.02	26.04	0.37	0.15	0.58	29.58	0.52	0.32	0.73	19.72
Gorontalo	2.14	0.56	3.72	37.67	1.78	0.24	3.32	44.24	1.96	0.87	3.05	28.45
Sulawesi Barat	1.29	0.45	2.14	33.40	1.88	0.88	2.88	27.23	1.59	0.93	2.25	21.24
Maluku	0.59	0.19	0.99	34.56	0.15	0.04	0.25	36.69	0.37	0.16	0.59	29.11
Maluku Utara	0.49	0.15	0.82	35.66	NA	NA	NA	67.94	0.56	0.11	1.02	40.72
Papua Barat	1.24	0.61	1.88	26.13	1.01	0.09	1.94	46.70	1.13	0.58	1.69	25.06
Papua	14.62	12.55	16.69	7.22	15.54	13.09	17.98	8.04	15.07	13.24	16.89	6.17
Indonesia	0.68	0.60	0.75	5.89	0.66	0.57	0.74	6.62	0.67	0.61	0.73	4.56

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.42 *Sampling Error* Angka Tidak Sekolah 13-15 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			Relative Standard Error
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	1.38	0.47	2.29	33.78	4.54	3.13	5.95	15.81	3.48	2.49	4.46	14.44
Sumatera Utara	3.86	2.45	5.28	18.62	5.26	4.07	6.45	11.55	4.50	3.55	5.44	10.70
Sumatera Barat	4.91	2.88	6.95	21.16	5.38	3.97	6.80	13.40	5.14	3.87	6.40	12.56
Riau	4.01	2.08	5.93	24.50	6.94	4.65	9.24	16.85	5.79	4.20	7.37	14.01
Jambi	5.47	2.48	8.45	27.86	8.80	6.22	11.38	14.95	7.62	5.64	9.60	13.24
Sumatera Selatan	4.20	2.29	6.11	23.24	8.83	6.85	10.80	11.41	7.09	5.66	8.53	10.33
Bengkulu	3.74	1.51	5.96	30.40	4.83	3.03	6.63	18.99	4.46	3.06	5.87	16.09
Lampung	7.85	4.11	11.59	24.33	7.74	6.00	9.49	11.48	7.78	6.04	9.52	11.39
Kep. Bangka Belitung	10.54	6.96	14.12	17.31	11.60	7.53	15.67	17.89	10.98	8.29	13.67	12.50
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	61.83	NA	NA	NA	62.87	2.84	0.20	5.48	47.36
DKI Jakarta	5.54	3.75	7.34	16.52	-	-	-	-	5.54	3.75	7.34	16.52
Jawa Barat	7.78	6.40	9.17	9.09	12.04	9.62	14.46	10.25	8.61	7.40	9.83	7.19
Jawa Tengah	5.73	4.56	6.90	10.39	7.36	5.89	8.84	10.23	6.49	5.56	7.42	7.30
DI Yogyakarta	1.24	0.19	2.28	42.99	1.57	0.06	3.09	49.20	1.32	0.46	2.19	33.44
Jawa Timur	4.63	3.64	5.62	10.87	7.35	5.90	8.80	10.06	5.82	4.97	6.66	7.40
Banten	5.39	3.40	7.39	18.85	10.12	6.74	13.49	17.02	6.50	4.79	8.21	13.43
Bali	4.24	1.96	6.52	27.42	5.41	3.10	7.71	21.76	4.59	2.84	6.33	19.44
Nusa Tenggara Barat	3.57	1.42	5.73	30.80	4.13	1.98	6.28	26.54	3.85	2.33	5.38	20.18
Nusa Tenggara Timur	4.31	2.01	6.62	27.26	8.58	7.10	10.06	8.79	7.48	6.22	8.73	8.56
Kalimantan Barat	7.64	4.60	10.67	20.27	12.29	9.98	14.59	9.57	10.45	8.61	12.28	8.96
Kalimantan Tengah	6.07	3.38	8.76	22.62	10.31	7.25	13.37	15.14	8.46	6.36	10.56	12.66
Kalimantan Selatan	10.26	6.71	13.81	17.67	10.23	7.49	12.97	13.68	10.24	7.99	12.50	11.22
Kalimantan Timur	3.91	1.87	5.95	26.62	2.98	1.09	4.86	32.28	3.62	2.10	5.14	21.46
Kalimantan Utara	5.21	1.82	8.60	33.18	9.07	4.02	14.11	28.39	6.67	3.84	9.50	21.67
Sulawesi Utara	4.34	2.15	6.52	25.76	9.75	6.63	12.86	16.32	6.70	4.85	8.54	14.07
Sulawesi Tengah	8.17	4.39	11.95	23.59	9.89	7.44	12.35	12.67	9.33	7.26	11.40	11.30
Sulawesi Selatan	8.42	5.75	11.08	16.16	9.92	8.18	11.66	8.96	9.19	7.62	10.76	8.73
Sulawesi Tenggara	6.00	3.44	8.56	21.76	8.37	6.46	10.29	11.67	7.37	5.82	8.92	10.72
Gorontalo	3.63	1.18	6.09	34.51	16.98	11.27	22.70	17.17	10.92	7.56	14.27	15.68
Sulawesi Barat	9.40	2.70	16.11	36.37	12.92	9.58	16.26	13.19	12.18	9.20	15.17	12.50
Maluku	1.95	0.80	3.09	30.03	4.25	2.91	5.60	16.14	3.28	2.36	4.21	14.31
Maluku Utara	1.35	0.13	2.58	46.29	4.25	2.45	6.06	21.67	3.41	2.07	4.76	20.03
Papua Barat	3.85	0.35	7.35	46.44	4.74	3.34	6.14	15.08	4.37	2.70	6.04	19.52
Papua	7.74	4.31	11.16	22.57	26.15	23.26	29.03	5.62	21.44	19.10	23.78	5.57
Indonesia	5.82	5.34	6.29	4.17	8.45	8.00	8.90	2.71	6.93	6.60	7.27	2.46

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.43 *Sampling Error Angka Tidak Sekolah 13-15 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023*

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	4.05	2.62	5.48	17.98	2.88	1.52	4.23	24.03	3.48	2.49	4.46	14.44
Sumatera Utara	5.13	3.84	6.42	12.79	3.80	2.46	5.15	18.07	4.50	3.55	5.44	10.70
Sumatera Barat	5.95	4.04	7.86	16.40	4.29	2.75	5.83	18.32	5.14	3.87	6.40	12.56
Riau	6.64	4.61	8.67	15.57	4.91	2.71	7.11	22.85	5.79	4.20	7.37	14.01
Jambi	9.30	6.25	12.35	16.73	5.83	3.40	8.26	21.29	7.62	5.64	9.60	13.24
Sumatera Selatan	8.58	6.31	10.84	13.48	5.70	3.92	7.47	15.93	7.09	5.66	8.53	10.33
Bengkulu	6.07	3.70	8.44	19.92	2.99	1.29	4.68	28.97	4.46	3.06	5.87	16.09
Lampung	7.95	5.78	10.12	13.91	7.63	4.96	10.30	17.84	7.78	6.04	9.52	11.39
Kep. Bangka Belitung	12.10	8.41	15.79	15.56	9.75	5.89	13.61	20.21	10.98	8.29	13.67	12.50
Kepulauan Riau	NA	NA	NA	55.92	0.97	0.19	1.75	41.24	2.84	0.20	5.48	47.36
DKI Jakarta	6.30	3.58	9.03	22.04	4.76	2.31	7.21	26.27	5.54	3.75	7.34	16.52
Jawa Barat	9.80	7.99	11.61	9.43	7.41	5.77	9.04	11.26	8.61	7.40	9.83	7.19
Jawa Tengah	7.90	6.55	9.26	8.75	5.00	3.77	6.23	12.54	6.49	5.56	7.42	7.30
DI Yogyakarta	1.59	0.32	2.86	40.68	NA	NA	NA	57.76	1.32	0.46	2.19	33.44
Jawa Timur	6.87	5.63	8.11	9.18	4.74	3.57	5.90	12.57	5.82	4.97	6.66	7.40
Banten	6.38	3.94	8.82	19.48	6.63	4.30	8.96	17.90	6.50	4.79	8.21	13.43
Bali	4.83	2.15	7.52	28.36	4.32	2.10	6.53	26.16	4.59	2.84	6.33	19.44
Nusa Tenggara Barat	4.37	2.23	6.52	24.98	3.31	1.11	5.51	33.95	3.85	2.33	5.38	20.18
Nusa Tenggara Timur	8.98	7.04	10.91	10.99	5.92	4.32	7.51	13.77	7.48	6.22	8.73	8.56
Kalimantan Barat	11.61	9.06	14.17	11.23	9.25	6.66	11.85	14.30	10.45	8.61	12.28	8.96
Kalimantan Tengah	10.39	7.36	13.42	14.86	6.46	3.76	9.16	21.35	8.46	6.36	10.56	12.66
Kalimantan Selatan	9.98	6.69	13.26	16.82	10.53	7.44	13.63	14.99	10.24	7.99	12.50	11.22
Kalimantan Timur	3.86	2.03	5.70	24.18	3.35	0.93	5.77	36.90	3.62	2.10	5.14	21.46
Kalimantan Utara	8.20	3.61	12.79	28.56	5.13	1.78	8.47	33.28	6.67	3.84	9.50	21.67
Sulawesi Utara	9.08	5.90	12.27	17.90	4.19	2.53	5.85	20.22	6.70	4.85	8.54	14.07
Sulawesi Tengah	12.20	9.05	15.35	13.19	6.40	3.72	9.08	21.34	9.33	7.26	11.40	11.30
Sulawesi Selatan	10.96	8.54	13.39	11.27	7.43	5.43	9.43	13.72	9.19	7.62	10.76	8.73
Sulawesi Tenggara	9.04	6.60	11.47	13.78	5.69	3.85	7.53	16.49	7.37	5.82	8.92	10.72
Gorontalo	15.91	10.15	21.67	18.47	6.36	3.60	9.11	22.15	10.92	7.56	14.27	15.68
Sulawesi Barat	14.24	9.89	18.59	15.59	10.22	6.55	13.89	18.33	12.18	9.20	15.17	12.50
Maluku	3.51	2.23	4.79	18.65	3.07	1.71	4.43	22.65	3.28	2.36	4.21	14.31
Maluku Utara	4.38	2.12	6.64	26.36	2.47	1.16	3.78	26.99	3.41	2.07	4.76	20.03
Papua Barat	4.64	2.03	7.24	28.64	4.09	2.01	6.16	25.95	4.37	2.70	6.04	19.52
Papua	22.50	19.24	25.76	7.39	20.27	17.35	23.19	7.34	21.44	19.10	23.78	5.57
Indonesia	7.97	7.48	8.46	3.15	5.86	5.41	6.31	3.92	6.93	6.60	7.27	2.46

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Warna merah (■) artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.44 *Sampling Error* Angka Tidak Sekolah 16-18 Tahun menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan				Total			Relative Standard Error
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	6.63	3.72	9.54	22.43	11.44	8.94	13.94	11.14	9.76	7.83	11.69	10.09
Sumatera Utara	11.50	9.11	13.88	10.56	15.59	13.32	17.86	7.42	13.27	11.59	14.94	6.44
Sumatera Barat	10.39	6.58	14.21	18.75	19.06	16.18	21.93	7.70	14.45	12.02	16.89	8.58
Riau	11.00	7.52	14.49	16.14	20.67	17.32	24.02	8.26	16.64	14.17	19.12	7.58
Jambi	14.77	9.40	20.13	18.53	22.10	18.53	25.66	8.23	19.45	16.47	22.44	7.84
Sumatera Selatan	12.73	9.42	16.04	13.28	25.02	21.79	28.26	6.59	20.05	17.66	22.43	6.06
Bengkulu	14.99	10.48	19.51	15.35	20.54	16.20	24.89	10.78	18.35	15.15	21.55	8.90
Lampung	20.97	14.97	26.97	14.60	24.75	21.47	28.03	6.76	23.48	20.53	26.43	6.42
Kep. Bangka Belitung	18.45	13.59	23.30	13.44	26.04	19.92	32.17	12.01	21.69	17.85	25.53	9.03
Kepulauan Riau	12.20	6.55	17.85	23.63	19.41	7.01	31.82	32.60	13.04	7.84	18.24	20.34
DKI Jakarta	12.06	9.18	14.93	12.17	-	-	-	-	12.06	9.18	14.93	12.17
Jawa Barat	24.45	22.28	26.63	4.54	37.54	33.77	41.31	5.12	27.03	25.12	28.93	3.60
Jawa Tengah	21.76	19.59	23.93	5.09	28.12	25.58	30.65	4.59	24.72	23.07	26.37	3.41
DI Yogyakarta	4.32	1.89	6.74	28.62	21.66	11.78	31.53	23.26	7.93	4.85	11.02	19.81
Jawa Timur	20.60	18.36	22.84	5.54	29.09	26.56	31.62	4.44	24.23	22.55	25.91	3.54
Banten	20.61	16.75	24.47	9.56	32.91	26.15	39.67	10.48	23.28	19.93	26.63	7.34
Bali	11.68	8.54	14.83	13.73	15.08	10.44	19.72	15.71	12.60	9.98	15.21	10.60
Nusa Tenggara Barat	8.47	5.52	11.42	17.78	23.08	17.49	28.67	12.36	15.48	12.30	18.65	10.46
Nusa Tenggara Timur	14.76	10.68	18.84	14.11	24.44	21.98	26.90	5.14	21.64	19.53	23.74	4.96
Kalimantan Barat	26.01	20.54	31.47	10.72	28.75	25.18	32.32	6.34	27.71	24.69	30.74	5.57
Kalimantan Tengah	22.53	16.73	28.32	13.14	31.86	27.26	36.46	7.36	27.66	24.00	31.31	6.74
Kalimantan Selatan	19.86	15.56	24.17	11.06	25.85	21.64	30.07	8.31	22.81	19.78	25.83	6.76
Kalimantan Timur	10.46	7.42	13.51	14.86	15.66	10.28	21.04	17.53	11.91	9.23	14.59	11.47
Kalimantan Utara	18.83	12.80	24.86	16.33	17.46	11.26	23.65	18.11	18.36	13.88	22.84	12.45
Sulawesi Utara	13.38	9.50	17.26	14.79	22.16	18.52	25.80	8.38	16.99	14.26	19.73	8.21
Sulawesi Tengah	10.73	6.73	14.72	19.00	27.98	23.91	32.06	7.42	21.48	18.39	24.57	7.34
Sulawesi Selatan	19.76	15.73	23.80	10.42	27.40	24.27	30.53	5.83	23.51	20.95	26.07	5.56
Sulawesi Tenggara	15.54	10.55	20.54	16.40	22.12	18.83	25.42	7.60	19.51	16.69	22.34	7.38
Gorontalo	21.02	14.51	27.53	15.81	28.38	22.93	33.83	9.79	25.05	20.87	29.22	8.50
Sulawesi Barat	24.38	14.54	34.23	20.59	23.65	19.28	28.01	9.41	23.81	19.78	27.83	8.63
Maluku	9.75	4.78	14.72	25.99	14.92	11.88	17.97	10.41	12.46	9.62	15.30	11.62
Maluku Utara	10.29	5.38	15.20	24.35	17.81	14.23	21.40	10.27	15.59	12.64	18.54	9.64
Papua Barat	11.03	5.81	16.24	24.14	17.46	13.98	20.94	10.18	14.88	11.97	17.79	9.99
Papua	14.48	10.25	18.72	14.91	45.00	41.42	48.58	4.06	36.67	33.71	39.64	4.13
Indonesia	18.50	17.69	19.31	2.24	26.06	25.28	26.84	1.53	21.61	21.04	22.19	1.36

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 3.45 *Sampling Error Angka Tidak Sekolah 16-18 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023*

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	9.66	6.93	12.38	14.38	9.86	7.46	12.25	12.38	9.76	7.83	11.69	10.09
Sumatera Utara	16.36	13.71	19.01	8.25	10.15	8.03	12.27	10.67	13.27	11.59	14.94	6.44
Sumatera Barat	20.82	16.65	24.99	10.21	8.03	5.87	10.18	13.67	14.45	12.02	16.89	8.58
Riau	20.56	17.03	24.09	8.77	12.48	9.50	15.46	12.17	16.64	14.17	19.12	7.58
Jambi	24.84	20.50	29.17	8.90	13.83	10.41	17.25	12.62	19.45	16.47	22.44	7.84
Sumatera Selatan	22.54	18.95	26.13	8.12	17.38	14.09	20.68	9.66	20.05	17.66	22.43	6.06
Bengkulu	23.19	18.51	27.87	10.30	13.03	9.28	16.78	14.67	18.35	15.15	21.55	8.90
Lampung	25.39	21.65	29.13	7.51	21.37	17.22	25.53	9.92	23.48	20.53	26.43	6.42
Kep. Bangka Belitung	24.16	18.65	29.67	11.64	19.18	14.03	24.32	13.68	21.69	17.85	25.53	9.03
Kepulauan Riau	14.53	7.94	21.12	23.15	11.41	3.53	19.29	35.23	13.04	7.84	18.24	20.34
DKI Jakarta	15.19	10.70	19.67	15.07	9.10	5.67	12.52	19.23	12.06	9.18	14.93	12.17
Jawa Barat	29.83	27.11	32.56	4.66	23.93	21.30	26.56	5.60	27.03	25.12	28.93	3.60
Jawa Tengah	25.68	23.41	27.95	4.51	23.68	21.29	26.06	5.14	24.72	23.07	26.37	3.41
DI Yogyakarta	8.62	4.46	12.79	24.64	7.23	2.42	12.05	33.97	7.93	4.85	11.02	19.81
Jawa Timur	25.07	22.83	27.31	4.56	23.38	21.00	25.75	5.18	24.23	22.55	25.91	3.54
Banten	23.36	18.19	28.54	11.30	23.20	18.95	27.45	9.34	23.28	19.93	26.63	7.34
Bali	11.95	8.32	15.58	15.49	13.32	9.36	17.28	15.17	12.60	9.98	15.21	10.60
Nusa Tenggara Barat	18.03	13.47	22.60	12.92	12.89	8.72	17.07	16.52	15.48	12.30	18.65	10.46
Nusa Tenggara Timur	22.98	19.93	26.04	6.78	20.24	17.32	23.15	7.34	21.64	19.53	23.74	4.96
Kalimantan Barat	30.57	26.53	34.60	6.73	24.63	20.25	29.01	9.08	27.71	24.69	30.74	5.57
Kalimantan Tengah	30.92	25.95	35.89	8.19	24.31	19.25	29.36	10.61	27.66	24.00	31.31	6.74
Kalimantan Selatan	25.13	20.53	29.72	9.33	20.50	16.67	24.32	9.52	22.81	19.78	25.83	6.76
Kalimantan Timur	15.12	10.87	19.37	14.35	8.40	5.60	11.20	17.00	11.91	9.23	14.59	11.47
Kalimantan Utara	21.75	15.12	28.37	15.54	15.10	9.56	20.64	18.71	18.36	13.88	22.84	12.45
Sulawesi Utara	16.87	13.72	20.02	9.53	17.13	12.62	21.64	13.44	16.99	14.26	19.73	8.21
Sulawesi Tengah	25.09	20.53	29.65	9.27	18.10	14.10	22.10	11.28	21.48	18.39	24.57	7.34
Sulawesi Selatan	26.01	22.39	29.63	7.10	20.97	17.59	24.35	8.23	23.51	20.95	26.07	5.56
Sulawesi Tenggara	23.04	18.74	27.34	9.52	15.88	12.47	19.29	10.95	19.51	16.69	22.34	7.38
Gorontalo	30.71	24.38	37.04	10.51	18.99	13.63	24.34	14.40	25.05	20.87	29.22	8.50
Sulawesi Barat	30.25	24.62	35.88	9.49	16.45	11.86	21.05	14.25	23.81	19.78	27.83	8.63
Maluku	15.75	11.14	20.36	14.93	9.09	6.47	11.71	14.70	12.46	9.62	15.30	11.62
Maluku Utara	15.25	11.63	18.88	12.13	15.93	11.53	20.34	14.10	15.59	12.64	18.54	9.64
Papua Barat	16.13	12.00	20.26	13.05	13.56	9.64	17.47	14.72	14.88	11.97	17.79	9.99
Papua	35.95	32.19	39.71	5.34	37.46	33.48	41.44	5.42	36.67	33.71	39.64	4.13
Indonesia	23.78	22.96	24.61	1.77	19.34	18.56	20.12	2.06	21.61	21.04	22.19	1.36

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



4

KEGIATAN
PESERTA DIDIK



Wajah pendidikan Indonesia mengalami perubahan sejak adanya pandemi Covid-19 pada tiga tahun yang lalu. Setelah diberlakukannya pembelajaran dengan metode daring secara penuh di tahun 2020 sampai dengan 2022, akhirnya pada tahun 2023 Presiden RI melalui KEPPRES No 17 tahun 2023 menetapkan berakhirnya status pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia. Dengan beralihnya metode pendidikan yang kembali menjadi luring, pada bab ini akan dilihat apakah terdapat perubahan kegiatan peserta didik dalam hal akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maupun kegiatan bekerja dan atau melakukan pekerjaan rumah tangga pada tahun 2023.

4.1 Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era yang serba canggih saat ini tidak terlepas dari aktivitas seluruh penduduk, termasuk para peserta didik di Indonesia. Selain itu, sejak adanya pandemi Covid-19, peserta didik dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan gaya belajar baru secara daring. Penggunaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar seperti internet, telepon seluler, maupun komputer menjadi sebuah keharusan. Akan tetapi, di tahun 2023 sekolah sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Namun demikian, penggunaan TIK masih terus dilakukan untuk membantu mempermudah proses belajar mengajar peserta didik.

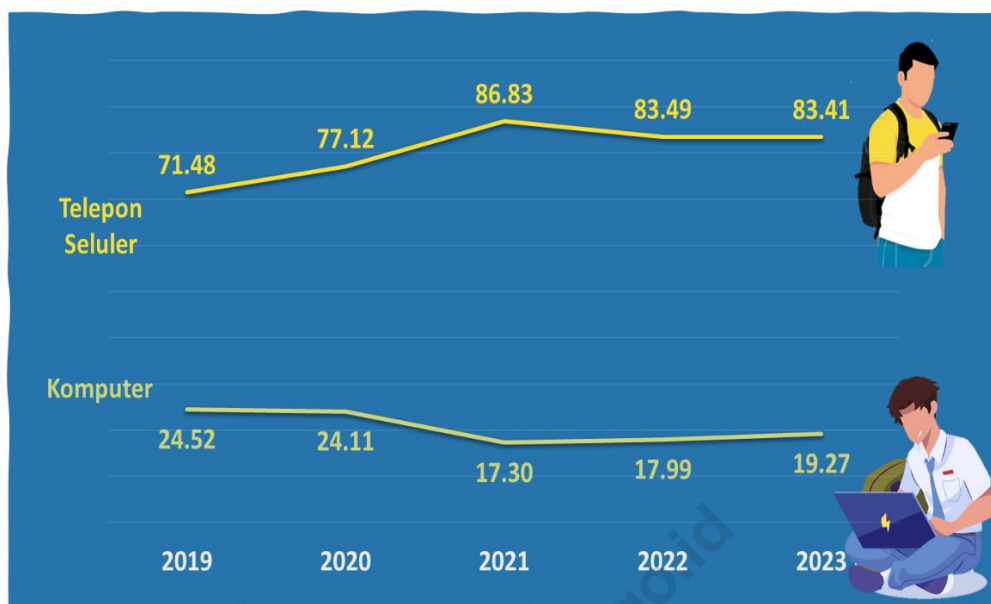
Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa pola penggunaan internet oleh peserta didik umur 5-24 tahun mengalami fluktuatif. Setelah kenaikan yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan 2021, persentase peserta didik umur 5-24 tahun yang menggunakan internet sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 76,76 persen. Namun demikian, angka tersebut kembali naik di tahun 2023 menjadi 77,46 persen. Hal ini terjadi meskipun kegiatan belajar mengajar peserta didik secara umum sudah dilakukan melalui tatap muka. Angka tersebut menunjukkan bahwa internet merupakan salah satu sarana TIK yang diperlukan oleh peserta didik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Internet, 2019-2023

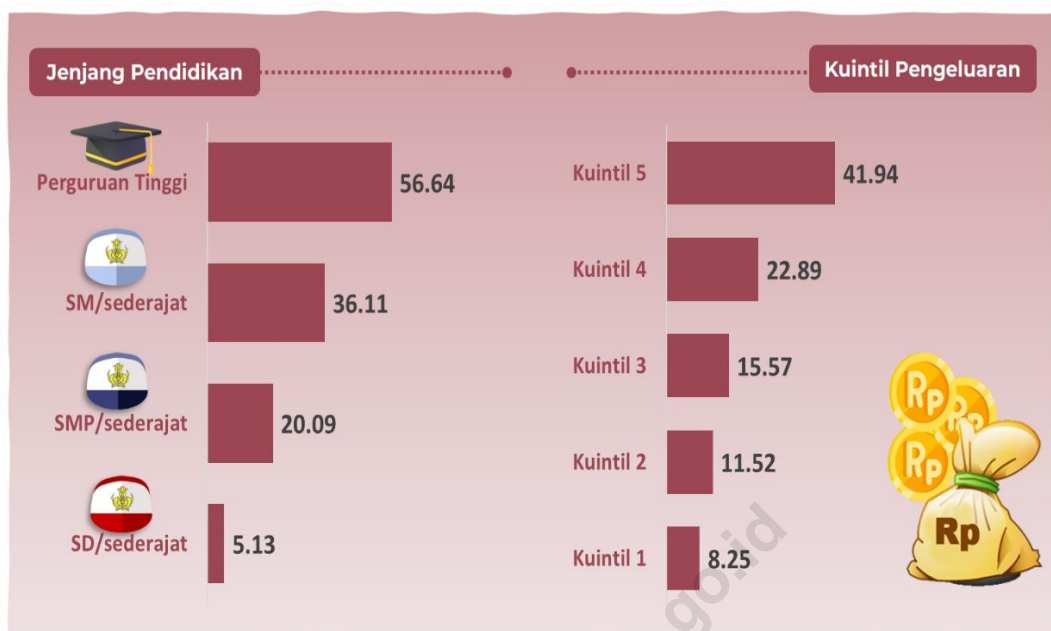
Hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 83,41 persen peserta didik umur 5-24 tahun yang menggunakan telepon seluler dan 19,27 persen yang menggunakan komputer (Gambar 4.2). Penggunaan telepon seluler oleh peserta didik terus meningkat pada tahun 2019 sampai dengan 2021 kemudian menurun di tahun 2022 dan 2023. Pola sebaliknya terjadi pada penggunaan komputer oleh peserta didik. Peserta didik umur 5-24 tahun yang menggunakan komputer (termasuk *PC/desktop*, *laptop/notebook*, *tablet/sejenis komputer genggam*) justru terus menurun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dan mulai naik pada tahun 2022 dan 2023. Secara umum, penggunaan komputer pada peserta didik jauh lebih rendah dibandingkan penggunaan telepon seluler. Perkembangan teknologi telepon seluler semakin pesat hingga dapat digunakan untuk melakukan beberapa fungsi komputer (Intan dkk, 2017).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer, 2019-2023

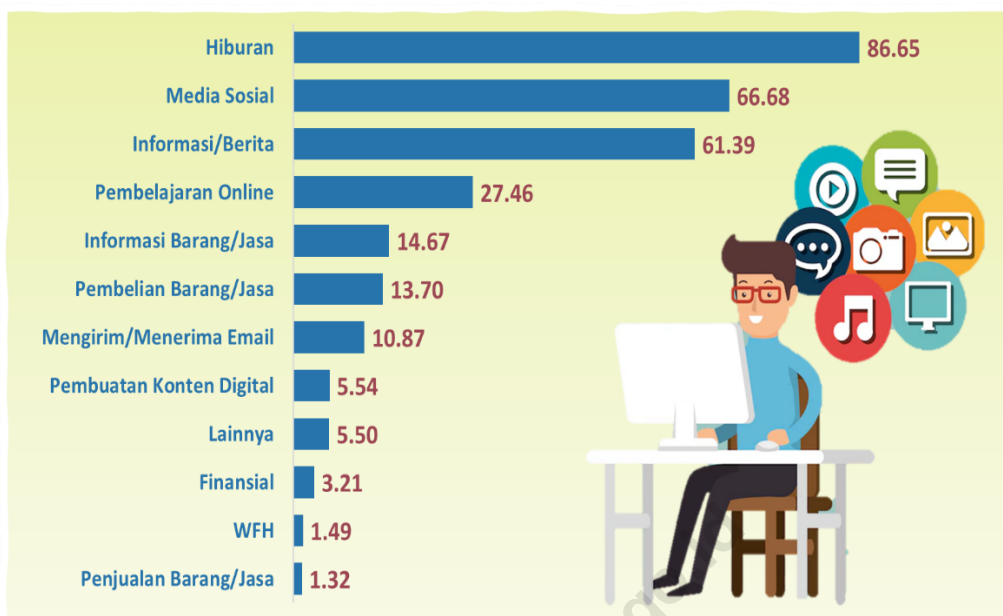
Tidak seperti penggunaan telepon seluler yang cenderung homogen, jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan dan kelompok pengeluaran rumah tangga, persentase penggunaan komputer cenderung memiliki pola tertentu. Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, penggunaan komputer pada peserta didik semakin tinggi. Dapat dilihat hanya 5,13 persen peserta didik pada jenjang SD/ sederajat, sementara itu terdapat 56,64 persen penduduk pada jenjang perguruan tinggi yang menggunakan komputer. Begitu juga berdasarkan tingkat kesejahteraan, semakin tinggi kuintil pengeluaran rumah tangga, maka persentase penggunaan komputer pada peserta didik juga semakin tinggi. Terlihat bahwa pada kuintil 1 sebesar 8,25 persen, sementara 41,94 persen peserta didik pada kuintil 5 menggunakan komputer.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer menurut Jenjang Pendidikan dan Kuintil Pengeluaran, 2023

Meskipun sistem pendidikan Indonesia sedikit banyak memengaruhi penggunaan internet bagi para peserta didik, namun realita di lapangan menunjukkan penggunaan internet di kalangan peserta didik di tahun 2023 bukan didominasi oleh pembelajaran daring. Penggunaan internet terbanyak pada peserta didik didominasi untuk tujuan hiburan (86,65 persen) dan media sosial (66,68 persen). Sementara itu, hanya 27,46 persen penggunaan internet untuk pembelajaran *online* oleh peserta didik di tahun 2023 (lihat Gambar 4.4). Rendahnya tujuan penggunaan internet untuk pembelajaran *online* tersebut dapat disebabkan oleh pembelajaran di Indonesia yang hampir 100 persen sudah dilaksanakan secara tatap muka di tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

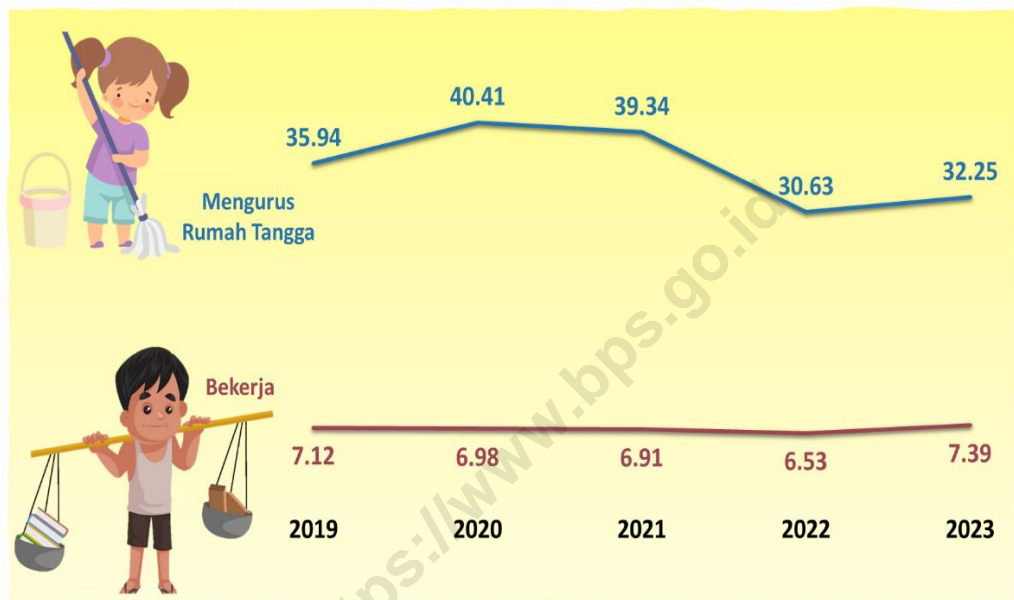
Gambar 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Penggunaannya, 2023

4.2 Aktivitas Peserta Didik Selain Bersekolah

Tidak hanya bersekolah, peserta didik juga melakukan kegiatan lainnya seperti mengurus rumah tangga maupun bekerja. Hal ini dikarenakan, usia peserta didik yang dianalisis pada publikasi ini yaitu yang berusia 5-24 tahun beririsan dengan usia bekerja (minimal 13 tahun untuk anak melakukan pekerjaan ringan menurut UU No. 13 Tahun 2003) dan usia perkawinan (minimal 19 tahun menurut UU No. 16 Tahun 2019). Akan tetapi, karena tujuan utama publikasi ini adalah untuk melihat aktivitas peserta didik secara keseluruhan, maka analisis yang digunakan dalam melihat kegiatan/aktivitas lain dibatasi pada peserta didik yang berusia 10-24 tahun.

Pada tahun 2023 aktivitas peserta didik usia 10-24 tahun untuk bekerja dan mengurus rumah tangga mengalami kenaikan, namun demikian kedua aktivitas tersebut memiliki pola yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Persentase peserta didik yang mengurus rumah tangga mengalami kenaikan

sekitar 1,62 persen poin di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 (Gambar 4.5). Sementara itu, angka peserta didik yang bekerja juga naik sekitar 0,86 persen poin dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 7,39 persen. Kenaikan aktivitas peserta didik selain sekolah tersebut menunjukkan bahwa masa endemi cukup memengaruhi kegiatan penduduk yang sebelumnya banyak dibatasi, salah satunya untuk bekerja atau bahkan mengurus rumah tangga.



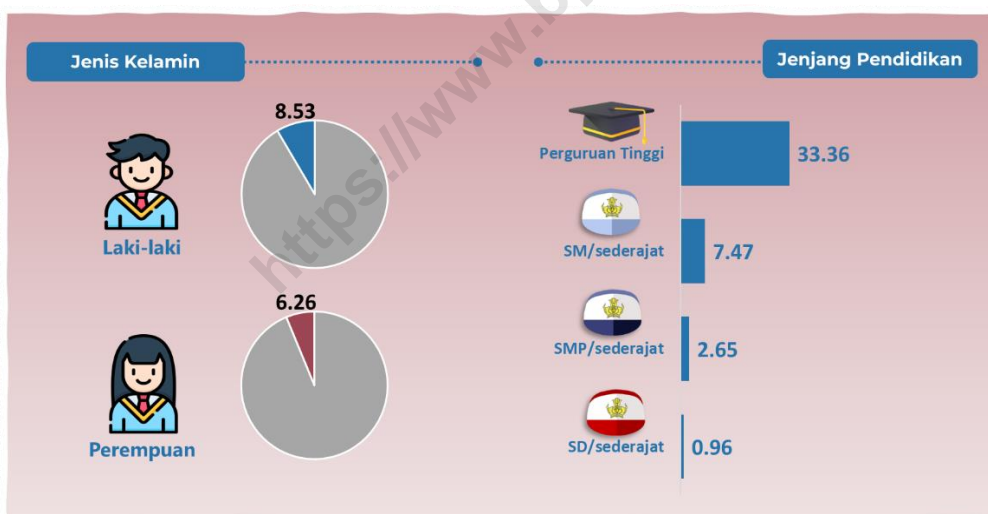
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga, 2019-2023

Sebuah studi yang berjudul *“The Benefits and Risks of Adolescent Employment”* (Mortimer, 2010) menyatakan bahwa pemuda yang bekerja dapat memiliki dampak positif dan negatif. Bekerja dapat mendorong perkembangan yang sehat seperti meningkatkan keterampilan manajemen waktu, rasa tanggung jawab, pengaturan keuangan, dsb. Akan tetapi, bekerja juga dapat memberikan dampak negatif terhadap peserta didik. Tekanan pekerjaan akan memberikan banyak risiko, salah satunya dapat mengganggu proses belajar mengajar peserta didik tersebut. Bahkan dalam kondisi ekstrim, pekerjaan juga dapat menyebabkan putus sekolah. Oleh karena itu, idealnya jenis pekerjaan yang dilakukan peserta didik menyesuaikan dengan kondisi serta beban kerja

yang memenuhi rekomendasi yang tertera pada regulasi mengenai pekerjaan di Indonesia yang telah disesuaikan dengan usia para peserta didik tersebut.

Visualisasi pada Gambar 4.6 menunjukkan persentase peserta didik yang bekerja semakin besar seiring semakin tingginya jenjang pendidikan. Terdapat sekitar 0,96 persen peserta didik pada jenjang SD/ sederajat yang bekerja, di sisi lain peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi yang bekerja jauh lebih besar yaitu 33,36 persen. Meskipun persentasenya relatif kecil, namun temuan ini juga harus menjadi perhatian karena berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, usia minimal untuk bekerja ringan adalah 13 tahun. Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik pada jenjang SD/ sederajat (yang sebagian besar berusia di bawah 13 tahun) masih ada yang bekerja. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa peserta didik laki-laki lebih banyak yang bekerja dibandingkan perempuan (8,53 persen berbanding 6,26 persen).

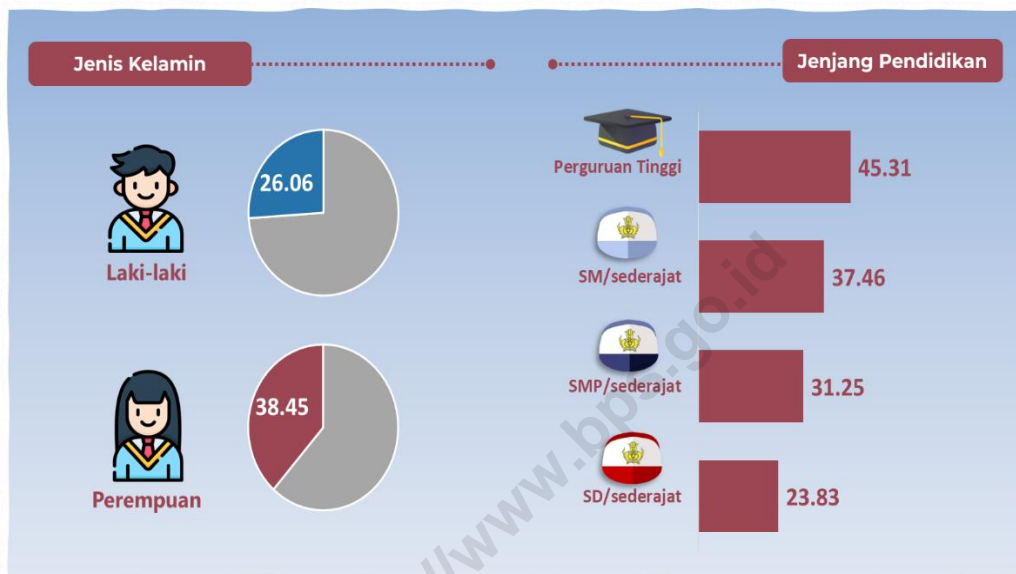


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.6 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2023

Berbeda dengan persentase peserta didik yang bekerja, perempuan yang mengurus rumah tangga lebih tinggi dibandingkan laki-laki (38,45 persen berbanding 26,06 persen) (lihat Gambar 4.7). Bosoni (2014) menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan telah ada sejak masyarakat

tradisional (pra-industri) yaitu perempuan dikaitkan untuk pengasuhan anak dan tugas-tugas rumah tangga, sementara laki-laki memainkan perannya sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, jika dilihat menurut jenjang pendidikan, persentase peserta didik yang mengurus rumah tangga semakin besar seiring semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.7 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2023

Gambar 4.8 menunjukkan kegiatan yang memakan waktu terbanyak yang dilakukan oleh peserta didik. Terlihat bahwa meskipun sebagian peserta didik melakukan kegiatan utama selain sekolah, namun partisipasi sekolah masih mendominasi yaitu sekitar 87,61 persen di tahun 2023. Hal ini sejalan dengan didorongnya wajib belajar 12 tahun dan juga tuntutan dunia kerja pada zaman sekarang yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu prasyarat dalam perekrutan pekerja. Sementara itu, karena usia peserta didik yang dianalisis beririsan dengan usia kawin dan usia kerja, sehingga terdapat sekitar 5,60 persen peserta didik yang bekerja serta 3,05 persen yang mengurus rumah tangga sebagai kegiatan utama yang dilakukan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4.8 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun menurut Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak, 2023

Tabel 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 tahun yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Karakteristik Demografi dan Media Mengakses TIK, 2023

Karakteristik	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Menggunakan Telepon seluler	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	83,41	19,27	77,46
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	82,94	17,51	76,74
Perempuan	83,89	21,04	78,19
Status Disabilitas			
Disabilitas	54,84	7,95	50,62
Nondisabilitas	83,52	19,32	77,56
Jenjang Pendidikan			
SD/ sederajat	72,28	5,13	62,56
SMP/ sederajat	90,81	20,09	87,13
SM/ sederajat	96,90	36,11	95,65
PT	98,25	56,64	97,57
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	73,70	8,25	64,11
Kuintil 2	80,65	11,52	73,47
Kuintil 3	84,85	15,57	78,67
Kuintil 4	88,14	22,89	84,02
Kuintil 5	91,43	41,94	89,54
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	86,12	24,62	82,22
Perdesaan	79,49	11,52	70,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2023

Tabel 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 menurut Karakteristik Demografi dan Status Bekerja, 2023

Karakteristik	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	7,39	92,61	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	8,53	91,47	100,00
Perempuan	6,26	93,74	100,00
Status Disabilitas			
Disabilitas	4,14	95,86	100,00
Nondisabilitas	7,41	92,59	100,00
Jenjang Pendidikan			
SD/ sederajat	0,96	99,04	100,00
SMP/ sederajat	2,65	97,35	100,00
SM/ sederajat	7,47	92,53	100,00
PT	33,36	66,64	100,00
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	5,87	94,13	100,00
Kuintil 2	6,30	93,70	100,00
Kuintil 3	7,57	92,43	100,00
Kuintil 4	8,31	91,69	100,00
Kuintil 5	9,08	90,92	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	7,30	92,70	100,00
Perdesaan	7,54	92,46	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Karakteristik Demografi dan Lapangan Usaha Utama, 2023

Karakteristik	Lapangan Usaha Utama		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	22,12	19,25	58,63
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	28,67	21,69	49,64
Perempuan	13,16	15,91	70,93
Status Disabilitas			
Disabilitas	48,75	21,64	29,61
Nondisabilitas	22,06	19,24	58,70
Jenjang Pendidikan			
SD/ sederajat	41,84	10,21	47,95
SMP/ sederajat	47,07	15,31	37,62
SM/ sederajat	30,50	17,94	51,56
PT	12,88	21,13	65,99
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	39,84	18,81	41,35
Kuintil 2	30,36	20,41	49,23
Kuintil 3	22,01	23,58	54,42
Kuintil 4	16,87	16,59	66,55
Kuintil 5	8,75	17,23	74,02
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	5,39	22,49	72,13
Perdesaan	46,53	14,52	38,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.4 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Karakteristik Demografi dan Status Pekerjaan, 2023

Karakteristik	Status Pekerjaan				
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Tidak Dibayar/ Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indonesia	8,76	3,00	54,98	6,38	26,88
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	9,80	3,32	50,14	9,01	27,72
Perempuan	7,35	2,56	61,59	2,78	25,72
Status Disabilitas					
Disabilitas	2,43	11,75	39,83	0,40	45,59
Nondisabilitas	8,78	2,98	55,02	6,39	26,84
Jenjang Pendidikan					
SD/ sederajat	6,57	0,71	15,30	2,93	74,49
SMP/ sederajat	4,99	2,89	23,08	10,38	58,65
SM/ sederajat	7,92	3,34	42,05	7,91	38,79
PT	9,92	3,03	68,81	5,29	12,94
Kuintil Pengeluaran					
Kuintil 1	7,96	3,88	37,62	10,20	40,34
Kuintil 2	7,97	3,17	48,71	8,43	31,73
Kuintil 3	7,85	2,65	57,41	6,52	25,58
Kuintil 4	9,65	2,76	57,96	5,69	23,94
Kuintil 5	9,92	2,81	66,65	2,71	17,91
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	9,12	1,95	68,67	4,34	15,92
Perdesaan	8,24	4,53	35,02	9,35	42,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.5 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun menurut Karakteristik Demografi dan Status Mengurus Rumah Tangga, 2023

Karakteristik	Mengurus Rumah Tangga		
	Ya	Tidak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	32,25	67,75	100,00
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	26,06	73,94	100,00
Perempuan	38,45	61,55	100,00
Status Disabilitas			
Disabilitas	18,27	81,73	100,00
Nondisabilitas	32,31	67,69	100,00
Jenjang Pendidikan			
SD/ sederajat	23,83	76,17	100,00
SMP/ sederajat	31,25	68,75	100,00
SM/ sederajat	37,46	62,54	100,00
PT	45,31	54,69	100,00
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	28,88	71,12	100,00
Kuintil 2	31,86	68,14	100,00
Kuintil 3	32,77	67,23	100,00
Kuintil 4	33,27	66,73	100,00
Kuintil 5	34,62	65,38	100,00
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	33,06	66,94	100,00
Perdesaan	31,03	68,97	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) Maret 2023

Tabel 4.6 Persentase Siswa Umur 10-24 Tahun menurut Karakteristik Demografi dan Kegiatan yang Menggunakan Waktu Terbanyak, 2023

Karakteristik	Bekerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indonesia	5,60	87,61	3,05	2,24
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	6,66	87,14	1,62	2,79
Perempuan	4,54	88,08	4,49	1,69
Status Disabilitas				
Disabilitas	2,77	55,96	5,51	7,82
Nondisabilitas	5,61	87,74	3,04	2,22
Jenjang Pendidikan				
SD/ sederajat	0,24	96,81	0,72	0,96
SMP/ sederajat	1,25	94,40	1,54	1,53
SM/ sederajat	4,97	87,60	3,41	2,66
PT	29,39	50,30	11,35	6,10
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	4,13	87,01	3,95	2,80
Kuintil 2	4,64	88,17	3,29	2,19
Kuintil 3	5,84	87,76	2,88	2,11
Kuintil 4	6,38	87,55	2,84	2,07
Kuintil 5	7,12	87,52	2,25	2,01
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	5,85	87,85	2,69	2,30
Perdesaan	5,22	87,24	3,59	2,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.7 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	79,09	82,57	80,87
Sumatera Utara	86,25	87,03	86,63
Sumatera Barat	86,67	88,51	87,60
Riau	87,34	89,22	88,31
Jambi	86,23	88,87	87,57
Sumatera Selatan	89,50	90,18	89,84
Bengkulu	92,11	89,48	90,74
Lampung	89,53	91,35	90,47
Kep. Bangka Belitung	94,30	92,51	93,42
Kep. Riau	91,37	92,09	91,74
DKI Jakarta	86,91	86,41	86,66
Jawa Barat	82,82	83,61	83,21
Jawa Tengah	87,82	87,15	87,48
DI Yogyakarta	92,38	93,00	92,68
Jawa Timur	87,49	87,22	87,35
Banten	81,07	82,06	81,56
Bali	91,70	93,98	92,82
Nusa Tenggara Barat	89,84	91,62	90,72
Nusa Tenggara Timur	84,38	84,67	84,52
Kalimantan Barat	86,55	86,61	86,58
Kalimantan Tengah	85,07	85,84	85,46
Kalimantan Selatan	87,47	90,09	88,78
Kalimantan Timur	86,53	88,58	87,53
Kalimantan Utara	87,16	86,59	86,87
Sulawesi Utara	84,87	83,14	83,99
Sulawesi Tengah	86,27	86,68	86,48
Sulawesi Selatan	87,54	90,69	89,11
Sulawesi Tenggara	85,13	88,17	86,64
Gorontalo	92,05	95,02	93,61
Sulawesi Barat	90,53	92,55	91,59
Maluku	83,00	87,02	85,04
Maluku Utara	82,50	84,48	83,52
Papua Barat	67,42	67,56	67,49
Papua	74,07	72,37	73,23
Indonesia	85,78	86,47	86,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.8 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	69,67	71,32	70,49
Sumatera Utara	80,80	80,12	80,47
Sumatera Barat	83,05	83,92	83,48
Riau	79,91	83,93	81,90
Jambi	81,98	82,04	82,01
Sumatera Selatan	78,95	81,98	80,46
Bengkulu	81,55	81,24	81,40
Lampung	86,63	87,53	87,08
Kep. Bangka Belitung	85,31	87,26	86,26
Kep. Riau	78,93	79,31	79,10
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	77,90	78,48	78,18
Jawa Tengah	86,11	86,67	86,38
DI Yogyakarta	87,39	87,51	87,46
Jawa Timur	84,48	83,55	84,01
Banten	72,91	75,29	74,05
Bali	88,77	89,30	89,02
Nusa Tenggara Barat	85,96	87,28	86,61
Nusa Tenggara Timur	70,35	71,21	70,79
Kalimantan Barat	70,18	74,96	72,54
Kalimantan Tengah	74,76	76,78	75,75
Kalimantan Selatan	84,42	87,12	85,76
Kalimantan Timur	79,13	78,53	78,84
Kalimantan Utara	77,92	79,56	78,74
Sulawesi Utara	77,10	78,09	77,59
Sulawesi Tengah	70,98	72,98	71,99
Sulawesi Selatan	81,54	84,90	83,23
Sulawesi Tenggara	81,70	84,39	83,04
Gorontalo	85,57	88,25	86,94
Sulawesi Barat	80,00	81,34	80,69
Maluku	61,97	63,09	62,53
Maluku Utara	60,45	63,50	61,95
Papua Barat	57,48	60,48	58,94
Papua	23,95	25,84	24,84
Indonesia	78,86	80,12	79,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.9 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Seluler Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	73.01	75.41	74.22
Sumatera Utara	83.86	83.98	83.92
Sumatera Barat	84.94	86.34	85.65
Riau	82.97	86.20	84.60
Jambi	83.54	84.59	84.07
Sumatera Selatan	83.13	85.29	84.22
Bengkulu	85.41	84.40	84.90
Lampung	87.62	88.91	88.27
Kep. Bangka Belitung	90.57	90.36	90.47
Kep. Riau	89.78	90.74	90.26
DKI Jakarta	86.91	86.41	86.66
Jawa Barat	81.88	82.66	82.27
Jawa Tengah	87.04	86.93	86.99
DI Yogyakarta	91.37	91.85	91.61
Jawa Timur	86.25	85.69	85.97
Banten	79.26	80.62	79.93
Bali	90.91	92.76	91.81
Nusa Tenggara Barat	87.99	89.53	88.75
Nusa Tenggara Timur	74.40	74.93	74.67
Kalimantan Barat	76.40	79.66	78.04
Kalimantan Tengah	79.27	80.91	80.10
Kalimantan Selatan	85.97	88.64	87.30
Kalimantan Timur	84.38	85.73	85.03
Kalimantan Utara	83.79	84.14	83.97
Sulawesi Utara	81.47	80.99	81.23
Sulawesi Tengah	76.29	77.85	77.09
Sulawesi Selatan	84.53	87.76	86.15
Sulawesi Tenggara	83.11	85.94	84.52
Gorontalo	88.64	91.58	90.16
Sulawesi Barat	82.18	83.73	82.98
Maluku	71.19	73.91	72.55
Maluku Utara	66.77	69.99	68.37
Papua Barat	61.56	63.42	62.47
Papua	40.17	41.79	40.95
Indonesia	82.94	83.89	83.41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.10 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16,39	19,42	17,94
Sumatera Utara	15,41	19,61	17,48
Sumatera Barat	23,08	29,39	26,28
Riau	19,58	22,39	21,03
Jambi	19,46	21,87	20,68
Sumatera Selatan	19,09	24,03	21,59
Bengkulu	27,03	32,70	29,99
Lampung	23,99	27,26	25,68
Kep. Bangka Belitung	19,56	24,96	22,22
Kep. Riau	26,06	29,61	27,85
DKI Jakarta	30,73	32,51	31,63
Jawa Barat	20,57	24,70	22,63
Jawa Tengah	24,68	29,10	26,90
DI Yogyakarta	36,31	42,19	39,21
Jawa Timur	28,20	32,31	30,25
Banten	22,19	22,17	22,18
Bali	28,01	32,34	30,14
Nusa Tenggara Barat	16,58	18,28	17,42
Nusa Tenggara Timur	21,16	25,34	23,21
Kalimantan Barat	15,16	21,05	18,22
Kalimantan Tengah	18,46	18,89	18,68
Kalimantan Selatan	18,44	21,27	19,86
Kalimantan Timur	21,93	28,01	24,91
Kalimantan Utara	19,43	25,40	22,50
Sulawesi Utara	19,29	22,25	20,79
Sulawesi Tengah	21,21	28,30	24,85
Sulawesi Selatan	22,51	26,64	24,57
Sulawesi Tenggara	18,19	25,41	21,78
Gorontalo	25,67	27,98	26,89
Sulawesi Barat	19,83	26,80	23,48
Maluku	23,93	28,99	26,50
Maluku Utara	14,67	17,72	16,25
Papua Barat	13,54	15,21	14,36
Papua	17,58	18,67	18,12
Indonesia	22,73	26,50	24,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.11 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6,40	8,65	7,52
Sumatera Utara	8,81	10,44	9,62
Sumatera Barat	11,11	14,89	13,00
Riau	8,94	11,43	10,17
Jambi	9,43	10,32	9,87
Sumatera Selatan	7,00	9,25	8,13
Bengkulu	9,21	12,78	11,00
Lampung	9,40	14,20	11,78
Kep. Bangka Belitung	8,91	11,22	10,04
Kep. Riau	5,93	13,91	9,53
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	10,45	11,87	11,14
Jawa Tengah	14,73	19,04	16,84
DI Yogyakarta	30,44	30,41	30,42
Jawa Timur	14,75	18,37	16,58
Banten	6,02	7,44	6,70
Bali	11,74	10,29	11,04
Nusa Tenggara Barat	8,63	11,37	9,99
Nusa Tenggara Timur	7,94	10,10	9,03
Kalimantan Barat	5,79	8,16	6,96
Kalimantan Tengah	6,26	9,69	7,95
Kalimantan Selatan	10,69	14,90	12,78
Kalimantan Timur	6,46	10,77	8,53
Kalimantan Utara	7,77	11,23	9,49
Sulawesi Utara	7,29	12,79	10,00
Sulawesi Tengah	6,30	9,18	7,75
Sulawesi Selatan	9,39	15,58	12,51
Sulawesi Tenggara	6,55	10,54	8,55
Gorontalo	9,46	14,31	11,93
Sulawesi Barat	10,63	14,63	12,69
Maluku	4,44	7,06	5,74
Maluku Utara	3,70	5,62	4,64
Papua Barat	6,21	5,66	5,94
Papua	1,71	2,53	2,10
Indonesia	10,02	13,05	11,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.12 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,94	12,57	11,26
Sumatera Utara	12,52	15,57	14,02
Sumatera Barat	17,35	22,55	19,97
Riau	13,32	16,14	14,74
Jambi	13,10	14,64	13,87
Sumatera Selatan	11,80	15,23	13,52
Bengkulu	15,72	20,41	18,12
Lampung	14,37	18,92	16,66
Kep. Bangka Belitung	15,13	19,35	17,20
Kep. Riau	23,48	27,95	25,71
DKI Jakarta	30,73	32,51	31,63
Jawa Barat	18,63	22,32	20,47
Jawa Tengah	20,13	24,62	22,36
DI Yogyakarta	35,12	39,73	37,41
Jawa Timur	22,67	26,49	24,58
Banten	18,60	19,04	18,82
Bali	23,61	26,60	25,07
Nusa Tenggara Barat	12,79	14,95	13,86
Nusa Tenggara Timur	11,76	14,31	13,04
Kalimantan Barat	9,35	13,36	11,37
Kalimantan Tengah	11,60	13,89	12,75
Kalimantan Selatan	14,64	18,16	16,39
Kalimantan Timur	17,43	23,12	20,20
Kalimantan Utara	15,17	20,46	17,86
Sulawesi Utara	14,04	18,23	16,13
Sulawesi Tengah	11,48	15,98	13,76
Sulawesi Selatan	15,93	21,05	18,50
Sulawesi Tenggara	11,35	16,63	13,98
Gorontalo	17,15	21,04	19,16
Sulawesi Barat	12,53	17,23	14,96
Maluku	12,98	16,98	14,98
Maluku Utara	6,84	9,36	8,09
Papua Barat	9,22	9,63	9,42
Papua	6,84	8,07	7,43
Indonesia	17,51	21,04	19,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.13 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	68,08	71,22	69,68
Sumatera Utara	76,12	78,01	77,05
Sumatera Barat	79,63	80,64	80,14
Riau	80,56	83,35	82,00
Jambi	82,02	80,51	81,25
Sumatera Selatan	83,16	86,83	85,02
Bengkulu	85,22	89,07	87,23
Lampung	82,98	87,34	85,24
Kep. Bangka Belitung	87,30	85,55	86,44
Kep. Riau	84,24	88,24	86,26
DKI Jakarta	82,59	83,13	82,86
Jawa Barat	79,42	81,17	80,29
Jawa Tengah	87,10	87,16	87,13
DI Yogyakarta	92,85	94,23	93,53
Jawa Timur	84,72	85,46	85,09
Banten	76,28	77,46	76,86
Bali	87,64	88,64	88,13
Nusa Tenggara Barat	82,96	83,24	83,10
Nusa Tenggara Timur	74,14	77,35	75,72
Kalimantan Barat	81,71	82,92	82,34
Kalimantan Tengah	81,87	84,28	83,11
Kalimantan Selatan	82,99	88,11	85,55
Kalimantan Timur	86,28	87,00	86,63
Kalimantan Utara	83,28	83,81	83,55
Sulawesi Utara	77,45	77,03	77,24
Sulawesi Tengah	79,70	83,65	81,73
Sulawesi Selatan	82,73	85,50	84,11
Sulawesi Tenggara	78,92	82,72	80,81
Gorontalo	84,42	90,66	87,71
Sulawesi Barat	78,93	87,66	83,51
Maluku	76,36	81,85	79,15
Maluku Utara	75,22	79,31	77,34
Papua Barat	66,06	66,94	66,49
Papua	68,41	67,96	68,19
Indonesia	81,45	83,00	82,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.14 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	54,93	54,84	54,89
Sumatera Utara	70,38	69,89	70,14
Sumatera Barat	71,41	72,13	71,77
Riau	69,68	74,44	72,05
Jambi	74,40	75,13	74,76
Sumatera Selatan	70,35	73,44	71,89
Bengkulu	72,19	73,48	72,84
Lampung	80,94	81,69	81,31
Kep. Bangka Belitung	76,33	79,15	77,70
Kep. Riau	65,31	70,46	67,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	71,90	73,15	72,51
Jawa Tengah	85,55	84,98	85,27
DI Yogyakarta	87,42	88,95	88,19
Jawa Timur	76,52	75,94	76,23
Banten	63,69	68,43	65,98
Bali	81,06	81,94	81,48
Nusa Tenggara Barat	74,09	73,17	73,63
Nusa Tenggara Timur	44,30	45,02	44,67
Kalimantan Barat	64,55	67,75	66,14
Kalimantan Tengah	69,88	70,68	70,28
Kalimantan Selatan	79,07	79,80	79,43
Kalimantan Timur	76,75	76,67	76,71
Kalimantan Utara	70,41	74,80	72,59
Sulawesi Utara	62,44	66,26	64,32
Sulawesi Tengah	56,73	58,59	57,67
Sulawesi Selatan	70,70	74,91	72,82
Sulawesi Tenggara	62,16	67,21	64,69
Gorontalo	75,71	74,38	75,03
Sulawesi Barat	64,56	67,93	66,30
Maluku	42,92	45,59	44,24
Maluku Utara	44,51	46,78	45,62
Papua Barat	44,71	46,79	45,72
Papua	14,71	15,96	15,30
Indonesia	69,98	71,15	70,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.15 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	59,59	60,80	60,20
Sumatera Utara	73,60	74,43	74,01
Sumatera Barat	75,70	76,62	76,17
Riau	74,16	78,27	76,23
Jambi	77,19	77,14	77,16
Sumatera Selatan	75,43	78,85	77,15
Bengkulu	76,95	79,45	78,23
Lampung	81,63	83,73	82,69
Kep. Bangka Belitung	82,74	82,93	82,84
Kep. Riau	81,82	86,36	84,09
DKI Jakarta	82,59	83,13	82,86
Jawa Barat	77,98	79,68	78,83
Jawa Tengah	86,39	86,19	86,29
DI Yogyakarta	91,75	93,13	92,44
Jawa Timur	81,35	81,48	81,42
Banten	73,49	75,54	74,50
Bali	85,86	86,90	86,37
Nusa Tenggara Barat	78,74	78,39	78,57
Nusa Tenggara Timur	52,92	53,96	53,44
Kalimantan Barat	71,08	73,88	72,49
Kalimantan Tengah	75,13	76,89	76,01
Kalimantan Selatan	81,07	84,05	82,55
Kalimantan Timur	83,51	84,07	83,78
Kalimantan Utara	78,58	80,66	79,64
Sulawesi Utara	70,88	72,46	71,67
Sulawesi Tengah	64,71	67,51	66,13
Sulawesi Selatan	76,69	80,14	78,42
Sulawesi Tenggara	69,07	73,57	71,31
Gorontalo	79,84	82,39	81,16
Sulawesi Barat	67,54	72,14	69,92
Maluku	57,58	61,99	59,79
Maluku Utara	53,31	56,84	55,07
Papua Barat	53,47	55,16	54,30
Papua	32,09	33,79	32,91
Indonesia	76,74	78,19	77,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.16 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	50,57	72,15	91,97	97,84
Sumatera Utara	59,50	86,66	93,58	98,99
Sumatera Barat	61,54	88,86	96,58	99,82
Riau	66,89	88,39	97,28	98,62
Jambi	65,70	94,27	98,29	97,68
Sumatera Selatan	73,22	92,16	98,78	99,20
Bengkulu	73,93	92,13	99,33	99,54
Lampung	73,05	94,01	97,90	99,49
Kep. Bangka Belitung	76,50	95,66	99,25	98,34
Kep. Riau	78,39	90,89	97,52	98,19
DKI Jakarta	69,71	93,67	97,83	97,66
Jawa Barat	66,01	89,17	97,90	97,88
Jawa Tengah	75,81	95,23	98,71	99,46
DI Yogyakarta	84,41	98,78	99,11	99,65
Jawa Timur	72,04	93,71	98,32	99,12
Banten	59,44	88,86	97,07	99,29
Bali	75,18	96,69	99,49	99,73
Nusa Tenggara Barat	71,17	92,11	96,64	99,06
Nusa Tenggara Timur	55,73	82,73	93,25	98,30
Kalimantan Barat	68,50	92,72	97,12	99,70
Kalimantan Tengah	70,16	94,76	98,36	96,17
Kalimantan Selatan	75,06	92,40	97,19	99,99
Kalimantan Timur	74,15	95,49	99,17	100,00
Kalimantan Utara	69,43	90,30	98,79	100,00
Sulawesi Utara	57,55	89,11	96,42	98,64
Sulawesi Tengah	64,35	86,15	97,99	97,89
Sulawesi Selatan	68,39	91,26	98,55	98,97
Sulawesi Tenggara	61,36	88,56	97,63	98,63
Gorontalo	75,59	96,13	99,43	98,37
Sulawesi Barat	69,83	90,92	100,00	100,00
Maluku	62,84	81,73	92,84	96,82
Maluku Utara	57,74	84,59	94,56	96,97
Papua Barat	43,78	78,05	88,38	89,60
Papua	48,69	76,78	86,72	93,73
Indonesia	68,06	90,88	97,43	98,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.17 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,43	62,00	86,28	94,57
Sumatera Utara	54,39	78,48	93,55	97,34
Sumatera Barat	54,39	83,52	96,49	97,26
Riau	56,23	84,66	94,53	95,75
Jambi	60,17	87,50	96,63	99,59
Sumatera Selatan	56,73	87,09	96,07	95,55
Bengkulu	55,34	87,45	95,89	98,45
Lampung	69,50	92,12	98,48	98,29
Kep. Bangka Belitung	63,89	93,10	98,96	98,45
Kep. Riau	55,34	80,79	82,89	98,75
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	58,18	85,93	96,46	98,56
Jawa Tengah	74,79	94,82	98,44	98,56
DI Yogyakarta	78,00	97,67	99,03	100,00
Jawa Timur	61,96	88,29	95,24	96,04
Banten	51,03	78,72	96,91	93,59
Bali	63,46	94,86	98,75	98,56
Nusa Tenggara Barat	60,47	84,30	92,28	95,60
Nusa Tenggara Timur	26,77	50,93	78,64	84,22
Kalimantan Barat	48,16	80,70	94,68	95,85
Kalimantan Tengah	56,14	82,14	93,52	93,87
Kalimantan Selatan	67,40	89,91	97,64	100,00
Kalimantan Timur	61,64	90,91	95,49	98,56
Kalimantan Utara	56,43	81,82	96,28	99,70
Sulawesi Utara	45,44	77,02	93,08	94,30
Sulawesi Tengah	35,60	72,40	90,44	91,35
Sulawesi Selatan	55,32	86,65	97,69	97,91
Sulawesi Tenggara	43,74	79,56	94,93	98,17
Gorontalo	57,68	89,59	98,40	96,93
Sulawesi Barat	44,87	82,39	96,25	98,85
Maluku	25,80	52,41	74,91	78,11
Maluku Utara	24,99	53,95	76,25	80,95
Papua Barat	27,73	57,11	74,29	76,41
Papua	8,18	19,89	24,11	33,43
Indonesia	55,48	81,93	92,89	94,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.18 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT (19-23 Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	38,62	65,48	88,37	96,04
Sumatera Utara	57,10	82,93	93,57	98,49
Sumatera Barat	57,83	86,26	96,54	98,98
Riau	60,28	86,17	95,81	97,38
Jambi	62,07	89,83	97,29	98,62
Sumatera Selatan	62,79	88,96	97,22	97,95
Bengkulu	61,36	89,12	97,26	99,10
Lampung	70,65	92,74	98,26	98,94
Kep. Bangka Belitung	71,05	94,66	99,14	98,38
Kep. Riau	75,51	89,55	96,03	98,23
DKI Jakarta	69,71	93,67	97,83	97,66
Jawa Barat	64,35	88,56	97,66	97,95
Jawa Tengah	75,33	95,04	98,59	99,18
DI Yogyakarta	82,79	98,50	99,09	99,68
Jawa Timur	67,59	91,33	97,10	98,26
Banten	57,38	86,55	97,04	98,62
Bali	71,99	96,12	99,31	99,52
Nusa Tenggara Barat	65,88	88,17	94,60	97,87
Nusa Tenggara Timur	33,69	59,10	83,49	91,07
Kalimantan Barat	55,54	85,65	95,69	97,75
Kalimantan Tengah	62,07	87,81	95,79	95,17
Kalimantan Selatan	71,12	91,12	97,41	99,99
Kalimantan Timur	70,28	94,03	98,12	99,80
Kalimantan Utara	64,47	87,14	97,92	99,94
Sulawesi Utara	51,87	84,03	95,03	97,33
Sulawesi Tengah	44,21	76,88	93,42	94,95
Sulawesi Selatan	61,14	88,86	98,15	98,62
Sulawesi Tenggara	50,00	83,08	96,10	98,47
Gorontalo	65,70	92,68	98,90	97,84
Sulawesi Barat	49,77	84,12	97,11	99,16
Maluku	39,91	64,97	83,77	89,82
Maluku Utara	33,56	62,22	82,06	88,64
Papua Barat	33,61	65,94	80,67	83,73
Papua	20,43	37,39	46,78	64,74
Indonesia	62,56	87,13	95,65	97,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.19 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7,63	6,59	7,10
Sumatera Utara	10,17	8,49	9,34
Sumatera Barat	8,88	7,20	8,03
Riau	6,96	6,33	6,64
Jambi	5,78	8,14	6,98
Sumatera Selatan	7,88	7,05	7,46
Bengkulu	7,36	6,54	6,93
Lampung	8,63	5,29	6,89
Kep. Bangka Belitung	5,77	6,37	6,06
Kep. Riau	7,81	5,19	6,49
DKI Jakarta	4,62	4,25	4,43
Jawa Barat	6,86	5,49	6,18
Jawa Tengah	8,07	7,52	7,80
DI Yogyakarta	18,59	10,77	14,76
Jawa Timur	8,74	8,21	8,47
Banten	6,20	6,32	6,27
Bali	8,10	8,10	8,10
Nusa Tenggara Barat	10,70	6,02	8,41
Nusa Tenggara Timur	8,75	4,77	6,83
Kalimantan Barat	6,20	7,86	7,06
Kalimantan Tengah	9,22	5,18	7,16
Kalimantan Selatan	8,28	7,67	7,97
Kalimantan Timur	8,85	7,38	8,11
Kalimantan Utara	6,73	7,11	6,93
Sulawesi Utara	4,67	2,80	3,73
Sulawesi Tengah	9,16	4,06	6,53
Sulawesi Selatan	10,82	6,50	8,67
Sulawesi Tenggara	11,17	7,42	9,24
Gorontalo	10,28	6,42	8,22
Sulawesi Barat	12,30	7,38	9,71
Maluku	6,65	6,03	6,33
Maluku Utara	9,13	4,32	6,63
Papua Barat	6,23	4,99	5,63
Papua	7,21	4,30	5,80
Indonesia	7,98	6,61	7,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.20 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,85	5,02	7,94
Sumatera Utara	16,15	10,31	13,26
Sumatera Barat	12,46	6,53	9,48
Riau	7,82	4,41	6,13
Jambi	9,13	5,49	7,31
Sumatera Selatan	6,40	2,28	4,36
Bengkulu	7,42	5,14	6,27
Lampung	8,43	4,57	6,51
Kep. Bangka Belitung	8,22	4,60	6,42
Kep. Riau	5,25	NA	7,04
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	6,53	3,23	4,93
Jawa Tengah	7,12	5,96	6,55
DI Yogyakarta	7,65	6,86	7,26
Jawa Timur	7,30	4,93	6,10
Banten	5,04	4,11	4,59
Bali	12,35	12,87	12,59
Nusa Tenggara Barat	15,71	7,78	11,76
Nusa Tenggara Timur	12,05	7,30	9,65
Kalimantan Barat	9,06	5,55	7,30
Kalimantan Tengah	10,97	4,08	7,54
Kalimantan Selatan	7,85	6,31	7,09
Kalimantan Timur	7,52	4,03	5,83
Kalimantan Utara	9,28	6,23	7,74
Sulawesi Utara	3,95	1,09	2,53
Sulawesi Tengah	10,80	4,99	7,86
Sulawesi Selatan	11,86	5,62	8,67
Sulawesi Tenggara	11,72	6,14	8,93
Gorontalo	13,58	3,57	8,49
Sulawesi Barat	11,52	6,68	9,02
Maluku	6,98	3,92	5,46
Maluku Utara	9,53	4,87	7,25
Papua Barat	10,57	8,26	9,43
Papua	17,28	14,90	16,15
Indonesia	9,34	5,72	7,54

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.21 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,70	5,61	7,63
Sumatera Utara	12,73	9,27	11,02
Sumatera Barat	10,54	6,89	8,70
Riau	7,45	5,25	6,35
Jambi	7,88	6,50	7,19
Sumatera Selatan	7,00	4,28	5,64
Bengkulu	7,40	5,70	6,52
Lampung	8,50	4,84	6,65
Kep. Bangka Belitung	6,74	5,64	6,20
Kep. Riau	7,49	5,62	6,56
DKI Jakarta	4,62	4,25	4,43
Jawa Barat	6,80	5,08	5,95
Jawa Tengah	7,64	6,84	7,24
DI Yogyakarta	16,48	10,00	13,30
Jawa Timur	8,16	6,87	7,51
Banten	5,95	5,87	5,91
Bali	9,25	9,31	9,28
Nusa Tenggara Barat	13,01	6,85	9,97
Nusa Tenggara Timur	11,04	6,58	8,81
Kalimantan Barat	7,93	6,50	7,20
Kalimantan Tengah	10,18	4,59	7,37
Kalimantan Selatan	8,08	7,02	7,55
Kalimantan Timur	8,47	6,47	7,47
Kalimantan Utara	7,65	6,81	7,21
Sulawesi Utara	4,36	2,08	3,22
Sulawesi Tengah	10,20	4,64	7,36
Sulawesi Selatan	11,32	6,07	8,67
Sulawesi Tenggara	11,49	6,70	9,06
Gorontalo	11,98	5,02	8,35
Sulawesi Barat	11,68	6,84	9,17
Maluku	6,83	4,94	5,87
Maluku Utara	9,41	4,69	7,05
Papua Barat	8,72	6,88	7,82
Papua	14,01	11,35	12,74
Indonesia	8,53	6,26	7,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.22 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Mengurus Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	25,48	40,22	33,07
Sumatera Utara	28,82	42,16	35,42
Sumatera Barat	35,86	56,56	46,29
Riau	29,13	40,30	34,87
Jambi	16,17	30,56	23,49
Sumatera Selatan	24,42	39,68	32,20
Bengkulu	29,21	43,37	36,69
Lampung	37,78	51,53	44,96
Kep. Bangka Belitung	43,12	42,37	42,76
Kep. Riau	41,84	54,98	48,44
DKI Jakarta	17,66	23,41	20,59
Jawa Barat	24,00	38,20	31,05
Jawa Tengah	28,03	40,27	34,16
DI Yogyakarta	34,98	45,42	40,09
Jawa Timur	27,65	38,54	33,11
Banten	15,90	23,32	19,63
Bali	57,06	62,87	59,91
Nusa Tenggara Barat	36,46	52,22	44,17
Nusa Tenggara Timur	40,30	48,33	44,17
Kalimantan Barat	15,20	28,38	22,06
Kalimantan Tengah	34,79	48,23	41,64
Kalimantan Selatan	36,56	44,75	40,64
Kalimantan Timur	26,88	38,46	32,68
Kalimantan Utara	15,34	28,78	22,41
Sulawesi Utara	20,12	28,76	24,46
Sulawesi Tengah	25,60	37,75	31,86
Sulawesi Selatan	23,75	35,19	29,44
Sulawesi Tenggara	41,10	51,51	46,47
Gorontalo	50,05	66,92	59,07
Sulawesi Barat	37,08	51,34	44,58
Maluku	39,30	59,38	49,62
Maluku Utara	23,28	36,65	30,24
Papua Barat	17,21	27,68	22,28
Papua	22,87	28,56	25,63
Indonesia	27,08	39,02	33,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.23 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengurus Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	18,85	31,69	25,26
Sumatera Utara	32,78	45,70	39,17
Sumatera Barat	26,77	45,79	36,31
Riau	20,86	32,99	26,87
Jambi	17,61	28,44	23,02
Sumatera Selatan	18,38	31,01	24,65
Bengkulu	22,67	40,54	31,68
Lampung	28,40	46,94	37,61
Kep. Bangka Belitung	32,63	49,14	40,86
Kep. Riau	33,86	38,73	36,15
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	30,02	39,77	34,77
Jawa Tengah	20,60	33,96	27,14
DI Yogyakarta	19,51	37,95	28,65
Jawa Timur	20,79	32,18	26,55
Banten	17,89	24,14	20,93
Bali	57,87	64,87	61,15
Nusa Tenggara Barat	29,32	47,16	38,22
Nusa Tenggara Timur	35,34	48,55	42,03
Kalimantan Barat	12,84	28,80	20,85
Kalimantan Tengah	21,85	34,99	28,38
Kalimantan Selatan	37,68	52,81	45,18
Kalimantan Timur	15,76	29,57	22,45
Kalimantan Utara	10,39	22,62	16,58
Sulawesi Utara	23,31	34,44	28,83
Sulawesi Tengah	21,92	37,01	29,57
Sulawesi Selatan	18,26	34,08	26,36
Sulawesi Tenggara	37,60	54,06	45,81
Gorontalo	24,62	42,58	33,75
Sulawesi Barat	24,26	39,68	32,24
Maluku	26,92	36,40	31,62
Maluku Utara	22,82	35,26	28,90
Papua Barat	29,77	37,02	33,32
Papua	26,62	34,85	30,53
Indonesia	24,55	37,60	31,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.24 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun yang Mengurus Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	21,23	34,87	28,12
Sumatera Utara	30,52	43,67	37,03
Sumatera Barat	31,65	51,59	41,68
Riau	24,35	36,21	30,32
Jambi	17,07	29,25	23,20
Sumatera Selatan	20,83	34,64	27,76
Bengkulu	25,12	41,67	33,62
Lampung	31,67	48,65	40,26
Kep. Bangka Belitung	38,95	45,17	41,99
Kep. Riau	40,85	53,18	47,00
DKI Jakarta	17,66	23,41	20,59
Jawa Barat	25,12	38,48	31,73
Jawa Tengah	24,69	37,50	31,03
DI Yogyakarta	32,00	43,95	37,86
Jawa Timur	24,88	35,95	30,45
Banten	16,33	23,49	19,90
Bali	57,28	63,38	60,24
Nusa Tenggara Barat	33,17	49,84	41,40
Nusa Tenggara Timur	36,85	48,48	42,66
Kalimantan Barat	13,77	28,63	21,34
Kalimantan Tengah	27,70	41,13	34,45
Kalimantan Selatan	37,10	48,59	42,82
Kalimantan Timur	23,70	36,03	29,82
Kalimantan Utara	13,56	26,68	20,38
Sulawesi Utara	21,49	31,16	26,32
Sulawesi Tengah	23,27	37,29	30,42
Sulawesi Selatan	21,12	34,64	27,94
Sulawesi Tenggara	39,08	52,94	46,09
Gorontalo	36,90	54,97	46,33
Sulawesi Barat	26,97	42,22	34,88
Maluku	32,68	47,50	40,16
Maluku Utara	22,96	35,71	29,32
Papua Barat	24,41	33,10	28,65
Papua	25,40	32,75	28,92
Indonesia	26.06	38.45	32.25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.25 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Menggunakan Komputer Selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	6.40	5.09	7.71	10.45	8.65	7.25	10.06	8.28	7.52	6.40	8.65	7.64
Sumatera Utara	8.81	7.49	10.14	7.66	10.44	8.94	11.94	7.32	9.62	8.44	10.80	6.25
Sumatera Barat	11.11	9.25	12.97	8.55	14.89	12.68	17.10	7.58	13.00	11.30	14.70	6.66
Riau	8.94	7.32	10.56	9.26	11.43	9.54	13.32	8.43	10.17	8.76	11.58	7.07
Jambi	9.43	7.52	11.35	10.35	10.32	8.29	12.34	10.01	9.87	8.31	11.44	8.09
Sumatera Selatan	7.00	5.68	8.32	9.61	9.25	7.86	10.64	7.65	8.13	7.08	9.17	6.55
Bengkulu	9.21	7.28	11.14	10.67	12.78	10.22	15.34	10.23	11.00	9.22	12.79	8.29
Lampung	9.40	7.79	11.02	8.77	14.20	12.30	16.10	6.83	11.78	10.33	13.23	6.27
Kep. Bangka Belitung	8.91	5.81	12.02	17.76	11.22	7.82	14.62	15.45	10.04	7.64	12.43	12.16
Kepulauan Riau	5.93	1.37	10.49	39.22	13.91	8.07	19.74	21.41	9.53	4.84	14.22	25.10
DKI Jakarta												
Jawa Barat	10.45	8.80	12.10	8.06	11.87	10.00	13.74	8.02	11.14	9.71	12.58	6.57
Jawa Tengah	14.73	13.27	16.19	5.06	19.04	17.36	20.72	4.51	16.84	15.56	18.13	3.89
DI Yogyakarta	30.44	22.92	37.96	12.60	30.41	24.48	36.33	9.95	30.42	24.91	35.94	9.25
Jawa Timur	14.75	13.25	16.25	5.18	18.37	16.76	19.99	4.49	16.58	15.32	17.83	3.86
Banten	6.02	3.93	8.10	17.66	7.44	4.93	9.95	17.22	6.70	4.80	8.61	14.48
Bali	11.74	8.62	14.86	13.57	10.29	6.97	13.60	16.45	11.04	8.30	13.79	12.68
Nusa Tenggara Barat	8.63	6.25	11.01	14.08	11.37	8.90	13.85	11.08	9.99	8.18	11.81	9.26
Nusa Tenggara Timur	7.94	6.62	9.27	8.50	10.10	8.66	11.54	7.26	9.03	7.85	10.22	6.67
Kalimantan Barat	5.79	4.39	7.18	12.28	8.16	6.54	9.78	10.12	6.96	5.71	8.21	9.18
Kalimantan Tengah	6.26	4.25	8.26	16.38	9.69	7.52	11.86	11.42	7.95	6.26	9.64	10.84
Kalimantan Selatan	10.69	8.48	12.89	10.53	14.90	11.95	17.84	10.09	12.78	10.72	14.85	8.23
Kalimantan Timur	6.46	3.79	9.13	21.09	10.77	7.11	14.42	17.33	8.53	5.85	11.21	16.02
Kalimantan Utara	7.77	4.91	10.63	18.80	11.23	7.22	15.24	18.22	9.49	6.92	12.06	13.83
Sulawesi Utara	7.29	5.69	8.90	11.24	12.79	9.90	15.68	11.53	10.00	8.20	11.80	9.18
Sulawesi Tengah	6.30	4.85	7.75	11.74	9.18	7.29	11.07	10.51	7.75	6.41	9.09	8.84
Sulawesi Selatan	9.39	8.08	10.71	7.15	15.58	13.82	17.35	5.78	12.51	11.22	13.80	5.25
Sulawesi Tenggara	6.55	5.27	7.83	9.98	10.54	8.46	12.61	10.04	8.55	7.16	9.93	8.25
Gorontalo	9.46	6.61	12.32	15.40	14.31	10.96	17.67	11.95	11.93	9.46	14.40	10.55
Sulawesi Barat	10.63	7.96	13.29	12.79	14.63	11.55	17.72	10.76	12.69	10.22	15.16	9.93
Maluku	4.44	2.81	6.07	18.69	7.06	4.96	9.16	15.16	5.74	4.12	7.36	14.39
Maluku Utara	3.70	2.56	4.84	15.75	5.62	4.26	6.98	12.34	4.64	3.62	5.65	11.19
Papua Barat	6.21	3.71	8.71	20.55	5.66	4.14	7.18	13.71	5.94	4.18	7.70	15.11
Papua	1.71	1.24	2.17	13.84	2.53	1.78	3.28	15.09	2.10	1.60	2.59	12.00
Indonesia	10.02	9.63	10.40	1.97	13.05	12.61	13.49	1.71	11.52	11.19	11.86	1.49

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.26 Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perkotaan yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	7.63	5.71	9.56	12.86	6.59	4.88	8.31	13.26	7.10	5.77	8.42	9.50
Sumatera Utara	10.17	7.80	12.55	11.93	8.49	6.81	10.17	10.11	9.34	7.80	10.88	8.40
Sumatera Barat	8.88	6.64	11.11	12.84	7.20	5.32	9.09	13.32	8.03	6.60	9.47	9.11
Riau	6.96	4.75	9.17	16.20	6.33	4.41	8.25	15.47	6.64	5.10	8.17	11.82
Jambi	5.78	3.47	8.09	20.39	8.14	5.12	11.16	18.92	6.98	5.02	8.95	14.38
Sumatera Selatan	7.88	5.46	10.31	15.67	7.05	4.67	9.42	17.20	7.46	5.61	9.30	12.61
Bengkulu	7.36	4.73	9.99	18.25	6.54	3.50	9.57	23.68	6.93	4.92	8.93	14.75
Lampung	8.63	5.63	11.63	17.74	5.29	3.42	7.17	18.07	6.89	5.22	8.55	12.36
Kep. Bangka Belitung	5.77	3.68	7.85	18.47	6.37	3.97	8.77	19.25	6.06	4.33	7.78	14.51
Kepulauan Riau	7.81	3.64	11.98	27.25	5.19	2.24	8.15	29.06	6.49	3.94	9.05	20.08
DKI Jakarta	4.62	3.26	5.98	14.98	4.25	2.86	5.63	16.67	4.43	3.42	5.44	11.60
Jawa Barat	6.86	5.84	7.89	7.61	5.49	4.59	6.39	8.35	6.18	5.49	6.87	5.71
Jawa Tengah	8.07	6.89	9.26	7.50	7.52	6.36	8.68	7.87	7.80	6.92	8.67	5.71
DI Yogyakarta	18.59	13.86	23.32	12.98	10.77	7.91	13.62	13.54	14.76	11.62	17.90	10.85
Jawa Timur	8.74	7.59	9.89	6.72	8.21	6.99	9.44	7.62	8.47	7.62	9.33	5.17
Banten	6.20	4.62	7.79	13.06	6.32	4.69	7.96	13.18	6.27	5.09	7.44	9.60
Bali	8.10	5.45	10.75	16.67	8.10	5.73	10.46	14.89	8.10	6.21	9.99	11.88
Nusa Tenggara Barat	10.70	7.98	13.41	12.96	6.02	3.97	8.07	17.37	8.41	6.52	10.30	11.48
Nusa Tenggara Timur	8.75	5.48	12.03	19.08	4.77	2.79	6.75	21.20	6.83	4.70	8.97	15.95
Kalimantan Barat	6.20	4.09	8.31	17.37	7.86	5.55	10.17	14.98	7.06	5.48	8.65	11.48
Kalimantan Tengah	9.22	6.16	12.27	16.89	5.18	2.76	7.60	23.82	7.16	4.98	9.34	15.54
Kalimantan Selatan	8.28	5.55	11.01	16.83	7.67	5.40	9.93	15.09	7.97	6.25	9.70	11.01
Kalimantan Timur	8.85	6.82	10.87	11.66	7.38	4.97	9.80	16.68	8.11	6.61	9.61	9.43
Kalimantan Utara	6.73	3.88	9.58	21.59	7.11	3.08	11.15	28.95	6.93	4.39	9.47	18.68
Sulawesi Utara	4.67	2.70	6.63	21.47	2.80	1.49	4.11	23.88	3.73	2.55	4.91	16.14
Sulawesi Tengah	9.16	5.98	12.33	17.69	4.06	1.86	6.26	27.65	6.53	4.59	8.47	15.16
Sulawesi Selatan	10.82	8.56	13.09	10.69	6.50	4.40	8.61	16.48	8.67	7.02	10.33	9.74
Sulawesi Tenggara	11.17	7.79	14.54	15.43	7.42	4.06	10.79	23.14	9.24	6.58	11.89	14.65
Gorontalo	10.28	6.30	14.26	19.75	6.42	2.95	9.90	27.61	8.22	5.54	10.89	16.59
Sulawesi Barat	12.30	6.35	18.25	24.69	7.38	1.99	12.78	37.29	9.71	5.12	14.30	24.11
Maluku	6.65	4.25	9.04	18.38	6.03	2.80	9.26	27.32	6.33	4.36	8.30	15.85
Maluku Utara	9.13	4.77	13.48	24.33	4.32	0.53	8.11	44.73	6.63	2.81	10.44	29.37
Papua Barat	6.23	3.30	9.16	23.98	4.99	2.34	7.63	27.04	5.63	3.59	7.66	18.46
Papua	7.21	4.90	9.51	16.33	4.30	2.55	6.04	20.70	5.80	4.23	7.36	13.74
Indonesia	7.98	7.55	8.42	2.77	6.61	6.23	6.99	2.94	7.30	7.00	7.59	2.08

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.27 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	10.85	9.33	12.37	7.14	5.02	3.83	6.21	12.10	7.94	6.90	8.98	6.70
Sumatera Utara	16.15	14.36	17.93	5.64	10.31	8.83	11.79	7.32	13.26	11.97	14.55	4.98
Sumatera Barat	12.46	10.54	14.38	7.86	6.53	5.05	8.00	11.54	9.48	8.18	10.79	7.03
Riau	7.82	5.84	9.79	12.88	4.41	3.05	5.77	15.76	6.13	4.94	7.32	9.92
Jambi	9.13	7.06	11.21	11.60	5.49	3.63	7.36	17.29	7.31	5.97	8.66	9.39
Sumatera Selatan	6.40	5.05	7.75	10.79	2.28	1.49	3.08	17.85	4.36	3.54	5.18	9.62
Bengkulu	7.42	5.29	9.55	14.64	5.14	3.58	6.70	15.49	6.27	4.95	7.59	10.71
Lampung	8.43	6.70	10.16	10.49	4.57	3.17	5.98	15.70	6.51	5.41	7.62	8.65
Kep. Bangka Belitung	8.22	5.41	11.02	17.41	4.60	0.90	8.31	41.09	6.42	4.18	8.66	17.79
Kepulauan Riau	5.25	1.97	8.53	31.89	NA	NA	NA	56.28	7.04	1.42	12.67	40.72
DKI Jakarta												
Jawa Barat	6.53	4.98	8.08	12.08	3.23	2.23	4.24	15.83	4.93	3.99	5.86	9.69
Jawa Tengah	7.12	5.92	8.31	8.56	5.96	4.89	7.03	9.14	6.55	5.73	7.38	6.41
DI Yogyakarta	7.65	3.71	11.59	26.26	6.86	3.86	9.85	22.32	7.26	4.70	9.82	18.00
Jawa Timur	7.30	6.10	8.50	8.38	4.93	3.93	5.93	10.32	6.10	5.30	6.90	6.66
Banten	5.04	2.30	7.78	27.72	4.11	2.15	6.06	24.26	4.59	2.89	6.28	18.90
Bali	12.35	8.60	16.10	15.48	12.87	9.14	16.60	14.80	12.59	9.81	15.38	11.27
Nusa Tenggara Barat	15.71	12.56	18.87	10.25	7.78	4.93	10.63	18.70	11.76	9.55	13.97	9.61
Nusa Tenggara Timur	12.05	10.13	13.97	8.12	7.30	5.89	8.72	9.86	9.65	8.27	11.02	7.28
Kalimantan Barat	9.06	7.25	10.87	10.20	5.55	4.08	7.03	13.55	7.30	6.09	8.51	8.43
Kalimantan Tengah	10.97	7.81	14.12	14.67	4.08	2.15	6.01	24.15	7.54	5.43	9.65	14.28
Kalimantan Selatan	7.85	5.79	9.91	13.38	6.31	4.40	8.23	15.48	7.09	5.75	8.43	9.62
Kalimantan Timur	7.52	4.48	10.55	20.59	4.03	1.59	6.47	30.87	5.83	3.84	7.82	17.43
Kalimantan Utara	9.28	3.20	15.36	33.41	6.23	2.47	10.00	30.82	7.74	3.19	12.29	30.01
Sulawesi Utara	3.95	2.71	5.19	16.03	1.09	0.43	1.76	31.08	2.53	1.77	3.29	15.28
Sulawesi Tengah	10.80	8.83	12.78	9.33	4.99	3.55	6.42	14.68	7.86	6.60	9.11	8.13
Sulawesi Selatan	11.86	10.13	13.60	7.46	5.62	4.44	6.80	10.72	8.67	7.61	9.72	6.21
Sulawesi Tenggara	11.72	9.61	13.83	9.20	6.14	4.69	7.58	12.03	8.93	7.50	10.37	8.20
Gorontalo	13.58	9.75	17.40	14.38	3.57	1.79	5.35	25.45	8.49	6.15	10.82	14.04
Sulawesi Barat	11.52	8.22	14.81	14.60	6.68	4.28	9.09	18.34	9.02	6.87	11.17	12.15
Maluku	6.98	5.36	8.60	11.81	3.92	2.52	5.31	18.18	5.46	4.33	6.59	10.55
Maluku Utara	9.53	6.92	12.15	14.00	4.87	2.97	6.77	19.89	7.25	5.26	9.25	14.04
Papua Barat	10.57	8.42	12.72	10.38	8.26	6.00	10.52	13.96	9.43	7.57	11.30	10.07
Papua	17.28	14.77	19.79	7.41	14.90	12.63	17.17	7.77	16.15	14.11	18.19	6.45
Indonesia	9.34	8.95	9.73	2.13	5.72	5.41	6.03	2.77	7.54	7.28	7.80	1.76

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.28 Sampling Error Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun yang Bekerja menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	9.70	8.50	10.89	6.27	5.61	4.62	6.59	8.95	7.63	6.81	8.45	5.47
Sumatera Utara	12.73	11.17	14.29	6.25	9.27	8.12	10.42	6.34	11.02	9.98	12.06	4.83
Sumatera Barat	10.54	9.04	12.04	7.26	6.89	5.67	8.11	9.04	8.70	7.72	9.69	5.75
Riau	7.45	5.98	8.93	10.09	5.25	4.11	6.39	11.07	6.35	5.40	7.30	7.62
Jambi	7.88	6.32	9.45	10.13	6.50	4.88	8.13	12.77	7.19	6.07	8.31	7.95
Sumatera Selatan	7.00	5.73	8.27	9.27	4.28	3.17	5.39	13.22	5.64	4.73	6.54	8.22
Bengkulu	7.40	5.74	9.05	11.43	5.70	4.17	7.23	13.71	6.52	5.41	7.64	8.74
Lampung	8.50	6.96	10.04	9.23	4.84	3.72	5.97	11.86	6.65	5.72	7.58	7.12
Kep. Bangka Belitung	6.74	5.06	8.43	12.75	5.64	3.57	7.71	18.73	6.20	4.83	7.57	11.26
Kepulauan Riau	7.49	3.81	11.18	25.10	5.62	2.78	8.46	25.78	6.56	4.21	8.91	18.26
DKI Jakarta	4.62	3.26	5.98	14.98	4.25	2.86	5.63	16.67	4.43	3.42	5.44	11.60
Jawa Barat	6.80	5.92	7.68	6.61	5.08	4.32	5.84	7.62	5.95	5.36	6.54	5.06
Jawa Tengah	7.64	6.80	8.49	5.64	6.84	6.03	7.64	5.99	7.24	6.64	7.85	4.28
DI Yogyakarta	16.48	12.49	20.47	12.35	10.00	7.63	12.37	12.10	13.30	10.69	15.91	10.01
Jawa Timur	8.16	7.32	9.00	5.25	6.87	6.04	7.71	6.20	7.51	6.91	8.12	4.11
Banten	5.95	4.57	7.33	11.81	5.87	4.51	7.22	11.82	5.91	4.91	6.90	8.60
Bali	9.25	7.07	11.43	12.02	9.31	7.30	11.32	11.02	9.28	7.70	10.86	8.66
Nusa Tenggara Barat	13.01	10.94	15.08	8.13	6.85	5.12	8.58	12.87	9.97	8.53	11.42	7.39
Nusa Tenggara Timur	11.04	9.38	12.70	7.68	6.58	5.42	7.74	9.02	8.81	7.66	9.97	6.71
Kalimantan Barat	7.93	6.55	9.31	8.88	6.50	5.22	7.79	10.09	7.20	6.24	8.17	6.83
Kalimantan Tengah	10.18	7.96	12.39	11.11	4.59	3.06	6.12	17.00	7.37	5.85	8.89	10.52
Kalimantan Selatan	8.08	6.34	9.81	10.94	7.02	5.53	8.51	10.85	7.55	6.45	8.65	7.45
Kalimantan Timur	8.47	6.78	10.15	10.15	6.47	4.59	8.35	14.84	7.47	6.26	8.69	8.31
Kalimantan Utara	7.65	4.78	10.51	19.15	6.81	3.86	9.77	22.15	7.21	4.92	9.51	16.24
Sulawesi Utara	4.36	3.12	5.60	14.55	2.08	1.27	2.89	19.81	3.22	2.47	3.97	11.91
Sulawesi Tengah	10.20	8.50	11.90	8.52	4.64	3.42	5.86	13.45	7.36	6.29	8.43	7.41
Sulawesi Selatan	11.32	9.88	12.76	6.49	6.07	4.85	7.28	10.22	8.67	7.68	9.66	5.84
Sulawesi Tenggara	11.49	9.61	13.36	8.33	6.70	5.01	8.39	12.85	9.06	7.66	10.47	7.90
Gorontalo	11.98	9.22	14.74	11.74	5.02	3.04	7.01	20.16	8.35	6.58	10.12	10.83
Sulawesi Barat	11.68	8.79	14.57	12.61	6.84	4.62	9.05	16.55	9.17	7.21	11.12	10.87
Maluku	6.83	5.42	8.24	10.54	4.94	3.19	6.68	18.01	5.87	4.76	6.98	9.66
Maluku Utara	9.41	7.16	11.66	12.18	4.69	2.91	6.47	19.40	7.05	5.24	8.87	13.16
Papua Barat	8.72	6.97	10.46	10.23	6.88	5.16	8.60	12.75	7.82	6.44	9.20	9.01
Papua	14.01	12.11	15.91	6.92	11.35	9.70	13.01	7.42	12.74	11.24	14.23	5.99
Indonesia	8.53	8.22	8.83	1.81	6.26	6.00	6.52	2.13	7.39	7.19	7.60	1.43

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 4.29 *Sampling Error* Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Daerah Perdesaan yang Mengurus Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Total			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	18.85	16.17	21.54	7.27	31.69	28.49	34.88	5.15	25.26	22.77	27.75	5.03
Sumatera Utara	32.78	29.96	35.61	4.39	45.70	42.54	48.85	3.52	39.17	36.59	41.75	3.36
Sumatera Barat	26.77	23.43	30.11	6.37	45.79	42.07	49.50	4.14	36.31	33.24	39.37	4.31
Riau	20.86	17.24	24.48	8.85	32.99	28.99	37.00	6.19	26.87	23.52	30.23	6.37
Jambi	17.61	14.12	21.10	10.12	28.44	24.39	32.49	7.27	23.02	20.04	26.00	6.61
Sumatera Selatan	18.38	15.61	21.15	7.69	31.01	27.74	34.29	5.39	24.65	22.09	27.20	5.29
Bengkulu	22.67	18.64	26.69	9.06	40.54	35.34	45.74	6.55	31.68	27.91	35.44	6.06
Lampung	28.40	24.78	32.01	6.50	46.94	43.27	50.62	3.99	37.61	34.51	40.70	4.20
Kep. Bangka Belitung	32.63	26.07	39.20	10.26	49.14	41.16	57.13	8.29	40.86	34.59	47.14	7.84
Kepulauan Riau	33.86	18.92	48.80	22.51	38.73	16.38	61.08	29.44	36.15	18.60	53.71	24.77
DKI Jakarta												
Jawa Barat	30.02	26.69	33.35	5.65	39.77	36.12	43.43	4.69	34.77	31.84	37.69	4.29
Jawa Tengah	20.60	18.45	22.75	5.33	33.96	31.42	36.50	3.81	27.14	25.16	29.11	3.71
DI Yogyakarta	19.51	13.53	25.48	15.63	37.95	30.23	45.68	10.39	28.65	22.95	34.34	10.15
Jawa Timur	20.79	18.54	23.03	5.51	32.18	29.65	34.72	4.01	26.55	24.57	28.54	3.81
Banten	17.89	13.34	22.44	12.98	24.14	18.72	29.56	11.45	20.93	16.71	25.14	10.28
Bali	57.87	50.53	65.20	6.47	64.87	57.97	71.78	5.43	61.15	55.13	67.17	5.02
Nusa Tenggara Barat	29.32	24.50	34.15	8.40	47.16	41.76	52.57	5.85	38.22	33.93	42.50	5.72
Nusa Tenggara Timur	35.34	32.16	38.51	4.58	48.55	45.35	51.74	3.35	42.03	39.23	44.83	3.40
Kalimantan Barat	12.84	10.39	15.29	9.72	28.80	25.43	32.17	5.97	20.85	18.42	23.28	5.95
Kalimantan Tengah	21.85	17.78	25.93	9.51	34.99	30.08	39.90	7.15	28.38	24.57	32.19	6.85
Kalimantan Selatan	37.68	33.06	42.30	6.26	52.81	47.86	57.75	4.78	45.18	41.06	49.29	4.65
Kalimantan Timur	15.76	10.61	20.90	16.65	29.57	23.22	35.92	10.95	22.45	17.82	27.08	10.52
Kalimantan Utara	10.39	6.10	14.67	21.05	22.62	15.58	29.66	15.88	16.58	11.81	21.35	14.67
Sulawesi Utara	23.31	19.42	27.20	8.51	34.44	29.10	39.79	7.92	28.83	25.06	32.60	6.67
Sulawesi Tengah	21.92	17.90	25.94	9.36	37.01	32.78	41.24	5.83	29.57	26.13	33.01	5.93
Sulawesi Selatan	18.26	15.72	20.80	7.09	34.08	31.09	37.07	4.48	26.36	24.03	28.68	4.50
Sulawesi Tenggara	37.60	33.93	41.26	4.97	54.06	50.39	57.73	3.47	45.81	42.67	48.96	3.50
Gorontalo	24.62	18.77	30.46	12.11	42.58	36.20	48.96	7.65	33.75	28.38	39.13	8.13
Sulawesi Barat	24.26	19.36	29.16	10.30	39.68	33.50	45.87	7.95	32.24	27.33	37.14	7.76
Maluku	26.92	22.17	31.68	9.02	36.40	31.43	41.37	6.97	31.62	27.32	35.93	6.95
Maluku Utara	22.82	18.23	27.40	10.26	35.26	30.55	39.96	6.81	28.90	24.77	33.03	7.29
Papua Barat	29.77	25.63	33.91	7.09	37.02	32.05	41.98	6.84	33.32	29.46	37.19	5.92
Papua	26.62	23.53	29.71	5.92	34.85	31.60	38.10	4.76	30.53	27.81	33.24	4.54
Indonesia	24.55	23.84	25.26	1.48	37.60	36.80	38.40	1.08	31.03	30.39	31.67	1.05

Catatan:

Warna kuning (■) artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



5

HASIL DAN
CAPAIAN PROSES
PENDIDIKAN



Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia adalah dengan mengusung program merdeka belajar (Kemendikbudristek, 2021). Program tersebut juga diupayakan sebagai bagian dari misi demi tercapainya 9 Agenda Prioritas Pembangunan. Pendidikan yang bermutu tinggi untuk semua rakyat Indonesia diharapkan dapat tercipta melalui program ini. Capaian tersebut dapat terlihat berdasarkan angka partisipasi yang tinggi pada setiap jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, serta mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Pada Bab ini, indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur pembangunan pendidikan diantaranya terkait proses pendidikan yang dilihat dari angka mengulang, angka bertahan, angka melanjutkan, dan angka putus sekolah. Selain itu juga akan dibahas tentang capaian dari pendidikan di Indonesia yang dilihat berdasarkan indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat penyelesaian pendidikan, serta pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

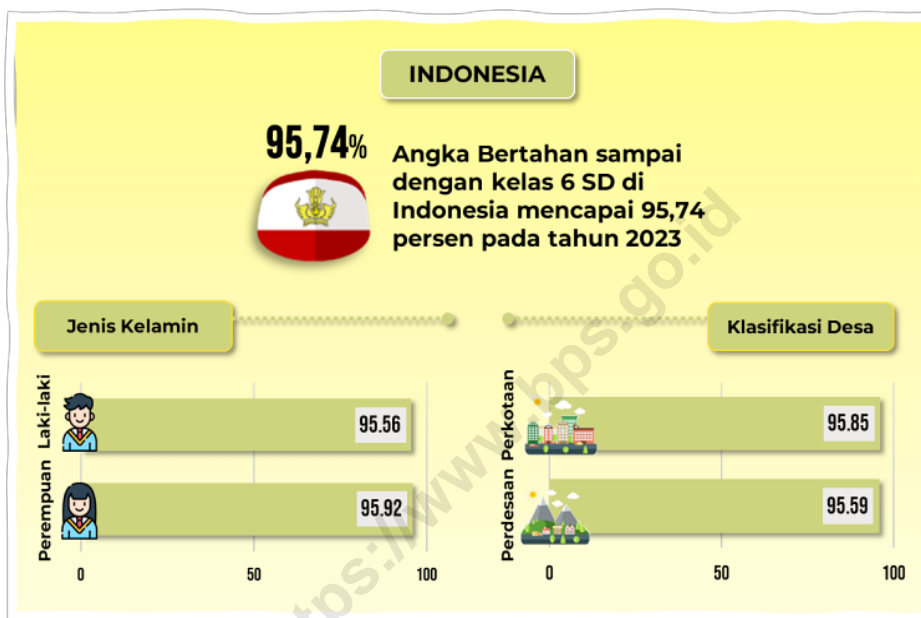
5.1 Proses Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia sedang mengalami masa transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Meskipun satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka semakin bertambah, namun hasil proses pendidikan yang ada masih belum bisa dikatakan sebagai hasil dari penerapan kurikulum merdeka. Berikut adalah beberapa indikator proses pendidikan yang datanya dihasilkan melalui Susenas Maret 2023.

A. Angka Bertahan

Jika angka mengulang merupakan indikator proses pendidikan yang dilihat dari sisi negatifnya, maka indikator yang dilihat dari sisi positifnya adalah angka bertahan. Angka bertahan atau *Survival Rate* merupakan indikator yang diadaptasi dari Pedoman Teknis Indikator Pendidikan dari UNESCO 2009. Secara konsep, angka bertahan SD adalah persentase siswa kelas 1 SD yang diharapkan bisa secara terus menerus mencapai kelas terakhir SD. Di Indonesia, kelas akhir untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat merupakan kelas 6, sehingga pada

indikator ini yang dihitung adalah peluang bertahan sampai kelas 6 SD/ sederajat. Indikator ini juga digunakan untuk memantau proses pendidikan dasar secara universal karena juga mempertimbangkan kejadian mengulang kelas dan putus sekolah (UNESCO, 2009). Angka bertahan yang mendekati 100 dapat diartikan sebagai rendahnya kejadian mengulang kelas atau putus sekolah di jenjang SD/ sederajat.



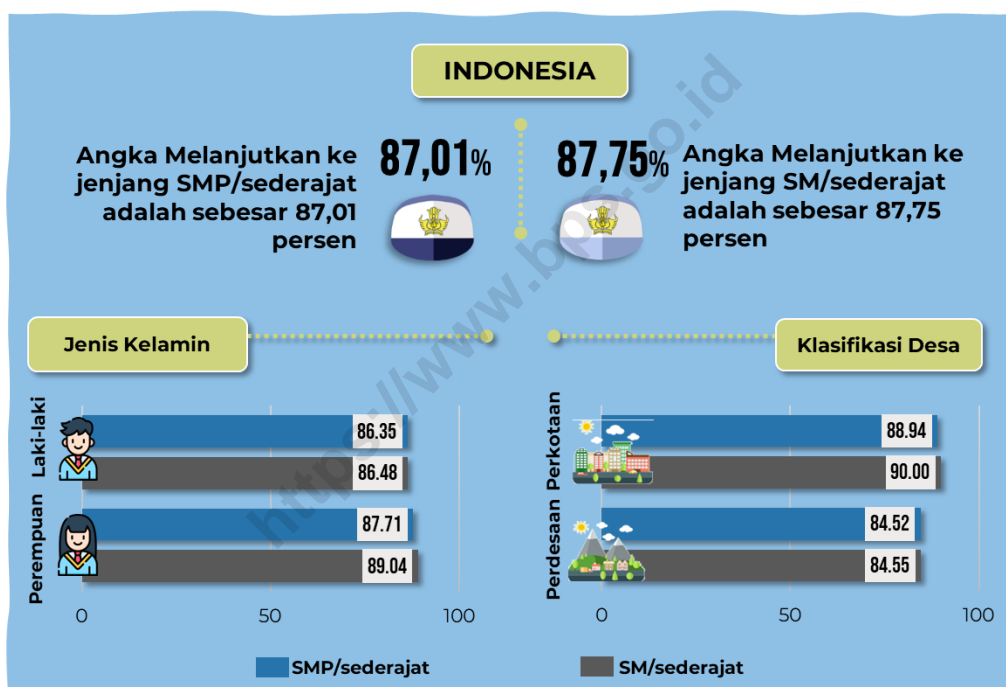
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.1 Angka Bertahan Kelas 6 SD/ sederajat menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Desa, 2023

Hasil pendataan Susenas Maret 2023 (Gambar 5.1) menunjukkan angka bertahan sampai dengan kelas 6 SD/ sederajat di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 95,74 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa 96 dari 100 peserta didik yang baru masuk SD/ sederajat dapat bertahan untuk tetap sekolah sampai dengan kelas 6 SD/ sederajat. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi desa, tidak terdapat perbedaan yang nyata antara angka bertahan laki-laki dan perempuan, serta antara angka bertahan perkotaan dan perdesaan.

B. Angka Melanjutkan

Indikator positif lain terkait proses pendidikan adalah angka melanjutkan. Angka melanjutkan menggambarkan persentase anak sekolah yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Indikator ini juga menggambarkan adanya seleksi oleh suatu sistem pendidikan karena faktor keilmuan maupun faktor ekonomi. Indikator ini menjadi indikator *output* jika dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih rendah, dan menjadi indikator *input* apabila dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

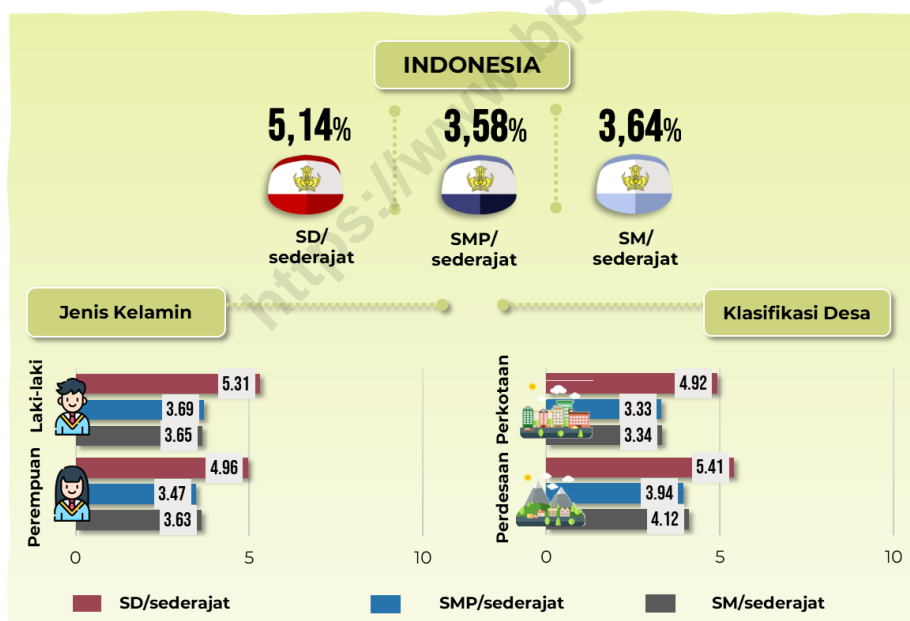
Gambar 5.2 Angka Melanjutkan menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023

Dari Gambar 5.2, terlihat bahwa angka melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat mencapai 87,01 persen. Sedangkan, angka melanjutkan ke jenjang SM/ sederajat mencapai 87,75 persen. Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi desa, baik untuk jenjang SMP/ sederajat atau SM/ sederajat, angka melanjutkan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan angka melanjutkan di perdesaan. Perbedaan angka melanjutkan di perkotaan dan perdesaan

memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan aksesibilitas pendidikan antara kedua daerah tersebut.

C. Angka Mengulang

Angka mengulang didefinisikan sebagai persentase kelompok siswa (atau siswa) yang terdaftar di kelas satu pada tingkat atau siklus pendidikan tertentu pada tahun ajaran tertentu yang diharapkan mencapai nilai berturut-turut pada tahun berikutnya, atau disebut juga proporsi siswa yang tetap berada pada kelas tersebut. Indikator ini merupakan indikator proses pendidikan yang dilihat dari sisi negatif. Pada Gambar 5.3 terlihat bahwa angka mengulang pada jenjang SD/ sederajat (5,14 persen) lebih tinggi dari SMP/ sederajat (3,58 persen) dan SM/ sederajat (3,64 persen). Pola tersebut juga terjadi jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maupun klasifikasi desa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.3 Angka Mengulang menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023

Berdasarkan data Dapodik tahun 2018/2019 diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap angka mengulang kelas di SD (Kemendikbud, 2020). Variabel yang berpengaruh secara statistik terhadap jumlah siswa mengulang di

SD menurut tingkat tiap provinsi yaitu: persentase kepala sekolah dan guru layak mengajar terhadap kepala sekolah dan guru seluruhnya tiap provinsi, rasio siswa per sekolah tiap provinsi, rasio siswa per (kepala sekolah+guru) tiap provinsi, rasio rombel per sekolah tiap provinsi, dan rasio rombel per kelas tiap provinsi. Analisis data primer juga dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab siswa mengulang kelas beberapa diantaranya adalah masalah akademik dan perilaku, kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak, orang tua mengalami kesulitan ekonomi sehingga ada orang tua yang mengajak siswa bekerja pada saat jam sekolah atau pulang sekolah, serta rata-rata karena jarak antara tempat tinggal dan sekolah jauh.

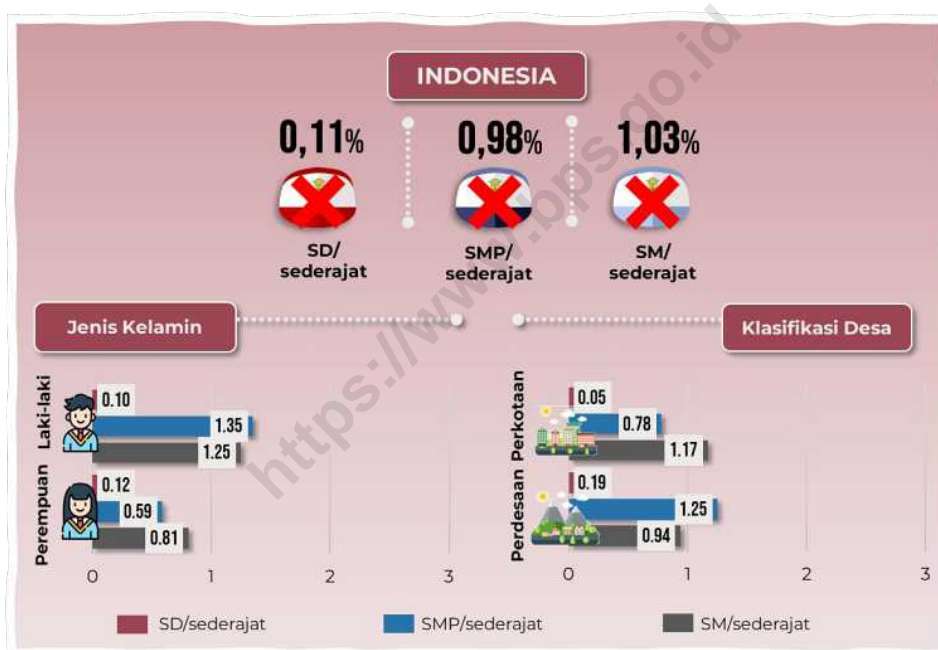
D. Angka Putus Sekolah

Sejak tahun 2009, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk anggaran pendidikan untuk mempersiapkan SDM Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional (Muhammad Indra Haria Kurba, 2021). Anggaran pendidikan tersebut salah satunya dialokasikan untuk dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang memiliki sasaran memastikan anak usia sekolah berada pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan semua anak usia sekolah yang tidak bersekolah dapat kembali bersekolah serta terjadinya pemerataan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas.

Hasil pendataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih terdapat anak yang putus sekolah baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SM/ sederajat. Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.4, semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Pola tersebut terjadi baik untuk peserta didik laki-laki maupun perempuan serta untuk yang tinggal di perkotaan. Secara umum terdapat 1 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Persentase ini lebih kecil dibandingkan angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat dan SM/ sederajat. Angka Putus Sekolah hasil Susenas hanya dapat disajikan sampai dengan estimasi tingkat nasional, dikarenakan ketidakcukupan sampel untuk menyajikan data sampai dengan tingkat provinsi. Namun demikian angka estimasi nasional

memberikan hasil yang sejalan dengan angka putus sekolah data kemendikbud (Kemendikbud, 2023).

Berdasarkan klasifikasi desa, terdapat kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, dimana angka putus sekolah pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang tinggal di perkotaan lebih mudah mengakses sekolah dibandingkan anak-anak di perdesaan (Okumu, 2008). Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki pada jenjang SMP/ sederajat dan SM/ sederajat lebih besar dibandingkan perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.4 Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023

Faktor penyebab peserta didik putus sekolah menurut penelitian yang dilakukan oleh Imran (2015) adalah (1) ketidakmampuan menyelesaikan pelajaran, (2) tidak memiliki biaya sekolah, (3) sakit parah, (4) terpaksa bekerja, (5) membantu orang tua di ladang, dan (6) dikeluarkan dari sekolah. Meskipun

separuh penyebabnya berkaitan dengan faktor ekonomi namun pemerintah juga perlu memerhatikan faktor lain agar angka putus sekolah dapat semakin ditekan.

5.2 Capaian Pendidikan

Tidak hanya proses pendidikan, capaian pendidikan dari sistem kurikulum yang baru juga tidak serta merta dapat langsung terlihat hasilnya. Saat ini sistem pendidikan masih dalam masa transisi. Capaian pendidikan dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melek huruf, serta rata-rata lama sekolah.

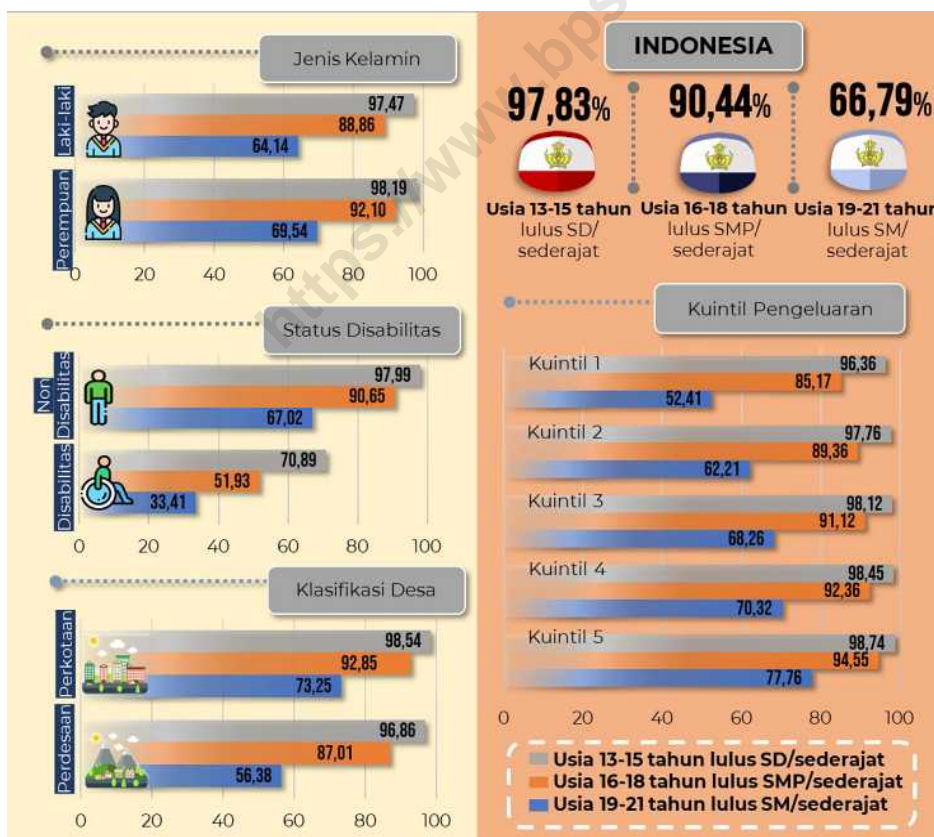
A. Tingkat Penyelesaian Pendidikan

Tingkat penyelesaian pendidikan merupakan indikator yang mengukur persentase penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam penghitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya (Bappenas, 2020). Sebagai contoh untuk penetapan rentang usia tingkat penyelesaian SD/ sederajat, usia wajib belajar yang ditetapkan di Indonesia untuk masuk SD adalah 7 tahun, jika diasumsikan siswa lulus tepat waktu maka akan lulus di usia 12 tahun. Maka rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat penyelesaian SD/ sederajat adalah usia 13 tahun (12+1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12+3 tahun). Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

Terdapat tiga umur referensi pada penghitungan tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia, yaitu: tingkat penyelesaian SD/ sederajat, tingkat penyelesaian SMP/ sederajat, dan tingkat penyelesaian SM/ sederajat. Adapun referensi umur untuk mengukur tingkat penyelesaian SD/ sederajat adalah penduduk umur 13-15 tahun, tingkat penyelesaian SMP/ sederajat adalah penduduk umur 16-18 tahun, dan tingkat penyelesaian SM/ sederajat adalah penduduk umur 19-21 tahun. Umur yang digunakan dalam penghitungan

tingkat penyelesaian pendidikan adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran (*school age*).

Menurut data Susenas 2023, tingkat penyelesaian pendidikan nasional untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 97,83 persen (Gambar 5.5). Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 13-15 tahun, sebanyak 97 orang diantaranya telah menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat. Sementara itu, tingkat penyelesaian untuk jenjang pendidikan menengah pertama adalah 90,44 persen. Mengikuti pola tingkat partisipasi sekolah di mana polanya menurun drastis seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, tingkat kelulusan juga demikian. Hal ini terlihat dari capaian tingkat penyelesaian pendidikan untuk jenjang SM/ sederajat hanya sebesar 66,79 persen.



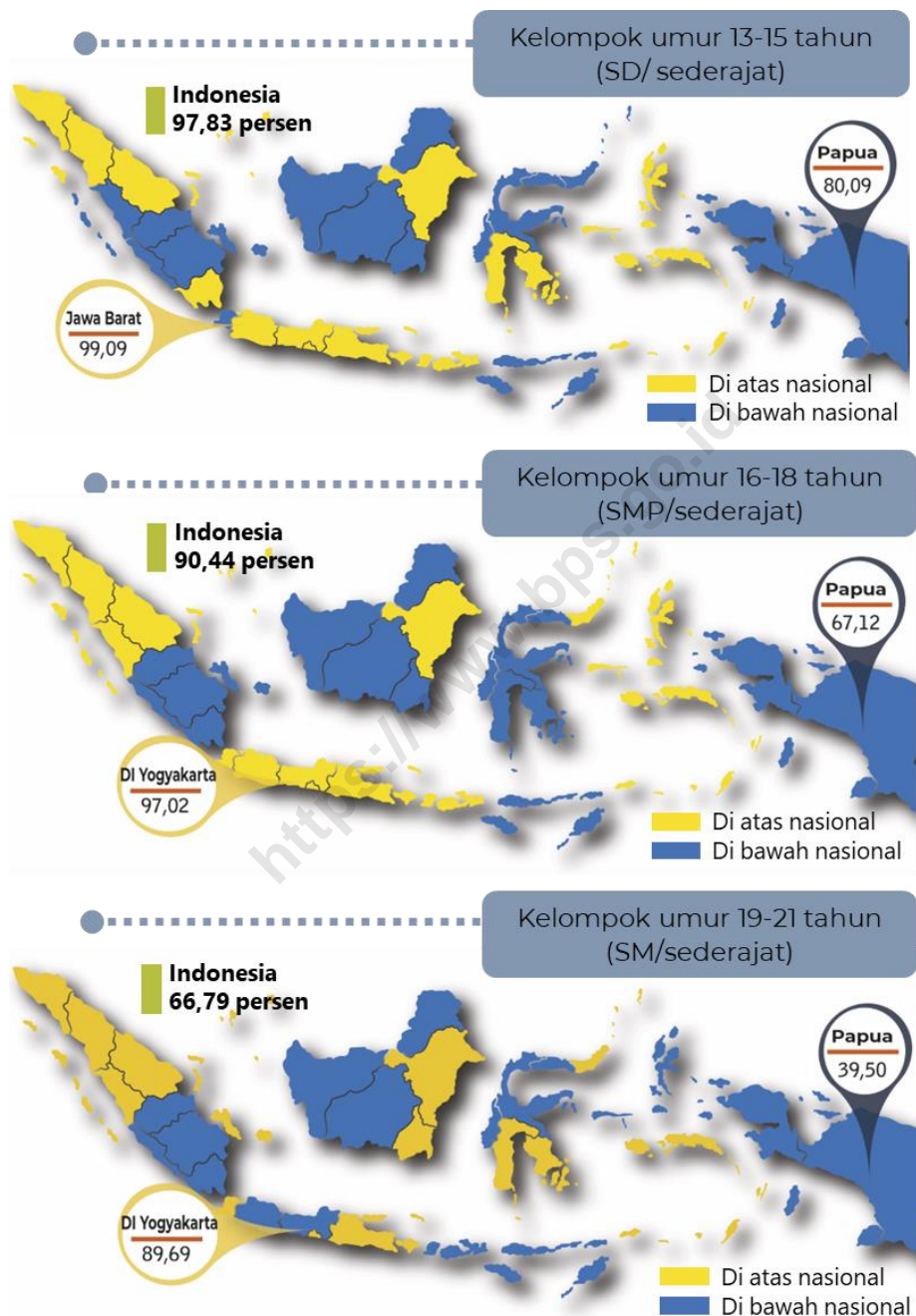
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.5 Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Karakteristik Demografi, 2023

Jika dilihat berdasarkan karakteristiknya, terdapat perbedaan yang nyata pada tingkat penyelesaian antara kelompok peserta didik terutama di tingkat pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Kesenjangan yang paling terlihat adalah antara peserta didik penyandang disabilitas dengan peserta didik normal (nondisabilitas), dimana terdapat gap yang cukup jauh di semua jenjang pendidikan. Latar belakang sosial ekonomi rumah tangga juga menyebabkan kesenjangan penyelesaian pendidikan di semua jenjang pendidikan terutama antara rumah tangga kuintil teratas dengan kuintil terbawah. Kesenjangan lebih lebar lagi di jenjang pendidikan sekolah menengah atas, dimana pada kuintil teratas 77,76 persen sedangkan kuintil terbawah hanya 52,41 persen. Selain itu, klasifikasi desa tempat tinggal rumah tangga juga menyebabkan gap dalam hal penyelesaian pendidikan. Tingkat penyelesaian pendidikan penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk di perdesaan. Kesenjangan paling lebar antara perkotaan dan perdesaan terlihat pada jenjang SM/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kelompok siswa jauh lebih rentan dibandingkan kelompok siswa lainnya dalam hal memasuki setiap jenjang pendidikan, bertahan di dalam sistem pendidikan, dan menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNICEF, 2017).

Jika dilihat menurut provinsi (Gambar 5.6), provinsi yang memiliki capaian tingkat penyelesaian pendidikan di atas nilai nasional, jumlahnya sama dengan provinsi yang memiliki capaian di bawah capaian nasional, di semua jenjang pendidikan. Selain itu, Papua tercatat sebagai provinsi dengan capaian tingkat penyelesaian pendidikan terendah di semua jenjang pendidikan. Dari Gambar 5.6 terlihat bahwa hanya terdapat sekitar 80,09 persen penduduk usia 13-15 tahun yang telah lulus SD/ sederajat, sekitar 67,12 persen penduduk usia 16-18 tahun yang telah lulus pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, dan 39,05 persen penduduk usia 19-21 tahun yang telah lulus pada jenjang pendidikan SM/ sederajat. Capaian tertinggi untuk jenjang SD/ sederajat adalah Provinsi Jawa Barat untuk sebesar 99,09 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan

SM/ sederajat, capaian tertinggi diperoleh Provinsi DI. Yogyakarta dengan capaian sebesar 97,02 persen dan 89,69 persen untuk masing-masing jenjang.

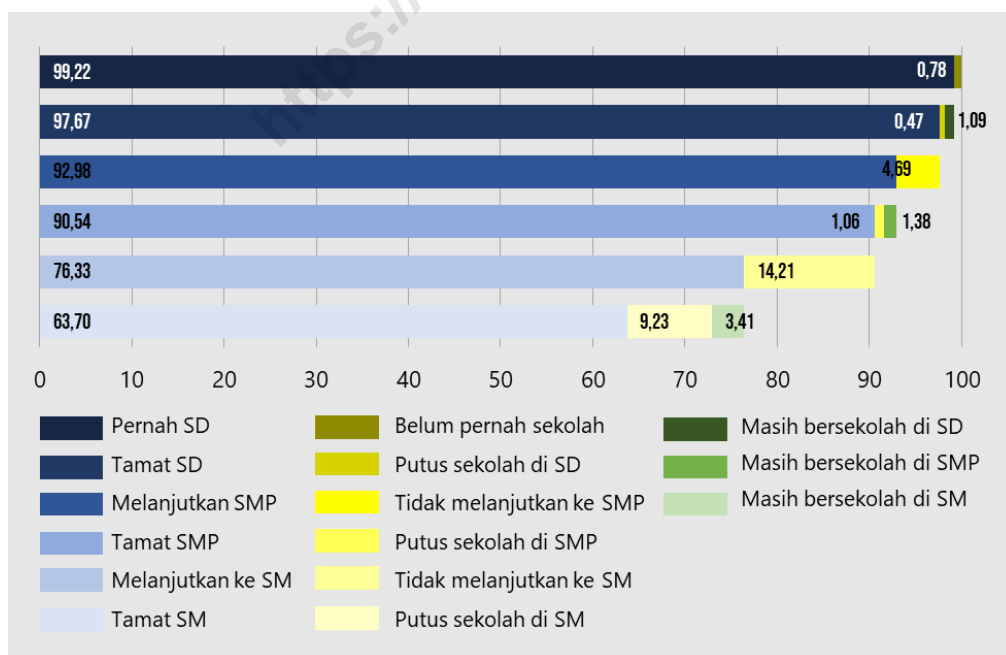


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.6 Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2023

Dari Gambar 5.7 dapat dilihat alur pendidikan penduduk usia 19-21 tahun dari jenjang SD/ sederajat sampai SM/ sederajat. Terdapat sekitar 99,22 persen penduduk usia 19-21 tahun pernah berada pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Dari besaran tersebut, 97,67 persen diantaranya tamat SD/ sederajat dan hanya 92,98 persen yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/ sederajat.

Meskipun indikator tingkat kelulusan dapat menggambarkan proporsi individu dalam kelompok usia tertentu yang tepat waktu atau terlambat (*delay*) dalam pendaftaran, hingga penyelesaian pada suatu jenjang pendidikan, namun indikator ini belum dapat melihat pada jenjang mana siswa keluar dari sistem pendidikan sebelum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Analisis Jalur Pendidikan menyediakan informasi tersebut dengan memetakan proporsi individu yang masuk dan bertransisi ke dan serta menyelesaikan semua tingkat pendidikan hingga pendidikan menengah atas. Analisis ini memungkinkan identifikasi hambatan dalam sistem pendidikan di mana sebagian besar siswa meninggalkan sekolah.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.7 Analisis Alur Pendidikan Penduduk Usia 19-21 Tahun, 2023

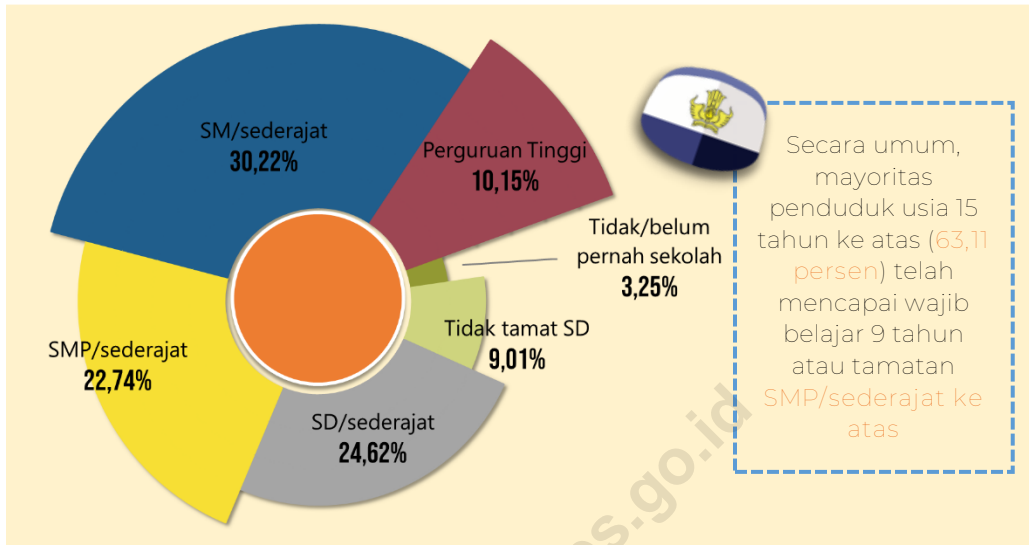
Analisis jalur berdasarkan data Susenas 2023 didasarkan pada penduduk yang pada saat pendataan berumur 19 hingga 21 tahun (1-3 tahun di atas usia kelulusan Sekolah Menengah Atas yang resmi, yaitu 18 tahun). Di antara penduduk kelompok umur 19-21 tahun tersebut, ditemukan bahwa 99,22 persen diantaranya pernah masuk sekolah dasar, selanjutnya 92,98 persen yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama, serta hanya 76,33 persen yang melanjutkan ke sekolah menengah atas (Gambar 5.7). Di sisi lain, di antara penduduk yang dianalisis, ditemukan sekitar 4,69 persen yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan 14,21 persen yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SM/ sederajat.

Jika dilihat berdasarkan angka putus sekolah, ditemukan bahwa angka putus sekolah tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan SM/ sederajat (9,23 persen), sedangkan pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat angka putus sekolah tidak terlalu tinggi, yaitu 0,47 persen dan 1,06 persen untuk masing-masing jenjang. Namun ada hal menarik yang dapat dilihat dari analisis ini, yakni masih ditemukan penduduk usia 19-21 yang masih bersekolah di jenjang pendidikan yang jauh dari seharusnya. Sekitar 1,09 persen penduduk usia 19-21 yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat dan 1,38 persen yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.

B. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Secara umum, tingkat pendidikan mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia telah mencapai wajib belajar 9 tahun atau tamatan SMP/ sederajat ke atas. Sebanyak 63,11 persen penduduk usia 15 tahun ke atas tamatan SMP/ sederajat ke atas, dengan rincian 22,74 persen tamatan SMP/ sederajat, 30,22 persen tamatan SM/ sederajat serta 10,15 persen tamatan perguruan tinggi (Gambar 5.8). Disisi lain, data Susenas 2023 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun

ke atas, 9 orang diantaranya tidak tamat SD dan 3 orang tidak/belum pernah sekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023

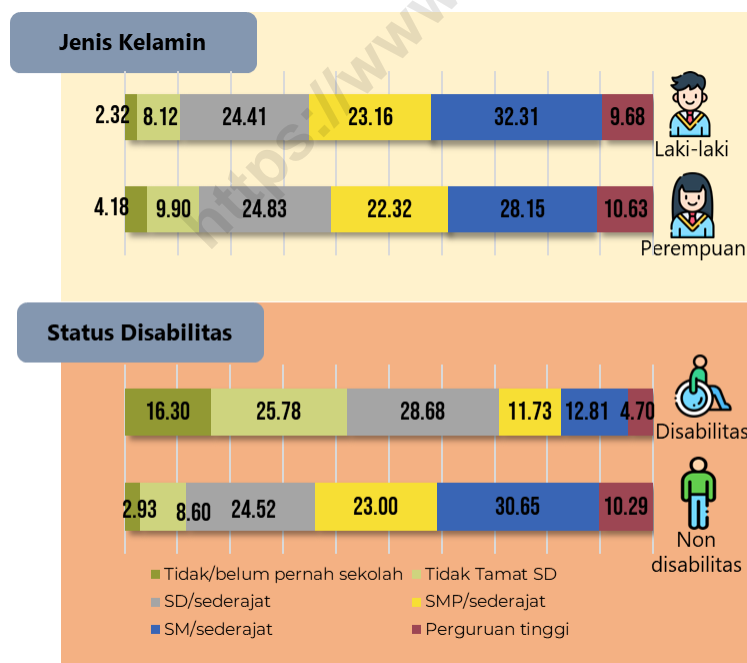
Gambar 5.8 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2023

Secara umum, tingkat pendidikan yang ditamatkan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas tidak berbeda secara signifikan (Gambar 5.9). Persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas cenderung sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki pada jenjang pendidikan rendah (tidak/belum sekolah, tidak tamat SD, dan tamat SD/ sederajat), yakni 38,91 persen berbanding 34,85 persen, dan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), yakni 10,63 persen berbanding 9,68 persen.

Kesenjangan juga terlihat antara penduduk penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Dari Gambar 5.9 dapat dilihat bahwa mayoritas penyandang disabilitas masih berpendidikan rendah, yaitu SD/ sederajat ke bawah (70,75 persen). Di lain sisi, persentase penduduk non-disabilitas usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD/ sederajat ke bawah hanya sebesar 36,06 persen. Ini menunjukkan kondisi ketimpangan capaian pendidikan yang sangat

tinggi antara penduduk usia 15 tahun ke atas penyandang disabilitas dengan bukan penyandang disabilitas.

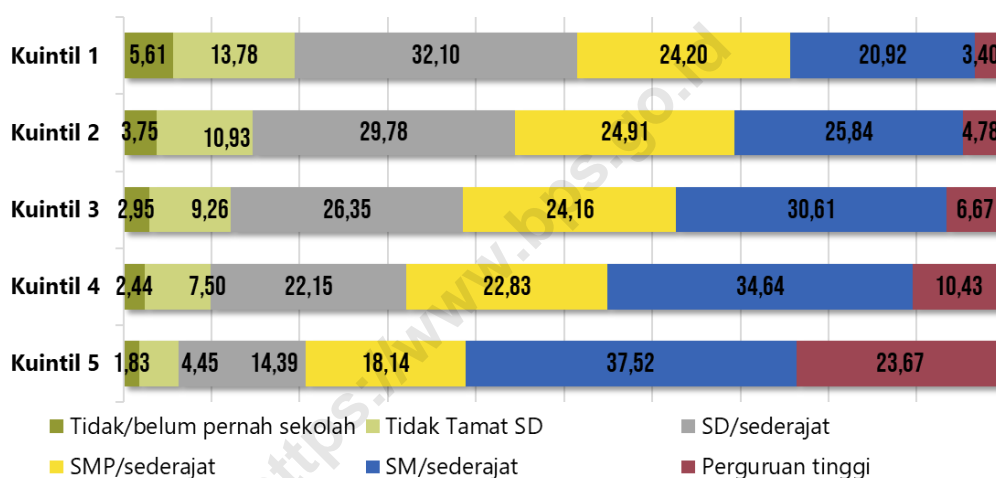
Ketimpangan capaian pendidikan yang dialami oleh penyandang disabilitas, tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia, namun sudah juga menjadi isu dunia. Praktik pendidikan inklusif di dunia telah menjadi agenda internasional di antaranya melalui SDGs yang mengamanatkan agar semua anak tanpa kecuali dipenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, serta telah menjadi agenda utama dalam pendidikan untuk semua di satuan pendidikan reguler. Di Indonesia, praktik pendidikan inklusif telah berkembang pesat sejak tahun 2003 dan sampai sekarang telah tercatat lebih dari 36.000 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.9 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Disabilitas, 2023

Selain itu, ketimpangan capaian pendidikan yang ditamatkan juga terjadi jika dilihat berdasarkan status ekonomi rumah tangga. Gambar 5.9 memperlihatkan pola bahwa semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga maka tingkat pendidikan yang ditamatkan juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, persentase penduduk tamatan SD/ sederajat ke bawah terlihat semakin besar seiring dengan semakin rendahnya status ekonomi rumah tangga. Hal ini berarti penduduk pada status ekonomi tertinggi (kuintil 5) didominasi oleh tamatan SM/ sederajat ke atas sedangkan pada kuintil 1 didominasi oleh penduduk yang tamat SD/ sederajat ke bawah.

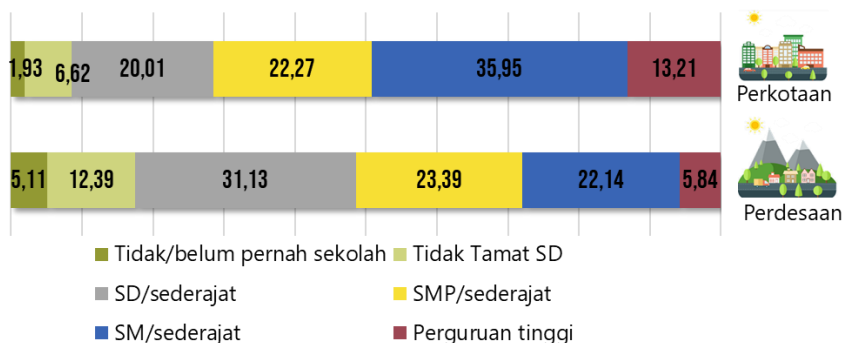


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.10 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Ekonomi, 2023

Kesenjangan capaian tingkat pendidikan yang ditamatkan lainnya juga terlihat antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan perkotaan. Gambar 5.11 memperlihatkan perbedaan capaian tersebut. Di perkotaan, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tamatan SM/ sederajat ke atas ada sekitar 49,17 persen. Sementara itu, penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan didominasi oleh tamatan SMP/ sederajat ke bawah (72,03 persen). Kesenjangan yang cukup jauh juga terlihat pada penduduk yang tamat Perguruan Tinggi, di perkotaan mencapai 13,21 persen sedangkan di perdesaan

hanya 5,84 persen. Hal ini diindikasikan karena ketersediaan fasilitas pendidikan perguruan tinggi mayoritas tersedia di daerah perkotaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

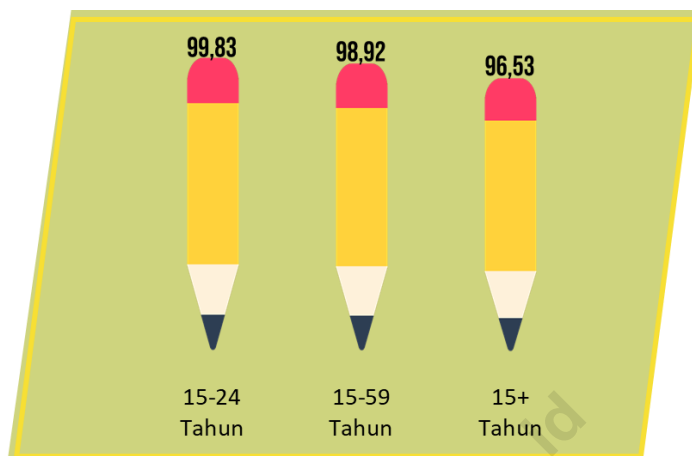
Gambar 5.11 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Klasifikasi Desa, 2023

Tujuan pembangunan pendidikan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, maupun waktu. Salah satunya pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan ekonomi.

C. Angka Melek Huruf

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH juga merupakan salah satu indikator pencapaian target SDGs pilar sosial yaitu indikator 4.6.1 (a), yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk

dewasa tertentu, baik laki- laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

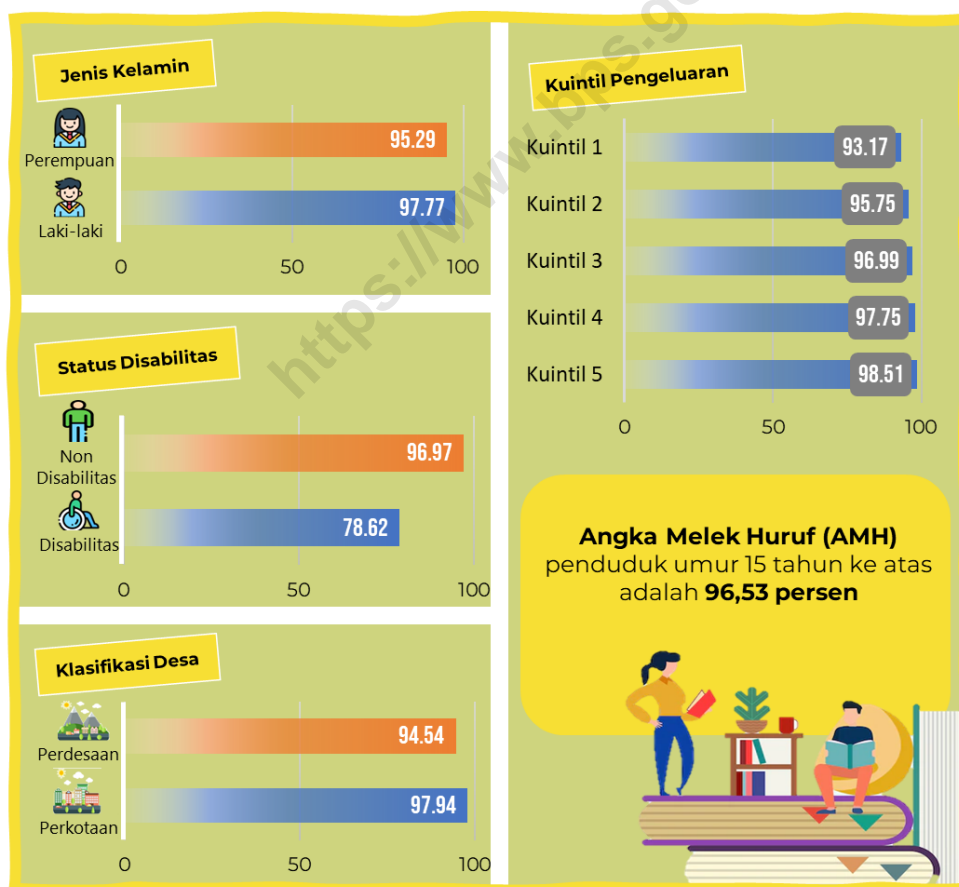
Gambar 5.12 Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur, 2023

Gambar 5.12 memperlihatkan perbandingan capaian AMH untuk setiap kelompok umur dimana AMH usia 15 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan AMH usia 15-24 tahun dan AMH usia 15-59 tahun. Pada tahun 2023, AMH usia 15-24 tahun mencapai 99,83 persen dan AMH usia 15-59 tahun mencapai 98,92 persen sedangkan AMH usia 15 tahun ke atas hanya 96,53 persen. Hal ini diasumsikan karena pada kelompok umur 15 tahun ke atas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa bahkan tidak bisa baca tulis. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Merujuk pada Gambar 5.13 dapat dilihat bahwa capaian AMH 15 tahun ke atas masih terdapat kesenjangan pada tiap karakteristik. Dilihat dari jenis kelamin, capaian AMH 15 tahun ke atas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (95,29 persen dibanding 97,77 persen). Kesenjangan yang cukup besar terlihat pada status disabilitas, dimana capaian AMH 15 tahun ke atas untuk penduduk yang tidak mengalami disabilitas sebesar 96,97 persen sedangkan yang mengalami disabilitas capaiannya hanya sebesar 78,62 persen. Capaian AMH 15 tahun ke atas di perdesaan juga lebih rendah dibandingkan

perkotaan (94,54 persen dibanding 97,94 persen). Menurut status ekonomi rumah tangga, semakin tinggi status ekonominya maka akan semakin tinggi juga capaian AMH 15 tahun ke atas.

Untuk dapat mewujudkan prinsip SDGs yaitu *"leave no one behind"*, keempat hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan capaian AMH. Literasi merupakan bagian dari hak atas pendidikan yang dapat meningkatkan derajat kehidupan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan mempunyai dampak positif terhadap kesehatan dan pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2023). Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh penduduk dewasa namun juga anak-anak sebagai bekal mereka di masa depan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.13 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik Demografi, 2023

D. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat pendidikan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2022). RLS memperhitungkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, tidak termasuk tahun yang dihabiskan untuk penduduk yang mengulang karena tidak naik kelas. Secara umum, nilai indikator ini menunjukkan tingkat keterampilan dan kompetensi penduduk suatu negara, yang dapat dilihat sebagai proksi dari aspek kuantitatif dan kualitatif dari stok sumber daya manusia. Nilai yang relatif tinggi menunjukkan besarnya proporsi penduduk dewasa menurut tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai atau diselesaikan, dan mencerminkan sistem pendidikan yang berkinerja baik (Unesco, 2009).

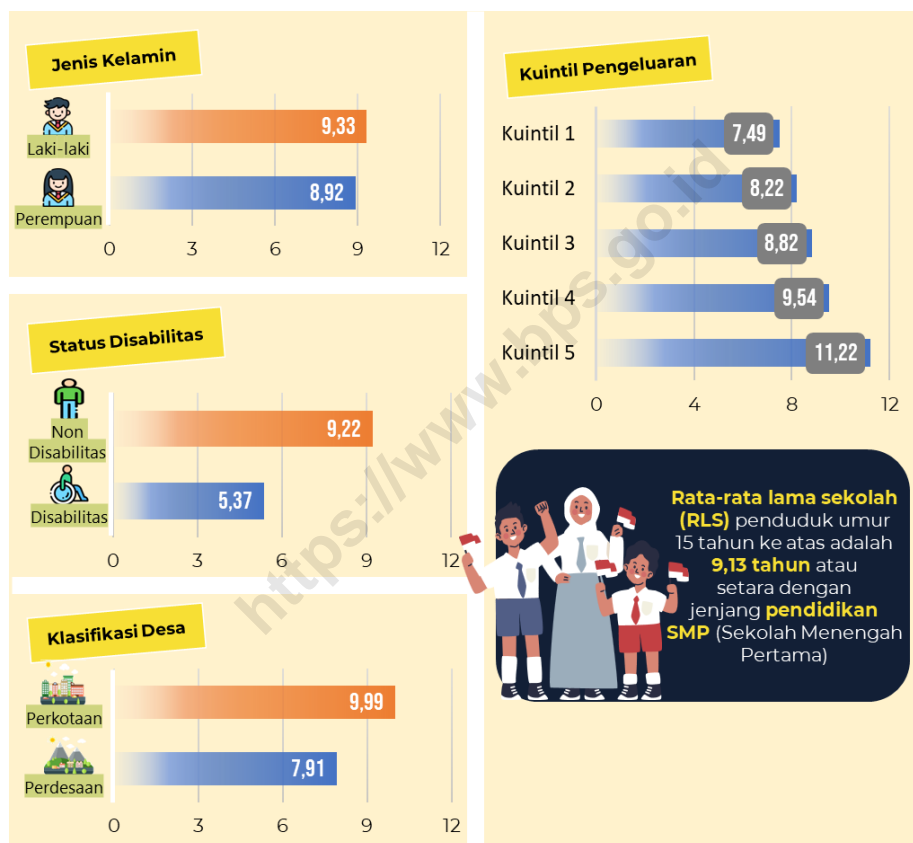


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.14 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi, 2023

Nilai RLS pada tahun 2023 mencapai 9,13 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2022) yakni sebesar 9,08 tahun. Dengan melihat pola pergerakan capaian RLS antar tahun yang terus meningkat, diharapkan target RLS penduduk usia 15 tahun ke atas, yang tertera pada RPJMN sebesar 9,18 tahun di tahun 2024, dapat tercapai.

Jika dilihat sebaran RLS pada setiap provinsi (Gambar 5.14), terdapat ketimpangan pendidikan antara provinsi-provinsi di Indonesia. Provinsi dengan nilai RLS tertinggi adalah DKI Jakarta dengan capaian sebesar 11,42 tahun atau setara dengan kelas 11 SM/ sederajat. Capaian ini menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di DKI Jakarta sudah mulai mendekati target wajib belajar 12 tahun. Di sisi lain, provinsi dengan nilai RLS terendah adalah Papua dengan capaiannya sebesar 7,34 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5.15 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Karakteristik Demografi, 2023

Menurut Ghumus dan Chudgar (2015) yang menyatakan bahwa status ekonomi rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Teori ini diperkuat dengan temuan dari Moh. Yamin, dkk (2015), bahwa salah satu faktor yang memengaruhi capaian RLS adalah status kemiskinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan

gambaran RLS menurut status ekonomi rumah tangga, dimana semakin tinggi status ekonomi rumah tangga maka semakin tinggi pula capaian RLS. Penduduk yang berada di kuintil 5 memiliki capaian RLS sebesar 11,22 tahun atau setara kelas 11 SM/ sederajat. Sementara itu, perbedaan yang cukup jauh terjadi pada penduduk yang berada pada kuintil 1 dimana capaiannya hanya 7,49 tahun atau setara kelas 7 SMP/ sederajat (Gambar 5.15).

Faktor lain yang memengaruhi capaian RLS adalah akses terhadap fasilitas pendidikan (Moh. Yamin dkk, 2015). Kurangnya fasilitas pendidikan di perdesaan yang menyebabkan sulitnya penduduk di perdesaan untuk mengakses pendidikan, diindikasikan menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan RLS antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Capaian RLS penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Dimana di perkotaan mencapai 9,99 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat sedangkan di perdesaan hanya 7,91 tahun atau setara kelas 7 SMP/ sederajat.

Selain itu, kesulitan yang dialami oleh penduduk penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas pendidikan juga diduga memengaruhi ketimpangan RLS antara penduduk penyandang disabilitas dengan penduduk yang bukan penyandang disabilitas. Penduduk yang mengalami disabilitas memiliki capaian yang jauh lebih rendah dibandingkan yang tidak mengalami disabilitas. Hal ini terlihat pada capaian RLS penduduk yang mengalami disabilitas hanya 5,37 tahun atau setara kelas 5 SD/ sederajat sedangkan penduduk yang tidak mengalami disabilitas mencapai 9,22 tahun atau setara kelas 9 SMP/ sederajat.

Tabel 5.1 Angka Melanjutkan menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023

Karakteristik Demografi	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)
Indonesia	87,01	87,75
Jenis Kelamin		
Laki-laki	86,35	86,48
Perempuan	87,71	89,04
Tipe Daerah		
Perkotaan	88,94	90,00
Perdesaan	84,52	84,55

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.2 Angka Mengulang menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023

Karakteristik Demografi	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	5,14	3,58	3,64
Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,31	3,69	3,65
Perempuan	4,96	3,47	3,63
Tipe Daerah			
Perkotaan	4,92	3,33	3,34
Perdesaan	5,41	3,94	4,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.3 Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Demografi, 2023

Karakteristik Demografi	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	0,11	0,98	1,03
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,10	1,35	1,25
Perempuan	0,12	0,59	0,81
Tipe Daerah			
Perkotaan	0,05	0,78	0,94
Perdesaan	0,19	1,25	1,17

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.4 Tingkat Penyelesaian Pendidikan (School Age), 2023

Karakteristik Demografi	Umur 13-15 Tahun minimal tamat SD/ sederajat	Umur 16-18 Tahun minimal tamat SMP/ sederajat	Umur 19-21 Tahun minimal tamat SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	97,83	90,44	66,79
Jenis Kelamin			
Laki-laki	97,47	88,86	64,14
Perempuan	98,19	92,10	69,54
Tipe Daerah			
Perkotaan	98,54	92,85	73,25
Perdesaan	96,86	87,01	56,38

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Karakteristik Demografi	Jenjang Pendidikan					
	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indonesia	3,25	9,01	24,62	22,74	30,22	10,15
Jenis Kelamin						
Laki-laki	2,32	8,12	24,41	23,16	32,31	9,68
Perempuan	4,18	9,90	24,83	22,32	28,15	10,63
Status Disabilitas						
Disabilitas	16,30	25,78	28,68	11,73	12,81	4,70
Non Disabilitas	2,93	8,60	24,52	23,00	30,65	10,29
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 1	5,61	13,78	32,10	24,20	20,92	3,40
Kuintil 2	3,75	10,93	29,78	24,91	25,84	4,78
Kuintil 3	2,95	9,26	26,35	24,16	30,61	6,67
Kuintil 4	2,44	7,50	22,15	22,83	34,64	10,43
Kuintil 5	1,83	4,45	14,39	18,14	37,52	23,67
Tipe Daerah						
Perkotaan	1,93	6,62	20,01	22,27	35,95	13,21
Perdesaan	5,11	12,39	31,13	23,39	22,14	5,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.6 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2023

Karakteristik	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	99,83	98,92	96,53
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	99,82	99,22	97,77
Perempuan	99,83	98,62	95,29
Status Disabilitas			
Disabilitas	92,26	89,80	78,62
Nondisabilitas	99,87	99,02	96,97
Kuintil Pengeluaran			
Kuintil 1	99,72	97,86	93,17
Kuintil 2	99,83	98,70	95,75
Kuintil 3	99,83	99,10	96,99
Kuintil 4	99,85	99,28	97,75
Kuintil 5	99,90	99,47	98,51
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	99,94	99,50	97,94
Perdesaan	99,66	98,09	94,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.7 Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,99	96,09	96,06
Sumatera Utara	95,77	94,96	95,39
Sumatera Barat	96,46	95,24	95,82
Riau	97,27	97,97	97,71
Jambi	96,13	94,32	94,95
Sumatera Selatan	95,83	93,96	94,63
Bengkulu	95,51	95,57	95,55
Lampung	97,03	97,71	97,49
Kep. Bangka Belitung	97,86	97,89	97,88
Kep. Riau	96,96	95,35	96,76
DKI Jakarta	99,01	-	99,01
Jawa Barat	95,37	94,81	95,25
Jawa Tengah	95,96	95,96	95,96
DI Yogyakarta	96,69	97,80	96,97
Jawa Timur	95,47	94,80	95,17
Banten	91,83	92,28	91,94
Bali	96,63	97,15	96,77
Nusa Tenggara Barat	98,66	97,99	98,33
Nusa Tenggara Timur	97,18	96,63	96,76
Kalimantan Barat	96,31	96,27	96,29
Kalimantan Tengah	95,24	95,88	95,61
Kalimantan Selatan	98,85	98,14	98,49
Kalimantan Timur	96,04	96,37	96,14
Kalimantan Utara	96,19	96,04	96,14
Sulawesi Utara	95,29	95,49	95,39
Sulawesi Tengah	93,91	94,11	94,05
Sulawesi Selatan	96,60	94,43	95,40
Sulawesi Tenggara	96,51	96,22	96,32
Gorontalo	97,60	97,54	97,57
Sulawesi Barat	96,33	96,14	96,18
Maluku	96,76	96,21	96,42
Maluku Utara	98,38	94,96	95,86
Papua Barat	93,61	94,91	94,43
Papua	92,89	94,38	93,94
Indonesia	95,85	95,59	95,74

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.8 Angka Bertahan Sampai Dengan Kelas 6 SD menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95,89	96,23	96,06
Sumatera Utara	95,71	95,06	95,39
Sumatera Barat	95,20	96,45	95,82
Riau	97,35	98,08	97,71
Jambi	94,43	95,49	94,95
Sumatera Selatan	94,26	95,02	94,63
Bengkulu	94,73	96,40	95,55
Lampung	97,12	97,88	97,49
Kep. Bangka Belitung	98,18	97,56	97,88
Kep. Riau	96,46	97,08	96,76
DKI Jakarta	98,96	99,06	99,01
Jawa Barat	95,09	95,41	95,25
Jawa Tengah	95,90	96,02	95,96
DI Yogyakarta	95,56	98,45	96,97
Jawa Timur	95,13	95,22	95,17
Banten	91,39	92,53	91,94
Bali	97,47	96,02	96,77
Nusa Tenggara Barat	98,42	98,24	98,33
Nusa Tenggara Timur	96,81	96,71	96,76
Kalimantan Barat	96,27	96,30	96,29
Kalimantan Tengah	95,05	96,17	95,61
Kalimantan Selatan	98,20	98,78	98,49
Kalimantan Timur	94,98	97,38	96,14
Kalimantan Utara	97,34	94,94	96,14
Sulawesi Utara	94,60	96,17	95,39
Sulawesi Tengah	94,61	93,48	94,05
Sulawesi Selatan	94,48	96,34	95,40
Sulawesi Tenggara	96,15	96,50	96,32
Gorontalo	98,34	96,78	97,57
Sulawesi Barat	96,44	95,91	96,18
Maluku	96,15	96,69	96,42
Maluku Utara	96,24	95,42	95,86
Papua Barat	93,97	94,90	94,43
Papua	94,09	93,79	93,94
Indonesia	95,56	95,92	95,74

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.9 Angka Melanjutkan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan	
	Melanjutkan ke SMP/ sederajat	Melanjutkan ke SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)
Aceh	81,30	80,08
Sumatera Utara	86,45	89,23
Sumatera Barat	89,72	89,54
Riau	90,40	88,91
Jambi	82,63	81,77
Sumatera Selatan	82,53	86,07
Bengkulu	91,40	90,24
Lampung	87,03	85,75
Kep. Bangka Belitung	92,18	95,41
Kep. Riau	80,31	86,35
DKI Jakarta	93,68	96,81
Jawa Barat	84,97	84,36
Jawa Tengah	89,13	87,54
DI Yogyakarta	96,82	93,68
Jawa Timur	86,72	87,58
Banten	84,08	85,13
Bali	91,88	90,69
Nusa Tenggara Barat	96,32	90,72
Nusa Tenggara Timur	93,21	92,12
Kalimantan Barat	87,84	90,00
Kalimantan Tengah	82,26	90,92
Kalimantan Selatan	87,38	92,13
Kalimantan Timur	86,15	91,87
Kalimantan Utara	88,58	89,11
Sulawesi Utara	88,42	86,71
Sulawesi Tengah	83,64	90,98
Sulawesi Selatan	84,15	89,38
Sulawesi Tenggara	91,79	94,36
Gorontalo	89,70	94,40
Sulawesi Barat	85,69	89,48
Maluku	89,34	89,23
Maluku Utara	83,88	91,01
Papua Barat	88,10	95,36
Papua	79,20	86,68
Indonesia	87,01	87,75

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.10 Angka Mengulang menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,57	6,60	5,87
Sumatera Utara	5,67	3,75	4,20
Sumatera Barat	4,76	3,10	3,91
Riau	3,00	3,45	2,66
Jambi	6,30	6,14	6,51
Sumatera Selatan	6,12	5,34	4,10
Bengkulu	4,81	4,57	5,57
Lampung	3,29	2,91	2,46
Kep. Bangka Belitung	2,63	1,95	2,68
Kep. Riau	5,27	4,79	4,32
DKI Jakarta	1,71	1,70	2,41
Jawa Barat	5,83	3,31	4,15
Jawa Tengah	4,77	3,01	2,09
DI Yogyakarta	2,97	2,25	NA
Jawa Timur	5,80	4,26	3,59
Banten	8,86	5,39	4,38
Bali	3,99	2,66	3,49
Nusa Tenggara Barat	1,92	2,19	2,16
Nusa Tenggara Timur	3,44	2,60	4,44
Kalimantan Barat	4,42	3,07	4,22
Kalimantan Tengah	5,80	2,53	2,89
Kalimantan Selatan	1,84	1,53	1,74
Kalimantan Timur	5,02	2,54	1,80
Kalimantan Utara	4,86	5,34	4,24
Sulawesi Utara	5,47	5,02	4,99
Sulawesi Tengah	6,58	3,89	4,00
Sulawesi Selatan	5,36	3,29	4,84
Sulawesi Tenggara	4,19	0,90	3,41
Gorontalo	2,97	NA	3,40
Sulawesi Barat	4,63	5,94	4,77
Maluku	4,18	3,77	5,77
Maluku Utara	5,70	4,57	6,13
Papua Barat	6,47	3,00	5,96
Papua	7,67	5,29	4,39
Indonesia	5,14	3,58	3,64

Catatan: NA: Data tidak dapat ditampilkan

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.11 Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Umur 13-15 Tahun minimal tamat SD/ sederajat	Umur 16-18 Tahun minimal tamat SMP/ sederajat	Umur 19-21 Tahun minimal tamat SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,08	94,55	74,46
Sumatera Utara	98,75	94,35	74,43
Sumatera Barat	95,81	90,65	68,64
Riau	98,09	90,52	67,79
Jambi	97,76	89,35	66,62
Sumatera Selatan	97,58	87,95	64,81
Bengkulu	97,10	89,25	63,41
Lampung	98,67	87,67	64,54
Kep. Bangka Belitung	96,01	87,11	68,96
Kep. Riau	97,92	95,51	78,97
DKI Jakarta	98,66	95,85	88,10
Jawa Barat	99,09	91,42	66,47
Jawa Tengah	98,42	90,64	58,35
DI Yogyakarta	98,95	97,02	89,69
Jawa Timur	98,78	90,74	68,65
Banten	97,15	90,86	70,07
Bali	98,43	93,03	76,51
Nusa Tenggara Barat	98,11	92,95	63,66
Nusa Tenggara Timur	93,41	82,48	43,46
Kalimantan Barat	95,33	81,56	55,58
Kalimantan Tengah	97,47	88,92	63,93
Kalimantan Selatan	95,99	88,19	68,35
Kalimantan Timur	97,88	94,85	73,63
Kalimantan Utara	96,41	88,08	59,50
Sulawesi Utara	96,18	92,07	67,57
Sulawesi Tengah	97,56	90,05	55,69
Sulawesi Selatan	98,37	88,74	67,41
Sulawesi Tenggara	97,83	89,55	68,28
Gorontalo	93,69	83,71	46,19
Sulawesi Barat	95,13	84,04	54,79
Maluku	98,69	93,90	75,01
Maluku Utara	98,30	93,46	64,61
Papua Barat	92,69	88,63	59,99
Papua	80,09	67,12	39,50
Indonesia	97,83	90,44	66,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.12 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023

Provinsi	Jenjang Pendidikan					
	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,08	8,13	20,00	24,32	33,27	13,20
Sumatera Utara	1,38	6,95	17,15	22,54	40,96	11,02
Sumatera Barat	1,09	11,75	19,41	21,74	33,07	12,94
Riau	1,97	7,04	23,40	23,61	32,58	11,41
Jambi	2,51	7,23	26,05	24,39	29,90	9,91
Sumatera Selatan	1,64	10,61	28,02	20,59	30,71	8,43
Bengkulu	2,14	10,70	23,49	21,88	29,04	12,75
Lampung	1,74	12,01	24,49	26,61	27,76	7,41
Kep. Bangka Belitung	2,19	14,17	25,43	18,23	31,28	8,70
Kep. Riau	1,33	5,23	18,30	18,33	43,85	12,96
DKI Jakarta	0,79	2,67	10,86	18,48	49,18	18,02
Jawa Barat	1,77	6,55	29,20	23,69	29,80	8,97
Jawa Tengah	3,71	11,43	27,71	24,45	25,07	7,63
DI Yogyakarta	2,89	10,82	14,62	20,46	35,60	15,61
Jawa Timur	4,94	10,65	26,07	22,33	26,83	9,19
Banten	2,56	6,31	25,33	22,79	33,82	9,19
Bali	5,41	6,37	20,09	20,75	32,57	14,80
Nusa Tenggara Barat	6,68	12,01	24,12	22,49	25,47	9,24
Nusa Tenggara Timur	3,44	15,69	29,45	21,21	20,22	9,99
Kalimantan Barat	5,19	14,37	26,29	21,00	25,01	8,13
Kalimantan Tengah	1,60	8,60	28,91	26,54	23,76	10,59
Kalimantan Selatan	1,30	11,49	28,71	21,90	26,42	10,18
Kalimantan Timur	1,49	5,40	19,72	21,29	40,14	11,97
Kalimantan Utara	4,08	6,21	22,03	24,51	31,40	11,77
Sulawesi Utara	0,46	10,08	18,58	23,53	35,94	11,41
Sulawesi Tengah	2,68	7,15	29,15	25,26	23,74	12,02
Sulawesi Selatan	4,75	11,09	21,56	20,50	29,58	12,51
Sulawesi Tenggara	3,72	8,14	21,33	26,40	25,30	15,11
Gorontalo	3,62	19,76	23,50	20,37	20,54	12,21
Sulawesi Barat	5,95	13,36	26,22	18,29	23,75	12,43
Maluku	1,47	5,51	19,99	24,97	33,87	14,19
Maluku Utara	1,77	9,24	23,39	24,09	29,49	12,02
Papua Barat	5,02	6,10	17,81	21,53	34,97	14,57
Papua	31,02	3,36	14,30	18,07	24,56	8,68
Indonesia	3,25	9,01	24,62	22,74	30,22	10,15

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.13.1 Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,90	99,83	99,44
Sumatera Utara	99,93	99,83	99,54
Sumatera Barat	99,97	99,82	99,51
Riau	99,94	99,95	99,55
Jambi	99,82	99,90	99,03
Sumatera Selatan	99,93	99,90	99,52
Bengkulu	100,00	99,81	99,03
Lampung	99,76	99,55	98,53
Kep. Bangka Belitung	100,00	99,57	98,80
Kep. Riau	99,98	99,94	99,42
DKI Jakarta	99,91	99,88	99,69
Jawa Barat	99,97	99,79	98,68
Jawa Tengah	99,96	98,98	95,85
DI Yogyakarta	99,94	99,43	97,08
Jawa Timur	100,00	98,94	96,15
Banten	99,96	99,89	98,54
Bali	99,95	99,95	97,29
Nusa Tenggara Barat	99,84	95,89	91,16
Nusa Tenggara Timur	99,91	99,43	98,26
Kalimantan Barat	99,97	99,16	96,93
Kalimantan Tengah	99,80	99,94	99,41
Kalimantan Selatan	99,97	99,84	99,14
Kalimantan Timur	99,94	99,90	99,28
Kalimantan Utara	99,73	99,49	98,91
Sulawesi Utara	99,93	99,97	99,83
Sulawesi Tengah	99,62	99,90	99,58
Sulawesi Selatan	99,94	98,95	97,29
Sulawesi Tenggara	99,64	99,55	97,68
Gorontalo	99,69	99,67	99,34
Sulawesi Barat	99,75	98,95	97,18
Maluku	100,00	100,00	99,75
Maluku Utara	100,00	99,90	99,59
Papua Barat	99,53	99,70	99,49
Papua	99,78	99,17	98,67
Indonesia	99,94	99,50	97,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.13.2 Angka Melek Huruf (AMH) di Daerah Perdesaan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,95	99,54	97,76
Sumatera Utara	99,98	99,72	98,65
Sumatera Barat	99,85	99,96	99,11
Riau	99,92	99,96	98,93
Jambi	99,88	99,84	97,74
Sumatera Selatan	99,95	99,55	98,23
Bengkulu	99,85	99,81	97,31
Lampung	99,99	99,33	96,73
Kep. Bangka Belitung	99,93	99,15	97,47
Kep. Riau	99,76	98,33	96,18
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	99,95	99,87	97,88
Jawa Tengah	99,95	98,29	92,63
DI Yogyakarta	100,00	97,86	91,10
Jawa Timur	99,87	97,37	90,57
Banten	99,75	99,84	97,15
Bali	99,83	97,96	91,29
Nusa Tenggara Barat	99,80	92,63	86,92
Nusa Tenggara Timur	99,46	97,29	93,96
Kalimantan Barat	99,88	97,46	93,50
Kalimantan Tengah	99,76	99,93	98,75
Kalimantan Selatan	99,89	99,95	97,61
Kalimantan Timur	99,98	99,89	98,40
Kalimantan Utara	99,33	98,49	95,74
Sulawesi Utara	99,93	99,97	99,74
Sulawesi Tengah	99,92	98,80	97,44
Sulawesi Selatan	99,79	95,96	90,79
Sulawesi Tenggara	99,93	98,01	94,96
Gorontalo	99,85	98,99	97,80
Sulawesi Barat	99,53	96,60	93,60
Maluku	99,93	99,57	99,24
Maluku Utara	99,82	99,95	98,49
Papua Barat	99,75	97,91	96,61
Papua	91,14	79,14	78,18
Indonesia	99,66	98,09	94,54

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.13.3 Angka Melek Huruf (AMH) Laki-laki menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,89	99,74	99,03
Sumatera Utara	100,00	99,85	99,49
Sumatera Barat	99,91	99,91	99,65
Riau	99,95	99,96	99,60
Jambi	99,77	99,88	98,89
Sumatera Selatan	99,89	99,76	99,24
Bengkulu	99,85	99,84	98,74
Lampung	99,97	99,47	98,26
Kep. Bangka Belitung	99,97	99,54	98,98
Kep. Riau	99,95	99,83	99,35
DKI Jakarta	99,81	99,87	99,74
Jawa Barat	99,99	99,90	99,14
Jawa Tengah	99,93	99,19	96,68
DI Yogyakarta	100,00	99,26	97,46
Jawa Timur	99,92	98,98	96,10
Banten	99,90	99,92	99,10
Bali	99,90	99,70	97,57
Nusa Tenggara Barat	99,97	96,02	92,05
Nusa Tenggara Timur	99,60	98,03	96,14
Kalimantan Barat	99,89	98,83	96,56
Kalimantan Tengah	99,82	99,96	99,27
Kalimantan Selatan	99,92	99,89	99,10
Kalimantan Timur	99,91	99,94	99,46
Kalimantan Utara	99,20	99,32	98,34
Sulawesi Utara	99,86	99,94	99,78
Sulawesi Tengah	99,69	99,28	98,63
Sulawesi Selatan	99,84	97,71	95,23
Sulawesi Tenggara	99,78	98,93	97,44
Gorontalo	99,92	99,10	98,47
Sulawesi Barat	99,39	97,42	95,67
Maluku	99,97	99,78	99,59
Maluku Utara	99,90	99,95	99,47
Papua Barat	99,50	99,03	98,42
Papua	93,98	86,46	85,80
Indonesia	99,82	99,22	97,77

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.13.4 Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,97	99,55	97,67
Sumatera Utara	99,90	99,72	98,85
Sumatera Barat	99,92	99,87	98,98
Riau	99,91	99,95	98,75
Jambi	99,95	99,83	97,42
Sumatera Selatan	100,00	99,61	98,20
Bengkulu	99,96	99,78	97,01
Lampung	99,86	99,33	96,37
Kep. Bangka Belitung	99,97	99,24	97,47
Kep. Riau	99,97	99,72	98,74
DKI Jakarta	100,00	99,89	99,65
Jawa Barat	99,95	99,72	97,88
Jawa Tengah	99,98	98,13	92,06
DI Yogyakarta	99,90	98,87	93,77
Jawa Timur	99,97	97,56	91,39
Banten	99,92	99,84	97,36
Bali	99,95	99,12	93,63
Nusa Tenggara Barat	99,68	92,67	86,31
Nusa Tenggara Timur	99,59	97,74	94,13
Kalimantan Barat	99,94	97,34	92,99
Kalimantan Tengah	99,73	99,90	98,78
Kalimantan Selatan	99,94	99,90	97,64
Kalimantan Timur	100,00	99,86	98,54
Kalimantan Utara	100,00	98,95	97,17
Sulawesi Utara	100,00	100,00	99,80
Sulawesi Tengah	99,93	99,05	97,65
Sulawesi Selatan	99,89	97,08	92,53
Sulawesi Tenggara	99,83	98,32	94,66
Gorontalo	99,64	99,50	98,52
Sulawesi Barat	99,77	96,72	92,99
Maluku	99,96	99,74	99,35
Maluku Utara	99,85	99,93	98,15
Papua Barat	99,83	98,29	97,21
Papua	93,14	83,05	82,47
Indonesia	99,83	98,62	95,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.13.5 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15+ Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99.93	99.65	98.34
Sumatera Utara	99.95	99.79	99.17
Sumatera Barat	99.91	99.89	99.31
Riau	99.93	99.96	99.18
Jambi	99.86	99.86	98.16
Sumatera Selatan	99.94	99.69	98.73
Bengkulu	99.90	99.81	97.89
Lampung	99.91	99.40	97.33
Kep. Bangka Belitung	99.97	99.39	98.24
Kep. Riau	99.96	99.77	99.05
DKI Jakarta	99.91	99.88	99.69
Jawa Barat	99.97	99.81	98.51
Jawa Tengah	99.95	98.66	94.34
DI Yogyakarta	99.95	99.07	95.59
Jawa Timur	99.94	98.27	93.70
Banten	99.91	99.88	98.23
Bali	99.92	99.42	95.61
Nusa Tenggara Barat	99.82	94.32	89.11
Nusa Tenggara Timur	99.60	97.88	95.11
Kalimantan Barat	99.92	98.10	94.79
Kalimantan Tengah	99.78	99.93	99.03
Kalimantan Selatan	99.93	99.89	98.37
Kalimantan Timur	99.95	99.90	99.01
Kalimantan Utara	99.59	99.14	97.78
Sulawesi Utara	99.93	99.97	99.79
Sulawesi Tengah	99.81	99.17	98.14
Sulawesi Selatan	99.87	97.39	93.83
Sulawesi Tenggara	99.80	98.62	96.03
Gorontalo	99.78	99.30	98.49
Sulawesi Barat	99.58	97.08	94.33
Maluku	99.96	99.76	99.47
Maluku Utara	99.88	99.94	98.81
Papua Barat	99.66	98.67	97.84
Papua	93.57	84.83	84.22
Indonesia	99.83	98.92	96.53

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.14 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Klasifikasi Desa, 2023

Provinsi	Klasifikasi Desa		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,85	9,37	9,89
Sumatera Utara	10,74	9,15	10,07
Sumatera Barat	10,50	8,66	9,59
Riau	10,84	8,76	9,60
Jambi	10,35	8,58	9,16
Sumatera Selatan	10,43	7,95	8,90
Bengkulu	11,25	8,39	9,35
Lampung	9,91	8,12	8,72
Kep. Bangka Belitung	9,54	7,45	8,66
Kep. Riau	10,86	7,85	10,52
DKI Jakarta	11,42	-	11,42
Jawa Barat	9,58	7,57	9,16
Jawa Tengah	9,22	7,56	8,44
DI Yogyakarta	10,83	8,14	10,16
Jawa Timur	9,43	7,38	8,53
Banten	10,04	7,44	9,48
Bali	10,40	8,05	9,74
Nusa Tenggara Barat	8,94	7,79	8,39
Nusa Tenggara Timur	10,27	7,59	8,31
Kalimantan Barat	9,70	7,24	8,17
Kalimantan Tengah	10,27	8,16	9,07
Kalimantan Selatan	10,03	7,88	8,95
Kalimantan Timur	10,82	8,71	10,17
Kalimantan Utara	10,23	8,26	9,53
Sulawesi Utara	10,64	9,06	9,94
Sulawesi Tengah	10,78	8,45	9,22
Sulawesi Selatan	10,46	7,95	9,12
Sulawesi Tenggara	10,97	8,75	9,62
Gorontalo	9,75	7,45	8,48
Sulawesi Barat	10,16	8,05	8,48
Maluku	11,52	9,46	10,38
Maluku Utara	11,40	8,85	9,61
Papua Barat	11,44	9,18	10,14
Papua	11,19	5,71	7,32
Indonesia	9,99	7,91	9,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.15 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

Provinsi	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,96	9,83	9,89
Sumatera Utara	10,20	9,95	10,07
Sumatera Barat	9,45	9,73	9,59
Riau	9,67	9,53	9,60
Jambi	9,31	9,01	9,16
Sumatera Selatan	8,98	8,81	8,90
Bengkulu	9,48	9,22	9,35
Lampung	8,90	8,52	8,72
Kep. Bangka Belitung	8,71	8,62	8,66
Kep. Riau	10,50	10,54	10,52
DKI Jakarta	11,61	11,23	11,42
Jawa Barat	9,37	8,96	9,16
Jawa Tengah	8,74	8,15	8,44
DI Yogyakarta	10,41	9,92	10,16
Jawa Timur	8,85	8,22	8,53
Banten	9,67	9,28	9,48
Bali	10,25	9,24	9,74
Nusa Tenggara Barat	8,80	7,99	8,39
Nusa Tenggara Timur	8,46	8,17	8,31
Kalimantan Barat	8,32	8,01	8,17
Kalimantan Tengah	9,17	8,96	9,07
Kalimantan Selatan	9,18	8,71	8,95
Kalimantan Timur	10,28	10,04	10,17
Kalimantan Utara	9,61	9,44	9,53
Sulawesi Utara	9,82	10,05	9,94
Sulawesi Tengah	9,26	9,18	9,22
Sulawesi Selatan	9,23	9,02	9,12
Sulawesi Tenggara	9,78	9,46	9,62
Gorontalo	8,10	8,86	8,48
Sulawesi Barat	8,57	8,39	8,48
Maluku	10,37	10,38	10,38
Maluku Utara	9,76	9,45	9,61
Papua Barat	10,36	9,91	10,14
Papua	7,74	6,87	7,32
Indonesia	9,33	8,92	9,13

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Tabel 5.16 *Sampling Error* Angka Mengulang menurut Jenjang Pendidikan, 2023

Provinsi	SD/ sederajat				SMP/ sederajat				SM/ sederajat			
	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error	Estimasi	Selang Kepercayaan		Relative Standard Error
		Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	5.57	4.79	6.36	7.22	6.60	5.25	7.95	10.43	5.87	4.45	7.28	12.31
Sumatera Utara	5.67	4.88	6.46	7.09	3.75	2.73	4.77	13.87	4.20	3.16	5.24	12.66
Sumatera Barat	4.76	3.98	5.53	8.33	3.10	1.83	4.37	20.95	3.91	2.63	5.18	16.63
Riau	3.00	2.29	3.71	12.09	3.45	2.33	4.57	16.55	2.66	1.68	3.65	18.91
Jambi	6.30	5.10	7.49	9.67	6.14	4.48	7.81	13.82	6.51	4.53	8.48	15.48
Sumatera Selatan	6.12	5.12	7.12	8.32	5.34	4.15	6.52	11.32	4.10	2.71	5.50	17.34
Bengkulu	4.81	3.73	5.90	11.48	4.57	2.92	6.22	18.41	5.57	3.71	7.43	17.00
Lampung	3.29	2.55	4.02	11.40	2.91	1.80	4.02	19.43	2.46	1.14	3.78	27.32
Kep. Bangka Belitung	2.63	1.66	3.59	18.74	1.95	0.82	3.09	29.72	2.68	1.21	4.16	28.07
Kepulauan Riau	5.27	3.42	7.11	17.88	4.79	0.89	8.69	41.54	4.32	1.20	7.44	36.88
DKI Jakarta	1.71	0.94	2.47	22.89	1.70	0.44	2.95	37.82	2.41	0.56	4.26	39.22
Jawa Barat	5.83	5.17	6.49	5.77	3.31	2.55	4.08	11.75	4.15	3.18	5.11	11.89
Jawa Tengah	4.77	4.23	5.31	5.77	3.01	2.35	3.67	11.23	2.09	1.53	2.65	13.66
DI Yogyakarta	2.97	1.75	4.20	20.99	2.25	1.06	3.44	26.93	NA	NA	NA	61.40
Jawa Timur	5.80	5.22	6.38	5.10	4.26	3.48	5.03	9.24	3.59	2.82	4.36	10.95
Banten	8.86	7.22	10.49	9.43	5.39	3.46	7.32	18.27	4.38	2.11	6.64	26.38
Bali	3.99	2.83	5.16	14.89	2.66	1.20	4.12	27.97	3.49	1.61	5.38	27.54
Nusa Tenggara Barat	1.92	1.26	2.58	17.60	2.19	1.08	3.29	25.84	2.16	0.88	3.43	30.19
Nusa Tenggara Timur	3.44	2.85	4.02	8.74	2.60	1.74	3.46	16.89	4.44	3.24	5.64	13.77
Kalimantan Barat	4.42	3.54	5.30	10.16	3.07	1.77	4.37	21.60	4.22	2.56	5.89	20.11
Kalimantan Tengah	5.80	4.73	6.87	9.44	2.53	1.51	3.54	20.52	2.89	1.66	4.12	21.68
Kalimantan Selatan	1.84	1.24	2.45	16.77	1.53	0.61	2.44	30.53	1.74	0.78	2.70	28.19
Kalimantan Timur	5.02	3.65	6.40	13.97	2.54	1.02	4.07	30.64	1.80	0.69	2.92	31.52
Kalimantan Utara	4.86	3.19	6.52	17.45	5.34	3.15	7.53	20.92	4.24	2.02	6.46	26.75
Sulawesi Utara	5.47	4.34	6.60	10.53	5.02	3.56	6.47	14.79	4.99	3.06	6.92	19.74
Sulawesi Tengah	6.58	5.22	7.93	10.51	3.89	2.48	5.29	18.46	4.00	2.55	5.45	18.48
Sulawesi Selatan	5.36	4.60	6.12	7.23	3.29	2.21	4.37	16.73	4.84	3.44	6.24	14.73
Sulawesi Tenggara	4.19	3.39	4.98	9.73	0.90	0.40	1.39	28.37	3.41	1.59	5.22	27.14
Gorontalo	2.97	1.82	4.11	19.65	NA	NA	NA	56.10	3.40	1.37	5.42	30.37
Sulawesi Barat	4.63	3.42	5.85	13.37	5.94	3.64	8.24	19.76	4.77	2.56	6.97	23.62
Maluku	4.18	3.19	5.18	12.15	3.77	2.70	4.85	14.55	5.77	3.81	7.74	17.36
Maluku Utara	5.70	4.47	6.93	11.04	4.57	3.15	5.98	15.85	6.13	4.21	8.04	15.96
Papua Barat	6.47	5.16	7.78	10.33	3.00	1.63	4.37	23.29	5.96	3.82	8.09	18.29
Papua	7.67	6.61	8.73	7.05	5.29	4.09	6.50	11.62	4.39	3.03	5.76	15.88
Indonesia	5.14	4.93	5.34	2.01	3.58	3.33	3.84	3.64	3.64	3.36	3.92	3.98

Catatan:

Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi.

Warna merah () artinya hasil estimasi dianggap tidak akurat.

NA: Data tidak dapat ditampilkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



DAFTAR
PUSTAKA

- Al Izzati, Ridho. 2021. "Berapa persen peluang anak dari rumah tangga miskin untuk melanjutkan kuliah" www.linkedin.com. Diakses pada Selasa 19 September 2023. https://www.linkedin.com/posts/smeru-research-institute_20tahunsmeru-kemiskinan-pendidikan-activity-6817325087797194752-Z6FO
- Arika, Yovita. 2020. "Angka Partisipasi Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus Sangat Rendah" www.kompas.id. Diakses 26 Juli 2023. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/09/11/angka-partisipasi-sekolah-anak-berkebutuhan-khusus-sangat-rendah>
- Arum, Amalia Pangesti, dan Melty Roza Adry. 2020. "Analisis Determinan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jambi." *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1): 10-21. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11549557.00>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia – Pilar Pembangunan Sosial . Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Pendidikan 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Pendidikan 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Indeks Pembangunan Manusia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

- Bappenas. 2020. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Bappenas.
- Bosoni, M. L. (2014). " *Breadwinners " or " Involved Fathers?" Men , Fathers and Work in Italy* *SPRING 2014 , Vol . 45 , No . 2 , SPECIAL ISSUE: The Transformation of Family Relationships in I. Journal of Comparative Family Studies*, 45(2, The Transformation of Family Relationships in Italy), 293–315. <https://www.jstor.org/stable/24339612>
- Cendekia, Diyang Gita. 2021. "Faktor Penentu Partisipasi Sekolah Anak Pada Rumah Tangga Sektor Pertanian di Indonesia". *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2): 215-226. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i2.471>
- Elmira, Elza dan Daniel Suryadarma.2018. "Pinjaman bagi Mahasiswa Miskin untuk Kesetaraan Akses Pendidikan Tinggi" www.smeru.or.id. Diakses pada Selasa 19 September 2023. <https://smeru.or.id/en/node/2965>
- Eriani, Eva dan Anne Mudya Yolanda. 2022. "Analisis Angka Partisipasi PAUD Untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Di Provinsi Riau". *Mitra Ash-Shibyan: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5 (01):1-16. <https://doi.org/10.46963/mash.v5i01.470>
- Fatah, Abdul, Muhammad Suhaili, dan Isna Farida. 2021. "Analisis Indikator Pendidikan: Partisipasi Pendidikan di Indonesia Periode 1994-2018." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran* 7, no. 3 (2021): 555-564. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/3516>
- Fitriyani, Vika Ramadhana.2021. "Problematika Akses Pendidikan Disabilitas" www.kumparan.com. Diakses pada 20 Agustus 2023. <https://kumparan.com/vika-ramadhana-fitriyani/1wEbPiNmEom>
- Gumus, Sedat dan Amita Chudgar. 2015. Factors affecting school participation in Turkey: an analysis of regional differences. *British Association for International and Comparative Education*: <http://dx.doi.org/10.1080/03057925.2015.1095073>
- Haekal, Muhammad. 2022. "Tantangan Distribusi Guru di Daerah Terpencil Indonesia: Antara Manajemen, Isu Personal, dan Faktor Geografi". *Ta'dib : Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 12 (1). DOI:10.54604/tdb.v12i1.100.
- Huriaty, Dina, Mayang Gadih Ranti, dan Zahra Chairani. 2018. "Peta Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015". *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(2): 16-28. <https://doi.org/10.33654/jpl.v13i2.318>
- Intan dkk. (2017). Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado. *e-journal Acta Diurna_ Volume VI. No. 1. Tahun*

2017. <https://media.neliti.com/media/publications/91161-IDpenggunaan-smartphone-dalam-menunjang-ak.pdf>
- Karini, Pilih. 2018. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16—18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 10(1): 103-115. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v10i1.64>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Latar Belakang Kurikulum Merdeka. Last Modified June 2023. <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824331505561-Latar-Belakang-Kurikulum-Merdeka>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Opsi Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Satuan Pendidikan. Last Modified Januari 2023. <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/8403555497497-Opsi-Implementasi-Kurikulum-Merdeka-Bagi-Satuan-Pendidikan>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Pengajaran Sesuai dengan Tingkat Kemampuan Peserta Didik. Last Modified January 2023. <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/14142735013145-Pengajaran-Sesuai-dengan-Tingkat-Kemampuan-Peserta-Didik>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2022. Luncurkan Kurikulum Merdeka, Mendikbudristek: Ini Lebih Fleksibel!. Modifikasi terakhir 12 Februari 2022. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/luncurkan-kurikulum-merdeka-mendikbudristek-ini-lebih-fleksibel>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Statistik Persekolahan SD 2022/2023. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Statistik Persekolahan SMA 2022/2023. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Statistik Persekolahan SMK 2022/2023. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2022. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Statistik Persekolahan SMP 2022/2023. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2022/2023. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. Kemendikbud Sampaikan Capaian Tahun 2020 dan Sasaran Tahun 2021. Las Modified January 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/kemendikbudsampaikan-capaian-tahun-2020-dan-sasaran-tahun-2021>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Pedoman Pengembangan Sanitasi Sekolah Dasar. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNICEF. 2017. SDG4 Baseline Report for Indonesia. Jakarta: KEMDIKBUD and UNICEF.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Data dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2012/2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2022. Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM Mulai Hari Ini. Artikel dapat diakses pada laman: <https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah-resmi-cabut-kebijakan-ppkm-mulai-hari-ini> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.
- Kompas. 2022. Kemendikbud Ristek: 142.000 Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka secara Mandiri. Last Modified August 16th, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/17014851/kemendikbud-ristek-142000-sekolah-terapkan-kurikulum-merdeka-secara-mandiri>.
- Kurba, Muhammad Indra Haria. 2021. Menyoal Anggaran Pendidikan. Last Modified 2021. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan>
- Lestari, Eko S., Priyatno Harsasto, dan Sulistyowati. 2015. "Analisis Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kota Semarang." Journal of Politic and Government Studies, 4(3): 351-360. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8897>

- Medcom.id. 2023. Bertambah, 150 Ribu Lebih Sekolah Daftar Implementasi Kurikulum Merdeka. Last Modified June 15th, 2023. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yKXEgBEN-bertambah-150-ribu-lebih-sekolah-daftar-implementasi-kurikulum-merdeka#:~:text=Dia%20menyebut%20dengan%20begitu%20semakin,Kurikulum%20Merdeka%2C%22%20tutor%20dia.>
- Mortimer, J. T. 2010. The Benefits and Risks of Adolescent Employment. The prevention researcher, 17(2), 8. <https://doi.org/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2936460/>
- Muttaqin, Tatang. 2017. "Why Do Children Stay Out Of School In Indonesia?". Jurnal Perencanaan Pembangunan. The Indonesian Journal of Dev. Planning Vol. 1 No. 2. Sept 2017.
- Nurrachmah, Dwi, Rika Vira Zwagery, dan Rooswita Santia Dewi. 2019. "Psidoedukasi Keliling (Psikoling) Sadar PAUD untuk meningkatkan kesadaran PAUD bagi masyarakat di Pinggiran Sungai Martapura". PRO SEJAHTERA (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), 1(1): 134-138. <http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-abdimas/article/download/301/302>
- Okumu. 2008. Socioeconomic determinants of primary school dropout: the logistic model analysis. Economic Policy Research Center, Makerere University.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Perdana, Novrian Satria. 2015. "Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak di Indonesia". Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 21(3): 279-298. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191>
- Pratiwi, Wiwik. 2018. "Kesiapan Anak Usia Dini Memasuki Sekolah Dasar". Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(1):1-13. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/502>.
- Purnamasari, Yessi, dan Dini Amaliah. 2015. "Peranan Partisipasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja di DKI Jakarta Tahun 2009-2013".

- Research and Development Journal of Education, 2(1): 20-28.
<http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v2i1.1420>
- Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Analisis Hubungan Jumlah Rombongan Belajar Dan Jumlah Peserta Didik Per Rombongan Belajar Dengan Mutu Lulusan. Jakarta : Puslitjakdikbud.
- Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Safira, Nita, dan Yudhi Hari Wibowo. 2021. "Angka Partisipasi Kasar Dan Angka Partisipasi Murni Sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia". *Pakar Pendidikan*, 19(2): 101-115. <https://doi.org/10.24036/pakar.v19i2.212>
- Salsabila, Aisyah, dan Budyanra Budyanra. 2022. "Determinan Status Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Pulau Jawa Tahun 2019." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 17 (1): 61-76. <https://doi.org/10.14203/jki.v17i1.677>
- Styawan, Dwi Agus. 2018. "Kesetaraan Gender dalam Bingkai Pendidikan " www.kompasiana.com. Diakses pada 4 Agustus 2023. https://www.kompasiana.com/da_styawan/5b75901612ae941212124054/kese-taraan-gender-dalam-bingkai-pendidikan?
- Sulistiyaningsih, Wiwik. 2005. "Kesiapan Bersekolah Anak Ditinjau Dari Jenis Pendidikan Pra Sekolah Anak dan Tingkat Pendidikan Orangtua". *Jurnal Psikologia*, 1(1):1-7. <https://www.scribd.com/doc/137541957/Psikologia-Vol-1-No-1-Juni-2005>
- Takerubun, Corsensia, dan Waris Marsisno. 2021. "Pengaruh Faktor Keluarga Terhadap Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Di Papua Barat". *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020 (1): 638-650.
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.460>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. 2023. What you need to know about literacy. Last Modified 29 June 2023. <https://www.unesco.org/en/literacy/need-know>

- UNESCO. Diakses pada 11 September 2023 pada <https://uis.unesco.org/en/glossary-term/mean-years-schooling>
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. 2009. Education Indicators Technical guidelines.
- Virdam, Fiona & Maria Bernadette Nani Ariani. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah Pada Provinsi Di Pulau Sulawesi". *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 2 (1) : 20-35. <https://ejournal.upnvj.ac.id/jded/article/view/5732>.
- Yahmin, Moh, Suyidno dan Syahlan Mattiro. 2015. Kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjar. Banjarmasin: Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat

<https://www.bps.go.id>



LAMPIRAN



<http://www.bps.go.id>



YSEN23JK

Dibuat 1 set untuk
BPS Kab/Kota



REPUBLIK INDONESIA

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2023

KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

MARET

SELAMAT PAGI/SIANG/SORE/MALAM, KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAAN SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN DAN PENGELOJARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU KAMI/SAYA AKAN MEWAWANCARAI BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASIKAN DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI WAWANCARA SEKARANG?

- Ya bersedia → Mulai wawancara
- Bersedia dengan perjanjian di lain waktu → Blok XXIII. Catatan
- Tidak bersedia → Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXIII. Catatan. Lampirkan Berita Acara Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pengawas

BLOK I. KETERANGAN TEMPAT	
101	Provinsi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
102	Kabupaten/Kota* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
103	Kecamatan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
104	Desa/Kelurahan* <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan 1. Perkotaan 2. Perdesaan <input type="checkbox"/>
106	Nomor Blok Sensus
107	Nomor Kode Sampel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
108	Nomor Urut Bangunan Tempat Tinggal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
109	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
110	Nama Kepala Rumah Tangga
111	Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)
112	Koordinat Lokasi Rumah Tangga Latitude (lintang) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Longitude (bujur) : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

*) Coret yang tidak perlu

BLOK II. KETERANGAN PENCACAHAN				
Uraian	Nama dan Kode/NIP	Jabatan	Waktu	Tanda Tangan
201. Pencacah Staf BPS Provinsi.....1 Staf BPS Kab/Kota.....2 Mitra.....3 1 2 3	Tgl <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bln <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
202. Pengawas Staf BPS Provinsi.....1 Staf BPS Kab/Kota.....2 Mitra.....3 1 2 3	Tgl <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bln <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
203. Hasil pencacahan rumah tangga	Terisi lengkap 1 <input type="checkbox"/> Terisi tidak lengkap 2 <input type="checkbox"/> Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan 3 <input type="checkbox"/> Responden menolak 4 <input type="checkbox"/> Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada 5 <input type="checkbox"/> Blok XXIII Catatan			

BLOK III. RINGKASAN	
301	Banyaknya anggota rumah tangga <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
302	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 0-4 tahun <input type="checkbox"/>
303	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas <input type="checkbox"/>
304	Banyaknya anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas <input type="checkbox"/>
305	Banyaknya perempuan berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin <input type="checkbox"/>

PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian kuesioner, perlu diperhatikan tata tertib sebagai berikut:

- Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan survei.
- Tulis isian secepat-cepatnya dengan pensil hitam pada tempat yang disediakan, agar mudah dibaca.
- Gunakan blok catatan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pengawas dan pengolah. Bagian kosong dari kuesioner juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang ditemui saat wawancara berlangsung.
- Pencatatan harus meneliti/memeriksa seluruh isian kuesioner dan memperbaiki setiap kesalahan, sebelum kuesioner diserahkan ke pengawas.
- Perhatikan dan patuhi tanda-tanda atau alur pertanyaan yang tertera pada kuesioner.
- Pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak dengan huruf kapital harus dibaca, sedangkan pertanyaan atau pilihan jawaban yang dicetak menggunakan huruf kecil tidak perlu dibaca.
- Kode pilihan jawaban yang menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, boleh dilingkari lebih dari satu pilihan jawaban. Kode pilihan jawaban yang menggunakan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, hanya boleh dilingkari salah satu.
- Beri tanda pengisian tempat diisi **sebelum ke lapangan**.
- Isikan Blok IV terlebih dahulu sampai selesai sebagai panduan untuk mengisi pertanyaan dalam format roster. Lipat bagian kertas yang ada tanda garis putus-putus dan tulisan lipit disini pada Blok IV halaman 2 sebagai panduan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada halaman genap. Sementara itu, untuk panduan mengisi pada halaman ganjil, kertas pada halaman 2 tidak perlu dilipat (dibarkan saja).
- Pertanyaan dalam format roster (nama anggota rumah tangga (ART) per baris) seperti pada Blok IV sampai dengan Blok XII diselesaikan dahulu dalam satu roster kemudian lanjut ke roster berikutnya.
- Tanda garis tebal pada pertanyaan roster menunjukkan batas pertanyaan untuk ART, isikan jawaban pertanyaan di dalam tanda garis tebal untuk seluruh ART, lalu berpindah ke pertanyaan selanjutnya.
- Tanda garis dua pada pertanyaan roster menunjukkan perbedaan tema pertanyaan dan seliap blok.
- Contoh cara penulisan informasi penerimaan Bantuan Pangan adalah menggunakan format rata kanan:

E. BERAPA KUALITAS KOMODITAS YANG DIBELI/MENGGUNAKAN	F. BERAS
Berat Paket/ Satuan yang Dibeli/Lakukan/Beritik	(i) Rp. 55.000 -
(j) Masing-masing Komoditas?	(ii) 50 Kg
(k) Berapa Kuantitas Komoditas yang Dibeli?	

14. Tabulasi umur responden yang sudah berulang tahun pada bulan Maret 2023:

Tahun lahir	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	
Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahun lahir	2007	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	
Umur	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tahun lahir	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978
Umur	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Tahun lahir	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963
Umur	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

BLOK IV. KETERANGAN DEMOGRAFI

Waktu mulai wawancara: : : :

(Disisi atas pang- awas)	No. urut ART	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) SEBUTKAN SEMPURNA YANG BERAS-TINGGAL DIRUMAH TANGGA INI DIMANA KEMUNGKINAN MAMANNYA DIKELODARI SATE DIPUR. MULAI DARI KEPALA RUMAH TANGGA, PASANGANNYA, ANAK YANG BELUM MENIKAH, MENANTU, CUCU, ORANG TUA/MERTUA, PEMBANTU/SOPR, FAMILIAN, DAN LAINNYA.	403 (Kode)	404	405	406	407	408	409	410
	1		1			/ /				
	2					/ /				
	3					/ /				
	4					/ /				
	5					/ /				
	6					/ /				
	7					/ /				
	8					/ /				
	9					/ /				
	10					/ /				

BERAPA KAH UMUR (nama)?
 KAPAN (nama) DILAHIRKAN?
 APAKAH APAKAH APAKAH
 HUBUNGAN STATUS (nama) PER- LAKI- LAKI- KAWINAN ATAU PERENH- PUAN?
 DENGAN KAWANAN (nama)?
 KEPALA RUMAH TANGGA? 1. Belum kawin 2. Kawin 1. Laki- laki 3. Cerai 4. Cerai 2. Perem- puan
 UMUR (nama) PASANGAN (nama) BUNYANG (nama) TINGGAL DIRUMAH TANGGA? **Jika > 97 tulis dalam 1 Ya 5.Tidak PERTAMA?**
 Tgl./Bin./Thn (DD/MM/YYYY)

Pastikan seluruh anggota rumah tangga tercatat dan tidak ada yang terlewat.
 Cek sekali lagi, apakah pengurusan makan seluruh anggota rumah tangga di kolom 402 dikelola dari satu dapur.
 Jika terdapat ART yang kepengurusan maknanya tidak dari satu dapur, maka keluarkan dari daftar.
 Kode 403: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)
 1. KRT 3. Anak kandung/tiri 5. Menantu 7. Orang tua/mertua 9. Lainnya (familil lain, orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT)
 2. Istri/suami 4. Anak angkat 6. Cucu 8. Pembantu/sopir

KONSEP DAN DEFINISI

- ▶ **Pertanyaan 203:** Hasil Pencacahan Rumah Tangga
- Terisi lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih dan memperoleh informasi secara lengkap.
- Terisi tidak lengkap, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, tetapi tidak dapat memperoleh informasi secara lengkap. Misalnya sampai batas akhir waktu pencacahan, informasi mengenai rumah tangga tersebut tidak diperoleh secara lengkap karena responden pergi keluar kota.
- Tidak ada ART/responden yang dapat memberi jawaban sampai akhir masa pencacahan, apabila petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak ada ART/responden yang dapat memberikan informasi mengenai rumah tangga sampai akhir masa pencacahan.
- Responden menolak, apabila responden menolak untuk diwawancarai.
- Rumah tangga pindah/bangunan sensus sudah tidak ada, apabila petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga/bangunan sensus terpilih sampai batas akhir masa pencacahan. Misalnya: rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, dan bangunan terbakar/runtuh karena gempa/banjir/bencana lain.
- ▶ **Pertanyaan 403:** Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga
- Kepala rumah tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pada kasus tertentu, misalnya beberapa anak sekolah mengontrak/menyewa rumah bersama-sama, maka KRT adalah seseorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai KRT.
- ▶ **Pertanyaan 408:** Apakah Pasangan Biasanya Tinggal di Rumah Tangga Ini?
- Yang dimaksud dengan pasangan biasanya tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir pasangan dari responden, tinggal di rumah lebih dari 6 bulan, meskipun tidak berturut-turut.
- ▶ **Pertanyaan 605:** Apakah Sederang/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah?
- Pendidikan prasekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
- ▶ **Pertanyaan 607, 608, dan 609:** Apakah Dapat Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana dalam Bahasa Sehari-Hari?
- Dapat membaca dan menulis yang dimaksud adalah jika seseorang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya.
- Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan tidaknya mengandung subjek dan predikat, misalnya 'saya membaca'.
- ▶ **Pertanyaan 610:** Apakah Bersekolah (Termasuk Mengikuti Program Paket ABC)?
- Bersekolah: apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun nonformal, khususnya program kesetaraan (Paket ABC) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya.
- ▶ **Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diduduki:** jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah atau yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi, baik jenjang pendidikan formal maupun nonformal kesetaraan (Paket ABC).
- ▶ **Pertanyaan 613:** Apa Tingkat/Kelas Tertinggi yang Sedang/Pernah Diduduki?
- Tingkat/kelas tertinggi adalah tingkatan/kelas terakhir atau paling tinggi yang dilalui seseorang pada suatu jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal (Paket ABC) di sekolah negeri maupun swasta.

KONSEP DAN DEFINISI

- Tamat sekolah/satuan pendidikan adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang baik pendidikan formal maupun nonformal (Paket ABC) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. **Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi, tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah/satuan pendidikan.**
- ▶ **Pertanyaan 614:** Apa Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki?
 - Ijazah/STTB adalah imbaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik pada suatu jenjang pendidikan tertentu.
 - ▶ **Pertanyaan 701:** Apakah (nama) memiliki rekening tabungan baik atas nama sendiri atau bersama-sama di Lembaga Keuangan (perbankan, koperasi)?
 - a. Rekening dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening meskipun rekening tabungan tersebut kosong.
 - b. Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya.
 - ▶ **Pertanyaan 703:** Selama Seminggu Terakhir, Apa Saja Kegiatan yang Dilakukan (nama)?
 - Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut boleh dilakukan baik secara berturut-turut/tidak terputus maupun kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir.
 - Sekolah adalah kegiatan berseskolah di sekolah formal maupun sekolah non formal (Paket ABC), baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur/cuti.
 - Mengurus rumah tangga adalah kegiatan mengurus rumah tangga/membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji. Anggota rumah tangga yang melakukan kegiatan kerumah tanggaaan, seperti memasak, mencuci, dsb. digolongkan sebagai mengurus rumah tangga.
 - Lainnya selain kegiatan pribadi adalah kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.
 - ▶ **Pertanyaan 905:** Sejak 1 Januari – 31 Desember 2022, Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya?
 - Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/perobaan tindak kejahatan.
 - ▶ **Pertanyaan 1101:** Jaminan Kesehatan Apa Saja yang Dimiliki (nama)?
 - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan: Peserta penerima Bantuan Luran (PBI), Jaminan Kesehatan melalui orang yang tergolong laki-laki miskin dan orang tidak mampu yang urutannya dibayar oleh pemerintah.
 - ▶ **Peserta bukan PBI** terdiri atas:
 - a. **Peserta penerima upah dan anggota keluarganya**, yaitu: a) Pegawai Negeri Sipil; b) Anggota TNI; c) Anggota Polri; d) Pegawai negara; e) Pegawai pemerintah nonpegawai negeri; f) Pegawai swasta; dan g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima upah.
 - b. **Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya**, yaitu: a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
 - c. **Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b**, termasuk warga negara asing yang bekerja sampai dengan huruf e yang mampu membayar luran.

BLOK V. KETERANGAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN													
Jika berstatus pernah kawin (404 = 2, 3, atau 4) APAKAH (nama) MEMILIKI/PERNAH MENIKAH DARI KANTOR CATATAN SIPIL? (untuk perkawinan yang terakhir) (Kode)		No. Urut Keluarga	No. Urut Ibu Kandung Lihat Blok IV (Isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rumah tarogga ini)	APAKAH (nama) MEMILIKI NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN (NIK)? 1. Ya 5. Tidak 508 ←	Nomor Induk Kependudukan (Tuliskan Nomor Induk Kependudukan setiap ART) 1. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9999 dan pada 506 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXVIII. Catatan. 2. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak ingat/tidak memiliki catatan → pada empat digit terakhir 505 tuliskan 9999 pada empat digit terakhir dan pada 506 dan 507 tuliskan kode 9, kemudian tulis catatan di Blok XXVIII. Catatan.					Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK (Cek digit ke-7 NIK pada 505) (Kode)	Sumber Data Nomor Induk Kependudukan 1. KK 2. KTP 3. Lainnya	APAKAH (nama) MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL? BOLEH SAYA MELIHATINYA? (Kode)	(Diisi oleh pengawas) Apakah isian 506 sama dengan isian 405? (Cek isian 405) 1. Sama 2. Berbeda 3. Tidak relevan
No. Urut ART	501	502	503	504	505					506	507	508	509
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Kode 501: Kepemilikan Buku Akta Nikah 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu	Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan. Termasuk keluarga apabila seseorang yang berstatus pernah kawin dan tinggal sendiri (tanpa pasangan atau anak), sedangkan yang berstatus belum kawin tidak dianggap keluarga (Supas, 2015).	Kode 506: Kode Jenis Kelamin ART berdasarkan NIK 1. Laki-laki 2. Perempuan 5. Tidak dapat ditentukan Jika tidak termasuk kode 1 atau 2	Kode 508: Kepemilikan Akta Kelahiran 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak memiliki 8. Tidak tahu
--	--	---	---

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN										
Untuk ART Semua Umur			Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas			Untuk ART Berumur 0-10 Tahun		Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas		
No. Unit ART	Di MANAKAH TEMPAT LAHIR (nama)? Tempat lahir adalah tempat tinggal ibu (nama) ketika melahirkan (nama). Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pengawas)		Di MANAKAH TEMPAT TINGGAL (nama) 5 TAHUN YANG LALU (MARET 2018)? Tuliskan nama tempat (Kode tempat diisi oleh pengawas)		APAKAH (nama) PERNAH MENGIKUTI PENDIDIKAN SEKOLAH?		JIKA BERNAH/ MASIH (605= 1,2 atau 3) APA JENIS PENDIDIKAN PRASEKOLAH?		APAKAH (nama) DAPAT MEMBACA DAN MENULIS KALIMAT SEDERHANA DALAM BAHASA SEHARI-HARI DENGAN MENGGUNAKAN:	
	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika lahir di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	PROVINSI/NEGARA	KABUPATEN/KOTA Jika di Kota, tuliskan "Kota" sebelum nama kota	(Kode)	(Kode)	1.Ya 5.Tidak	HURUF LATIN/ ALFABET? 1.Ya 5.Tidak	HURUF ARAB/ HURUF LAINNYA? (CONTOH: JAWA, KAWI, CINA, DLL.) 1.Ya 5.Tidak	1.Ya 5.Tidak
401	601	602	603	604	605	606	607	608	609	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kode 606: Jenis Prasekolah

1. Taman Kanak-kanak
2. Bustanul Athfal
3. Raudatul Athfal
4. Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.)
5. Kelompok Bermain
6. Taman Penitipan Anak

Kode 605: Partisipasi Prasekolah

1. Masih mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)
2. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah tahun ajaran ini (2022/2023)
3. Pernah mengikuti pendidikan prasekolah sebelum tahun ajaran 2022/2023
4. Tidak/belum pernah mengikuti pendidikan prasekolah

BLOK VI. KETERANGAN MIGRASI DAN PENDIDIKAN

No. Urut ART	Untuk ART berumur 5 tahun ke atas				Untuk ART berumur 5-30 tahun			Untuk ART yang masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi (610 = 2 atau 3)						
	APAKAH BERSEKOLAH? (termasuk mengikuti program paket A/B/C) (Kode) Kode = 1 ke ART berikutnya/ Blok VII Kode=3 → 612	APAKAH BERSEKOLAH DI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA? (Kode) 1. Negeri 2. Swasta	APA JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG SEDANG/ PERNAH DIKUTI (nama)? (Kode)	APAKAH BERSEKOLAH TERTINGGI YANG DIMILIKI (nama)? (Kode)	APALUJAZAH/ STTB YANG DIMILIKI (nama)? (Kode)	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)? 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat ditunjukkan 5. Tidak	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMPEROLEH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)? 1. Ya 5. Tidak → 619	SELAMA BULAN AGUSTUS 2022-FEBRUARI 2023 BERAPA JUMLAH UANG PIP YANG DITERIMA?	(Jika P. 617 = 0) UNTUK PENERIMAAN BERAPA SEMESTER?	(Semester)	618	619	620	621
	610	611	612	613	614	615	616	617	618	(Rupiah)	(Semester)	619	620	621
401	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode 610 dan 619:
Partisipasi Sekolah
1. Tidak/belum pernah bersekolah
2. Masih bersekolah
3. Tidak bersekolah lagi

Kode 612 dan 620: Jenjang Pendidikan dan Kode 614: Ijazah/STTB
01. Paket A
02. SDLB
03. SD
04. MI
05. SPM/PDF Ula
06. Paket B
07. SMP LB
08. SMP
09. MTs
10. SPM/PDF Wustha
11. Paket C
12. SMLB
13. SMA
14. MA
15. SMK
16. MAK
17. SPM/PDF Ulya
18. D/ID2
19. D3
20. D4
21. S1
22. Profesi
23. S2
24. S3
25. Tidak Punya Ijazah SD (khusus 614)

Kode 613 dan 621: Tingkat/Kelas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Tamat & Lulus)
• Jika pernah/ sedang kuliah Profesi, kode 1
• Jika pernah/ sedang kuliah S2, kode 6
• Jika pernah/ sedang kuliah S3, kode 7

BLOK VII. KETERANGAN KEPEMILIKAN TABUNGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN

No. Urut ART	Unik ART Umur 5 Tahun ke Atas		Unik ART Umur 10 Tahun ke Atas										Unik ART Umur 18 Tahun ke Atas			
	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI REKENING TABUNGAN BAK ATAS NAMA PASAR MODAL, LEMBAGA BERSAMA-SAMA DI LEMBAGA KEUANGAN (PERBANKAN, MIKRO, PERGADAAN, KOPERASI)? 1. Ya 5. Tidak	DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH KEGIATAN YANG MENGUNAKAN WAKTU TERBANYAK? 1. BEKERJA → 706 2. SEKOLAH 3. MENURUS RUMAH TANGGA 4. LAINNYA SELAIN KEGIATAN PRIBADI Jika X terpilih → 705	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) DILAKUKAN (nama) TERAKHIR, APAKAH (nama) MENYALAKAN PERUSAHAAN USAHA, TERAPI SEBENTARA TIDAK BEKERJA? 1. Ya 5. Tidak → 710	Jika bekerja atau sementara tidak bekerja (703= pilihan A terpilih atau 705 =1)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, APAKAH (nama) BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)	SELESA SEMINGGU TERAKHIR, BERAPA JUMLAH JAM KERJA DARI PERKERJAAN UTAMA? (Kode) (Jam)
401																
1	A	B	C	D	X											
2	A	B	C	D	X											
3	A	B	C	D	X											
4	A	B	C	D	X											
5	A	B	C	D	X											
6	A	B	C	D	X											
7	A	B	C	D	X											
8	A	B	C	D	X											
9	A	B	C	D	X											
10	A	B	C	D	X											

• Contoh-contoh lembaga jasa keuangan:
a. Bank: bank konvensional dan syariah.
b. Pasar modal: perusahaan efek/sukuritas, manajer investasi konvensional, manajer investasi syariah, penyelenggara urun dana konvensional, dan penyelenggara urun dana syariah.
c. Lembaga pembiayaan: lembaga pembiayaan konvensional dan syariah.
d. Perusahaan asuransi: perusahaan asuransi konvensional dan syariah.

e. Dana pensiun: dana pensiun konvensional (Taspen, DPPK, DPLK) dan syariah (DPPK-Syariah, DPLK-Syariah, Unit Syariah DPPK, Unit Syariah DPLK).
f. Lembaga keuangan mikro: lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah, koperasi lembaga keuangan mikro dan syariah, BMT, Bank Wakaf Mikro.
g. Pergadaian: pergadaian konvensional dan syariah yang diawasi OJK.
h. Fintech: pinjaman online konvensional dan syariah.
i. Uang elektronik: Bizi, Flazz, e-Money, Gopay, Ovo, dll.

• Kartu Prakerja bukanlah kartu fisik, melainkan sebuah kode unik 16 angka yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pelatihan. Nomor kartu prakerja diperoleh setelah mendaftar di situs resmi kartu prakerja www.prakerja.go.id dan dinyatakan lulus sebagai penerima kartu prakerja.

Kode 707: Status/Ketidudukan dalam Pekerjaan
(Jika 705=1), 707 tidak boleh berkode 5 atau 6)
1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas
6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar

BLOK VIII. KETERANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No. Uji ART	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN TELEPON SELULER UNTUK KOMUNIKASI? 1. Ya 5. Tidak	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MEMILIKI TELEPON SELULER (HP) NIKABEL?	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) JUALAH SMCARD AKTIF (nama) PADA HP LAINNYA, MENURUT PROVIDER/OPERATOR BERIKUT: TEKMSBL? INDOSAT? XL AXIATA? LAINNYA?	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) YANG DIGUNAKAN KOMPUTER YANG DIGUNAKAN (nama)? (Pilihan jawaban harus dibacakan) A. PC/DESKTOP B. LAPTOP/MOTE BOOK C. TABLET X. Tidak menggunakan komputer	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENGGUNAKAN FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, WHATSAPP, DLL)? 1. Ya 5. Tidak → 812	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, SAHA YANG DIGUNAKAN (nama) UNTUK MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan) A. PC/DESKTOP B. LAPTOP/MOTE BOOK C. TABLET D. HP/POINSEL E. LAINNYA	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, DI MANA SAJA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan) A. RUMAH SENDIRI B. BUKAN RUMAH SENDIRI C. TEMPAT BEKERJA/KANTOR D. GEDUNG SEKOLAH/KAMPUS E. TEMPAT UMUM F. DALAM KONDISI BERGERAK G. LAINNYA	DALAM 3 BULAN TERAKHIR, UNTUK APA SAJA (nama) MENGGUNAKAN INTERNET? (Pilihan jawaban harus dibacakan) A. MENDAPAT INFORMASI BERITA B. MENDAPAT INFORMASI MENGENAI BARANG/JASA C. MENRIMM/NERIMA E-MAIL D. MEDIA SOSIAL/LEJARING SOSIAL E. PEMBELIAN BARANG/JASA F. PENJUALAN BARANG/JASA G. FASILITAS FINANSIAL (E-BANKING) H. PEMBELAJARAN ONLINE I. WORK FROM HOME (WFH) BEKERJA ONLINE DARI RUMAH J. HIBURAN K. PEMBUATAN KONTEN DIGITAL L. LAINNYA	Untuk ART Umur 5 Tahun ke Atas (nama) APAKAH (nama) SEDANG/ PERNAH/ BELAJAR TIK, MISALNYA BELAJAR KOMPUTER, DLL? 1. Ya 5. Tidak				
										801	802	803	804
401	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Menggunakan HP yang dimaksud tidak harus menggunakan HP yang dimiliki sendiri atau dibeli/dibayar sendiri oleh individu yang menggunakan.
- Memiliki/menguasai HP apabila anggota rumah tangga tersebut memiliki/menguasai HP dengan minimal 1 kartu yang aktif dalam 3 bulan terakhir.
- Menggunakan internet: apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan internet sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet. Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan meskipun hanya tinggal melanjutkan.
- Mengakses internet untuk hiburan misalnya download/main game, menonton tv, download/menonton film/video, radio, download gambar dan musik menggunakan internet.
- Pembuatan konten digital misalnya mengunggah konten, menggunakan cloud storage (Google Drive, Dropbox, dll), menggunakan software yang dijalankan melalui internet untuk mengedit dokumen (teks, spreadsheet, presentasi), dll.
- Sedang/pemah belajar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) jika belajar TIK secara formal (di sekolah) atau nonformal (di tempat kursus yang memiliki kurikulum) namun tidak termasuk belajar otodidak. Misalnya, belajar aplikasi perkantoran (Microsoft Office/MS Word, MS Excel, dll.), pemrograman, robotik, dll.

BLOK IX. KETERANGAN BEPERGIAN DAN KORBAN KEJAHATAN

No.	SEJAK 1 JANUARI-31 DESEMBER 2022 APAKAH (nama) PERNAH BEPERGIAN KELUAR DARI LINGKUNGAN KESEHARIAN, BUKAN BEPERGIAN RUTIN, MINIMAL 3 JAM DI TEMPAT TUJUAN, TIDAK UNTUK SEKOLAH ATAU BEKERJA?	Jika pernah bepergian (901=1)		SEJAK 1 JANUARI-31 DESEMBER 2022, APAKAH (nama) PERNAH MELAKUKAN KEJAHATAN PENGURBAN, PENGANIAYAAN, PENGURUSAN, PELECEHAN SEKSUAL, ATAU LAINNYA? 1. Ya 5. Tidak ART berikutnya ← Blok X	BERAPA KALI (nama) MENJADI KORBAN KEJAHATAN DAN BERAPA KEJAHATAN YANG DILAPORKAN KE POLISI? (Jika ≥ 7 kejaahan, Tulis 7)										Jika 907, 909, 911, 913, atau 915(40) KETIKA KEJAHATAN TERSEBUT DALAM PROSES PELAPORAN KE POLISI, APAKAH (nama) MEMPERTANYAKAN DITEMANI/BANTUAN HUKUM? 1. Ya 5. Tidak
		BERAPA KALI (nama) BEPERGIAN SELAMA PERIODE: 1 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2022? (Kali)	PADA KONDISI TERAKHIR, APA BEPERGIAN YANG MAKSUD UTAMA (nama) MELAKUKAN BEPERGIAN?		PENCURIAN	PENGANIAYAAN	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	PELECEHAN SEKSUAL	LAINNYA						
		902 (Kali)	903 (Kali)	904 (Kode)	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
401															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Kode 904: Maksud Utama Bepergian

- 02. Berlibur/rekreasi
- 03. Profesi/bisnis
- 04. Misi/peremuan/kongres/seminar
- 05. Training/pendidikan/pelatihan
- 06. Kesehatan/berobat
- 07. Berziarah/keagamaan
- 08. Mengunjungi teman/keluarga
- 09. Mudik/pulang kampung hari raya
- 10. Olahraga/kesenian
- 11. Belanja/shopping
- 12. Lainnya

- **Lingkungan keseharian** didefinisikan sebagai wilayah geografis (tidak harus berdekatan) bagi seseorang melakukan untuk rutinitas kehidupnya/pekerjaannya. Misalnya rumah, kantor atau tempat kerja, pasar yang rutin dikunjungi, sekolah, taman yang rutin dikunjungi, fasilitas olahraga yang rutin dikunjungi, dan sebagainya.
- **Bepergian rutin** adalah bepergian ke tempat/tujuan utama dengan frekuensi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

Suatu peristiwa kejahatan dianggap telah dilaporkan ke polisi apabila:

- a. Korban kejahatan telah melaporkannya ke polisi.
 - b. Orang lain melaporkan peristiwa kejahatan tersebut ke polisi.
 - c. Polisi mengetahuinya sendiri atau tertangkap tangan.
- Pelaporan kepada polisi tidak harus dilakukan di kantor polisi

BLOK X. KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART BERUMUR 2 TAHUN KE ATAS)

No. Urut ART	Isikan kode 1 jika Umur < 2 tahun atau kode 0 jika Umur < 2 tahun	BLOK X. KETERANGAN GANGGUAN FUNGSIONAL (UNTUK ART BERUMUR 2 TAHUN KE ATAS)										DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH (nama) MENEMBAH BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH PUSAT BERUPA ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) PENYAWANG DISABILITAS? 1. Ya 5. Tidak
		APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN PENGLIHATAN? 1. Ya, sama sekali tidak bisa melihat 2. Ya, banyak kesulitan 3. Ya, sedikit kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN PENDENGARAN? 5. Ya, sama sekali tidak bisa mendengar 6. Ya, banyak kesulitan 7. Ya, sedikit kesulitan 8. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN BERJALAN/ATAU NAIK/TANGGA? 1. Ya, sama sekali tidak bisa berjalan/naik tangga 2. Ya, banyak kesulitan 3. Ya, sedikit kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN MENGGUNAKAN/ MENGERAKKAN/ TANGAN/JARI? 5. Ya, sama sekali tidak bisa menggunakan/ mengerakkan tangan/jari 6. Ya, banyak kesulitan 7. Ya, sedikit kesulitan 8. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN DALAM HAL MENGINGAT ATAU BERKONSENTRASI? 1. Ya, selalu mengalami kesulitan 2. Ya, seringkali mengalami kesulitan 3. Ya, sedikit mengalami kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (nama) MENGALAMI PERILAKU DAN/ATAU EMOSIONAL? 5. Ya, selalu mengalami gangguan 6. Ya, seringkali mengalami gangguan 7. Ya, sedikit mengalami gangguan 8. Tidak mengalami gangguan	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN BERBICARA DAN/ATAU MEMAHAMI/ BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG LAIN? 1. Ya, sama sekali tidak bisa memahami/dipahami/ berkomunikasi 2. Ya, banyak mengalami kesulitan 3. Ya, sedikit mengalami kesulitan 4. Tidak mengalami kesulitan	APAKAH (nama) MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN UNTUK MENGIKURUS DIRI SENDIRI? (SEPERTI MANDI, MAKAN, BERPAGAN, BUANG AIR BESAR, BUANG AIR KECIL) 5. Ya, sama sekali tidak bisa mengurus diri sendiri 6. Ya, banyak mengalami kesulitan 7. Ya, sedikit mengalami kesulitan 8. Tidak mengalami kesulitan	1010		
401	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010		
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- Disabilitas adalah adanya gangguan/keterbatasan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbalasnya partisipasi di masyarakat.
- Gangguan/keterbatasan fungsi ditandai oleh kelainan baik dari psikologis, fisiologis, maupun struktur atau fungsi anatomis.
- Peugas tidak diperkenankan memuluskan bahwa responden tidak mengalami disabilitas tertentu berdasarkan apa yang dilihat secara kasat mata.
- Gangguan/keterbatasan fungsi antara lain: kesulitan melihat, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan tangan/jari.
- Setiap orang bisa mengalami lebih dari satu jenis gangguan.
- Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yaitu layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak, dukungan keluarga, perawatan sosial, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental, pelatihan vokasional/pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

BLOK XI. KETERANGAN KELUHAN KESEHATAN DAN RAWAT JALAN

	JAMINAN KESEHATAN (nama)?	DALAM SEBUHAN TERAKHIR, APAKAH KESEHATAN TERSEBUT MENGANGGUKAN PEKERJAAN, SEKOLAH, ATAU KEGATAN SEHARI-HARI?	DALAM SEBUHAN TERAKHIR, APAKAH PERNAH MENDOBATI SENIOR?	DALAM SEBUHAN TERAKHIR, APAKAH PERNAH RAWAT JALAN?	DALAM SEBUHAN TERAKHIR, DIPINANGI RAWAT JALAN?	DALAM SEBUHAN TERAKHIR, BEPAPA KALI RAWAT JALAN?	JAMINAN KESEHATAN (nama) YANG DIGUNAKAN UNTUK RAWAT JALAN?	Jika 1109 pilihan A, B, dan C tidak ditanggapi APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKN/JAMKESDA. UNTUK RAWAT JALAN?	1110
No. Urut	A. BPJS Kesehatan B. BPJS Kesehatan C. BPJS Kesehatan D. Asuransi swasta E. Penusahaan/ kantor X. Tidak punya	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Ya 5. Tidak	1. Tidak punya biaya berobat 2. Tidak ada biaya transport 3. Tidak ada sarana transportasi 4. Waktu tunggu pelayanan lama 5. Mengobati sendiri 6. Tidak ada yang mendampingi 7. Merasa tidak perlu 8. Lainnya <i>(Lanjut ke ART berikutnya/ Blok XII)</i>	A. R.S Pemerintah B. R.S Swasta C. Praktik dokter/bidan D. Klinik/praktik dokter bersama E. Puskesmas/Pustu F. UKBM (Poskodes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) G. Praktik pengobatan tradisional/alternatif H. Lainnya	A. BPJS Kesehatan B. BPJS Kesehatan C. BPJS Kesehatan D. Asuransi swasta E. Penusahaan/kantor X. Tidak menggunakan	A. Tidak tahu cara memanfaatkan jaminan kesehatan B. Prosedur/persyaratan sulit dipenuhi C. Kartu JKN tidak aktif D. Tidak ada faskes yang mudah dijangkau dari rumah responden E. Tidak ada pelugas pemberi pelayanan jaminan kesehatan F. Tidak ada biaya (transportasi, dll.) G. Waktu tunggu pelayanan amatlahre panjang H. Menggunakan asuransi selain JKN/Jamkesda I. Lainnya	1110
401	1 A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1106	1107	1109		1110
1	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
2	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
3	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
4	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
5	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
6	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
7	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
8	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
9	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
10	A B C D E X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G H	A B C D E X	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I

• **Jaminan kesehatan yang dimiliki** adalah jaminan dalam bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya.

• **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

• **Terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari** adalah tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya.

• **Rawat jalan** adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendaftari tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional lama menginap, termasuk mendatangkan pelugas kesehatan ke rumah.

• **Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat jalan** adalah bila biaya berobat jalan anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.

BLOK XII. KETERANGAN RAWAT INAP DAN MEROKOK

No. urut ART	Jika 1204 pilihan A,B, dan C tidak ditingkari APA SAJA ALASAN (nama) TIDAK MENGGUNAKAN JKNI/JAMKESDA UNTUK RAWAT INAP?										Untuk ART Berumur 5 Tahun ke Atas					
	DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH PERNAH DIRAWAT INAP?	DALAM SETAHUN TERAKHIR, BERAPA HARI (nama) DIRAWAT INAP?	JAMINAN KESEHATAN (nama) UNTUK RAWAT INAP?	A, BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	B, BPJS Kesehatan Non-PBI/ Mandiri	C, Jamkesda	D, Asuransi swasta	E, Perusahaan/kantor	X, Tidak menggunakan	1203 (Hari)	1204	1205	1206	1207	1208	1209
401	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209							
1	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	A B C D E F G	<input type="checkbox"/>	A B C D E X	A B C D E F G H I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Rawat inap** adalah upaya penyembuhan/keuhan kesehatan dengan menginap semalam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk rawat inap untuk persalinan.
- **Responden yang pernah rawat inap** adalah responden yang telah selesai menjalani rawat inap, tidak termasuk bila pada saat pencacahan sedang menjalani rawat inap.
- **Menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap** adalah bila biaya rawat inap anggota rumah tangga seluruhnya atau sebagian dibiayai oleh penjamin kesehatan.
- **Jumlah hari** adalah jumlah hari rawat inap dalam satu tahun terakhir.
- **Merokok** merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan.
- **Rokok tembakau** meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu, isong, pipa cangklong/linting/kawung yang diisi tembakau. Termasuk juga orang yang menghisap shisha/waterpipe.
- **Penghitungan jumlah batang rokok rata-rata per minggu** selama sebulan terakhir adalah jumlah rokok yang dihisap selama sebulan dikali 7 dibagi 30.

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401): Nama & No. Urut Pemberi Informasi
BLOK XIV. KETERANGAN IMUNISASI, ASI, DAN MP-ASI (DITANYAKAN UNTUK SEMUA ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-59 BULAN)			
1401. Umur (nama balita) dalam bulan (Hitung dari Blok IV 406)	<input type="checkbox"/> bulan	<input type="checkbox"/> bulan	<input type="checkbox"/> bulan
IMUNISASI BALITA			
SAYA AKAN MENYAKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI IMUNISASI			
1402. APAKAH BAPAK/IBU MEMILIKI BUKU KIAKMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)? BOLEHKAH SAYA MELIHATNYA?	Ya, dapat ditunjukkan..... 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan..... 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku..... 5	Ya, dapat ditunjukkan..... 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan..... 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku..... 5	Ya, dapat ditunjukkan..... 1 → 1404 Ya, tidak dapat ditunjukkan..... 2 → 1406 Tidak ada kartu/buku..... 5
1403. APAKAH BAPAK/IBU PERNAH MEMILIKI BUKU KIAKMS ATAU KARTU BEROBAT/DOKUMEN LAIN YANG TERTULIS TANGGAL IMUNISASI (nama balita)?	Ya..... 1 → 1406 Tidak..... 5 → 1406	Ya..... 1 → 1406 Tidak..... 5 → 1406	Ya..... 1 → 1406 Tidak..... 5 → 1406
1404. Salin dari kartu, tanggal, bulan, dan tahun imunisasi untuk setiap jenis imunisasi. Tulis 44 di kolom tanggal, bulan, dan tahun, jika kartu menunjukkan bahwa imunisasi diberikan, tetapi tanggal, bulan, dan tahun tidak ada. Tulis 00 jika imunisasi tidak diberikan.	Tanggal Bulan Tahun	Tanggal Bulan Tahun	Tanggal Bulan Tahun
a. HEPATITIS B (<24 JAM)			
b. BCG			
c. POLIO TETES 1			
d. DPT-HB-Hib 1			
e. POLIO TETES 2			
f. DPT-HB-Hib 2			
g. POLIO TETES 3			
h. DPT-HB-Hib 3			
i. POLIO TETES 4			
j. POLIO SUNTIK (IPV)			
k. CAMPAK-RUBELLA (MR)			

PERTANYAAN	BALITA 1			BALITA 2			BALITA 3			
	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun	
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401):										
l. DPT-HB-HIB LANJUTAN										
m. CAMPAK-RUBELLA (MR) LANJUTAN										
n. MMR										
1405. APAKAH (nama balita) MENERIMA IMUNISASI DASAR, YANG TIDAK TERCATAT DALAM KARTU, TERMASUK IMUNISASI YANG DITERIMA SAAT PEKAN IMUNISASI NASIONAL? Lingkari kode 1 jika responden menyebutkan jenis imunisasi dasar (lihat pertanyaan 1404).	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	Ya 1 → 1404 (Tanyakan jenis imunisasinya, tulis '66' pada kolom tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan di 1404. Jika imunisasi tidak diberikan, tuliskan '00')	
UNTUK BALITA YANG TIDAK MEMPUNYAI ATAU TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KARTU IMUNISASI										
1406. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT IMUNISASI UNTUK MELINDUNGINYA DARI BERBAGAI PENYAKIT?	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	Ya 1 Tidak 5 → 1417 Tidak Tahu 8 → 1417	
1407. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN BCG UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TBC – BIASANYA DISUNTIKAN PADA LENGAN ATAU BAHU DAN MEMBULKAN BEKAS LUKA-?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	
1408. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN UNTUK MENCEGAH PENYAKIT POLIO – YANG "DITESTESKAN KE MULUT ATAU DISUNTIKAN PADA LENGAN/PAHA" –?	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411	Ya 1 Tidak 5 → 1411 Tidak Tahu 8 → 1411
1409. KAPAN VAKSIN POLIO PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEBULAN PERTAMA KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	Sebulan pertama 1 Setelah sebulan pertama 2	
1410. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN POLIO?	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	a. POLIO TETES : ____ kali b. POLIO SUNTIK (IPV) : ____ kali	
1411. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN DPT – YAITU SUNTIK DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT TETANUS, BATUK REJAN, ATAU DIPTERI? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin DPT kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan Hepatitis B)	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	Ya 1 Tidak 5 → 1413 Tidak Tahu 8 → 1413	

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salm dari Blok IV 402 dan 401): kali kali kali
1412. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN DPT? kali kali kali
1413. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT VAKSIN HEPATITIS B – YAITU SUNTIKAN DI PAHA ATAU BOKONG – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT HEPATITIS B? (Probing dengan menyatakan bahwa pemberian vaksin Hepatitis B kadang-kadang bersamaan dengan vaksin Polio dan DPT)	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416	Ya 1 Tidak 5 → 1416 Tidak Tahu 8 → 1416
1414. SUDAH BERAPA KALI (nama balita) MENDAPATKAN VAKSIN HEPATITIS B? kali kali kali
1415. KAPAN VAKSINASI HEPATITIS B PERTAMA DITERIMA (nama balita), APAKAH PADA SEMINGGU PERTAMA SETELAH KELAHIRAN ATAU SETELAHNYA?	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2	Seminggu pertama 1 Setelah seminggu pertama 2
1416. APAKAH (nama balita) PERNAH MENDAPAT SUNTIKAN CAMPAK – RUBELLA (MR) ATAU MMR – YAITU PADA UMUR 9 BULAN ATAU LEBIH – UNTUK MENCEGAH PENYAKIT CAMPAK? i. CAMPAK – RUBELLA (MR)	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
ii. MMR	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8
A S I DAN MP-ASI DITANYAKAN UNTUK BADUTA (ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-23 BULAN)			
Cek umur balita dari 1401, berikan tanda centang (✓)			
Balita berumur 0-23 bulan Balita berumur ≥ 24 bulan	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV	<input type="checkbox"/> → 1417 <input type="checkbox"/> → Balita berikutnya/Blok XV
1417. A. APAKAH (nama baduta) PERNAH DISUSUI/DIBERI AIR SUSU IBU (ASI)?	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419	Ya 1 Tidak 5 → 1419 Tidak tahu 8 → 1419
B. LAMANYA PEMBERIAN ASI: i. TANPA MAKANAN PENDAMPING ii. DENGAN MAKANAN PENDAMPING	B. bulan i. bulan ii. bulan	B. bulan i. bulan ii. bulan	B. bulan i. bulan ii. bulan

PERTANYAAN	BALITA 1	BALITA 2	BALITA 3
Nama dan No. Urut (Salin dari Blok IV 402 dan 401): 1418. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DISUSUI/DIBERI ASI?	Ya 1 5 8 Tidak tahu 8	Ya 1 5 8 Tidak tahu 8	Ya 1 5 8 Tidak tahu 8
1419. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MENERIMA CAIRAN, TERMASUK CAIRAN YANG DIKOMBINASKAN DENGAN MAKANAN LAIN DAN CAIRAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH? a. SUSU SELAIN ASI (SUSU FORMULA, SUSU BUBUK, SUSU SEGAR, UHT)? Jika "Ya", isikan berapa kali susu selain ASI dikonsumsi baduta. b. MINUMAN LAIN (AIR PUTH, JUS TANPA GULA, SUP/ KALDU, TERHOPTANPA GULA, AIR TAJIN, DLL.)? c. MINUMAN BERPEMANIS GULA (MINUMAN RINGAN, SODA, TEH MANIS, SUSU KENTAL MANIS, DLL.)?	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali b) 1 5 8 c) 1 5 8
1420. SAYA INGIN MENANYAKAN TENTANG SEMUA YANG DIKONSUMSI OLEH (nama baduta) SEHARIAN KEMARIN, TERMASUK MAKANAN YANG DIKONSUMSI DI LUAR RUMAH ATAU JAJAN. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) MAKAN/MINUM? a. SEREAL, AKAR, DAN LUMBI (NASI, JAGUNG, GANDUM, PASTA, ROTIPANEKUK, UBI, KENTANG, SORGUM, DLL.)? b. MAKANAN DARI KACANG-KACANGAN (KACANG TANAH, KEDELAI, TAHU, TEMPE, ATAU KACANG LAINNYA)? c. PRODUK TURUNAN SUSU (YOGURT, KEJU, DLL.)? d. DAGING, IKAN (SAPI, AYAM, KAMBING, IKAN, MAKANAN LAUT, DINGGIGIKAN DALAM KALENG, DLL.)? e. TELUR (AYAM, ITIK, PUYUH, DLL.)? f. BUAH DAN SAYUR SUMBER VITAMIN A (TERMASUK SAYURAN BERDAUN GELAP)? g. BUAH ATAU SAYURAN LAINNYA (LABU SIAM, GAMBAS, ALPUKAT, JERUK, DLL.)? h. MAKANAN RINGAN YANG GURUH, GORENGAN, MAKANAN MANIS (ES KRIM, PERMEN, KUE KERING, CAKE, DLL.)?	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8	Ya Tidak Tidak tahu a) 1 5 8 b) 1 5 8 c) 1 5 8 d) 1 5 8 e) 1 5 8 f) 1 5 8 g) 1 5 8 h) 1 5 8
1421. SELAMA SEHARIAN KEMARIN, APAKAH (nama baduta) DIBERI MAKANAN PADAT, SETENGAH PADAT, ATAU LUNAK? Jika "Ya", isikan berapa kali baduta diberi makanan padat, setengah padat, atau lunak.	Ya 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali Tidak tahu 8	Ya 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali Tidak tahu 8	Ya 1 5 8 <input type="checkbox"/> kali Tidak tahu 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 407): tahun tahun tahun
KETERANGAN TENTANG PENOLONG PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA (DITANYAKAN KEPADA SEMUA PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN)			
BLOK XV. PENOLONG PERSALINAN			
1501. A. APAKAH (nama) PERNAH HAMIL? B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT HAMIL PERTAMA?	A) Ya 1 Tidak.... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya 1 Tidak.... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya 1 Tidak.... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun
1502. A. APAKAH (nama) PERNAH MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP? B. UMUR BERAPAKAH (nama) PADA SAAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG PERTAMA KALI?	A) Ya 1 Tidak.... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya 1 Tidak.... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun	A) Ya 1 Tidak.... 5 → PPK berikutnya/Blok XVI B) ___ tahun
1503. KAPAN MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR?	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu2 PPK berikutnya/Blok XVI ←	2 tahun yang lalu atau kurang...1 Lebih dari 2 tahun yang lalu2 PPK berikutnya/Blok XVI ←
1504. A. DI MANA (nama) MELAHIRKAN (nama anak lahir hidup yang terakhir)?	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8	RS Pemerintah/RS Swasta..... 1 Rumah bersalin/Klinik..... 2 Puskesmas 3 Pustu 4 Praktik nakes 5 Polindes/Poskesdes 6 Rumah 7 Lainnya, tuliskan: 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401): tahun tahun tahun tahun tahun tahun
B. SIAPA YANG MENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR?	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8	Dokter kandungan 1 Dokter umum 2 Bidan 3 Perawat 4 Tenaga kesehatan lainnya 5 Dukun beranak/paraji 6 Lainnya 7 Tidak ada 8
C. BERAPA BERAT (nama anak lahir hidup yang terakhir) KETIKA DILAHIRKAN?	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8	< 2,5 kg 1 ≥ 2,5 kg 2 Tidak ditimbang 5 Tidak tahu 8
1505. BERAPA LAMA SETELAH KELAHIRAN (nama anak lahir hidup yang terakhir) PERTAMA KALI DILETAKKAN DI ATAS DADA IBU DENGAN BERSENTUHAN KULIT SECARA LANGSUNG?	< 1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥ 24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	< 1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥ 24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8	< 1 jam setelah lahir 1 1-23 jam setelah lahir 2 ≥ 24 jam setelah lahir 3 Tidak pernah 5 Tidak tahu 8

PERTANYAAN	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (1)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (2)	PEREMPUAN PERNAH KAWIN (PPK) UMUR 10-54 TAHUN (3)
Nama dan No. Urut: Umur (Salin dari Blok IV 407): Nama & No. Urut Pemberi Informasi (Salin dari Blok IV 402 & 401): tahun tahun tahun tahun tahun tahun
BLOK XVI. KELUARGA BERENCANA			
1601. APAKAH (nama/pasangan) PERNAH/SEDANG MENGGUNAKAN ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL UNTUK MENUNDA ATAU MENCEGAH KEHAMILAN?	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII	Ya, pernah 1 → PPK berikutnya/ Blok XVII Ya, sedang 2 Tidak 5 → PPK berikutnya/ Blok XVII
1602. ALAT KB ATAU CARA TRADISIONAL APA YANG SEDANG DIGUNAKAN? <i>Jika (nama) menyebutkan lebih dari satu, lingkari kode terkecil.</i>	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pili 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pili 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11	Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW 1 Sterilisasi pria/vasektomi/MOP 2 IUD/AKDR/spiral 3 Suntikan 4 Susuk KB/implan 5 Pili 6 Kondom pria/karet KB 7 Intravag/kondom wanita/diafragma 8 Metode menyusui alami 9 Pantang berkala/kalender 10 Lainnya 11
1603. JIKA MENGGUNAKAN ALAT KB MODERN (1602 = 1-8), DI MANA (nama/pasangan) MEMPEROLEH (ALAT KB) TERAKHIR KALI?	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MIJYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MIJYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10	Rumah sakit 1 Puskesmas/Pustu/Klinik 2 TKBK/TMK/MIJYAN 3 Polindes/Poskesdes 4 Posyandu/Pos KB/PPKBD 5 Rumah bersalin 6 Praktik dokter umum/kandungan 7 Praktik bidan/bidan di desa/ perawat 8 Apotek/toko obat 9 Lainnya 10

BLOK XVII. AKSES TERHADAP MAKANAN (DITANYAKAN PADA KRT/PASANGAN/ART 15 TAHUN KE ATAS)		BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
Nama dan No. Urut pemberi informasi:		Nama dan No. Urut pemberi informasi:	
SEKARANG SAYA AKAN MENGAJUKAN BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI AKSES TERHADAP MAKANAN. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA:		<input type="checkbox"/> keluarga (lihat 7, jika terdapat 7 keluarga atau lebih)	
1701. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA KHAWATIR TIDAK AKAN MEMILIKI CUKUP MAKANAN UNTUK DISANTAP KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	1801. BERAPA JUMLAH KELUARGA YANG TINGGAL DI DALAM BANGUNAN SENSUS/RUMAH INI?	Milik sendiri 1 Kontrak/sewa 2 Bebas sewa 3 Dinas 4 Lainnya, tuliskan: 5
1702. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA SAAT DI MANA ANDA/ART LAINNYA TIDAK DAPAT MENYANTAP MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	1802. APA STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL YANG DITEMPATI? (Pilihan jawaban boleh dibaca)	Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART 1 SHM bukan atas nama ART dengan perijinan pemanfaatan tertulis 2 SHM bukan atas nama ART tanpa perijinan pemanfaatan tertulis 3 Sertifikat selain SHM (SHGB, SHRS) 4 Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) 5 Tidak punya 6
1703. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA HANYA MENYANTAP SEDIKIT JENIS MAKANAN KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	1803. APA JENIS BUKTI KEPEMILIKAN TANAH BANGUNAN TEMPAT TINGGAL INI? (Pilihan jawaban boleh dibaca)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> m ² (Bulatkan dalam meter persegi) Ya 1 Tidak 5
1704. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA PERMAH MELEWATKAN SATU WAKTU MAKAN PADA SUATU HARI TERTENTU KARENA TIDAK MEMILIKI UANG ATAU SUMBER DAYA LAIN YANG CUKUP UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	1804. BERAPA LUAS LANTAI RUMAH/BANGUNAN TEMPAT TINGGAL?	Beton 1 Genteng 2 Seng 3 Asbes 4 Bambu 5 Kayu/sirap 6 Jerami/juk/daun-daunan/rumbia 7 Lainnya 8
1705. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA MAKAN LEBIH SEDIKIT DARIPADA SEHARUSNYA KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	1805. APAKAH KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN-NYA/ANKNYA MEMILIKI RUMAH LAIN, SELAIN RUMAH YANG DITEMPATI SAAT INI?	Tembok 1 Plesteran anyaman bambu/kawat 2 Kayu/papan 3 Anyaman bambu 4 Belang kayu 5 Bambu 6 Lainnya 7
1706. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA KEHABISAN MAKANAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9	1806. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA ATAP RUMAH TERLUAS? (Pilihan jawaban boleh dibaca)	1807. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA DINDING RUMAH TERLUAS?
1707. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA MERASA LAPAR TAPI TIDAK MAKAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		
1708. SELAMA SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ANDA/ART LAINNYA TIDAK MAKAN SEHARIAN KARENA KURANGNYA UANG ATAU SUMBER DAYA LAINNYA?	Ya 1 Tidak 5 Tidak tahu 8 Menolak menjawab 9		

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
1808. APAKAH BAHAN BANGUNAN UTAMA LANTAI RUMAH TERLUAS?	Marmar/granit.....1 Keramik.....2 Parket/vinil/karpet.....3 Ubun/legas/teraso.....4 Kayu/papan.....5 Semen/bata merah.....6 Bambu.....7 Tanah.....8 Lainnya.....9
1809. A. APAKAH MEMILIKI FASILITAS TEMPAT BUANG AIR BESAR DAN SAMA SAMA YANG MENGGUNAKAN?	Ada, digunakan hanya ART sendiri.....1 Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu.....2 Ada, di MCK komunal.....3 Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan.....4 Ada, ART tidak menggunakan.....5 Tidak ada fasilitas.....6 } 1810A
B. <i>Jika 1809.A = 1, 2, atau 3</i> APAKAH JENIS KLOSET YANG DIGUNAKAN?	Leher angsa.....1 Plengsergen dengan tutup.....2 Plengsergen tanpa tutup.....3 Cemplung/cubluk.....4
C. DI MANAKAH TEMPAT PEMBILANGAN AKHIR TINJA?	Tangki septik.....1 IPAL.....2 Kolam/sawah/sungai/danau/laut.....3 Lubang tanah.....4 Pantail/lanah lapang/kebun.....5 Lainnya.....6 } 1810A
D. SUDAH BERAPA LAMA TANGKI SEPTIK INI DIBUAT/DIBANGUN?	Tidak tahu..... <input type="checkbox"/> tahun.....98 <input type="checkbox"/> kali (Isikan 6, jika 6 kali atau lebih) Tidak pernah.....7 Tidak tahu.....8
E. DALAM 5 TAHUN TERAKHIR , BERAPA KALI TANGKI SEPTIK INI DIKOSONGKAN/DILAKUKAN PENYEDOTAN?	Tidak pernah.....1 Tidak tahu.....2 <input type="checkbox"/> kali (Isikan 6, jika 6 kali atau lebih) Tidak pernah.....7 Tidak tahu.....8
1810. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MINUM?	Air kemasan bermerek.....1 Air isi ulang.....2 Leding.....3 Sumur bor/pompa.....4 Sumur terlindung.....5 Sumur tak terlindung.....6 Mata air terlindung.....7 Mata air tak terlindung.....8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 Air hujan.....10 Lainnya.....11 } 1811A

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. <i>Jika 1810.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)</i> BERAPA JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJA TERDEKAT?	< 10 m.....1 ≥ 10 m.....2 Tidak tahu.....8
1811. A. DI MANAKAH LOKASI SUMBER/FASILITAS AIR MINUM TERSEBUT?	Di rumah/kawasan dalam pagar rumah.....1 → 1812 Di luar kawasan pagar rumah.....2 } 1812
B. BERAPA LAMA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGAMBIL AIR KE SUMBER/FASILITAS AIR SAMPAI KEMBALI LAGI KE RUMAH?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> menit.....988 Tidak tahu.....
1812. DALAM SETAHUN TERAKHIR , APAKAH RUMAH TANGGA PERNAH MENGALAMI KEKURANGAN AIR MINUM UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SELAMA MINIMAL 24 JAM?	Ya.....1 Tidak.....5 Tidak tahu.....8 Ya Tidak A. KERUH.....1 5 B. BERWARNA.....1 5 C. BERASA.....1 5 D. BERBUSA.....1 5 E. BERBAU.....1 5
1813. BAGAIMANA KONDISI FISIK SUMBER AIR UTAMA UNTUK MINUM MENURUT ANDA?	Air kemasan bermerek.....1 Air isi ulang.....2 Leding.....3 Sumur bor/pompa.....4 Sumur terlindung.....5 Sumur tak terlindung.....6 Mata air terlindung.....7 Mata air tak terlindung.....8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 Air hujan.....10 Lainnya.....11 } 1815.A
1814. A. APA SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN RUMAH TANGGA UNTUK MANDI/CUCI/DLL.?	Air kemasan bermerek.....1 Air isi ulang.....2 Leding.....3 Sumur bor/pompa.....4 Sumur terlindung.....5 Sumur tak terlindung.....6 Mata air terlindung.....7 Mata air tak terlindung.....8 Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).....9 Air hujan.....10 Lainnya.....11 } 1815.A
B. <i>Jika 1814.A = 4, 5, 6, 7, atau 8 (sumur/pompa/mata air)</i> BERAPA JAUH JARAK KE TEMPAT PENAMPUNGAN LIMBAH/KOTORAN/TINJA TERDEKAT?	< 10 m.....1 ≥ 10 m.....2 Tidak tahu.....8
1815. A. BOLEHKAH SAYA MELIHAT TEMPAT DI MANA ANGGOTA RUMAH TANGGA ANDA BIASA MENGUCI TANGGA?	Ya, di dalam rumah.....1 Ya, di luar rumah.....2 Tidak ada tempat cuci tangan.....3 Tidak dizinkan melihat.....4 } 1816.A

BLOK XVIII. KETERANGAN PERUMAHAN	
B. Amati ketersediaan air di tempat mencuci tangan! Verifikasi dengan memeriksa Kran/pompa atau baksoni, ember, wadah air atau sejenisnya.	Tersedia air 1 Tidak tersedia air 5
C. Cek ketersediaan sabun atau deterjen di tempat mencuci tangan!	Tersedia sabun/detergen 1 Tidak tersedia sabun/detergen 5
1816. A. APAKAH SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA INI?	Listrik PLN dengan meteran 1 Listrik PLN tanpa meteran 2 Listrik non-PLN 3 } -1817 Bukan listrik 4
B. BERAPA DAYA TERPASANG DI RUMAH INI? 450 Watt 1 900 Watt 2 1.300 Watt atau lebih 3	Meteran 1 <input type="checkbox"/> Meteran 2 <input type="checkbox"/> Meteran 3 <input type="checkbox"/> (Isikan daya untuk setiap meteran yang terpasang)
1817. APAKAH JENIS BAHAN BAKAR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMASAK?	Listrik 1 Elpiji 5,5 kg/blue gaz 2 Elpiji 12 kg 3 Elpiji 3 kg 4 Gas kota 5 Biogas 6 Minyak tanah 7 Briket 8 Arang 9 Kayu bakar 10 Lainnya 11 Tidak memasak di rumah 0
BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1901. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA KREDIT? (Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)	A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 1 B. KREDIT DARI BANK UKUM SELAIN KUR 5 C. KREDIT DARI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 1 D. KREDIT DARI KOPERASI 5 E. PERORANGAN DENGAN BUNGA 5 F. PEGADAJIAN 5 G. PERUSAHAAN LEASING 1 H. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 5 I. PUNJAMAN ONLINE 5 J. LAINNYA 1
BLOK XIX. AKSES TERHADAP LAYANAN KEUANGAN	
1902. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI E-WALLET? (Lingkari kode 1 jika memiliki, kode 5 bila tidak memiliki)	Ya Tidak A. GOPAY 1 5 B. OVO 1 5 C. LINK AJA 1 5 D. DANA 1 5 E. SHOPEE PAY 1 5 F. LAINNYA, tuliskan: 1 5
BLOK XX. KETERANGAN KEPEMILIKAN BARANG	
2001. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI BARANG-BARANG SEBAGAI BERTIKUT? (Lingkari kode 1 jika memiliki, kode 5 bila tidak)	Ya Tidak A. TABUNG GAS 5,5 KG ATAU LEBIH 1 5 B. LEMARI ES/KULKAS 1 5 C. AC 1 5 D. PEMANAS AIR (WATER-HEATER) 1 5 E. TELEFON RUMAH (PSTN) 1 5 F. KOMPUTER/LAPTOP/TABLET 1 5 G. EMAS/PERHIASAN (MINIMAL 10 GRAM) 1 5 H. SEPEDA MOTOR 1 5 I. PERAHU 1 5 J. PERAHU MOTOR 1 5 K. MOBIL 1 5 L. TELEVISI LAYAR DATAR (MINIMAL 30 INCH) 1 5 M. TANPA LAHAN 1 5
2002. (Jika 2001.M = 1, jika memiliki TANPA LAHAN, SIAPA PEMILIK TANAH/ LAHAN TERSEBUT?)	KRT A Pasangan KRT B Anak C ART lainnya D
BLOK XXI. KETERANGAN SUMBER PENGHASILAN RUMAH TANGGA	
2101. A. APAKAH SUMBER TERBESAR PERBIAYAAN DI RUMAH TANGGA INI?	ART YANG BERKERJA 1 → 2101.B KIRIMAN UANG/BARANG 2 → 2101.C INVESTASI (DEPOSITO, ROYALTI, SAHAM, BUNGA BANK, DAN SEJENISNYA) 3 → Blok XXII PENSUNAN 4 → Blok XXII
B. (Jika 2101.A = 1) APAKAH ART YANG MENANGGUNG PERBIAYAAN TERBESAR?	Nama ART : <input type="checkbox"/> No. Urut ART : <input type="checkbox"/>
C. (Jika 2101.A = 2) APABILA MENERIMA KIRIMAN UANG/BARANG DARI MANAKAH SUMBER UTAMANYA?	ORANG TUA 1 ANAK 2 FAMILIAN 3 LAINNYA 4

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

	Ya	Tidak	
2201. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI ATAU MENEMUKAN JAMINAN SOSIAL BERUPA:	(i)	(ii)	(iii)
A. JAMINAN PENSUNN/VETERAN	A. 1 → 2201.iii.A	5 → 2201.B	A. orang
B. JAMINAN HARI TUA	B. 1 → 2201.iii.B	5 → 2201.C	B. orang
C. JAMINAN/SURANSI KECELAKAAN KERJA	C. 1 → 2201.iii.C	5 → 2201.D	C. orang
D. JAMINAN/SURANSI KEMATIAN	D. 1 → 2201.iii.D	5 → 2201.E	D. orang
E. JAMINAN KEHLANGAN PEKERJAAN (JKP)	E. 1 → 2201.iii.E	5 → 2201.F	E. orang
F. PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	F. 1 → 2201.iii.F	5 → 2202	F. orang
2202. APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMERIKAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS)?	Ya, dapat menunjukkan kartu	1	
	Ya, tidak dapat menunjukkan kartu	2	
	Tidak	5	
2203. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERNAH MENJADI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)?	Ya	1	
	Tidak	5 → 2205	
2204. A. APAKAH SAAT INI RUMAH TANGGA ANDA MASIH TERCATAT/ MENJADI PENERIMA PKH?	Ya	1	
	Tidak tahu	5 } 2205	
	Tidak	8	
B. DIMANA RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN PKH?	Kantor Pos	1	
	ATM	2	
	Kantor Bank	3	
	Agen Bank	4	
	Pendamping, ketua kelompok	5	
C. DALAM SETAHUN TERAKHIR, UNTUK APA SAJA BANTUAN PKH DIPERGUNAKAN? ADA LAGI? <i>(Pilihan jawaban boleh lebih dari satu yang dipilih)</i>	Belanja Pangan	A	
	Biaya Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga (sewa rumah/kontrak, listrik, air, telepon, bahan bakar, dll)	B	
	Biaya Pengobatan	C	
	Biaya Perawatan Ibu Hamil	D	
	Biaya Sekolah	E	
	Pembayaran Hutang/Kredit	F	
	Lainnya, tuliskan:	G	
2205. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA LANSIA (60 TAHUN KE ATAS) YANG MEMERIMA BANTUAN SOSIAL DARI PROGRAM ATENSI LANSIA?	Ya	1	Tuliskan No. Urut ART Lansia 1) <input type="text"/> <input type="text"/> ; 2) <input type="text"/> <input type="text"/> ; 3) <input type="text"/> <input type="text"/> ; 4) <input type="text"/> <input type="text"/>
	Tidak	5	
2206. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ART BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MEMERIMA BANTUAN SUBSIDI UPABBSU?	Ya	1	Tuliskan No. Urut ART 1) <input type="text"/> <input type="text"/> ; 2) <input type="text"/> <input type="text"/> ; 3) <input type="text"/> <input type="text"/> ; 4) <input type="text"/> <input type="text"/>
	Tidak	5	

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

	Ya Tidak.....15 → 2209	Bulan Januari 2023 A) Ya1 Tidak5 → Desember'22	Bulan Februari 2023 A) Ya1 Tidak5 → Januari'23	Bulan Januari 2023 A) Ya1 Tidak5 → Desember'22	Bulan Desember 2022 A) Ya1 Tidak5 → November'22	Bulan November 2022 A) Ya1 Tidak5 → 2209										
2207. APAKAH RUMAH TANGGA ANDA PERAH MENJADI PENERIMA BANTUAN PANGAN (BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (PROGRAM SEMBAKO)?																
2208. DALAM 4 BULAN TERAKHIR , SEBUTKAN INFORMASI PEMBELIAN/ PENGUNJUMAN BANTUAN PANGAN:																
A. APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA BANTUAN PANGAN PADA 4 BULAN TERAKHIR?																
B. APAKAH ANDA MENGETAHUI BERAPA NILAI BANTUAN YANG DITERIMA?																
C. UNTUK PENERIMAAN BERAPA BULAN?																
D. APAKAH RUMAH TANGGA MEMANFAATKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT?																
E. BERAPA NILAI JUMLAH KOMODITAS YANG DIBELI MENGGUNAKAN BANTUAN PANGAN TERSEBUT? (i) BERAPA TOTAL RUPAH YANG DIBELANJAKAN UNTUK MASING-MASING KOMODITAS? (ii) BERAPA KUANTITAS KOMODITAS YANG DIBELI? Nomor urut bahan pangan lainnya, misalnya:																
<table border="1"> <tr> <td>Komoditas</td> <td>No. Urut di VSEN23.KP</td> </tr> <tr> <td>Tepung terigu</td> <td>006</td> </tr> <tr> <td>Daging ayam ras</td> <td>059</td> </tr> <tr> <td>Tempe</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Pepaya</td> <td>120</td> </tr> </table>	Komoditas	No. Urut di VSEN23.KP	Tepung terigu	006	Daging ayam ras	059	Tempe	107	Pepaya	120						
Komoditas	No. Urut di VSEN23.KP															
Tepung terigu	006															
Daging ayam ras	059															
Tempe	107															
Pepaya	120															
Nomor urut untuk komoditas lainnya lihat VSEN23.KP																
F. JIKA MEMBELI BERAS [2208.E nilai (Rp) dan kuantitas (kg) beras ≠ 0], BAGAIMANA KUALITAS BERAS YANG DIBELI?																
G. APAKAH ANDA DAPAT MENENTUKAN SENDIRI JENIS DAN KUANTITAS KOMODITAS YANG DIBELI?																
H. DI MANA TEMPAT MEMBELI KOMODITAS TERSEBUT?																

BLOK XXII. KETERANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL

<p>2209. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI BERIKUT: (Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)</p>	<p>Ya Tidak A. BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM)1 5 B. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)1 5 C. BANTUAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)1 5</p> <p>Ya1 Tidak1 Tuliskan No. Urut ART 1) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ; 2) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ; 3) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ; 4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Tidak.....5</p> <p>Perjelasan: 1. Usaha mikro memiliki modal usaha maksimal Rp1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. 2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.</p>
<p>2210. A. APAKAH ADA ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI USAHA MIKRO ATAU KECIL?</p> <p>B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH TERDAPAT ANGGOTA RUMAH TANGGA YANG MENERIMA BANTUAN PEMBIAYAAN USAHA SEBAGAI BERIKUT: (Lingkari kode 1 jika menerima, kode 5 bila tidak menerima)</p>	<p>Ya Tidak (i) PEMBIAYAAN KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)1 5 (ii) PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO (UMI)1 5 (iii) PROGRAM MEMBINA EKONOMI KELUARGA SEJAHTERA (PNM MEKAAP)1 5 (iv) BANK WAKAF MIKRO (BWM)1 5 (v) DANA BERGULIR OLEH LEMBAGA PENGELOLA DANA1 5</p>
<p>2211. A. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/ BANTUAN SOSIAL/ SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?</p> <p>B. DALAM SETAHUN TERAKHIR, APAKAH RUMAH TANGGA ANDA MENERIMA BANTUAN/ BANTUAN SOSIAL/ SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH BERUPA BANTUAN RUTIN?</p>	<p>Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</p> <p>(i) BANTUAN RUTIN UNTUK PANGAN Rp.- (ii) BANTUAN RUTIN UNTUK ANAK Rp.- (iii) BANTUAN RUTIN UNTUK LANSIA Rp.- (iv) BANTUAN RUTIN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS Rp.- (v) BANTUAN RUTIN LAINNYA Rp.-</p> <p>Ya1 → 2211.A. / s.d. v Tidak.....5 → 2211.B</p> <p>Bantuan yang Diterima Setahun Terakhir</p> <p>Ya1 → 2211.B. / Tidak.....5 → Blok XXIII</p>

BLOK XXIII. CATATAN

Kunjungan I	: Tanggal:	Mulai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sesuai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kunjungan II	: Tanggal:	Mulai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Sesuai: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Kode 706: Lapangan Usaha (diisi oleh pengawas)

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 01. Pertanian tanaman padi dan palawija | 09. Pengeadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin | 15. Informasi dan komunikasi | 22. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial |
| 02. Hortikultura | 10. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi | 16. Aktivitas keuangan dan asuransi | 23. Kesenian, hiburan, dan rekreasi |
| 03. Perkebunan | 11. Konstruksi | 17. Real estat | 24. Aktivitas jasa lainnya |
| 04. Perikanan | 12. Perdagangan besar dan perawatannya | 18. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis | 25. Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja |
| 05. Peternakan | 13. Pengangkutan dan pergudangan | 19. Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya | 26. Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya |
| 06. Kehutanan dan pertanian lainnya | 14. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 20. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | |
| 07. Pertambangan dan penggalian | | 21. Pendidikan | |
| 08. Industri pengolahan | | | |

Waktu selesai wawancara: : :

The image features a central yellow vertical band on a white background. The band is decorated with various blue geometric elements: a large circle on the left, a grid of dots, a plus sign, a wavy line, and another plus sign. On the right side, there is a plus sign, a circle, another plus sign, a grid of dots, and a large circle. A blue rounded rectangle is centered on the yellow band, containing the word 'METADATA' in white, uppercase, sans-serif font. A faint watermark 'http://www.bps.go.id' is visible across the yellow band.

METADATA

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Peserta Didik per Rombel	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di jenjang pendidikan } i}{\text{Jumlah rombel di jenjang pendidikan } i}$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
2	Rasio Rombel per Kelas	Perbandingan antara jumlah rombongan belajar (rombel) dengan jumlah kelas di setiap jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah rombongan belajar di jenjang pendidikan } i}{\text{Jumlah kelas di jenjang pendidikan } i}$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
3	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4	Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	$\frac{\text{Jumlah guru di jenjang pendidikan } i \text{ yang berkualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah guru di jenjang pendidikan } i} \times 100\%$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022
4	Rasio Murid-Guru	Perbandingan antara jumlah peserta didik dengan jumlah guru di setiap jenjang pendidikan	$\frac{\text{Jumlah murid di jenjang pendidikan } i}{\text{Jumlah guru di jenjang pendidikan } i}$	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang masih/pernah bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun Ajaran 2021/2022 dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$APKPAUD = \frac{JMPAUD}{JP3 - 6} \times 100\%$ <p>APKPAUD: APK PAUD JMPAUD: Jumlah penduduk umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD JP3-6: Jumlah penduduk umur 3-6 tahun</p>	Susenas Maret
6	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masih/pernah bersekolah di jenjang pendidikan PAUD pada Tahun Ajaran 2021/2022 dengan jumlah penduduk umur 3-6 tahun. Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$APMPAUD = \frac{JMPAUD3 - 6}{JP3 - 6} \times 100\%$ <p>APMPAUD: APM PAUD JMPAUD3-6: Jumlah penduduk umur 3-6 tahun yang mengikuti PAUD JP3-6: Jumlah penduduk umur 3-6 tahun</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang saat ini bersekolah kelas 1 SD/ sederajat dan sebelumnya pernah mengikuti PAUD dengan jumlah penduduk kelas 1 SD/ sederajat. Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.	$AKS = \frac{JM1SDPAUD}{JM1SD} \times 100\%$ <p>AKS: Angka Kesiapan Sekolah JM1SDPAUD: Jumlah murid kelas 1 SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD JM1SD: Jumlah murid kelas 1 SD/ sederajat</p>	Susenas Maret
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi pendidikan usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A/ sederajat (7-12 tahun).	$APKSD = \frac{JMSD}{JP7-12} \times 100\%$ <p>APKSD: APK SD/ sederajat JMSD: Jumlah murid SD/ sederajat JP7-12: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun</p>	Susenas Maret
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/ sederajat (13-15 tahun).	$APKSMP = \frac{JMSP}{JP13-15} \times 100\%$ <p>APKSMP: APK SMP/ sederajat JMSP: Jumlah murid SMP/ sederajat JP13-15: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (16-18 tahun).	$APKSM = \frac{JMSM}{JP16 - 18} \times 100\%$ <p>APKSM: APK SM/ sederajat JMSM: Jumlah murid SM/ sederajat JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun</p>	Susenas Maret
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan PT (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan PT (19-23 tahun).	$APKPT = \frac{JMPT}{JP19 - 23} \times 100\%$ <p>APKPT: APK PT JMPT: Jumlah murid PT JP19-23: Jumlah penduduk umur 19-23 tahun</p>	Susenas Maret
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ Paket A/ sederajat dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun.	$APMSD = \frac{JMSD7 - 12}{JP7 - 12} \times 100\%$ <p>APMSD: APM SD/ sederajat JMSD7-12: Jumlah murid SD/ sederajat umur 7-12 tahun JP7-12: Jumlah penduduk umur 7-12 tahun</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 13-15 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/ sederajat dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun.	$APMSMP = \frac{JMSMP13 - 15}{JP13 - 15} \times 100\%$ <p>APMSMP: APM SMP/ sederajat JMSMP13-15: Jumlah murid SMP/ sederajat umur 13-15 tahun JP13-15: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun</p>	Susenas Maret
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SM/ sederajat	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C/ sederajat dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun.	$APMSM = \frac{JMSM16 - 18}{JP16 - 18} \times 100\%$ <p>APMSM: APM SM/ sederajat JMSM16-18: Jumlah murid SM/ sederajat umur 16-18 tahun JP16-18: Jumlah penduduk umur 16-18 tahun</p>	Susenas Maret
15	Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi (PT)	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 19-23 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan PT dengan jumlah penduduk umur 19-23 tahun.	$APMPT = \frac{JMPT19 - 23}{JP19 - 23} \times 100\%$ <p>APMPT: APM PT JMPT19-23: Jumlah murid PT umur 19-23 tahun JP19-23: Jumlah penduduk umur 19-23 tahun</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).	$TP_i = \frac{N_{TPI}}{N_i} \times 100\%$ <p>TPi: Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i NTPi: Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut Ni: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i</p>	Susenas Maret
17	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Anak tidak sekolah adalah anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut.	$PS_i = \frac{N_{PSi}}{N_i} \times 100\%$ <p>PSi: Angka anak tidak sekolah untuk jenjang i NPSi: Jumlah penduduk dalam rentang usia sekolah di jenjang i yang tidak terdaftar di sekolah pada periode tertentu Ni: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang pendidikan i pada periode yang sama</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Angka Melek Huruf (AMH)	Indikator ini mengukur Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	$AMH_{15+} = \frac{MH_{15+}}{P_{15+}} \times 100\%$ <p>Keterangan AMH : Angka Melek Huruf MH₁₅₊ : Penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf P₁₅₊ : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas</p>	Susenas Maret
19	Angka Mengulang Menurut Jenjang Pendidikan	Persentase siswa kelas x suatu jenjang pendidikan pada tahun ajaran lalu yang masih duduk di kelas x pada tahun ajaran sekarang, terhadap anak kelas x pada tahun ajaran lalu	$Angka\ Mengulang = \frac{A}{B} \times 100\%$ <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang menduduki jenjang yang sama pada tahun ajaran sekarang dan tahun lalu B : Jumlah siswa pada suatu jenjang tahun ajaran lalu</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Angka Bertahan Sampai Kelas 6 SD/ sederajat	<p>Persentase siswa kelas 1 SD yang diharapkan bisa secara terus menerus mencapai kelas 6 SD</p>	<p>$\text{Angka Bertahan} = \frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : NOM SD2 + NOM SD3 + NOM SD4 + NOM SD5 + NOM SD6 B : MASIH SD1 + MASIH SD2 + MASIH SD3 + MASIH SD4 + MASIH SD5</p> <p>NOM SD2 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 2 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 1 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 2 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 1 SD</p> <p>NOM SD3 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 3 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 2 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 3 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 2 SD</p> <p>NOM SD4 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4) NOM SD4 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 4 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD NOM SD5 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 5 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 5 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD NOM SD6 : Jumlah penduduk yang tahun ini sedang bersekolah kelas 6 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 5 SD + Jumlah penduduk yang tahun ini tidak bersekolah lagi kelas 6 SD dan tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 5 SD MASH SD1 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 1 SD MASH SD2 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 2 SD MASH SD3 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 3 SD MASH SD4 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 4 SD MASH SD5 : Jumlah penduduk yang tahun sebelumnya sedang bersekolah kelas 5 SD	(5)

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan SMP/ sederajat dan SM/ sederajat	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu	<p>Angka Melanjutkan ke SMP/ sederajat = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMP pada tahun ajaran sekarang B : Jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu</p> <p>Angka Melanjutkan ke SM/ sederajat = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SM pada tahun ajaran sekarang B : Jumlah siswa yang duduk di kelas 3 SMP pada tahun ajaran lalu</p>	Susenas Maret
22	Angka anak tidak sekolah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun	Anak tidak sekolah adalah penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut.	$PS_i = \frac{N_{PSi}}{N_i} \times 100\%$ <p>Keterangan PSi : Angka anak tidak sekolah untuk kelum i NPSi : Jumlah penduduk kelompok umur i yang tidak terdaftar di sekolah pada periode tertentu Ni : Jumlah penduduk kelompok umur i</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan	Persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama.	<p>Angka Putus Sekolah = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan A : Jumlah siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan pendidikan sebelum lulus dari jenjang pendidikan tertentu B : Jumlah siswa pada tahun ajaran lalu yang masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama</p>	Susenas Maret
24	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah	<p>TP = $\frac{A}{B} \times 100\%$</p> <p>Keterangan TP : tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan A : Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang menamatkan pendidikan tertentu B : Jumlah penduduk 15 tahun ke atas</p>	Susenas Maret
25	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	<p>RLS = $\frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n X_i$</p> <p>Keterangan xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 15 tahun ke atas N = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas</p>	Susenas Maret

No	Indikator	Konsep Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	<p>Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya.</p> <p>Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun.</p> <p>Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/ sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).</p>	$TP_i = \frac{N_{TPI}}{N_i} \times 100\%$ <p>TPi: Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i NTPi: Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut Ni: Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i</p>	Susenas Maret

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo no. 6-8, Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> email: bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2086-4566



9 772086 456606 >